i
1490
N

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

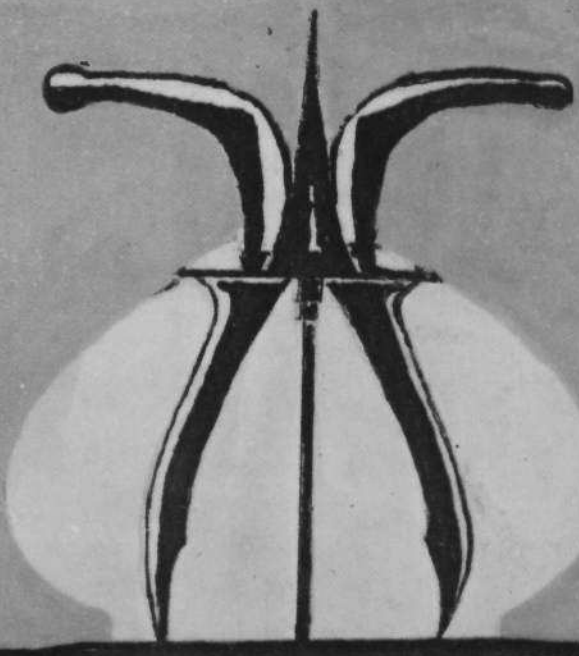

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIBLIOTHEEK KITLV
0001 1203

C - 1490 - N

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1983.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh Tahun 1979/1980.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga akhli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Muhammad Ibrahim, Drs. Rusdi Sufi, Drs. Nasruddin Sulaiman, Drs. M. Thamrin Z., Drs. Zakaria Ahmad, Drs. T. Ibrahim Alfian, MA. dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Sutrisno Kutoyo dan Masykuri BA.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.–

Jakarta, Mei 1983.

Pemimpin Proyek,

Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1979/1980 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/ Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Mei 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan,

H Soebadio

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
KATA SAMBUTAN v
DAFTAR ISI vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
BAB II. KEADAAN DI DAERAH ACEH PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942 – 1945 17
A. Kehidupan Pemerintahan 17
B. Kehidupan Sosial Budaya 28
C. Kehidupan Sosial-Ekonomi 30
D. Pengaruh Politik Pendudukan Jepang di Aceh 33
E. Interaksi di Daerah Aceh dengan Kegiatan Organisasi Politik/Sosial 36
BAB III. KEADAAN DI DAERAH ACEH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN 50
A. Proklamasi Kemerdekaan dan Sambutan Masyarakat Aceh 50
B. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Aceh 59
C. Pembentukan Organisasi Kemiliteran dan Kelasykaran Rakyat 69
D. Kedatangan Tentara Sekutu dan Tentara NICA di Daerah Aceh 81
BAB IV. PERJUANGAN DI DAERAH ACEH 87
A. Masa Sebelum Aksi Militer Belanda Pertama . 87
B. Masa Aksi Militer Belanda Pertama 106
C. Masa Aksi Militer Belanda Kedua 114
D. Inter Aksi di Daerah dengan Berbagai Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional 120
E. Perjuangan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kegiatan 125
BAB V. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK) 140
A. Masa Menjelang Persetujuan KMB 140
B. Sikap Masyarakat Terhadap Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia 143

C. Kegiatan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kehidupan 153
D. Pelaksanaan Hasil KMB di daerah 162

Daftar Kepustakaan 164
Daftar Informan 172
Lampiran-lampiran 175
Daftar Kata-kata dan Penjelasannya 195

BAB I
PENDAHULUAN

Pada awal Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) daerah Aceh merupakan salah satu karesidenan dari Propinsi Sumatera yang dibentuk sejak tanggal 3 Oktober 1945; dan sebagai kota kedudukan residen, seperti juga pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, ialah Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Bersamaan dengan itu daerah-daerah yang disebut *Bunsyu* dan *Gun* (masing-masing diperintah oleh *Bunsyutyo* dan *Guntyo)* dalam wilayah Karesidenan Aceh kembali dinamakan seperti nama pada masa sebelum pendudukan Jepang, yaitu: *Afdeeling* dan *Onderafdeeling* dengan kepala pemerintahannya disebut Asisten-Residen dan Kepala Wilayah *(Controleur).* Kemudian dalam perkembangan berikutnya pada waktu itu nama ke dua daerah tersebut diubah lagi menjadi kabupaten dan kewedanan yang masing-masing diperintah oleh seorang bupati dan wedana. Demikian pula daerah-daerah yang dinamakan *Son* dengan kepala pemerintahannya disebut *Sontyo* (daerah-daerah *Zelfbestuur dan Uleebalangschap* pada masa pemerintah kolonial Belanda; kepalanya itu terdiri dari para uleebalang yang memerintah secara turun temurun, tetapi *sontyo* yang diangkat Jepang tidak mesti seorang uleebalang, sehingga status "istimewa"nya itu dapat dikatakan hilang pada waktu itu) kembali diakui sebagai daerah uleebalang yang diperintah oleh para uleebalang *(Tengku Chiek, Keujrueun, Bentara* dan sebagainya). Tetapi setelah revolusi sosial, pada awal tahun 1946, status "istimewa" itu dihapuskan dan daerah-daerah tersebut dijadikan "Negeri" yang diperintah oleh 5 orang Dewan Pemerintahan Negeri *(Bestuur Commissie)* dan salah satu di antara mereka dupilih/ditunjuk sebagai Kepala Negeri (dalam perkembangan selanjutnya daerah Kenegerian tersebut dijadikan Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Camat). Selain itu daerah-daerah yang dikenal dengan nama *Ku* (dikepalai oleh *Kutyo)* dan *Kumi* (dikepalai oleh *Kumityo)* dikembalikan kepada nama semula, yaitu: *Mukim* dan *Gampong* yang masing-masing dikepalai oleh *Imum Mukim* dan *Keuchiek.*

Untuk menggerakkan roda pemerintahan Republik di Daerah Aceh, seperti juga di daerah-daerah lain yang menjadi wilayah Negera Republik Indonesia yang baru diproklamasikan itu, dalam

waktu singkat telah berhasil disusun nama-nama para pejabat pemerintahan, sejak dari residen, pejabat kehakiman daerah, pejabat penerangan daerah dan lain-lain sampai kepada anggota Dewan Pemerintahan Negeri, disamping susunan anggota Komite Nasional Daerah. Dan dalam rangka mempertahankan proklamasi dari kemungkinan serangan musuh dibentuk pula kesatuan ketentaraan serta kelasyakaran rakyat, tidak saja di kota-kota, bahkan tersebar sampai ke pelosok-pelosok gampong di seluruh daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya selama Revolusi Kemerdekaan, kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari Wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, seirama dengan gerak revolusi pada waktu itu. Pada awal tahun 1947 Keresidenan Aceh berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara (pada waktu itu Propinsi Sumatera dibagi menjadi tiga wilayah administratif: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur Muda). Dan pada bulan Agustus 1947, berhubung dengan dilancarkannya aksi militer Belanda pertama terhadap Republik Indonesia, berdasarkan keputusan wakil Presiden Republik Indonesia, No. 3/BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947, daerah Aceh bersama dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer, diperintah oleh Gubernur Militer yang berkedudukan di Kutaraja, meskipun status keresidenan masih tetap dipertahankan.

Pada tahun 1948 daerah administratif Sumatera Utara ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Sumatera Utara dengan membawahi tiga keresidenan, yaitu: Karesidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Sejak waktu itu, Kutaraja yang menjadi Ibukota Keresidenan Aceh dan Daerah Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, juga menjadi ibukota Propinsi Sumatera Utara, sehingga daerah Aceh umumnya dan Kutaraja khususnya menjadi pusat kegiatan administrasi pemerintahan sipil dan militer Sumatera Utara. Tetapi, setelah terjadi aksi militer Belanda ke dua, berdasarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia No. 21/Pem./PDRI, tanggal 16 Mei 1949, kekuasaan sipil dan militer dialihkan kepada satu tangan, yaitu kepada Gubernur Militer, sedang jabatan gubernur di Sumatera untuk sementara dihapuskan. Dengan demikian jabatan-jabatan sipil di Sumatera Utara khususnya pada waktu itu tidak berfungsi lagi, dan bekas gubernur diangkat menjadi Komisaris Pemerintah Pusat yang diberi hak hanya untuk

mengawasi daerah-daerah otonomi (status propinsi sendiri tidak dihapuskan).

Setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta dan Pemerintah Darurat dibubarkan, sejak bulan Agustus 1949 Wakil Perdana Menteri R.I. yang mewakili Pemerintah Pusat untuk Sumatera ditempatkan di Kutaraja. Tindakan Wakil Perdana Menteri setelah menduduki posnya adalah menghapuskan jabatan-jabatan Komisaris yang mengfungsikan kembali daerah-daerah otonomi. Khusus bagi keresidenan Aceh yang sebelumnya berada di bawah Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Peraturan Wakil Perjabatan Komisaris Pemerintah Pusat serta Gubernur Militer diseluruh Sumatera dan mengfungsikan kembali daerah-daerah otonomi. Khusus bagi keresidenan Aceh yang sebelumnya berada didaerah Kabupaten Langkat yang terletak di luar daerah Negara Bagian Sumatera Timur dan Propinsi Tapanuli. Sumatera Timur (bekas Propinsi Sumatera Utara setelah dikeluarkan Propinsi Aceh dan Negara Bagian Sumatera Timur). Tetapi Propinsi Aceh yang pertama ini tidak berumur panjang; berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950, yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Agustus 1950, daerah Aceh kembali menjadi sebuah kresidenan yang berada di bawah Propinsi Sumatera Utara.

Dewasa ini daerah aceh dikenal dengan nama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (status propinsi sejak tanggal 1 Januari 1957 berdasarkan undang-undang No. 24 tahun 1956 dan sebutan "daerah istimewa" sejak tanggal 26 Mei 1959 berdasarkan keputusan Perdana Menteri R.I. No. 1/Missi 1959). Letak geografisnya adalah di ujung Barat Laut Pulau Sumatera dengan batas-batasnya: di sebelah Utara dengan Selat Malaka; Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia dan Propinsi Sumatera Utara; sebelah Barat dengan Samudera Indonesia; dan sebelah Timur dengan Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara. Adapun pembagian wilayahnya terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 kotamadya, yaitu : Kabupaten Aceh Besar dengan Ibukotanya : Banda Aceh; Kabupaten Pidie, ibukota: Sigli; Kabupaten Aceh Utara Ibukota : Lhokseumawe; Kabupaten Aceh Timur, ibukota; Langsa; Kabupaten Aceh Tengah, Ibukota : Takengon; Kabupaten Aceh Barat, ibukota : Meulaboh; Kabupaten Aceh Selatan, ibu kota : Tapaktuan; dan Kabupaten Aceh Tenggara, ibu kota : Kutacane; Kotamadya Sabang; dan Kotamadya Banda Aceh, yang juga menjadi ibukota

Daerah Istimewa Aceh*), Selama masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) wilayah Daerah Aceh, kecuali Sabang, tidak pernah berhasil diduduki kembali oleh Belanda, sehingga administrasi pemerintahan Republik Indonesia di daerah ini relatif lebih teratur bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain pada waktu itu (Aceh tidak pernah melepaskan diri dari R.I. seperti yang terjadi dengan beberapa daerah yang menjadi "Negara Bagian" lepas dari R.I).

1. **Tujuan Penelitian**

Uraian di atas memberikan gambaran umum mengenai daerah Aceh, terutama yang menyangkut perkembangan bidang administrasi pemerintahan wilayah daerah tersebut selama masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik). Selain itu, beriringan dengan terjadinya perubahan struktur tata pemerintahan, di seluruh daerah berlangsung pula perjuangan rakyat Aceh dalam berbagai bidang kehidupan yang pada dasarnya ditujukan untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal ini merupakan sasaran utama yang diteliti selama kegiatan inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.1 Untuk menggali, mengumpulkan, mencatat serta mengolah sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan dan perjuangan rakyat Aceh dalam berbagai bidang kehidupan selama masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) di Daerah Istimewa Aceh.

1.2 Menyusun bahan-bahan sejarah tersebut menjadi naskah sejarah tematis daerah, berupa Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Propinsi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk dijadikan bahan pelengkap sejarah Nasional Indonesia.

1.3 Menyediakan data dan informasi sejarah Daerah Instimewa Aceh masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) bagi keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan penelitian dan masyarakat.

---

*) Sejak tanggal 1 Januari 1963, berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, No. 153/1962, tanggal 28 Desember 1962, nama Kutaraja diganti menjadi Banda Aceh; dan dengan SK. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, tanggal 9 Mei 1963, No. Des 52/1/43-43, Banda Aceh disahkan menjadi nama Ibukota Daerah Istimewa Aceh.

2. Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa proses perjuangan untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 selama masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik), seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, juga berlangsung di daerah Aceh. Dalam proses keberlangsungan itu, perjuangan rakyat di sana menampakkan diri dalam berbagai bidang kehidupan, seperti: pertahanan dan keamanan (pembentukan kesatuan ketentaraan/kelasyakaran, dan lain-lain), pemerintahan, sosial-ekonomi, sosial budaya, agama, pers, kepemudaan, kewanitaan dan sebagainya.

Pada masa sekarang, setelah 34 tahun kita memperoleh kemerdekaan, semakin terasa pentingnya nilai-nilai kesejarahan yang terkandung di dalam masa Revolusi Kemerdekaan, mengingat terjadinya penggalangan kehidupan bangsa dan negara, termasuk penyusunan negara dan penataan bangsa serta nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia tercermin pada masa itu. Dan pada hakekatnya nilai-nilai kesejarahan dimaksud ada di dalam *ke-bhinekaan* kegiatan perjuangan di daerah-daerah, termasuk daerah Aceh, selama periode tersebut. Karena itu perlu diadakan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi sejarah daerah, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perwujudan cita-cita ke-tunggal ikaan yang menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan kegiatan perjuangan rakyat Aceh yang telah dilakukan selama masa Revolusi Kemerdekaan, sampai saat ini belum diperoleh suatu deskripsi (dalam Bahasa Indonesia) yang menggambarkan secara keseluruhan sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) di Daerah Istimewa Aceh; yang ada hanya tulisan-tulisan yang bersifat pragmentaris, tersebar dalam majalah-majalah dan harian-harian, terutama yang ditulis sendiri oleh para pelaku sejarah pada masa itu. Pada hal deskripsi yang menggambarkan keseluruhan semacam itu sangat dibutuhkan, terutama untuk memenuhi tujuan serta kepentingan akan nilai-nilai kesejarahan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Selain dari yang telah dikemukakan, masalah tersedianya bahan-bahan sejarah dari sumber lisan primer mengenai masa Revolusi Kemerdekaan di daerah Aceh, juga memerlukan penggarapan dalam waktu secepat mungkin. Pada masa sekarang para pemimpin yang terlibat langsung dalam proses perjuangan untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan nasional di daerah

Aceh, sebagian dari mereka telah meninggal dunia. Karena itu dari mereka yang masih tinggal dan usianya sudah lanjut pula, perlu dikumpulkan bahan-bahan sejarah, terutama yang menyangkut perjuangan mereka selama periode tersebut.

Berdasarkan pokok-pokok masalah yang telah dikemukakan, maka dipandang perlu adanya kegiatan penelitian dan pencatatan secara lebih luas dan terperinci serta di dokumentasikan dalam bentuk naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan demikian diharapkan adanya pengertian yang lebih mendalam mengenai zaman itu.

3. Ruang Lingkup

Peristiwa-peristiwa sejarah yang menjadi obyek penelitian selama kegiatan inventarisasi dan dokumentasi tematis ini dibatasi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batas wilayah administrasi Daerah Istimewa Aceh sekarang. Materi pembahasannya sejauh mungkin diusahakan bersifat kedaerahan, sehingga dengan demikian akan tampak dengan jelas keseluruhan kegiatan perjuangan rakyat Aceh di daerahnya selama masa Revolusi Kemerdekaan itu.

Keharusan adanya pendeskripsian yang memberikan gambaran keseluruhan dari proses perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia di daerah Aceh, berarti juga mengharuskan adanya tinjauan secara lebih luas dan terperinci tentang peristiwa-peristiwa sejarah di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi tematis ini meliputi segi-segi kehidupan tata pemerintahan, kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama/kepercayaan, organisasi masyarakat, kepemudaan, kewanitaan, pers dan bentuk organisasi profesional lainnya.

Di samping itu, karena peristiwa-peristiwa kesejarahan yang terjadi pada masa Revolusi Kemerdekaan saling berkaitan dalam suatu kesinambungan sejarah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, maka pada bagian pertama penulisan tematis ini ditinjau juga keadaan daerah Aceh pada masa pemerintahan pendudukan Jepang (1942 – 1945). Tinjauannya meliputi segi-segi kehidupan pemerintahan, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan interaksi dengan kegiatan organisasi politik/sosial dan kejadian bersejarah tingkat nasional di daerah Aceh.

Dengan demikian secara terperinci sistimatis penyusunan inventarisasi dan dokumentasi ini adalah sebagai berikut :

3.1 Keadaan di daerah Aceh pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Sehubungan dengan kehidupan pemerintahan; pada dasarnya susunan tata pemerintahan daerah, batas wilayah administrasi daerah dan bentuk pemerintahan daerah selama masa pemerintahan militer Jepang di Aceh, tidak mengalami perubahan yang berarti, selain dari penggantian nama-nama bahasa Belanda ke dalam bahasa Jepang *(afdeeling* menjadi *bunsyu, dan sebagainya),* pemisahan kekuasaan kepolisian dari pamongpraja dan penyederhanaan susunan pengadilan. Para pejabat pemerintahan, untuk tingkat keresidenan *(syuu)* dan *afdeeling (bunsyu))* tetap dipegang oleh orang Jepang, sedang tingkat *onderafdeeling (gun)* diserahkan kepada bangsa Indonesia, kecuali beberapa daerah yang dianggap strategis, seperti Sabang dan lain-lain (pada masa pemerintahan kolonial Belanda semua kepala pemerintahan *onderafdeeling* di Aceh di pegang oleh orang Belanda). Di bidang kehidupan ekonomi, rupanya Jepang telah menyusun suatu konsepsi untuk pembangunan ekonomi di Aceh, tetapi konsepsi ini tidak berjalan lancar. Ekonomi rakyat menjadi merosot; hasil panen padi sebagian besar dikumpulkan untuk perbekalan perang, sehingga muncul bahaya kelaparan. Seperti halnya dengan perekonomian yang diarahkan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, demikian juga dengan kehidupan sosial budaya. Sistem pendidikan umpamanya, lebih diarahkan kepada pendidikan kemiliteran dan olah-raga, sedang Sekolah sekolah Swasta, seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah dibubarkan digabung dengan sekolah pemerintah (Taman Muda dan HIS. Muhammadiyah digabung dengan HIS. Pemerintah menjadi Shumingakko = Sekolah Rendah Rakyat, dan lain-lain). Pada bagian akhir bab ini diuraikan mengenai interaksi di daerah Aceh dengan kegiatan organisasi politik/sosial dan kejadian bersejarah tingkat nasional, seperti: pembentukan organisasi kemiliteran *(Gyugun,* dan sebagainya), pembentukan *Aceh syu SangiKai,* Maibkatra = Majlis Agama Islam untuk bantuan kemakmuran Asia Timur Raya Aceh, pengerahan Romusya di beberapa tempat, seperti: Aceh Utara di Tambue, Pidie di Blang Putek dan masih banyak lagi.

3.2 Keadaan di daerah Aceh sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Inti pokok pembahasan bagian ini adalah mengenai sambutan hangat masyarakat Aceh terhadap berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan gerakan perampasan senjata tentara Jepang dan pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih, baik di kantor-kantor yang masih dikuasai oleh Jepang, maupun di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian disusul dengan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh (Keresidenan Aceh) dan pembentukan Komite Nasional (KNI) daerah Aceh, yaitu pada akhir Agustus sampai dengan awal Oktober 1945. Selain itu, sejak berita proklamasi kemerdekaan diterima di Aceh, para pemimpin perjuangan segera mengambil langkah untuk membentuk organisasi kemiliteran, baik kesatuan tentara resmi pemerintah R.I. di sana yaitu : API Angkatan Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang Indonesia), kemudian menjadi TKR yang resmi dilantik oleh residen Aceh pada tanggal 12 Oktober 1945, maupun kesatuan-kesatuan kelasyakaran, yaitu Barisan Mujahidin, Pesindo dan lain-lain. Uraian yang menjadi penutup bab ini ialah mengenai kedatangan tentara Sekutu dan tentara NICA di daerah Aceh. Seperti telah disebutkan di muka, satu-satunya wilayah Daerah Aceh yang berhasil didudukinya ialah Pulau Sabang, walaupun mereka telah berusaha untuk mendaratkan pasukannya di beberapa tempat di pesisir Aceh, seperti di Lhok Nga, dan lain-lain.

3.3 Perjuangan di Daerah Aceh. Dalam bagian ini diuraikan keseluruhan perjuangan rakyat Aceh mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, sejak dari awal sampai menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan. Uraian diawali dengan perjuangan pada masa sebelum aksi militer Belanda pertama. Suatu tragedi telah terjadi pada masa ini, yaitu "perang saudara", yang sering disebutkan dengan istilah "Revolusi Sosial" di daerah Aceh. Selanjutnya selama aksi militer Belanda pertama dan kedua, perjuangan rakyat Aceh lebih diarahkan ke Medan Area di daerah Sumatera Timur, berhubung daerahnya sendiri tidak diduduki oleh Belanda. Pada waktu itu daerah Aceh menjadi tempat penampungan para pengungsi yang berasal dari Sumatera Timur khususnya. Selanjutnya ditinjau juga interaksi di daerah Aceh dengan berbagai kejadian bersejarah tingkat nasional, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Reville, Komisi Tiga Negara (KTN), Politik *Divide et Impera* HJ. van Mook,

dan sebagainya. Pada bagian penutup diuraikan mengenai perjuangan masyarakat Aceh pada berbagai kegiatan kehidupan, seperti : tata pemerintahan, sosial ekonomi, sosial budaya, agama, pers, dan sebagainya.

3.4 Keadaan di Daerah Aceh menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan. Pokok-pokok uraian dalam bagian ini ialah : Situasi daerah Aceh menjelang persetujuan KMB; terutama mengenai situasi kesiap-siagaan rakyat Aceh dalam rangka menghadapi kemungkinan gagalnya KMB. Pada waktu itu daerah Aceh menjadi tempat kedudukan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia dan sering dikunjungi oleh para pemimpin Nasional, seperti !Dr. M. Hattaa (Wakil Presiden, Dr. Sukiman (Menteri Dalam Negeri), Mr. Assa'at (Ketua KNIP) dan masih banyak lagi, sehingga situasi kesiap-siagaan untuk menghadapi kemungkinan perang kembali semakin nampak. Selanjutnya di uraikan juga mengenai pelaksanaan hasil KMB di daerah Aceh, terutama mengenai pengembalian pulau Weh (Sabang), yang selama ini dikuasai oleh Belanda, kepada pemerintah Republik Indonesia (bukan kepada RIS, sebab daerah Aceh adalah bagian dari Republik Indonesia yang pada waktu itu menjadi bagian dari RIS). Selain itu, sebagai kelanjutan dari uraian bab terdahulu, ditinjau lagi mengenai kegiatan masyarakat Aceh pada berbagai bidang kehidupan, seperti: bidang Politik, sosial-ekonomi, sosial-budaya, agama dan sebagainya. Pada bagian penutup bab ini diuraikan tentang sikap masyarakat Aceh terhadap ide pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melewati masa-masa transisi dan federasi. Pada dasarnya, seperti telah diperlihatkan selama Revolusi Kemerdekaan yang tidak pernah melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia, masyarakat Aceh, termasuk tokoh-tokoh daerahnya selalu menjadi pendukung cita-cita tersebut.

3.5 Bagian penutup. Untuk lebih melengkapi uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dalam bagian ini disusun daftar kata-kata dan penjelasan kata-kata penting serta beberapa lampiran. Demikian juga daftar bibliografi yang erat hubungannya dengan sejarah daerah Aceh masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) dan daftar informan beserta dengan kurikulum vitae mereka masing-masing.

4. **Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian**

Pelaksanaan penelitian dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi tematis ini menggunakan metode sejarah sebagai alatnya, yang meliputi empat tahap, yaitu:

4.1 Tahap mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di daerah Aceh.

4.2 Tahap penelitian sumber-sumber tersebut melalui kritik sumber.

4.3 Tahap analisa bahan dalam sumber: perumusan dan seleksi fakta-fakta serta penyadaran arti fakta-fakta dan penyusunan konsepsi-konsepsi dalam kaitan dengan masa Revolusi Kemerdekaan di daerah Aceh.

4.4 Tahap penyusunan naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dalam tahap mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan masa Revolusi Kemerdekaan di daerah Aceh, tim peneliti telah melakukan dua kegiatan, yaitu: studi kepustakaan dan studi lapangan ke daerah-daerah kabupaten dalam wilayah daerah Istimewa Aceh sekarang. Selama studi kepustakaan sejumlah arsip, buku-buku dan artikel-artikel dalam majalah-majalah, surat kabar dan lain-lain yang tersimpan di Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan informasi Aceh (PDIA), Museum Aceh, Pusat latihan penelitian Ilmu-ilmu sosial Aceh, Perpustakaan Negara, Perpustakaan Pusat Universitas Syiah Kuala dan beberapa perpustakaan lain yang ada di Banda Aceh telah diteliti dan dipelajari untuk dari dalamnya, dipungut bahan-bahan yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Selain itu, yang juga termasuk sumber berharga, adalah sejumlah kertas kerja yang berasal dari Seminar Perjuangan Aceh sejak 1873 sampai dengan Kemerdekaan Indonesia yang diadakan di Medan pada bulan Maret 1976, bahan-bahan diskusi dari Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Daerah Istimewa Aceh selama tahun 1976 dan kertas kerja Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Aceh, yang diselenggarakan oleh Majlis Ulama Daerah Istimewa Aceh pada bulan Juli 1978 di Banda Aceh. Selanjutnya, selama studi lapangan ke daerah-daerah anggota tim peneliti telah memanfaatkan beberapa perpustakaan pribadi, terutama dari para pemimpin perjuangan yang aktif selama masa Revolusi Kemerdekaan di daerah Aceh.

Dalam rangka studi lapangan ke daerah-daerah kabupaten, para anggota tim peneliti telah meninjau kota-kota dan tempat-tempat yang diperkirakan dapat memberi informasi tentang adanya kegiatan perjuangan kemerdekaan selama masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) di daerah Aceh. Bersamaan dengan itu juga telah diwawancarai beberapa tokoh pemimpin setempat untuk diperoleh keterangan dan penjelasan yang lebih terperinci mengenai situasi perjuangan di daerahnya. Sehubungan dengan para informan ini, mengingat agar dapat memberikan keterangan yang lebih mendekati kebenaran, mereka yang dipilih umumnya berumur sekitar 60 tahun ke atas; dan anggota tim peneliti telah menemui mereka, selain yang ada di daerah-daerah kabupaten dan Banda Aceh, juga para pemimpin perjuangan dari daerah Aceh yang sekarang bertempat tinggal di Medan dan Jakarta.

Tahap penilaian sumber-sumber, yang dasar kerjanya adalah kritik intern dan ekstern, dilakukan melalui serangkaian diskusi antara sesama anggota tim peneliti, sehingga berhasil dipisahkan antara sumber-sumber yang diragukan dengan sumber-sumber yang dinilai mengandung kebenaran. Demikian pula proses analisa bahan-bahan dalam sumber yang telah dinilai itu. Para anggota tim peneliti, melalui diskusi-diskusi, telah berusaha merumuskan dan menyeleksi fakta-fakta dalam sumber-sumber tersebut serta menilai arti fakta-fakta itu bagi penyusunan konsepsi-konsepsi dalam rangka penyusunan naskah sejarah Revolusi Kemerdekaan di daerah Aceh.

Tahap penyusunan naskah diawali dengan penulisan edisi pertama oleh masing-masing anggota tim peneliti. Dalam hubungan ini, melalui sidang-sidang, anggota tim peneliti telah mengadakan pembagian tugas dengan berpedoman pada kerangka laporan yang telah ditentukan. Hasil penulisan edisi pertama dibahas kembali melalui diskusi-diskusi, tidak saja antara sesama para anggota tim peneliti, tetapi juga dengan para peminat sejarah yang bertempat tinggal di Banda Aceh, terutama dengan para pemimpin daerah yang pernah secara aktif ikut berjuang selama Revolusi Kemerdekaan. Berdasarkan saran-saran yang disampaikan para peserta diskusi edisi pertama diperbaiki kembali. Dengan langkah-langkah yang ditempuh ini; kiranya wujud naskah akhir, yang memberikan deskripsi keseluruhan proses perjalanan sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) di daerah Istimewa Aceh, dilihat dari segi ilmiah sejarah sejauh mungkin dapat dipertanggung-

jawabkan.

5. **Hasil Akhir**

Naskah ini aslinya disusun oleh suatu Tim di daerah menurut kerangka yang dibuat oleh Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat. Sesudah itu dilakukan penilaian oleh para tenaga ahli dan Tim Proyek di Pusat serta Daerah. Hasil penilaian itu dijadikan pedoman untuk penyempurnaan. Selanjutnya naskah ini mengalami proses editing yang difokuskan pada segi-segi kebahasaan dan pendekatan. Pada segi kebahasaan diutamakan hal-hal ejaan dan penggunaan istilah serta keterbacaan pada umumnya. Pada pendekatan sejauh mungkin diusahakan agar sesuai dengan azas regiosentris seperti yang sudah disepakati.

Naskah ini merupakan usaha infentarisasi dan dokumentasi kesejarahan periode Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) 1945 – 1949 di Daerah Istimewa Aceh. Diakui bahwa di dalam naskah ini belum mencakup semua data dan permasalahan kesejarahan pada periode tersebut di atas, meskipun demikian sudah cukup memadai. Hendaknya naskah ini dipandang sebagai usaha perintisan. Diharapkan usaha ini akan mendorong kegiatan penelitian dan penulisan kesejarahan di daerah-daerah selanjutnya.

BAB – II

KEADAAN DAERAH ACEH PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942 – 1945

A. Kehidupan Pemerintahan

Dalam kita membicarakan keadaan kehidupan pemerintahan di daerah Aceh pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), ada baiknya terlebih dahulu dibahas tentang situasi menjelang pendaratan Jepang ke Aceh. Dengan ini kiranya akan mendapatkan suatu gambaran tentang situasi di Aceh pada khususnya dan di Sumatera pada umumnya pada saat-saat menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda.

Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, yaitu pada tahun 1941 dan awal tahun 1942, kebencian rakyat terhadap Belanda semakin bertambah memuncak yang walaupun Belanda telah berusaha dengan bermacam-macam cara untuk menghadapinya, namun rasa kemarahan rakyat tidak dapat dibendung lagi. Hal ini akan terlihat dari berbagai kegiatan rakyat yang bertujuan untuk menentang penjajahan Belanda baik yang merupakan perjuangan dalam bentuk fisik, maupun dalam bentuk kegiatan politik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah yang masih berkuasa. Kedua bentuk kegiatan ini dipelopori oleh para ulama dan *uleebalang*, yang kedua golongan ini mempunyai pengaruh cukup besar di dalam masyarakat Aceh.

Perjuangan dalam bentuk politik, misalnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan dengan luar Negeri guna memperoleh bantuan. Ke Semua kegiatan ini bertujuan memperoleh kembali kemerdekaan yang sudah demikian lama diperjuangkan. Kegiatan mengadakan rapat ini misalnya rapat rahasia pada bulan Desember 1941 yang dihadiri oleh Tengku (Tgk) Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab, yang kedua-duanya dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Teuku (T.) Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), T. Muhammad Ali Panglima Poleh (Panglima Sagi XXII Mukim), T. Ahmad (ulee balang Jeunib – Samalanga). Rapat ini diselenggarakan di Lamnyong (rumah T. Nyak Arief) dengan mengucapkan ikrar bersama yaitu dengan bersumpah setia kepada agama Islam, bangsa dan tanah air, menyusun pemberontakan bersama melawan pemerintah

Belanda dan bersetia kepada Dai Nippan[1].

Selain mengadakan rapat seperti tersebut di atas, PUSA juga aktif dalam mengadakan hubungan dengan Jepang yang telah berada di Malaya. Orang-orang dari PUSA seperti Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim diutus secara khusus ke sana guna menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh dengan tujuan secepat mungkin dapat mengusir Belanda[2]. Perjuangan dalam bentuk politik lainnya berupa suatu tuntutan yang disampaikan oleh T. Nyak Arief dalam suatu pertemuan antara Residen Belanda Pauw dengan para Panglima Sagi dan Uleebalang-uleebalang lainnya.

T. Nyak Arief secara tegas telah mengemukakan pendiriannya kepada Residen agar pemerintahan diserahkan ketangan rakyat Aceh sendiri untuk dapat mengatur pemerintahan sendiri. T. Nyak Arief juga telah mengemukakan bahwa rakyat akan mampu mempertahankan tanah airnya dan dapat membela diri sendiri dari setiap ancaman dari luar, jika seandainya pemerintah Belanda mengalihkan kekuasaan pemerintahan kepada rakyat. Tuntutan ini ditolak oleh residen dan sejak saat itu T. Nyak Arief tidak pernah lagi mengadakan hubungan dengan pemerintah Belanda.[3]

Disebabkan oleh rasa kebencian yang begitu mendalam dari rakyat kepada pemerintah Belanda, lahir pulalah perjuangan-perjuangan dalam bentuk fisik yang tidak dapat dielakkan lagi. Ini adalah merupakan spontanitas dari tindakan rakyat yang selalu tertekan. Rakyat Aceh beserta pemimpin-pemimpinnya telah memperhitungkan bahwa saatnya telah tiba untuk mengakhiri perang gerilya melawan Belanda yang selama ini terus menerus mereka lancarkan. Hal ini diketahui setelah diperhatikan situasi yang berlangsung pada permulaan pecahnya perang Pasifik yaitu dengan terus menerus terdapatnya kemerosotan di pihak Belanda dan sekutu-sekutunya.

Situasi yang demikian ini menyebabkan terjadinya kekhawatir-

---

1 M. Jonoes, *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh,* (Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, 1975) hal. 4 – 5.

2 Nazaruddin Sjamsuddin, *The Course of The National Revolution In Aceh, 1945 – 1949,* thesis tidak diterbitkan Monash University, 1974, hal. 34. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia,* Jilid I, (Bandung: DISJARAH – AD dan Angkasa, 1977), hal. 93 – 94.

3 A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 94 – 95.

an pemerintah Belanda. Pada saat yang demikian seharusnya rakyat dapat memberikan bantuannya kepada pemerintah untuk mempertahankan diri dari gempuran Jepang bila mereka mendarat nanti, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak hanya dengan perjuangan politik dan diplomasi, rakyat Aceh pada saat terakhir justeru melakukan perlawanan secara fisik. Pada tanggal 19 – 20 Januari 1942 terjadi sabotase kawat-kawat telepon dan rel kereta api yang dilancarkan oleh rakyat di Seulimeum dan Indrapuri. Pada tanggal 24 Januari 1942 Controleur Belanda di Seulimeum, Tiggelman dibunuh oleh rakyat, dan lain-lain kegiatan lagi yang dilakukan oleh rakyat di Aceh Besar. Di luar Aceh Besar juga terjadi perlawanan-perlawanan fisik yaitu tanggal 25 Januari 1942 Asisten Residen Sigli, Van den Berg juga mati dibunuh oleh rakyat. Di kawasan Aceh Barat peristiwa yang sama juga tidak terhindarkan. Pada tanggal 9 Maret 1942 rakyat di bawah pimpinan T. Sabi Lageun menyerang asrama tentara Belanda di Lageun dan kantor pemerintah di Calang.[4] Demikianlah situasi yang terjadi pada saat-saat berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh. Setelah itu Belanda tidak pernah berkuasa lagi di Aceh.

Dalam menghadapi serangan Jepang. Sumatera berada di bawah dua buah Komando Teritorial, yaitu Komando Teritorial Sumatera Tengah dan Utara serta Komando Teritorial Aceh, yang masing-masing di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.I. Overakkker dan Kolonel G.F.V. Gosenson.[5]

Jenderal Overakker dan Kolonel Gosenson membuat suatu rencana untuk mencoba mempertahankan pulau Sumatera dari kejatuhannya ke tangan Jepang dengan mengambil tempat pertahanan yang terakhir daerah Gayo Luas dan Tanah Alas. Daerah ini memang tepat untuk dipergunakan sebagai daerah pertahanan terutama untuk melakukan gerilya, disebabkan oleh karena kondisi alamnya yang sangat strategis, untuk memasuki daerah ini hanya melalui dua jalan dari arah Bireuen ke Takengon dan dari Kabanjahe (Sumatera Utara) ke Kutacane. Selain daerah ini

---

[4] Peristiwa-peristiwa yang dilancarkan oleh rakyat Aceh menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, secara lebih luas lihat: Muhammad Ibrahim (Ketua), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/1979, hal. 137 – 147.

[5] *Medan Area Mengisi Proklamasi*, (Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia, 1966), hal. 26 – 27.

Gosenson juga mencadangkan daerah Geumpang – Tangse (Pidie), karena daerah ini juga memiliki kondisi yang sama dengan Gayo Luas dan Tanah Alas. Pada permulaannya rencana untuk bertahan di Gayo Luas dan Tanah Alas hanya merupakan rencana lokal yang disusun oleh Gosenson sebagai benteng pertahanannya yang terakhir untuk bergerilya dalam mempertahankan kedudukan mereka di Aceh. Sejalan dengan rencananya ini Gosenson pada tanggal 15 Februari 1942 memindahkan Markas Besar Komando Territorial Aceh dari Kutaraja (Banda Aceh) ke Takengon, yang ditempatkan di sebuah perkebunan teh Redelong. Demikian pula halnya dengan Jenderal Overakker sejak jatuhnya Pulau Jawa ke tangan Jepang, dia telah mulai memusatkan pasukannya yaitu KOmando Teritorial Sumatera Tengah dan Utara dengan menempatkan Markas Besarnya di Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi mereka tidak dapat bertahan lama oleh karena terus di desak oleh Jepang, akhirnya pada tanggal 9 Maret 1942 Overakker kembali memindahkan markas Besarnya ke Kabanjahe. Pada hari ini pula tentaranya yang berasal dari Jambi, Sumatera Barat dan Tapanuli turut dipindahkan ke Tanah Alas dan Gayo Luas.[6] Sejak waktu itulah Gayo Luas dan Tanah Alas dijadikan pusat pertahanan dari dua Komando Teritorial tersebut.

Jepang mendarat ke Aceh pada tanggal 12 Maret 1942, yang pendaratannya dilakukan di tiga tempat yaitu masing-masing di Krueng Raya (Aceh Besar), Sabang dan Peureulak (Aceh Timur).[7] Pendaratan Jepang ke Aceh berlangsung dengan sukses yaitu tanpa mendapat rintangan, baik dari pemerintah Belanda maupun dari rakyat, malah sebaliknya rakyat menyambut kedatangan Jepang ke Aceh dengan perasaan senang serta turut membantunya. Hal yang demikian tidak mengherankan, oleh karena jauh sebelum Jepang melakukan pendaratan ke Aceh, mereka telah menciptakan suatu suasana politik yang menguntungkan mereka.

Jepang sebelum mendarat ke Aceh telah mempunyai kontak langsung dengan para pemimpin rakyat, terutama dengan P.U.S.A. yang selama ini menjadi inti dalam melakukan aksi/perlawanan terhadap Belanda.[8] Sebagaimana di singgung di atas P.U.S.A. telah

---

[6] Ibid., hal. 27 – 29.

[7] M. Joenoes Djamil, *op. cit.*, hal. 76.

[8] Paul Van't Veer, *De Atjeh – Oorlog* (Perang Belanda di Aceh, alih bahasa Aboe Bakar) (Bahasa Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, 1977), hal. 374.

pernah mengirimkan utusannya beberapa kali ke Malaya dan Pulau Pinang guna menghadap pembesar-pembesar Jepang dalam rangka meminta bantuan dari Jepang. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak Jepang yaitu dengan mengumpulkan orang-orang Aceh yang ada di Pulau Pinang dan Malaya dengan menganjurkan mereka ini kembali ke Aceh guna membentuk organisasi rahasia yang bernama *"Fujiwara Kikan"* atau yang lebih sering disebut barisan "F", karena mereka memakai initial "F" sebagai lambangnya. Salah seorang pelopor dari barisan F ini adalah Said Aboebakar yang sengaja dikirim dari Malaya ke Aceh. Melalui barisan F ini Jepang memberikan indoktrinasi serta janjinya untuk mempercepat pengusiran Belanda di Aceh. Barisan F telah memainkan peranan yang penting dalam melakukan kampanye untuk meratakan jalan bagi pendaratan Jepang. Mereka telah mempropagandakan tentang rencana pendaratan Jepang serta menyebarluaskan janji-janji Jepang ke seluruh daerah.

Di samping dua kekuatan yang telah disebutkan di atas masih ada satu unsur lagi yang juga telah mempunyai jasa dalam mendatangkan Jepang. Mereka ini adalah Pemuda PUSA yang bermarkas besar di tempat kedudukan ketuanya, Husein Al Mujahid di Idie (Aceh Timur). Sejak dari Idie mereka secara terus menerus mengadakan propaganda untuk meminta rakyat bersama dengan mereka menyambut kedatangan Jepang dan mengusir Belanda dengan segera.[9] Tiga kekuatan inilah yang telah berusaha dengan gigih sekali dalam menumbuhkan suasana yang sangat menguntungkan bagi pendaratan Jepang dan mereka pulalah yang telah mengkoordinir rakyat dalam mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda,[10] di saat akan tibanya pendaratan Jepang di Aceh. Atas usaha mereka ini sebagian besar rakyat terpengaruh dan menyambut kedatangan Jepang dengan segala senang hati serta turut memberikan bantuan yang diperlukan.

Sejak saat tentara Jepang mendarat di Aceh, mereka bersama dengan rakyat terutama barisan F, terus melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Dalam keadaan yang demikian itu Gosenson yang markas besarnya telah dipindahkan ke Takengon, namun masih ada juga sebagian tentaranya yang tinggal di Kutaraja untuk

---

[9] Uraian lebih luas tentang keadaan Aceh menjelang masuknya Jepang lihat MuhammadIbrahim, *loc. cit.*,

[10] Paul Van't Veer, *loc. cit.*,

mempertahankan pelabuhan udara Lhok Nga.[11] Mereka yang mencoba untuk mempertahankan Lhok Nga terpaksa mundur melalui pantai barat guna menggabung diri dengan pasukan-pasukan yang masih berada di pantai Barat dan Selatan dengan tujuan untuk mencapai daerah pertahanan di Lae Lutar, mereka di samping dikejar oleh Jepang juga di gerilya oleh rakyat seperti yang terjadi di Lam No pada tanggal 13 Maret 1942, di Blang Pdie pada tanggal 17 Maret 1942 dan di beberapa tempat lain di Aceh Selatan.[12]

Selain dari mereka yang mengungsi arah ke pantai Barat dan Selatan Aceh, ada juga yang masih berada di Aceh Besar dan Pidie. Mereka ini melarikan diri ke Tangse dan Geumpang yang merupakan benteng pertahanan Belanda ke dua setelah Takengon, tetapi terus menerus di kejar oleh Jepang. Pasukan Jepang berada di daerah ini pada tanggal 19 Maret 1942; kemudian menggempur pasukan Belanda yang akhirnya mereka menyerah pada hari itu juga.[13] Rencana Belanda yaitu ingin mempertahankan pelabuhan udara Lhok Nga dan Tangse – Geumpang yang dicadangkan sebagai baris pertahanan ke dua ternyata kini telah mengalami kegagalan. Selain yang telah menyerah kalah kepada Jepang di Tangse Geumpang tanggal 19 Maret tersebut sisa-sisanya, terutama yang berada di Aceh Utara, menggabungkan diri dengan pasukan induknya yang telah berada di Takengon.

Di daerah Tanah Alas dan Gayo Luas kini telah ada dua markas teritorial yaitu di bawah pimpinan Gosenson dan Overakker. Mulanya Gosenson mempertahankan serbuan Jepang arah dari Takengon sedangkan Overakker mempertahankan serangan yang dilancarkan dari arah Tanah Karo dengan memusatkan pertahanan di Kutacane. Bagaimanapun hebatnya pertahanan yang dipimpin langsung oleh dua Panglima teritorial, untuk bergerilya secara terus menerus tidak dapat bertahan lama oleh karena serangan gencar yang dilancarkan Jepang dengan tidak henti-hentinya. Pada tanggal 24 Maret 1942 Jepang sekali lagi melakukan serangan secara umum ke Lembah Alas, Gayo Luas yang telah menjadi kubu pertahanan Overakker dan Gosenson dari setiap jurusan yaitu dari

---

[11] Medan Area, *op. cit.*, hal. 31.

[12] M. Joenoes Djamil, *op. cit.*, 56-57.; Uraian yang lebih luas mengenai perlawanan rakyat Aceh sebelum masuknya Jepang, lihat juga A.J. Piekaar, Atjeh en de Oolog met Japan, (Den Haag – Bandung : W. van hoeve, 1949), hal. 63 – 106.

[13] Medan Area, *op. cit.*, hal. 31.

Kutacane dan dari Takengon. Akhirnya rencana ke dua pemimpin terotorial Belanda untuk bertahan tidak memungkinkan lagi dan mereka terpaksa menyerah kalah kepada tentara pendudukan Jepang pada tanggal 28 Maret 1942 di Blang Kejeran.[14] Dengan jatuhnya Tanah Luas dan Gayo Alas berarti telah berakhir pula pertahanan Belanda untuk membendung masuknya Jepang ke Aceh pada khususnya dan Sumatera pada umumnya. Rencana Overakker dan Gosenson hanyalah merupakan impian belaka yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan teori perang gerilya mereka pada waktu itu.

Sejak tanggal 28 Maret 1942 berarti secara resmi Jepang telah berkuasa sepenuhnya di seluruh daerah Aceh dan akan mengatur langkah selanjutnya dalam usaha penanaman kekuasaan di daerah ini. Pada saat Jepang masuk ke Aceh, sistim pemerintah di Aceh masih seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Belanda terdahulu. Daerah Aceh terdiri atas daerah yang disebut *Zelfbestuursgebied* dan *Rechtsreeks bestuuur Gebied.* Daerah yang disebut pertama adalah daerah berpemerintahan sendiri dan daerah yang kedua adalah daerah yang berada langsung di bawah Gubernur atau pemerintah Belanda.[15]

Aceh pada masa ini di bagi ke dalam beberapa *afdeeling,* yang keseluruhannya terdapat empat *afdeeling.* Setiap daerah *afdeeling* diperintah langsung oleh Asisten Residen dan untuk Aceh seluruhnya diperintah oleh Gubernur sampai tahun 1936 dan sesudah ini Aceh berada di bawah Residen sampai masuknya Jepang.[16]

Keempat *afdeeling* yang terdapat di Aceh adalah masing-masing: 1. *Afdeling Groot-Atjeh* di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Kutaraja dan dibawahnya terdapat tiga *onderafdeeling* yaitu Kutaraja, yang meliputi beberapa daerah ke-

---

[14] Ibid., *hal.* 33 – 34. ; Paul Van't Veer, *op. cit.*, hal. 376.

[15] S.M. Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau,* (Jakarta: Padnya Paramita, 1978), hal. 17.

[16] Aceh pada tahun 1873 diperintah oleh Komisaris Pemerintah untuk Aceh yang bernama: Nieuwenhujzen; pada tahun 1978 dirobah menjadi daerah dibawah pemerintahan Sipil dan Militer yang untuk pertama dipercayakan kepada K. van der Heijden, sejak tahun 1918 dirobah lagi daerah Sipil dengan Gubernur Sipil yang pertama A.G.H. Van Sluijs dan terakhir dirobah menjadi daerah Keresidenan dalam tahun 1936 sampai masuknya Jepang dengan residen yang pertama J. Jongejans (1936 - 1940) dan J. Pauw sebagai residen terakhir (1940 – 1942).

uleebalangan *(uleebalangschappen)* seperti ulelheu, Sagi XXV Mukim dan Sagi XXVI Mukim. 2. *Afdeeling Noordkust van Atjeh* di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Sigli. *Onderafdeeling* yang termasuk ke dalam afdeeling ini adalah Sigli, Lammeulo, Meureudu, Bireuen, Takengon, Lhokseumawe dan Lhoksukon. Daerah ini terdapat 47 *zelfbesturende landschappen.* 3. *Afdeling Ooskust van Atjeh met serbajadi, Alas landen en Gayo Luas, yang Asisten* Residennya berkedudukan di Langsa. Daerah ini terdapat 5 *onderafdeeling* yaitu Idie, Langsa, Tamiang, *Alaslanden* (Tanah Alas) dan Gayo Luas. Di samping 5 *onderafdeeling* daerah ini terdapat lagi sejumlah 20 *zelfbesturende landschappen.* 4. *Afdeeling Westkust van Atjeh* dengan asisten residennya berkedudukan di Meulaboh, dengan 6 *onderafdeeling* yaitu Calang, Meulaboh, Tapaktuan, Simeulu dan Singkil. Di *afdeeling* ini terdapat 36 zelfbesturende landschappen *dan* ditambah lagi 4 *districten rechtsreeks bestuur gebied,* termasuk *onderafdeeling* Singkil ke dalam katagori ini.[17]

Zelfbestuursgebied atau daerah dengan pemerintahan sendiri meliputi *afdeeling-afdeeling* yang telah disebutkan di atas yang disebutkan dengan istilah *Zelfbesturende Lands chappen,* sedangkan daerah *Rechtestreeks Bestuur Gebied* atau daerah yang diperintah langsung disebut dengan *Uleebalangschappen.* Di kedua bentuk daerah ini dipimpin oleh seorang Uleebalang yang memerintah dalam setiap bidang pemerintahan, termasuk dalam bidang peradilan dan kepolisian. Perbedaannya hanya terdapat: Uleebalang di *Zelfbesturende Landschappen* dapat melakukan pemerintahan dengan bebas menurut kebijaksanaannya sendiri, tanpa keharusan untuk mentaati perintah dari siapapun, termasuk di dalamnya kebebasan dalam memutuskan perkara di pengadilan dan pembentukan polisi untuk menjaga keamanan daerahnya. Sedangkan Uleebalang yang memerintah di *Rechtstreeks betuur gebied* atau *Uleebalangschappen,* meskipun juga bertindak sebagai pemimpin daerahnya tetapi di dalam menjalankan pemerintahan harus mentaati perintah-perintah yang disampaikan oleh *Kontroleur* yang merupakan bawahan dari Gubernur. Ini adalah merupakan suatu keharusan yang mesti dijalankan.[18]

---

[17] J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu,* (Baarn: Hollandia Drukkerij N.V., 1939) hal. 276 – 277.; T. Alibasyah Talsya, *10 tahun Daerah Istimewa Aceh,* (Banda Aceh: Pustaka Putro Candeng, 1969), hal. 27.

[18] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 17

Daerah-daerah yang termasuk ke dalam *Zelfbestuur gebied* adalah meliputi daerah-daerah afdeeling yang telah disebutkan di atas dengan pengecualian-pengecualiannya, *afdeeling Groot-Atjeh* dan *onderafdeeling Singkil* di *afdeeling Westkust Van Atjeh.* Karena ke dua daerah ini yaitu *afdeeling Groot-Atjeh* dan *onderafdeeling Singkil* dijadikan daerah Rechtsrettks bestuur gebied.[19]

Seperti telah diuraikan di atas bahwa struktur pemerintahan di Aceh pada masa penjajahan Belanda terdiri Gubernuran yang kemudian diganti dengan daerah Kresidenan yang di bawahnya terdapat *Afdeeling,* yang di bawah *afdeeling* terdapat lagi *onderafdeeling.* Di bawah *onderafdeeling* ini dibagi-bagi lagi atas distrik-distrik yang telah disebutkan yaitu *Uleebalangschap,* yang di bawah *Uleebalangschap* ini masih terdapat pembagian lagi yang disebut dengan nama *Mukim* dan selanjutnya di bagi atas wilayah kekuasaan terkecil yang disebut dengan nama *Gampong* (dalam bahasa Indonesia: Kampung). Gampong adalah merupakan wilayah pemerintahan yang terkecil yang terdapat di Aceh sampai pada saat berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh.[20]

Struktur pemerintahan yang telah diatur oleh pemerintah Belanda sampai masuknya Jepang tidak pernah diadakan perubahan lagi, akan tetapi namanya disesuaikan dengan sebutan Jepang sendiri. Keresidenan Aceh yang ditinggalkan oleh Belanda sampai dengan masa Jepang tidak mengalami perobahan statusnya, tetap dijadikan sebagai sebuah keresidenan dalam wilayah Pulau Sumatera di bawah tentara ke dua puluh lima dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi,[21] yang berarti tidak diadakan perobahan yang bersifat fundamental. Keresidenan diganti dengan nama *Syu,* residen disebut dengan *Syu Tyokan. Afdeeling* menjadi *Bunsyu,* yang untuk jabatan Asisten residen disebut *Bunsyutyo. Onderafdeeling* dijadikan *Gun* dan untuk *Controleur* dipanggil dengan *Guntyo.* Distrik atau uleebalangschap dinamakan Son yang dikepalai oleh Sontyo sebagai ganti sebutan ullebalang dan Gampong di gantikan dengan *Kumi* yang diperintah oleh *Kumityo.*

---

[19] J. Jongejans, *op. cit.*, hal. 277 – 295., : S.M. Amin, *Ibid.*,

[20] Muhammad Ibrahim, (Ketua), *Sejarah Daerah Proponsi Daerah Istimewa Aceh,* (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hal. 170.

[21] Sartono Kartodirdjo (Editor), *Sejarah Nasional Indonesia VI,* (Jakarta: Departemen P dan K, 1975), hal. 5

Untuk jabatan-jabatan penting seperti *Syu Tyokan dan* Bunsutyo dipegang langsung oleh pembesar-pembesar Jepang. Untuk jabatan *Guntyo*, Sontyo dan Kumityo dijabat oleh orang-orang Aceh. Di beberapa daerah yang dianggap penting terutama daerah-daerah terpencil seperti Sabang, Sinabang, Singkil dan Kutacane, jabatan *Guantyo* dipegang langsung oleh orang Jepang dengan sebutan *Tyuzaikan.*[22] Jadi jelas, bahwa mulai dari Guntyo ke bawah adalah di jabat oleh orang-orang Aceh. Seandainya untuk jabatan Guntyo tidak dijabat oleh orang Aceh untuk jabatan itu tidak lagi disebut Guntyo, tetapi dirobah menjadi Tyuzaikan.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan yang fundamental, hanya pengertian, istilah-istilah yang disesuaikan dengan bahasa Jepang. Selain itu masih ada perubahan kecil di mana untuk jabatan uleebalang, yang pada masa Belanda kedudukan tersebut itu diperolehnya secara turun temurun, kini jabatan uleebalang yang disebut sentyo tidak lagi secara turun temurun dan bagi mereka yang oleh Jepang dianggap tidak memenuhi syarat akan diganti dengan orang-orang lain yang mungkin berasal dari golongan ulama dan rakyat umum. Sebagai contoh dapat dikemukakan seperti pengangkatan T. Nyak Banta yang dizaman Belanda memegang jabatan Menteri Polisi kemudian diangkat sebagai *Guntyo* Sinabang dan pengangkatan Teuku Muhammad Jakub sebagai *Guntyo* Bireuen, yang sebelumnya ia adalah sebagai Komis Asisten Residen di Langsa. Hal ini berarti tradisi turun temurun untuk jabatan uleelang telah dihapuskan. Demikian pula halnya dengan penghapusan perbedaan antara daerah swapraja atau daerah dengan pemerintahan sendiri *(Zelfbestuur gebied)*, tidak dibedakan lagi dengan daerah yang diperintah langsung atau *Rechtstreeks Bestuur gebied.*[23]

Di samping perubahan-perubahan seperti yang telah kita sebutkan masih ada lagi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan dalam hubungannya dengan sistem pemerintah. Kekuasaan Kepolisian yang pada waktu pemerintah Belanda berada di bawah pamongpraja, sekarang dipisahkan dan berdiri sendiri. Di samping adanya polisi umum yang disebut *Keimubu* terdapat pula polisi bersenjata

---

[22] Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah, *op.cit.*, hal. 170 – 171. ; S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 17 – 18.

[23] S. M. Amin, *Ibid.*

yang disebut *Tukubetsu.*[24] Selain pemisahan kekuasaan kepolisian, dalam bidang peradilan juga turut diadakan beberapa perubahan. Dulu terdapat berbagai bentuk peradilan seperti *districtsgerecht, landschaps gerecht, magistraatsgerecht, musapat, residentiesgerecht,* sekarang hanya terdapat dua bentuk pengadilan yaitu *Tiho Hoin* dan *Ku Hoin* yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1944.[25] Peradilan yang begitu banyak pada masa Belanda sebagian berada langsung di tangan uleebalang untuk memutuskan perkaranya atau turut campur tangannya pemerintah dalam perkara-perkara yang besar. Kini dengan telah dibentuknya dua jenis peradilan, yang berarti peradilan yang terlepas dari tangan uleebalang dan kontroleur, menuju keperadilan sendiri yang terlepas dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan keputusan. Dengan kata lain pemerintah Jepang telah mencoba untuk memperlakukan azas "Trias Politika" di daerah Aceh. Untuk menuju ke arah ini Atjeh *Syu Tyokan* telah mengeluarkan beberapa ketetapan, seperti ketetapan Atjeh *Syu Tyokan* tanggal 1 Oktober 1942 No. 1 – 2., kemudian dilengkapi dengan Ketetapan Aceh Tyo Tyokan tanggal 13 April 1943 No. 4 – 5 yang meniadakan untuk sebagian hak peradilan *Guntyo* dan *Sontyo.* Dengan ketetapan Atjeh *Tyu Tyokan* bulan Desember 1943 no. 10, yaitu meniadakan seluruh kekuasaan peradilan *Guntyo* dan *Sontyo* dan kemudian diserahkan kepada hakim-hakim baru yaitu hakim pada *Ku Hoin* dan *Tiho Hoin,* dengan tugas peradilan yang bebas dari campur tangan Pemerintah.[26]

Di Aceh selain badan-badan peradilan umum seperti yang telah disebutkan di atas yaitu *Ku Hoin* yang didirikan untuk tiap-tiap Gun dan Son, ada lagi *Tiho Hoin* didirikan untuk Atjeh Syu yang berkedudukan di Banda Aceh dengan cabang-cabangnya di seluruh *Bun-Syu.* Sebutan untuk ketua Mahkamah disebut *Saiban Tyo* dan untuk hakim disebut *Simpankan.* Berdasarkan ketetapan Atjeh *Syu Tyokan* yang disebut dengan *Atjeh Syu Rei* Nomor 10 Desember 1943 didirikan badan peradilan agama di samping peradilan umum itu. Peradilan agama ini disebut *Syu Kyo Hoin* (Mahkamah Agama), yang mempunyai wewenang dan susunannya ditetapkan berdasarkan atas Ketetapan Aceh *Syu Tyokan* yang di-

---

[24] T. Alibasyah Talsya, *loc. cit.,*

[25] Beberapa pemandangan tentang Kehakiman di *Daerah Aceh,* (Kutaraja: 1944), hal. 32.

[26] S.M. Amin, *op. cit.* hal. 19

sebut *Atjeh Syu Rei* Nomor 12[27] Sebagai Ketua Mahkamah Agama ini ditetapkan Teungku H. Jakfar Siddiq (Tgk. Lamjabat) seorang ulama terkemuka di Banda Aceh dengan anggota-anggotanya Tgk. A. Wahab Seulimeum, Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Tgk. Abdussalam dan Sajid Abubakar.[28]

B. Kehidupan Sosial Budaya

Membahas masalah sosial budaya pada sesuatu masyarakat dalam kurun tertentu, berarti akan menyoroti hal-hal yang berkenaan dengan masalah pendidikan, kebudayaan, agama atau sistem kepercayaan yang ada dalam masyarakat pada kurun itu. Demikian halnya dengan bahagian ini akan dicoba untuk menelusuri masalah-masalah yang telah diutarakan itu dari rakyat Aceh dalam periode pendudukan Jepang.

Membicarakan masalah pendidikan umpamanya adalah merupakan masalah yang tersendiri. Keadaan pendidikan di Aceh pada masa pendudukan Jepang lebih mundur, jika dibandingkan dengan masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda. Di Aceh pada waktu itu telah terdapat sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Sekolah Desa *(Volkschool)* yang didirikan dihampir seluruh desa di Aceh, demikian pula telah terdapat sekolah-sekolah lanjutan dari Sekolah Desa itu yang disebut *Vervolgschool.* Sekolah MULO hanya terdapat di Kutaraja. Selain sekolah yang bersifat umum seperti ini terdapat juga sekolah kejuruan, seperti kejuruan kewanitaan dan kejuruan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat melalui organisasi-organisasi sosial seperti Muhammadiyah, dan Taman Siswa telah turut pula membina pendidikan di Aceh pada masa penjajahan Belanda. Selain sekolah Taman Siswa dan Sekolah Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan umum, masih terdapat pula sekolah yang bercorak umum yang diselenggarakan secara pribadi seperti Rumah Perguruan Kita dan Rumah Perguruan Murid di Takengon, serta Pusaka di Peureulak.[29]

Dalam rangka memajukan masyarakat Aceh di bidang pendidikan pada masa Belanda ini, sekolah-sekolah yang bercorak

---

[27] Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah, *op. cit.*, hal. 172.; untuk lebih jelas lihat lampiran no. ix dan x dari buku ini.

[28] S.M. Amin, *op.cit.*, hal. 20.

[29] Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah, *op. cit.*, hal. 178.

agama telah turut memainkan peranan. Sekolah-sekolah agama yang berkembang pada akhir kekuasaan Belanda antara lain Madrasah Saadah Abadiah di Sigli, Madrasah Iskandar Muda di Lampakuk, Madrasah Al Muslim di Matang Geulumpang Dua, Jadam di Montasik, Perguruan Islam Normal di Bireuen,[30] dan lain-lain. Tidak kurang pula pentingnya pada masa ini peranan Pasanteren (Dayah), yang hidup dengan baik di seluruh pelosok daerah dan bahkan ada dayah-dayah yang telah mempergunakan sistim kurikulum dengan menggunakan kelas seperti dayah Jeureula.

Pada zaman Jepang pemerintah tidak membenarkan sekolah-sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah Jepang hanya membenarkan adanya sekolah negeri yang diasuh oleh pemerintah, semua sekolah swasta yang telah dibuka pada masa ini harus ditutup.[31] Pada masa ini di Aceh hanya terdapat dua buah sekolah lanjutan negeri yaitu *Shu Gakko* (sekolah lanjutan lima tahun) dan sebuah lagi ialah *Sihang Gakko* (sekolah guru tiga tahun). Di kedua sekolah ini yang menjadi pimpinannya adalah orang-orang Jepang sendiri, sedangkan orang-orang Indonesia seperti Karim Duriat, Suratno, Ali Murtolo, Mukman, Z. Burhanuddin Pasaribu, Hasjim M.K., A. Azis Ibrahim hanya sebagai guru biasa di *Shu Gakko,* Burhanuddin Harahap dan Ibrahim sebagai guru Sihang Gakko.[32]

Perkembangan pendidikan dasar dari berbagai-bagai jenis sekolah tingkat dasar yang terdapat pada waktu Belanda, sekarang dijadikan satu jenis sekolah dasar saja yang diberi nama *Kokumin Gakko* (sekolah negara). Bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah dasar ini adalah bahasa Melayu. Bahasa Jepang diajarkan sejak dari kelas satu. Dua bahasa asing yang sebelumnya dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh pelajar-pelajar baik pada tingkat dasar maupun menengah yaitu bahasa Belanda dan Inggris dihilangkan sama sekali. Huruf Arab Melayu diganti dengan huruf-huruf Jepang Katakana dan Hirakana. Lagu-lagu Jepang seperti *Kimigayo* dan *Taiso* (senam pagi) diajarkan kepada setiap murid di sekolah.[33]

---

[31] Nasruddin Sulaiman, *Perguruan Taman Siswa di Aceh,* Thesis Sarjana Fakultas Keguruan Unsyiah, (Banda Aceh: 1976), belum diterbitkan, hal. 100

[32] 10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan, (Banda Aceh: Yayasan Pembina Darussalam, 1969), hal. 329.

[33] *Ibid.*, hal. 374.

Jalannya pelajaran untuk anak-anak di sekolah tidak mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini sesuai dengan suasana negara dalam keadaan perang. Isi pendidikan dalam masa ini agak diarahkan ke pendidikan kemiliteran. Jepang mengharapkan putera-putera Indonesia dapat membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Untuk mengatur pendidikan secara keseluruhan pemerintah telah membentuk semacam "Kantor Pendidikan" *(BUNKYOKA)* untuk *Atjeh Syu* yang berkedudukan di Kutaraja.[34] Lembaga-lembaga pendidikan agama kini mengalami hidup yang tidak menentu lagi. Sejak dari pendidikan agama di rumah tangga, surau dan mesjid yang sebelumnya berjalan dengan lancar kemudian berjalan dengan tersendat-sendat, karena kesulitan dalam memperoleh minyak lampu, sebagian dari dayah-dayah di seluruh Aceh telah menjadi sepi bahkan ada yang telah kosong.[35] Suatu hal yang menguntungkan bagi rakyat, yang diperoleh dari pendidikan pada masa Jepang, yaitu terdapatnya pendidikan kemiliteran. Dengan adanya pendidikan kemiliteran ini, rakyat mampu untuk mempertahankan Indonesia dari agresi-agresi Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada zaman Jepang kehidupan seni budaya sama sekali tidak berkembang. Rakyat pada masa ini tidak banyak memiliki waktu untuk melahirkan karya-karya seni seperti pada waktu sebelumnya. Tidak lahirnya karya-karya seni dalam waktu ini bukanlah berarti bahwa daya kreasi rakyat telah hilang, melainkan karena suasana perang di mana rakyat secara keseluruhan dikerahkan untuk bekerja demi kepentingan perang, seperti pembuatan lapangan-lapangan terbang baru, pembuatan kubu-kubu pertahanan dan lain kepentingan strategi militer.

Kebiasaan-kebiasaan rakyat yang sebelumnya seperti mengadakan pagelaran kesenian, baik seni tari, seni drama atau seni suara pada waktu-waktu upacara tertentu, kini tidak pernah diselenggarakan lagi. Di beberapa tempat, umpamanya di dayah-dayah, kini mereka hanya membaca Hikayat Perang Sabil yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan semangat guna melanjutkan perjuangan menentang penjajahan fasisme Jepang. Hal ini berarti, dengan pembacaan hikayat ini, tidak ada kaitannya dengan pembinaan pengembangan seni budaya.[36] Di sekolah-sekolah kepada

---

[34] Nayan, Majalah Minami, nomor khusus Aceh.

[35] Ismuha, *Pendidikan Agama di Aceh,* kertas prasarana diskusi MSI Aceh, 1977, hal. 11.

[36] Teungku M. Sufi Ismail, *Wawancara,* Banda Aceh.

murid-murid tidak diajarkan pelajaran-pelajaran yang membangkitkan apresiasi seni bagi si murid. Kepada mereka hanya diajarkan senam melalui radio serta diajarkan lagu-lagu Jepang seperti Kimigayo sebagaimana telah disebutkan di muka.

Sudah menjadi kebiasaan rakyat Aceh bahwa setiap tahun mereka memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan upacara-upacara besar yang mengandung nilai-nilai keagamaan. Pada upacara memperingati Maulid ini rakyat Aceh secara bersama-sama selain mengadakan kenduri, juga melakukan berzanji yaitu upacara zikir yang diucapkan dengan lagu secara bersama-sama, yang di dalam bahasa Aceh disebut dengan *"Dike Maulid"* (zikir Maulid). Pada zaman Jepang kebanyakan tidak pernah dilakukan lagi disebabkan kesulitan-kesulitan dalam lapangan hidup, terutama dalam kehidupan ekonomi.[37]

Salah satu dari kehidupan kesenian yang terdapat dalam masa ini adalah sandiwara. Sandiwara ini satu-satunya kesenian yang diperuntukkan sebagai hiburan rakyat dan inipun hanya terdapat di beberapa tempat saja. Boleh disebutkan bahwa selama pendudukan Jepang kehidupan kebudayaan di Aceh tidak berkembang bahkan yang telah ada hampir-hampir mendekati kehancuran.

Untuk melihat perkembangan keagamaan di Aceh pada masa pendudukan Jepang, terlebih dahulu harus dilihat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah dalam bidang ini. Seperti telah disinggung dalam masalah pendidikan, bahwa hampir semua lembaga pendidikan agama mengalami kemerosotan, terutama karena ikut sertanya campur tangan pemerintah dalam bidang ini. Seperti diketahui bahwa pemerintah militer Jepang dalam menanamkan pengaruhnya di Aceh telah mempergunakan dua jalur kekuatan yaitu jalur Ulama dan Uleebalang, yang masing-masing mempunyai kekuatan di dalam masyarakat. Ulama mempunyai kekuasaan di bidang hukum sedangkan Uleebalang memegang kekuasaan di bidang hukum sedangkan Uleebalang memegang kekuasaan dalam bidang adat, karena itu pemerintah telah menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan itu.

Seperti telah disinggung di buka sewaktu masuknya Jepang ke Aceh telah mendapat bantuan sepenuhnya dari PUSA Dengan sen-

---

[37] *Ibid.*

dirinya dalam rangka mengharapkan bantuan yang terus menerus untuk masa-masa mendatang mereka selalu mendekati dan mempergunakan para ulama yang tidak dicurigai (Setelah Jepang berkuasa, disebabkan oleh kekejaman-kekejamannya, banyak ulama, baik dari kalangan PUSA ataupun lain-lain, menjadi musuh Jepang). Kebijaksanaan pemerintah Jepang dalam menghadapi para ulama, ialah membentuk sebuah badan resmi yang dapat memberikan nasehat-nasehat kepada pemerintah di bidang agama. Badan ini bernama "Majlis Agama Islam Untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya" (MAIBKATRA), dengan tugas memberikan bantuan dalam usaha mempertinggi kemakmuran Asia Timur Raya yang tidak bertentangan dengan Agama Islam. Yang menjadi ketua dari Maibkatra adalah Tuanku Abdul Azis.[38]

Sebelum pembentukan Maibkatra, yang peresmian dilakukannya pada tanggal 10 Maret 1943 oleh *Syu Tyokan,* pemerintah terlebih dahulu telah mengangkat Tuanku Abdul Aziz untuk menjadi penasehat pemerintah dalam urusan agama Islam pada bulan Januari 1943. Adapun maksud pemerintah mengangkat Tuanku Abdul Aziz sebagai penasehat agama maupun ketua Maikatra dan mendirikan Mahkamah Agama *(Syukyo Hoin)* adalah tidak terlepas daripada kepentingan politik penjajahan. Dengan organisasi-organisasi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan penerangan yang luas kepada rakyat tentang pendudukan Jepang di Aceh, seperti yang diucapkan oleh *Syu Tyokan* pada peresmian Maibkatra, agar para ulama menggerakkan tenaganya untuk menyadarkan rakyat dalam hal yang antara lain kemurnian tujuan dari peperangan untuk Asia Timur Raya . . . .[39]

Pada mulanya pembentukan Maibkatra ini dilakukan oleh perorangan seperti Tuanku Abdul Aziz, kemudian Maibkatra bentukan pertama ini dibubarkan dan dibentuk baru yang melibatkan hampir semua ulama yang ada di Aceh serta mengikut sertakan wakil-wakil dari organisasi keamanan. Badan baru ini juga masih bernama Maibkatra, susunan organisasinya sudah lebih disempurnakan. Dalam majlis ini duduk sebagai ketua dan wakil ketua masing-masing Tuanku Abdul Aziz, Tgk. Muhammad Hasbi, Tengku Muhammad Daud Beureu'eh dan Teungku M. Junus Jamil sebagai sekretaris. Di samping itu ditetapkan beberapa orang komisaris yang mewakili organisasi yaitu T. Johan Meuraksa dari Muham-

---

[38] S.M. Amin, *op.cit.* hal. 27.
[39] A.J. Piekaar, *op.cit.*, hal. 275 – 277.

madiyah, Teuku M. Amin dari PUSA. Sebagai penasehat untuk bidang ini dari pemerintah diangkat S. Masubuchi dan S. Yamamoto, juga pemerintah menetapkan ulama-ulama untuk mewakili mereka yaitu Tgk. Jakfar Siddiq (Tgk. Lamjabat) Tgk. H. Ahmad Hasballah (Tgk. Inderapuri), Tgk. Abdussalam dan untuk Seulimeum diangkat Tgk. Abdul Wahab sebagai ketua cabang.[40] Kelihatannya tidak seorang pun yang mewakili golongan uleebalang dalam badan ini, hal ini mungkin dianggap sebagai politik keseimbangan yang oleh karena golongan uleebalang telah cukup banyak diberikan kedudukan dalam badan-badan pemerintahan seumpama *Guntyo* dan *Sontyo*.

Di bidang Mahkamah Agung Islam seperti telah dijelaskan terdahulu, telah dibentuk berdasarkan undang-undang Aceh *(Atjeh Syu Rei)* nomor 12 pada tanggal 15 Pebruari 1944. Dasar pembentukan *Syukyo Hoin* ini seperti yang tercantum dalam fasal 1 *Atjeh Syu Rei* nomor 12 adalah untuk menghormati dan menghargai agama Islam. Untuk melaksanakan *Atjeh Syu Rei no. 12* ini dikeluarkan maklumat pemerintah *(Atjeh Syu Kokuzai)* no. 35 yang mengatur tugas-tugas sejak dari *Syukyo Hoin*, Kepala Kadhi, Kadhi Son, sampai-sampai kepada Imam Mesjid, Chatib, Bilal dan lain-lain.

Dalam hubungan dengan perkembangan agama perlu kiranya juga dijelaskan secara singkat tentang pendidikan agama. Sejak awal pendaratan, Jepang telah menunjukkan perasaan penuh curiga akan bahaya-bahaya yang selalu terbuka yang datang dari lembaga pendidikan agama seumpama dari dayah apabila dayah-dayah ini tidak dikontrol dengan ketat. Kecurigaan ini telah diperkuat dengan terjadinya perlawanan yang dilancarkan oleh Tgk. Abdul Jalil, dalam bulan Nopember 1942 yang merupakan seorang pemimpin dayah di Cot Plieng Payu.[41] Oleh karena itu pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua lembaga pendidikan agama, mereka harus memberikan keterangan yang lengkap mengenai lembaga pendidikannya mulai dari jumlah pengajar, banyaknya murid, tahun pelajaran, program pelajaran sampai ke-

---

[40]-S.M. Amin, *loc. cit.*,

[41] Mengenai perlawanan yang dilancarkan oleh Tgk, Abdul Djalil yang lebih terkenal dengan peristiwa Cot Plieng Bayu, lihat Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah . . ., *op. cit.*, hal. 192 – 198.

pada alat-alat pelajaran yang dipergunakan. Untuk mencapai sasaran dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan agama ini, pemerintah mengangkat Tgk. Ismail Jacub untuk menjadi inspektur Pendidikan Agama di Aceh, karena ia dianggap sebagai orang yang lebih ahli dalam lapangan pendidikan agama. Bila badan yang dipimpin oleh Ismail Jacub ini gagal dalam menjalankan tugasnya, maka masih ada *Kempetai* yang tidak pernah lalai dalam melakukan tugasnya.[42]

C. Kehidupan Sosial Ekonomi

Sebagaimana di dalam kehidupan budaya telah dibahas masalah yang menyangkut pendidikan, kebudayaan, keagamaan, demikian pula halnya dengan kehidupan sosial ekonomi akan dicoba untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut sistem perekonomian, pranata ekonomi masyarakat serta komunikasi yang turut berperan dalam memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat itu. Seperti telah disinggung di muka bahwa kehidupan budaya masyarakat pada masa ini sangat tersendat-sendat jalannya, maka kehidupan sosial ekonomi pun sangat sulit.

Adalah sangat berbeda dari apa yang digariskan oleh pemerintah Jepang sebagai suatu konsepsi atau kebijaksanaan yang akan dijalankan di dalam lapangan ini untuk memajukan kehidupan rakyat dengan kenyataannya yang diderita oleh rakyat sendiri. Konsepsi ini tentunya bertitik tolak kepada kepentingan politik dalam rangka menarik simpati rakyat untuk selalu berdiri di belakang mereka dalam mensukseskan perang Asia Timur Raya. Residen Aceh melalui *Atjeh Syu Seisyo Sangyu Kotabutyo* (Kepala Urusan Ekonomi dan Lalu-lintas Daerah Aceh) S. Mashubiti, telah mendengungkan bahwa pertanian, pengairan, kerajinan, peternakan dan pertambangan akan diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. S. Mashubuti telah membentangkan bahwa dengan adanya pengairan tentu rakyat akan dapat memperbaiki sawahnya yang selama ini merupakan sawah tadah hujan, serta dikandung maksud pemerintah untuk memperluas sawah rakyat. Dalam soal kerajinan kepada rakyat Aceh dianjurkan

---

[42] A.J. Piekaar, *op. cit.*, hal. 284 – 286.

untuk memelihara ulat sutera serta menanam kapas agar rakyat dapat membuat sendiri kain atau pakaian secukupnya. Dalam soal ternak kini sedang dicita-citakan untuk mengadakan suatu latihan bagi pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda yang telah mengikuti latihan diharapkan dapat memperbaiki sistim peternakan yang dijalankan selama ini sekaligus untuk menyempurnakannya.[43]

Jika diperhatikan konsepsi yang telah diutarakan oleh orang yang paling berwenang dalam masalah ini, tentu kehidupan ekonomi rakyat terutama ekonomi pertanian akan lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Namun demikian konsepsi tetap tinggal sebagai konsepsi sedang kehidupan yang dialami oleh rakyat semakin bertambah sulit. Dari sekian banyak rencana yang akan dijalankan di bidang pertanian itu, hanya satu yang pernah dilaksanakan dalam hal peningkatan produksi pertanian rakyat. Pemerintah Jepang mengerahkan rakyat secara bergotong-royong membersihkan saluran-saluran air yang telah ada di persawahan-persawahan, mereka tidak pernah mengadakan usaha-usaha untuk membuka saluran air yang baru. Dalam melakukan gotong royong ini dikerahkan rakyat secara paksa dan dipimpin langsung oleh orang-orang Jepang sendiri. Kalau diperhatikan kepada konsepsi yang telah disebutkan itu, tentunya pemerintah dengan dana yang tersedia padanya akan membuka irigasi-irigasi baru, maupun perbaikan irigasi yang telah ada bukan dengan sistim seperti yang dipraktekkan ini.

Pada zaman ini kehidupan rakyat di bidang perdagangan juga mengalami kemerosotan. Para pedagang bumi putera walaupun masih melakukan kegiatan-kegiatan di bidang usaha mereka, namun tidak dapat memajukan usaha-usahanya, bahkan semakin hari semakin terbatas ruang geraknya. Banyak diantara pedagang yang meninggalkan usaha mereka, disebabkan oleh karena kebutuhan akan sandang dan pangan bagi rakyat diusahakan oleh Pemerintah sendiri dan disalurkan melalui BDK yang dibentuk tiap-tiap Son. Tugas dari BDK ini bukan saja sebagai penyalur tetapi, juga bertindak sebagai penampung. Dalam usaha menampung hasil-hasil bumi dari rakyat terutama yang menjadi sumber makanan pokok seperti padi dikumpulkan langsung dari petani secara setengah paksa yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk

---

[43] Majalah Minami, *op.cit.*

mengelola BDK. Tidak jarang padi rakyat terus dikumpulkan langsung dari sawah setelah panen. Pengumpulan secara paksa ini dilakukan dengan dalih untuk menjaga kemakmuran bersama.[44]

Dalam sistem yang dilakukan secara pemaksaan ini, memang kepada petani dibayar harganya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan padi yang dapat diambil oleh BDK adalah padi yang diperhitungkan lebih menurut kebutuhan keluarga masing-masing, tetapi dalam prakteknya tidak dijalankan demikian. Apabila ada di antara rakyat yang mencoba untuk menentang praktek BDK ini, bagi mereka akan menerima hukuman fisik yang cukup berat. Akibatnya banyak rakyat yang menderita kelaparan, karena hasil panennya telah diambil dan tidak mungkin untuk memperoleh bantuan dari BDK ini. Oleh karena praktek-praktek yang demikian maka timbullah berbagai cemooh dari rakyat yang dilontarkan kepada pemerintah terutama kepada BDK. Akibat lain yang timbul dari usaha perampasan ini tidak kurang rakyat yang menggantikan bahan makanan pokok daripada dengan jenis-jenis makanan yang lain seperti sagu dan jenis-jenis ubian.[45]

Kebutuhan-kebutuhan rakyat akan bahan-bahan lainnya yang merupakan kebutuhan sehari-hari seperti kain, minyak tanah, gula pasir dan lain-lain keperluan rumah tangga sangat sukar untuk diperolehnya. Oleh karena seperti telah diuraikan di atas bahwa semua kebutuhan rakyat akan sandang dan pangan diatur dan didatangkan oleh pemerintah. Bahan-bahan seperti itu pada umumnya dipergunakan untuk kebutuhan militer, bukan untuk kepentingan rakyat. Banyak di antara rakyat pada masa ini bukan saja menukar bahan makanan pokoknya, juga ada yang telah mempergunakan goni sebagai ganti kain, minyak kelapa dipergunakan untuk lampu sebagai ganti minyak tanah.[46]

Jasa pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik perhubungan laut maupun perhubungan darat, bukanlah dipergunakan untuk memperlancar roda perekonomian rakyat. Artinya penggunaan alat perhubungan ini bukan untuk menunjang kegiatan ekonomi seperti pengangkutan berbagai jenis barang

---

[44] T.M. Amin, *Wawancara*, Banda Aceh.

[45] T. Sabi Ubit, "Rakyat yang berjiwa patriotik melawan penjajahan fasisme Jepang", *Berita Buana*, (Jakarta : 22 Mei 1975).

[46] T.M. Amin, *op.cit.*

ekonomi dari satu daerah ke daerah yang lain misalnya dari daerah produsen ke daerah konsumen. Alat perhubungan ini dipergunakan sebagian besar untuk mengangkut bahan-bahan amunisi dan lain keperluan perang. Walaupun terdapat barang-barang konsumsi yang diangkut dengan mempergunakan alat perhubungan, itu semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan militer. Tegasnya rakyat sangat sukar untuk mengadakan hubungan komunikasi antar daerah dengan mempergunakan jasa-jasa pengangkutan. Hal ini kesemuanya disebabkan keadaan daerah yang selalu diliputi suasana perang. Demikianlah sekedar gambaran umum dari kehidupan rakyat yang berkenaan dengan kehidupan sosial ekonomi.

D. Pengaruh Politik Pendudukan Jepang di Aceh

Apabila kita membicarakan tentang kehidupan politik di Aceh dalam zaman pendudukan Jepang, kiranya perlu juga dibahas secara selintas praktek-praktek politik yang dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang dan pengaruhnya terhadap rakyat. Seperti telah disinggung dimuka, Jepang sejak sebelum masuk ke Aceh telah berusaha untuk mendekatkan diri dengan rakyat dengan bermacam-macam siasat. Mulai dari Uleebalang sampai kepada Ulama telah didekatinya dengan jalan mengikut sertakannya dalam lapangan pemerintahan. Guna menerapkan sistim politiknya Jepang telah menciptakan berbagai-bagai bentuk badan atau lembaga agar keikut sertaan semua golongan masyarakat dapat dilibatkan. Dari berbagai-bagai badan atau lembaga yang dibentuk tidak terlepas dari kepentingan politiknya, yang dalam hal ini dapat dijelaskan dalam uraian selanjutnya.

Pembentukan *Syukyo Hoin* atau Mahkamah Agama sebagaimana telah disebutkan dalam membahas sistem pemerintahan, perlu juga kiranya dibicarakan dalam hubungan dengan kehidupan politik ini. *Syukyo Hoin* yang dibentuk berdasarkan Aceh *Syu Rei* No. 12 tanggal *Syowa 19 Ni Gatu Niti,* yang tugasnya ditetapkan pada fasal 2, yang antara lain melakukan urusan Nikah, *Faraidh* dan berhak untuk menguji putusan-putusan Kepala Kadli dan Kadli *Son.* Di samping tugas-tugas ini masih ditambah satu tugas lagi yang juga tertera dalam pasal 2 yaitu ..... lain-lain yang diperintah oleh *Atjeh Syu Tyokan* yang mengenai urusan keagamaan[47] –

[47] Fasal demi fasal dari Atjeh Syu Rei No. 12 dapat dilihat dalam *"Beberapa Pemandangan Tentang Kehakiman di Daerah Atjeh"* (Kutaradja: 1944), hal. 56 – 57.

Dengan adanya tugas tambahan ini berarti badan peradilan ini lebih bersifat penasehat bagi pemerintah. Badan ini lebih merupakan alat politik pemerintah dapat dilihat dengan jelas, karena tidak saja melakukan tugas yang ditetapkan dalam Aceh *Syu Rei no. 12* seperti tersebut di atas kemudian di tambah pula oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Maklumat *(Atjeh Syu Kokuzi No. 35)*. Di dalam maklumat pemerintah no. 35 ini kepada *Syukyo Hoin* diberikan lagi tugas yang menyangkut dengan pengurusan Zakat, Wakaf, harta-harta anak yatim, harta-harta orang gila dan harta-harta orang mati yang tidak ada walinya.[48] Tugas-tugas ini jelas bukan tugas badan peradilan tetapi adalah tugas dari badan harta agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan badan ini lebih terjurus kepada kepentingan politik jika dibandingkan dengan kepentingan peradilan sendiri.

Pembentukan Maibkatra juga tidak terlepas dari kepentingan politik mereka. Tujuan pembentukan badan ini telah digariskan oleh *Atjeh Tyokan* seperti telah disebutkan di muka. Dalam prakteknya Maibkatra melalui konperensi-konperensinya telah menunjukkan dengan jelas ke arah usaha-usaha mendukung konsepsi pemerintah yang telah di gariskan. Sebagai contoh dapat disebutkan misalnya bahwa dalam bulan Maret 1943 Maibkatra menyelenggarakan konperensi di Kutaraja. Dalam konperensi ini telah ditetapkan beberapa orang ulama yang mewakili Aceh untuk menghadiri kongres ulama-ulama Islam se Sumatera dan Malaka yang akan diselenggarakan di Singapura pada tanggal 5-6 April 1943. Mereka yang mewakili Aceh adalah Tuwanku Abdul Azis, Tgk. Muhammad Hasbi, Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh dan Tgk. Muhammad Junus Jamil. Dalam konperensi ini juga dikeluarkan suatu resolusi yang isinya antara lain "Kami menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa bagi kami adalah tidak lebih dari patut, untuk menyumbangkan seluruh tenaga kami pada Jepang, demi tercapainya tujuan-tujuan suci dari peperangan ini"[49]

Dalam usaha untuk menetapkan keberhasilan politiknya, Jepang juga membentuk Badan Penerangan untuk *Aceh Syu* yang disebut *Sendenhan* yang dipimpin langsung oleh orang Jepang sendiri T. Kodera.[50] Badan ini mempunyai tugas untuk memberikan penerangan yang seluas-luasnya kepada rakyat yang berhubungan

---

[48] S.M. Amin., *op.cit.*, hal. 27
[49] *I b i d.*, hal, 28.
[50] Majalah Minami, *op.cit.*,

dengan perang Asia Timur Raya. Untuk melancarkan tugas-tugasnya *Sendenhan* atau *Hodaka* menerbitkan surat kabar yang diberi nama *Aceh Shinbun.* Harian *Aceh Shinbun* memang dewan redaksinya juga terdiri dari orang-orang Aceh, tetapi berita yang dimuat di dalamnya tidak boleh ke luar dari garis politik yang ditentukan.

Semua berita yang akan disiarkan terlebih dahulu harus melalui sensor orang-orang Jepang yang ditugaskan khusus pada Aceh Shinbun itu. Dengan keluarnya karangan-karangan dari berbagai tokoh masyarakat yang nadanya mendukung pemerintah dan ditanggapi oleh masyarakat dengan demikian pemerintah sangat senang hati.[51] Selain dari badan-badan yang telah disebutkan itu, masih ada dua lembaga lagi bentukan Jepang untuk menarik simpati rakyat. Kerja dari lembaga-lembaga ini mengajak rakyat dengan penuh bujuk rayu serta memberikan gambaran-gambaran bagi masa depan daerah ini yang lebih cerah. Lembaga yang dimaksudkan adalah Aceh *Syu Min Koa Hoko Kai* atau Badan Kebaktian Penduduk Aceh Untuk Membina Asia. Yang satu lagi bernama Badan Pembantu Perlindungan Tanah Air Dibelakang Garis Pertahanan Dalam *Aceh Syu.* Badan yang disebut pertama mendapat pengawasan yang ketat dari *Syu Tyokan* yang berhak mengangkat ketua dan wakil ketua menurut yang ia kehendaki. Untuk Badan ini *Syu Tyokan* S. Iino menetapkan T. Nyak Arif sebagai ketua yang kemudian digantikan dengan T. Panglima Polem Muhammad Ali dan sebagai wakil Ketua ditetapkan Tuanku Mahmud.

Tugas badan ini terbagi atas empat, yaitu: bagian umum dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh, bahagian pertahanan Haji Muhammad Zainuddin, bahagian perburuan Tgk. Muhammad Hasbi, dan bagian keamanan oleh Tgk. Syeh Ibrahim. Badan yang disebut kedua dengan tugas membantu para isteri dan anak-anak yang orang tuanya telah dipergunakan untuk tentara maupun sebagai pekerja pada pembuatan kubu pertahanan di front-front pertahanan. Jadi tugas badan ini mengumpulkan sumbangan terutama dari rakyat, baik berupa uang maupun bahan-bahan makanan dan juga mendapat subsidi dari pemerintah guna meringankan beban bagi tenaga buruh atau militer yang berasal dari rakyat.[52]

Salah satu instansi yang sangat ditakuti rakyat pada masa pen-

---

[51] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 26

[52] *Ibid.*, hal. 28 – 29.

dudukan Jepang adalah *Kempetai.* Badan ini selalu memata-matai rakyat guna mencari-cari kesalahan rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Dengan tuduhan yang dibuat-buat banyak rakyat yang turut ditangkap. Kalau badan-badan atau lembaga-lembaga yang telah disebutkan terdahulu melakukan tugas dengan penuh bujuk rayu, maka Kempetai melakukan penganiayaan serta tindakan-tindakan kebengisan lainnya yang di luar perikemanusiaan. Kempetai mempergunakan setiap kesempatan untuk melampiaskan bahwa nafsunya tidak saja kepada lawan-lawan mereka seperti para tawanan Belanda, tetapi juga kepada teman mereka yang telah membantunya dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Kepada setiap orang yang ditangkap pasti akan dianiaya dan dituduh tidak ikut membantu untuk menciptakan satu Asia yaitu Asia Timur Raya.

E. Interaksi di Daerah Aceh Dengan Kegiatan Organisasi Politik/ Sosial

Pada bahagian akhir dari uraian masa pendudukan Jepang di Aceh akan dicoba untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut interaksi politik dan sosial yang erat hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tingkat nasional.

Interaksi sosial politik yang akan dibahas dalam bahagian ini terutama menyangkut masalah gerakan pembentukan Asia Timur Raya, pembentukan *Syu Sangi Kai,* pembentukan organisasi kemiliteran seperti *Gyugun,* pengerahan tenaga *romusya* dan lain-lain yang ada hubungannya dengan interaksi sosial politik itu.

Dalam membahas kehidupan pemerintahan telah disinggung secara sepintas bahwa kedatangan tentara pendudukan Jepang ke Aceh tidak mengalami kesulitan, bahkan mendapat bantuan sepenuhnya dari rakyat. Hal ini tidak lain oleh karena sebelum mereka masuk ke Indonesia mereka terlebih dahulu telah melancarkan suatu propaganda politik guna mendapat dukungan dari daerah-daerah yang akan di datangi. Politik yang dilancarkan ini lebih terkenal dengan sebutan "Gerakan Tiga A". Untuk daerah Aceh siasat politik yang demikian telah termakan di hati rakyat melalui pemimpin-pemimpinnya. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang telah dijalankan terutama oleh PUSA., beserta dengan segenap aparatnya.

PUSA telah berusaha pula mengajak orang-orang lain yang berada di luar organisasi mereka, agar bersama-sama dengan me-

reka untuk menyusun kekuatan dalam mengusir Belanda dan menyambut Jepang.

Kegiatan-kegiatan yang telah dimainkan oleh PUSA sangat menentukan dalam usaha pendaratan Jepang ke Aceh, karena selain mengadakan propaganda mereka juga mengadakan kontak langsung dengan pembesar-pembesar Jepang di Pulau Pinang, Malaya seperti telah disinggung di muka pada tanggal 7 Januari 1942 PUSA mengirimkan utusannya ke Pulau Pinang di bawah pimpinan T. Ali Basyah, yang berangkat dari Pente Labu Aceh Timur dengan enam orang anggota. Pada tanggal 20 Pebruari 1942 PUSA mengutuskan lagi Tgk. Abdul Hamid salah seorang anggota Pengurus besar PUSA dengan tiga orang temannya, M. Ahmad Batee, Tgk. Abd. Samad dan Peutua Husen, juga menuju ke pulau Pinang dengan tugas yang sama.[53]

Di samping usaha-usaha yang telah ditempuh oleh PUSA, tentara pendudukan Jepang yang telah menguasai Malaya terus menerus mengadakan propaganda serta mengorganisasi berbagai kekuatan sosial agar gerakan mereka dapat diterima dengan baik oleh rakyat Aceh. S. Mashubuti yang kemudian menjadi kepala urusan ekonomi dan lalu lintas pada *Aceh Syu* adalah seorang perencana dalam pembentukan kolone kelima atau yang lebih terkenal dengan barisan *"Fujiwara Kikan"* atau barisan "F", telah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya orang-orang Aceh yang ada di Malaya dan Pulau Pinang untuk kembali ke Aceh dalam barisan F. Dalam bulan Maret 1942 Mashubuti kembali mengumpulkan orang-orang Aceh yang ada di Malaya, yang kepada mereka dianjurkan untuk memasuki barisan F dan kemudian pulang ke Aceh bersama-sama dengan tentara Jepang guna mengusir Belanda. Mereka kesemuanya berjumlah 24 orang bersama dengan orang PUSA yang dikirim dari Aceh. Pemimpin barisan F untuk Aceh antara lain Said Abubakar dan Said Ali.[54]

Gerakan F ini telah mengobral janji-janji muluk kepada rakyat sejak Jepang belum masuk maupun setelah pendaratan Jepang, yang kelak setelah Jepang memperoleh kemenangan besar di Aceh janji tersebut tidak pernah dipenuhinya. Said Abubakar dengan mempergunakan orang yang berpengaruh di dalam masyarakat melancarkan Propaganda-propaganda ke seluruh Aceh, seperti yang

---

[53] M. Joenoes Djamil, *op. cit.*, hal. 6.
[54] Ibid., hal ; A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 93 – 95.

pernah dilakukan oleh Tgk. M. Sufi ke daerah Aceh Barat dan Selatan setelah ia bertemu dan mendapat janji dari Said Abubakar.[55] Propaganda seperti ini memang mendapat pengaruh yang besar di kalangan rakyat, karena yang melakukannya adalah orang yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat.

Peranan Pemuda PUSA yang bermarkas besar di Idie di bawah pimpinan Amir Husin Al Mujahid seperti yang telah disebutkan, juga turut mensukseskan gerakan pemasukan Jepang. Mereka telah bergerak sejak dari Idie menuju ke Aceh Utara, Aceh Besar, Aceh Barat, sampai ke Aceh Selatan mengajak seluruh pemuda agar bergabung dalam pemuda PUSA guna mengusir Belanda. Untuk mempercepat pengusiran Belanda, Jepang akan membantunya dan dengan demikian dianjurkan kepada rakyat terutama pemuda agar memberikan bantuan sepenuhnya kepada Jepang.[56]

Setelah Jepang berhasil mendarat di Aceh, propaganda serupa tetap dilancarkan dengan menggunakan berbagai kesempatan serta lembaga-lembaga yang telah dibentuknya. Kepada rakyat diminta untuk membantu Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya dan dengan demikian kemerdekaan akan dengan segera dapat diwujudkan. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa semua lembaga yang dibentuk bertujuan untuk membantu membina Asia Timur Raya. Harian *Aceh Shinbun* dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyebarkan janji-janji serta harapan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Tidak cukup dengan usaha yang telah dilakukan itu, mereka mengadakan pula rapat-rapat umum untuk memberikan penerangan kepada rakyat dalam usaha pembentukan Asia Timur Raya. Bayangan kemerdekaan disambut dengan penuh semangat oleh rakyat, walaupun sampai akhir kekuasaan Jepang tidak pernah diberikannya. Dalam setiap rapat umum rakyat menyambutnya dengan semangat yang penuh bergelora. Puncak dari rapat umum itu terjadi pada tanggal 9 September 1944 yang dilakukan di Banda Aceh, dan telah melahirkan sebuah resolusi yang berisi pernyataan akan bekerja sama dengan tentara *Dai Nippon* dalam mempertahankan tanah air, mempersatukan segala tenaga agar dalam waktu singkat dapat diperoleh kemenangan serta lebih memperbesar semangat dalam memberi bantuan kepada tentara Jepang, mengenyampingkan segala per-

---

[55] Muhammad Ibrahim, Sejarah Kebangkitan Nasional, *op.cit.*, hal. 144-46.

[56] Muhammad Ibrahim, Sejarah Daerah, *op. cit.*, hal. 166.

selisihan guna memperoleh suatu "Negara Hindia Timur yang merdeka"[57]

Aceh *Syu Sangi Kai* atau Badan Perwakilan Rakyat *Aceh Syu* dibentuk berdasarkan Ketetapan *Aceh Syu Syokan* tanggal 17 Nopember 1943 Nomor 7.[58] Jika diperhatikan dengan dibentuknya *Syu Sangi Kai* ini seolah-olah pemerintah telah memenuhi janjinya untuk segera memberikan kemerdekaan, karena dengan pembentukan badan ini berarti pemerintah akan menjalankan dengan sungguh-sungguh azas kenegaraan sesuai dengan azas Trias Politika. *Syu Sangi Kai* ini sekalipun disebut Badan Perwakilan Rakyat Daerah, sebenarnya bukan suatu badan perwakilan rakyat yang lazim terjadi di negara demokrasi. Badan ini bukan membuat atau merumuskan peraturan-peraturan daerah yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, tetapi wewenang yang diberikan untuk badan ini adalah hanya sekedar memberikan nasehat kepada *Aceh Syu Tyokan.* Jadi badan ini adalah merupakan pendamping pemerintah untuk memberikan nasehat atau sebagai badan penasehat pemerintah di samping badan-badan lainnya seperti Maibkatra, yang memberikan nasehat kepada pemerintah dalam urusan *Aceh Syu Kyo Hoin,* dan lain-lain badan serupa.

Pembentukan *Syu Sangi Kai* di Pulau Sumatera berbeda dengan di pulau Jawa, hal ini dapat dimengerti oleh karena Sumatera diperintah langsung oleh Komando Tentera ke 25 dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi. Kalau di Jawa pada tanggal 5 September 1943 telah dikeluarkan *Osamu Seirei.5*[9] yang mengatur pembentukan Dewan-dewan daerah pada tiap-tiap karesidenan di seluruh Pulau Jawa *(Syu Sangi Kai)* dan Dewan Pusat (Syu Sangi In) yang berkedudukan di Jakarta. Komando tentara ke-25 baru sejak tanggal 1 Nopember 1943 mengeluarkan keputusan untuk membentuk *Syu Sangi Kai* di kesepuluh Keresidenan di Sumatera, yang realisasinya untuk Aceh pada tanggal 17 Nopember 1943 seperti tersebut di atas. *Syu Sangi In* di Sumatera yang dibentuk pada tanggal 24 Maret 1945 dan berkedudukan di Bukittinggi tidak tunduk kepada Syu Sangi In di Jawa yang telah dibentuk sejak tanggal 5 September 1943.

Pembentukan *Syu Sangi Kai* maupun *Syu Sangi In* adalah pe-

---

[57] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 15

[58] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 20

[59] Peraturan Pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima tertinggi Tentara pendudukan Jepang di Pulau Jawa.

laksanaan dari program politik yang telah digariskan oleh konperensi kemaharajaan dalam bulan Mei 1943 yang merupakan alat pengikat bagi kerelaan berkorban yang lebih besar dari rakyat. *Syu Sangi In* Sumatera pada permulaan pembentukannya beranggotakan 15 orang yang merupakan utusan dari 10 kepresidenan. Untuk keresidenan yang dianggap penting seperti Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat dan Palembang mendapat dua orang wakil. Dari Aceh yang duduk dalam *Syu Sangi In* Sumatera adalah T. Nyak Arief dan Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh Sejak tanggal 24 Maret 1945.[60]

Aceh Syu Sangi Kai pada waktu pembentukan pertama kalinya beranggotakan 30 orang. Pada tanggal 1 Pebruari 1945 jumlah keanggotaannya di tambah lagi sehingga menjadi 40 orang. Bahwa lembaga ini hanya merupakan badan penasehat jelas terlihat dari susunan keanggotaannya. Sebagian besar anggotanya adalah orang pemerintah yaitu *Guntyo* dan *Sontyo*. Dari ketiga puluh orang anggotanya terdapat 7 orang *Guntyo*, 7 orang *Sontyo* dan 16 orang yang mewakili golongan ulama, pemuka-pemuka masyarakat, pegawai dan lain-lain.

Susunan anggotanya sebagai berikut: Dari Guntyo masing-masing 1. T. Muhammad Hasan (Sigli), 2. T. Cut Hasan (Bireuen), 3. Radja Zainuddin (Takengon), 4. T. Muhammad Syah (Idie), 5. T. Radja Sulung (Kuala Simpang), 6. Radja Naribun (Kutacane), 7. T. Ahmad (Meulaboh) dari Sontyo masing-masing 1. T. Djohan (Balohan), 2. Teuku Bentara Hasan (Keumala). 3. T. Ali Basyah (Trienggadeng), 4. T. Cut Radja Paeet (Lhokseumawe), 5. Teuku Muhammad Aji (Alu Ie Mirah Keureuto), 6. T. Said Umar Abdul Aziz (Sungai Raya), 7. T. Ad (Kutaraja). Sedangkan yang diangkat mewakili golongan ulama, pemuka-pemuka masyarakat adalah 1. Tgk. Syeh Ibrahim, 2. Matrahim Jindam, 3. Nyak Mangsur, 4. Teuku Muhammad Ali, 5. Chek Ahmad, 6. Tengku Adnan Mahmud, 7. Tgk. Ibrahim Meuraksa, 8. T. Panglima Polem Muhammad Ali, 9. T. Nyak Arief, 10. Teuku Muhammad Daud Bereu'eh, 11. Tgk. Haji Hasan, 12. Tgk. Muhammad Hasbi, 13. Dr. Muhammad Nahjuddin, 14. Teuku Mahmud, 15. Ali Murholo dan 16. Tgk. Ibrahim[61] -

---

[60] Medan Area, *op. cit.*, hal. 45 - 46 dan 701 – 703.

[61] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 21.; lihat juga Said Abubakar, "Dewan Perwakilan Rakyat Aceh", *Majalah DPRD Daerah Istimewa Aceh no. 2 tahun 1977*, hal. 31 2.

Atjeh Syu Sangi Kai ini sejak terbentuknya diketuai oleh T. Nyak Arief.

Seperti telah disebutkan *Atjeh Syu Tyokan* dengan ketetapannya tanggal 1 Pebruari 1945 no. 2 telah menyempurnakan keanggotaan badan ini sehingga berjumlah 40 orang anggota. Dalam Dewan baru ini 19 orang masih tetap anggota lama, 21 orang anggota baru dan berarti 11 orang anggota lama telah diberhentikan. Mereka yangdianggap sebagai anggota baru adalah 1. Tgk. Abdul Wahab, 2. T. Muhammad Amin, 3. Ahmad Kamil, 4. T. Mahmud, 5. T. Sabi, 6. Tgk. Syeh Abdul Hamid, 7. Chalidin Abu Bakar, 8. T. Wahi, 9. Radja Mahmud, 10. Muhammad Saleh Taman Sari, 11. Tgk. Abdulrahman 12. Tgk. Hasan Hanafiah, 13. T. Ramli Angkasah, 14. T. Tjut Ahmad, 15. Mr. S.M. Amin, T. Hanafiah, 17. T. Chiek Mahmud, 18. dokter F.J. Nainggolan, 19. Muhammad Syam, Thio Kie San, dan 21. T. Laksana Umar.[62]

Bahwa badan ini adalah badan yang memberikan advis kepada pemerintah jelas disebutkan dalam ketetapan pembentukannya yaitu: bahwa wewenang badan ini antara lain mengadakan rapat dua kali setahun untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan *Atjeh Syu Tyokan* mengenai kebijaksanaan pemerintah. Selanjutnya dalam ketetapan tanggal 1 Pebruari no. 2 disebutkan bahwa tugasnya antara lain untuk memberikan penerangan-penerangan kepada Pemerintah. Dengan telah diberikan tugas ini berarti telah diberikan hak kepada rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan, supaya mereka lebih setia dan lebih bersemangat dalam memberikan bantuan kepada pemerintah.[63] Dengan demikian jelaslah bahwa badan ini walaupun dikatakan sebagai Badan Perwakilan Rakyat, tetapi bukanlah dalam arti yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai alat pemerintah untuk menarik simpati rakyat.

Dalam usaha untuk menambah jumlah tentara serta mengikut sertakan pemuda-pemuda ke Medan Peperangan, maka diusahakanlah latihan-latihan kemiliteran maupun semi militer kepada para pemuda. Pendidikan kemiliteran yang diberikan kepada para pemuda dalam lapangan kemiliteran ini ialah *Gyugun, Haiho* dan *Tokebutsu,* yang pembentukannya dikaitkan dengan janji-janji me-

---

[62] *Ibid.*, hal. 21; mengenai anggota yang diberhentikan lihat Said Aboe Bakar, *Ibid.*,

[63] *Ibid.*, hal. 21 – 22.

reka yang seolah-olah dalam rangka memberikan kemerdekaan terlebih dahulu harus ada tentara untuk dapat mempertahankan negaranya sesudah diberikan kemerdekaan.

Pembentukan *Gyu Gun* bersamaan waktunya dengan pembentukan *PETA* Di Pulau Jawa. *Gyu Gun* dapat diartikan sebagai "Tentara Rakyat". Istilah ini tidak begitu populer di Aceh, dibandingkan dengan istilah PETA yang cukup populer di Jawa. Penyusunan *Gyugun* ini sebenarnya telah diserahkan kepada Maibkatra. Badan ini menyerahkan pemuda-pemudanya untuk dididik sebagai prajurit *Gyugun. Gyu gun* akan dipergunakan sebagai tentara cadangan atau yang biasa disebut sebagai tentara baris ke dua, yang dimaksudkan untuk mempertahankan keamanan daerah apabila militer Jepang tidak berhasil menghadapi sekutu. Oleh Jepang *Gyugun* disebut sebagai tentara pembela tanah air. Pemuda-pemuda yang dikerahkan untuk pertama kali atau angkatan pertama direncanakan untuk dijadikan sebagai perajurit *(Heitei),* yang setelah melalui latihan-latihan dasar ada pula di antara mereka yang dipilih untuk kemudian diangkat menjadi *Kasikan* (Bintara) dan di antara mereka yang terbaik dipilih pula untuk diangkat menjadi *Syako* atau perwira. Penarikan angkatan ke dua direncanakan untuk dijadikan *Syako,* hanya yang terlalu jatuh mutunya akan dijadikan *Kasikan.* Oleh karena itu untuk angkatan kedua ini diusahakan untuk memperoleh pemuda yang pintar-pintar, anak-anak kaum bangsawan dan mereka yang pernah menjadi anggota barisan "F". Kepada bekas anggota barisan "F" diberikan prioritas karena mereka dianggap telah berjasa kepada Jepang.[64]

Di Sumatera latihan bagi calon perwira dan bintara dilakukan dalam dua gelombang. Angkatan pertama dimaksudkan untuk dijadikan perwira-perwira dan bintara-bintara Infantri dari tentara rakyat yang akan dikerjakan untuk mempertahankan daerah-daerah pantai dan pedalaman, yang disebut Gyu gun. Angkatan ke dua dimaksudkan untuk dijadikan perwira-perwira dan bintara Infantri dari tentara rakyat dalam rangka mempertahankan lapangan terbang yang disebut *Gyu Hikojo Kinmutai.*

Berkenaan dengan latihan *Gyugun* untuk Sumatera tidak dipusatkan pada suatu tempat latihan seperti di pulau Jawa, tetapi

---

[64] Syamaun Gaharu, *Beberapa catatan tentang perjuangan penegakan Kemerdekaan di Aceh sejak Proklamasi sampai dengan pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia,* Prasarana pada Seminar Perjuangan Aceh, (Medan 1976).

di bagi ke dalam beberapa *renseitai* atau tempat latihan. Misalnya untuk angkatan pertama (perwira dan bintara) Gyugun di mulai pada tanggal 8 Desember 1943 yang untuk seluruh Aceh dipusatkan direseitai Idie. Latihan kedua untuk perwira dan bintara *Gyu Hikijo Kinmuntai* yang dimulai pada awal Maret 1944, bagi daerah Aceh dilangsungkan direnseitai Lhok Nga.[65]

Organisasi Gyugun yang terdapat di Aceh sampai pada saat Jepang menyerah masih bersifat kompi atau pasukan yang berdiri sendiri, walaupun telah dikandung maksud untuk mempersatukan atau meningkatkannya untuk masing-masing residen dengan satu batalion atau lebih, bahkan untuk Aceh direncanakan lebih banyak lagi. Karena di daerah Aceh jumlah anggota Gyugun lebih banyak dari daerah lain yaitu lebih dari 5000 orang, sedangkan daerah-daerah lain di Sumatera rata-rata berkisar antara 1000 sampai 1500 orang.[66]

Mengenai pembentukan kelompok-kelompok lain seperti *Heiho*, ini juga diambil dari rakyat. Mulanya pembentukan *Hei-ho* dimaksudkan untuk mengkoordinir kelompok-kelompok tenaga pekerja kasar yang setiap saat dapat dikerahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat bagi keperluan perlengkapan tentara Jepang. Karena itulah kelompok ini kemudian dimiliterisasikan, digabung dalam kesatuan-kesatuan tentara Jepang, diberi pakaian seragam, diberi gaji tetap dan diberi tanda pangkat.[67] Adapun yang menjadi motivasi dari para pemuda untuk memasuki pendidikan kemiliteran Jepang ini bukan hanya disebabkan rangsangan akan diberikan kemerdekaan di masa depan, tetapi hal yang menjadi pendorong utama adalah untuk menghindari kewajiban-kewajiban berat seperti romusya *dan* jenis-jenis kerja paksa lainnya.[68]

Membicarakan masalah yang menyangkut *romusya* berarti membicarakan masalah kehidupan rakyat dalam masa pendudukan Jepang. Tenaga rakyat diperas secara besar-besaran untuk *romusya* yang bertujuan melaksanakan proyek-proyek besar bagi kepentingan militer Jepang. Pekerjaan-pekerjaan yang mempergunakan tenaga *romusya* secara besar-besaran adalah pembuatan pro-

---

[65] Medan Area, *op. cit.*, hal. 50 – 51.
[66] *Ibid.*, hal. 51 – 55.
[67] *Ibid.*, hal. 51 – 55.
[68] *Ibid.*, hal. 56.

yek jalan Raya Takengon – Blangkejeran dan proyek pertahanan gunung setan di Tanah Luas. Proyek jalan raya Takengon – Blang Kejeran dimulai pada tanggal 1 Januari 1944 dan selesai pada awal bulan Juli 1944.[69] Dapat dibayangkan bagaimana pengerahan tenaga untuk mengerjakan jalan sejauh itu dan dalam waktu enam bulan dan bagaimana sistem pekerjaan yang diberikan kepada rakyat, sehingga proyek ini bisa selesai dalam tempo yang sesingkat itu. Ini semuanya berarti pemerasan tenaga di luar kemampuan kerja manusia dan ini lebih merupakan tindakan di luar peri kemanusiaan. Romusya yang digerakkan untuk mengerjakan jalan ini diambil dari daerah Aceh sendiri dan dikoordinasi oleh sebuah badan yang diberi nama "Perkumpulan Pekerja-pekerja untuk umum di *Aceh Syu* guna membina Asia Timur Raya".

Proyek basis pertahanan gunung setan yang dimulai setelah hampir selesai pembuatan jalan Raya Takengon Blangkejeran tidak saja mempergunakan tenaga *romusya* yang berasal dari Aceh tetapi juga mempergunakan tenaga *romusya* yang berasal dari Keresidenan Sumatera Timur dan dari Pulau Jawa. Proyek ini memakan waktu lama dan akhirnya tidak selesai sampai Jepang meninggalkan Aceh.

Selain mengerjakan proyek-proyek besar seperti telah disebutkan masih banyak lagi tenaga rakyat dipergunakan sebagai *romusya*. Pekerjaan membuat memperbaiki pelabuhan Udara Blang Bintang, Pelabuhan Udara Lhok Nga dan Pembuatan Pelabuhan Udara yang baru di Blang Peutek Padang Tiji, Tambue (Aceh Utara) serta pelabuhan Udara Trumon, Aceh Selatan, kesemuanya dikerjakan dengan tenaga *romusya*. Tiga buah pelabuhan udara yang disebut kemudian, yaitu pelabuhan Udara Blang Peutek, Tambue dan Trumon tidak selesai dikerjakan, karena Jepang keburu menyerah kepada Sekutu. Sejalan dengan politik Fasisme Jepang, rakyat yang tidak mau melakukan *romusya* tidak segan-segan dikenakan hukuman fisik yang cukup berat. Selanjutnya untuk mempertahankan lapangan terbang, baik yang telah siap, maupun yang dalam taraf penyelesaian seperti Blang Peutek dan Trumon telah dibentuk polisi lapangan yang dipersenjatai, disebut *"Tokubetsu"*, Anggota *Tokubetsu* ini juga diambil dari pemuda-pemuda, yang kepada mereka di samping bertugas menjaga lapangan juga bertindak sebagai pembantu polisi umum. Untuk *Aceh Syu Toku-*

---

[69] Samaun Gaharu, *op. cit.*,

betsu dikepalai oleh *Kaimubutyo* dan untuk tiap-tuap bunsyu dikepalai oleh *Keisatsutyo.*[70]

Untuk menerangkan politik fasismenya, Jepang mempergunakan media komunikasi. Satu-satunya media massa (Surat kabar) yang terbit di Aceh pada masa itu adalah koran *"Atjeh Sinbun". Atjeh Sinbun* merupakan alat pemerintah guna menyampaikan berita-berita yang diinginkan oleh pemerintah untuk membantu menenteramkan suasana. Dari koran ini rakyat dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.[71] Seperti telah disebutkan terdahulu *Atjeh Sinbun* berada langsung di bawah pengawasan pemerintah yang tanggung jawabnya dipegang oleh *Aceh Syu Seityo Sendenka Sinbunhantyo* atau kepala urusan penerangan daerah Aceh.

Aceh Sinbun kalau diperhatikan memang merupakan koran Bangsa Indonesia, karena yang memimpin koran ini sejak pemimpin redaksi sampai kepada redaktur dikelola oleh orang-orang Indonesia. Koran ini diterbitkan setelah tiga bulan Jepang mendarat di Aceh oleh urusan penerangan Aceh di bawah pimpinan Abdulwahid ER, seorang wartawan dari Medan.[72] Sedangkan pemimpin redaksi dan para redaktur yang pernah mengasuh koran ini antara lain Teungku Ismail Jacob, A. Hasjmy, Amelz, Abdullah Arief, A. Gani Mutiara, T. Alibasyah Talsya, Ibnu Rasjid, Djohan Ahmad dan Abdulmanaf. Sebagai koran pemerintah, maka pemerintah mengadakan pengawasan langsung terhadap jalannya koran ini terutama dari segi beritanya. Untuk ini pemerintah menempatkan beberapa orang Jepang pada dewan redaksi yang bekerja bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Mereka ini adalah S. Sagawa, T. Kodera, K. Yamada dan H. Nagamatsu.[73]A

Seperti telah disebutkan, surat kabar yang diterbitkan ini adalah sebagai salah satu cara untuk memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat agar rakyat mencintai pemerintah, karena itu berita yang disiarkannya selalu sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah. Karena yang memimpin surat kabar ini putera-putera Aceh, maka tidak mengherankan apabila berita-berita yang dimuat secara samar-samar telah bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tidak jarang diantara mereka, para pe-

---

[70] A.H. Nasution., *op. cit.*, hal. 126; T.Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 28.
[71] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 26.
[72] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 26.
[73] A. Hasjmy dan T. Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 17.

mimpin redaksi, sering mendapat peringatan keras dari pihak pemerintah.

Demikianlah telah kita uraikan beberapa masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat selama masa pendudukan Jepang di Aceh.

***

BAB III
KEADAAN DI DAERAH ACEH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. Proklamasi Kemerdekaan dan Sambutan Masyarakat Aceh

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa pendaratan Jepang ke Aceh pada mulanya mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini tidak lain oleh karena rakyat mengharapkan dengan kedatangan Jepang berarti kemerdekaan yang telah demikian lama dinantikan akan segera terwujud, sesuai dengan janji yang telah pernah diucapkan sebelum mereka memasuki Aceh. Janji yang telah mempengaruhi rakyat itu, terutama disampaikan melalui barisan *Fujiwara Kikan* dan juga sebagai hasil pertemuan dengan delegasi PUSA yang diutus ke Malaya dan Pulau Pinang.

Tetapi apa yang diharapkan oleh rakyat itu, ternyata sebaliknya yang terjadi. Rakyat Aceh semenjak daerahnya diduduki Jepang telah merasa, bahwa perlakuan Jepang kadang-kadang lebih kejam dari apa yang telah pernah dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Seperti telah disinggung juga di muka rakyat sangat menderita, terutama dalam bidang kehidupan ekonomi. Banyak harta rakyat yang dirampas untuk kepentingan perang melalui kaki tangannya, BDK; demikian pula tenaga rakyat diperas untuk membuat kubu-kubu pertahanan, lapangan terbang dan lain-lain melalui pengerahan tenaga rakyat yang dikenal dengan romusha. Hal-hal yang demikian itulah yang menyebabkan rasa kebencian rakyat semakin hari semakin bertambah, yang untuk ini tercermin dari perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat, seperti peristiwa yang dilancarkan oleh Tengku Abdul Jalil, Gerakan *Gyugun* di bawah pimpinan Teuku Abdul Hamid di Meureudu dan peristiwa Pandrah-Jeunib yang berlangsung beberapa bulan sebelum Jepang meninggalkan Daerah Aceh.[1]

Keadaan yang demikian tidaklah akan berlangsung lebih lama; tetapi segera berubah, terutama setelah pasukan Sekutu dapat menguasai beberapa daerah di Pasifik. Sebagai akibat dari perubahan situasi internasional pada waktu itu, menyebabkan Jepang

[1] Mengenai peristiwa yang digerakkan oleh Tgk. Abdul Jalil (Peristiwa Cot Plieng Bayu), gerakan Gyugun di Meuredu dan Peristiwa Pandrah-Jeunib, lihat lebih lanjut, Muhammad Ibrahim et. al., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, P3KD, Dep. P dan K, (Kakarta 1977/1978), hal. 190 – 199.

harus mengadakan perubahan sikapnya terhadap penduduk di daerah Aceh. Mereka terpaksa berusaha untuk mendekati penduduk kembali; berbagai daya upaya dijalankan dengan tujuan mengambil hati rakyat yang telah lama membenci mereka. Pelaksanaan dari politik yang dianut ini dapat dilihat antara lain, dimana-mana diadakan rapat umum; demikian pula dengan menggunakan mass-media, seperti harian *Aceh Sinbun*, untuk menarik hati rakyat.

Meskipun Jepang telah berusaha semaksimal mungkin agar rakyat tetap bersimpati kepada mereka, namun rasa kebencian itu tidak dapat terkendalikan lagi; sampai pada saat Jepang akan meninggalkan Aceh masih ada saja peristiwa-peristiwa berdarah yang diakibatkan dari rasa kebencian itu. Menjelang diumumkan kapitulasi atau pada saat-saat telah mulai jatuhnya beberapa front pertahanan di daerah daerah yang telah mereka rebut pada awal perang Pasifik, keadaan di daerah Aceh semakin bertambah genting. Dalam saat-saat yang demikian pemerintah Jepang telah mengambil beberapa langkah kebijaksanaan yang lebih merupakan pengamanan terhadap rakyat umum. Di antara tindakan pengamanan itu adalah menyita pesawat radio yang dimiliki oleh rakyat dan mengawasi dengan ketat kantor berita Domei yang selama ini memonitoring berita-berita tentang kemenangan Jepang atau pesan-pesan pemerintahnya kepada daerah-daerah pendudukan. Demikian pula halnya dengan mass-media lainnya; bahkan satu-satunya surat kabar resmi pada waktu itu di Aceh, yaitu: *Acen Sinbun*, juga diawasi dengan ketat agar berita-berita tentang kemunduran Jepang di front Pasifik, yang mungkin diketahui oleh para anggota redaksi secara rahasia (Staf redaksi terdiri dari Jepang dan Indonesia) tidak dimuat sebagai berita.[3]

Tindakan pemerintah Jepang itu menyebabkan para pemimpin di daerah Aceh menjadi sulit dalam mengikuti perkembangan politik internasional yang sesungguhnya pada waktu itu. Dan hal ini pula lah yang menyebabkan hampir tidak ada komunikasi lagi antara pemimpin-pemimpin pergerakan di suatu daerah dengan daerah-daerah lainnya. Kini yang diketahui umumnya hanya siaran-siaran resmi pemerintah atau pemberitahuan dari pembesar-pembesar Jepang yang selalu menganjurkan agar rakyat bersatu padu dalam menghadapi Sekutu dan sebagai imbalannya Jepang akan

---

[3] Muhammad Ibrahim, et. al., *op. cit.*, hal. 201.

tetap memelihara keamanan di Daerah Aceh sampai tiba saatnya bangsa Indonesia menerima kemerdekaan seperti yang telah pernah dijanjikannya. Sehubungan dengan ini surat kabar *Aceh Sinbun* dalam penerbitan istimewanya, Jum'at tanggal 8 September 1944 menyiarkan pidato radio Perdana Menteri Jepang, yang antara lain berbunyi :

> " . . . . . Kemaharadjaan *Dai Nippon* memakloemkan dengan teroes terang, bahwa kemudian hari Hindia Timoer akan diberikan kemerdekaannja soepaja dapat mentjapai kebahagiaanja jang kekal oentoek bangsanja sendiri. Beginilah kejoejoeran Kemaharajaan Nippon atas pendoedoek-pendoedoek di Asia Timoer ini . . . . . Marilah kita bersama-sama membaharoei hati dengan kokoh sebagai wadja dan serahkanlah segenap tenaga oentoek mencapai kemenangan bersama-sama madjoe oentoek memoelihkan Asia oentuk Asia. Kalaoe dilakoekan demikian dalam peperangan soetji sekarang ini pastilah kita dapat menghantjoerkan moesoeh-moesoeh kita Amerika, Inggeris, dan Belanda[4].

Selain itu dalam penerbitan lain dimuat pula semboyan : "Bergotong royong membantu Tentara, Menuju ke arah Indonesia Merdeka" *(Aceh Sinbun,* Kamis 15 Pebruari 1945 atau 15 Ni Gatu 2605). Dan tujuh hari sebelum Jepang menyerah. *Aceh Sinbun* sekali lagi memuat berita mengenai kemerdekaan yang dijanjikan Jepang itu, yaitu dalam nomor istimewanya yang terbit tanggal 7 Agustus 1945 :

> "Kemerdekaan Indonesia jang di-idam-idamkan akan ditjiptakan dalam masa jang singkat ini, demikian bunji makloemat Balatentara Kawasan Selatan . . . . . Dasarnja dan pokoknja Negara Indonesia Merdeka jang akan lahir dan soesoenan siasatnja serta hal-hal jang penting, akan ditetapkan oleh Panitia Kemerdekaan Indonesia dengan meroendingkan seteliti-telitinja. Berhoeboeng dengan ini pada hari ini *Soematera Saikosikikan Kakka* memberi nasehat jang menjatakan Kemerdekaan Indonesia akan segera terkaboel, negara Indonesia akan menjadi satoe bahagian dari lingkoengan Asia Timoer Raja jang gilang gemilang jang Nippon sebagai poesatnja[5].

Tetapi bagaimanapun ketatnya dilakukan pengawasan agar kekalahan mereka tidak diketahui ataupun tidak tersiar kepada rakyat, namun kemudian hal itu bisa juga diketahui, terutama melalui perwira-perwira *Gyugun* yang masih dipekerjakan oleh Jepang dan ditempatkan di staf intelejen. Selain itu juga melalui beberapa anggota redaksi *Aceh Sinbun* (disini ditempatkan sebuah radio

---

[4] Nomor Istimewa Aceh Sinbun itu tersimpan pada Aboe Bakar Bsf. dan telah dimuat pula, sebagai halaman tambahan, dalam buku yang diterjemahkannya, yaitu, H.C. Zentgraaff, *Aceh,* belum diterbitkan, hal. 407-8.

[5] *Ibid.;* terbitan tanggal 15 Pebruari 1945 disimpan pada Muhammad Ibrahim. (EJD dari pengutip).

untuk kepentingan Jepang); secara rahasia, tanpa sepengetahuan staf redaksi orang Jepang, mereka selalu berusaha untuk mendengar berita-berita yang berasal dari pihak Sekutu. Kemudian, baik para perwira *Gyugun*, maupun para anggota redaksi *Aceh Sinbun*, secara lisan dan rahasia berusaha pula untuk menyampaikan berita-berita tersebut, terutama yang menyangkut kedudukan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, kepada para pemuka masyarakat. Penyampaian secara rahasia ini dimaksudkan agar terhindar dari jaringan intelijen Jepang yang selalu mengamat-amati gerak para pemuka masyarakat.[6] Kalau sekiranya diketahui pasti akan membayakan mereka; bagi pemuka masyarakat yang dicurigai atau dituduh tidak memihak Jepang akan ditangkap, bahkan ada pula yang dibunuhnya. Penangkapan dan pembunuhan dalam jumlah yang besar terhadap orang-orang yang dicurigai telah direncanakan[7] dan juga telah pernah dilakukan, seperti penangkapan atas diri Teuku Raja Jum'at Lhoong, Teuku Ali Basyah Peukan Bada dan Teuku Dullah Seulimeum. Demikian pula pembunuhan terhadap Teuku Mohd. Hasan Geulumpang Payong dan Rizal, bekas pengurus perkara-perkara di *Landraad* Kutaraja. Kepada mereka ini dituduh melakukan perlawanan terhadap *Dai Nippon* dan menghambat kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.[8]

Di lain pihak, yang semakin menambah keyakinan para pemimpin rakyat akan kemunduran tentara Jepang di setiap front adalah dari tindakan dan perbuatan mereka sendiri di beberapa tempat di Aceh. Tindakan tersebut adalah pemberhentian sukarelawan angkatan laut Jepang, yang berasal dari bangsa Indonesia, di Sabang dan pembubaran kesatuan *Gyugun* serta menyuruh mereka agar pulang ke kampung masing-masing dan jika diperlukan lagi akan dipanggil kembali nanti. Dalam pada itu tersiar pula berita tentang adanya beberapa opsir Jepang yang melakukan tindakan bunuh diri.[9] Kejadian-kejadian tersebut semakin memperkuat du-

---

[6] A. Hasjmy dan T. Alibasyah Talsya, *Hari-hari Pertama Revolusi 45 di Derah Modal*, Kanwil Dep. P dan K Propinsi Istimewa Aceh – MSI. Aceh, 1976, hal. 7 – 8.

[7] Nama-nama pemimpin rakyat yang direncanakan ditangkap dan dibunuh di Aceh Timur, lihat, Abdullah Hussain, *Terjebak* (I) Pustaka Antara (Kuala Lumpur; 1965), hal. 371 – 6.

[8] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 15 – 16.

[9] Ismail Jacob, "Riwayat Gema Proklamasi di Aceh", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan*, no. 7 tahun 1971, Perw. Dept. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, hal. 23.

gaan mengenai kekalahan yang diderita Jepang, sebab hal-hal yang serupa itu sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Jepang di daerah Aceh.

Sejalan dengan politik yang telah disebutkan di atas, yakni politik ingin mendekati rakyat dari berbagai golongan, baik para bangsawan, ulama ataupun lain-lain, maka pada bulan Juni 1945 para pembesar Jepang menghubungi tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kutaraja, antara lain Tuanku Hasyim. Dalam pertemuan itu, pihak Jepang kembali menegaskan, bahwa *Dai Nippon* pasti akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu mereka meminta untuk mengkoordinasi pemuda-pemuda sehingga lahir suatu angkatan pemuda yang kuat di Aceh. Bahkan beberapa hari kemudian Tuanku Hasyim diminta oleh *Atjeh Syu Seityo,* Matsubushi untuk mengadakan suatu rapat pemuda di Kutaraja. Juga dijelaskan bahwa *Atjeh Syu Tyokan* (residen Aceh) S Lino dan ia sendiri akan hadir dan sekaligus menyampaikan pidato pada rapat tersebut. Rapat pemuda yang dimintanya itu akhirnya dapat dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1945 di Atjeh Bioskop Kutaraja dan dihadiri oleh pemuda-pemuda serta masyarakat dari setiap unsur. Suatu hal yang mengejutkan para pemuda yaitu dengan tidak sengaja mengetahui bahwa tepat pada hari itu Jepang telah menyerah, yaitu dengan tidak hadirnya *Syu Tjokan,* dan satu-satunya yang hadir dari pihak Jepang adalah Matsubushi, yang mengucapkan pidato singkat tanpa bersemangat. Sedang di pihak pemuda telah menyampaikan pidatonya secara penuh membakar semangat, tidak saja dari unsur pemuda, seperti Ali Hasjmy, Tuanku Hasyim, tetapi juga telah turut berbicara dengan penuh semangat dua orang pemimpin Aceh, yaitu: Teuku Nyak Arief dan Teungku Mohd. Daud Beureueh.[10]

Rapat pemuda yang diadakan tepat pada hari menyerahnya Jepang itu telah memberikan arti yang penting bagi para pemuda, terutama yang berada di Kutaraja dan Aceh Besar; mereka telah mendengar langsung pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh para pemimpin mereka pada waktu itu. Karenanya tidak mengherankan apabila nanti setelah diketahui Indonesia telah merdeka, para pemuda dengan cepat berhasil mengorganisasi dirinya dalam satu barisan pemuda yang diberi nama Ikatan Pemuda Indonesia. Organisasi pemuda ini merupakan hasil nyata dari rapat tersebut,

[10]Tuanku Hasyim, ' Detik-detik Proklamasi 1945", *Warta* Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hal. 13.

meskipun pada waktu rapat berlangsung tidak dengan tegas disinggung hal-hal yang menyangkut perlunya mengkoordinasi kekuatan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan yang akan diproklamasikan (tidak diberikan oleh Jepang).

Gambaran sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan, bahwa suasana di ibukota *Aceh Syu* (Keresidenan Aceh) khususnya dan di tempat-tempat lain di Aceh umumnya, pada bulan-bulan terakhir menjelang kekalahan Jepang tampak kacau dan tidak menentu. Para pemimpin rakyat tidak mengetahui dengan pasti apa yang sedang dan akan terjadi, sebab berita-berita (informasi) yang diterima umumnya tidak dapat dijadikan pegangan. Karenanya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada waktu itu tidak dapat diketahui dengan segera; kapitulasi Jepang tanggal 14 Agustus 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat didengar pada saat peristiwa itu berlangsung. Kedua peristiwa bersejarah ini baru diketahui oleh rakyat Aceh setelah beberapa hari berlangsung.

Mengenai peristiwa kapitulasi Jepang pada mulanya hanya diketahui secara samar-samar, yaitu melalui para perwira *Gyugun* yang masih bekerja di staf intelijen Jepang dan juga melalui beberapa orang Indonesia (Gazaly Yunus, M. Nur, Amiruddin S, Bustaman, Bustani) yang bekerja pada kantor berita Domei di Kutaraja[11] Mula-mula berita yang samar-samar ini tidak begitu berpengaruh dalam masyarakat, tetapi kemudian setelah terlihat tindakan dan gerak-gerik Jepang sendiri, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka berita tersebut semakin tersebar luas dalam masyarakat. Keadaan yang serba tidak pasti itu pada mulanya tidak ditanggapi secara serius oleh para pembesar Jepang di Aceh. *Tyokan* sendiri, sebagai penguasa tertinggi di sana tidak pernah memberikan keterangan resmi mengenai kekalahan Jepang itu. Hal ini mungkin di dasarkan pada pertimbangan, bahwa jika situasi yang sesungguhnya diketahui oleh rakyat, diperkirakan mereka akan mendapat perlawanan dari rakyat. (apa yang diduga itu, seperti yang akan diuraikan dalam bagian berikutnya, memang benar terjadi).

Karena situasi daerah semakin tidak menentu, maka pada tanggal 23 Agustus 1945 *Tyokan* S Iino terpaksa memanggil para pemimpin rakyat ke tempat kediamannya (pendopo Gubernur

---

[11] Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 563; Ismail Jacob, *op. cit.*, hal. 22

sekarang). Adapun pemimpin-pemimpin rakyat yang dipanggil itu ialah : Teuku Nyak Arief, Teuku Panglima Polem Mohd. Ali, Teungku Mohd. Daud Bereueh, Said Abubakar dan Teuku Ahmad Danu.[12] Dalam pertemuan itu S Iino secara resmi menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi daerah Aceh dan posisi Jepang pada waktu itu, tetapi tidak sedikitpun menyinggung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia; ia hanya menegaskan bahwa perang telah selesai dan kepada para pemimpin rakyat dianjurkan untuk bersama-sama dengan pemerintah Jepang menjaga keamanan di daerah Aceh. Selain itu pada tanggal 24 Agustus 1945 *Bunsyutyo Aceh Timur,* Obara, juga telah menyampaikan hal yang serupa kepada para *guntyo, Sontyo* dan *kutyo* yang ada dalam wilayahnya. Ditambahkan lagi olehnya kata-kata: "Apa boleh buat perang sudah damai, Jadi Indonesia tidak dapat merdeka lagi"[13] (yang dimaksudkan tentu kemerdekaan sebagai "hadiah" Jepang, sebab Kemerdekaan yang diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri telah terjadi tujuh hari sebelumnya; dan ini tidak diberitahukan kepada yang hadir pada waktu itu).

Pembicaraan antara pemimpin rakyat dengan *Tyokan* S. Iino tanggal 23 Agustus itu tidak diketahui oleh rakyat umum, berhubung pertemuan diadakan tertutup dan yang hadir juga terbatas. Karena itu mengingat pentingnya, diminta agar *Tjokan* mengumumkan secara resmi mengenai apa yang telah disampaikannya dalam pertemuan tersebut kepada segenap lapisan masyarakat. Untuk maksud inilah pada tanggal 25 Agustus 1945 *Tjokan* S. Iino mengeluarkan sebuah maklumat yang ditujukan kepada seluruh rakyat Aceh. Pada hari itu juga, setelah semua pegawai *gunseibu,* baik bangsa Jepang maupun bangsa Indonesia, hadir di karesidenan. Tyokan memberikan penjelasan tentang terjadinya perdamaian antara Dai Nippon dengan Sekutu. Penjelasan itu diberikan berdasarkan maklumat *Soematera Saikosikikan Kakka,* yang menyatakan bahwa peperangan Asia Timur Raya telah berakhir dan Kemaharajaan *Dai Nippon* telah bersedia melangsungkan perdamaian dengan Amerika, Inggeris, Rusia dan China. Selanjutnya *Tyokan* S Iino juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan rakyat Aceh serta kerja sama yang baik dengan

---

[12] *Ibid.*, hal. 23.

[13] Abdullah Hussain, *Peristiwa,* (II) Pustaka Antara, (Kuala Lumpur : 1965), hal. 5.

Dai Nippon selama ini[14].

Maklumat resmi yang dikeluarkan oleh *Atjeh Syu Tyokan* itu dalam waktu yang relatif singkat telah tersebar luas ke seluruh pelosok daerah Aceh. Harian *Atjeh Sinbun* yang terbit sebagai edisi terakhir pada hari keluarnya maklumat tersebut juga memuatnya, karena dianggap isinya penting untuk diketahui secepat mungkin oleh rakyat umum dan tentu juga sebagai kenang-kenangan terakhir pada penutup usianya itu[15]. Demikian pula halnya dengan para pemuda yang telah memperoleh maklumat tersebut; secara cepat diperbanyak dan ditempelkannya di setiap sudut kota, bahkan secara maraton dikirimkan ke luar Kutaraja, sehingga dalam waktu beberapa hari saja sebagian besar rakyat telah mengetahui keadaan yang sesungguhnya.[16]

Mengenai berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945 juga terlambat beberapa hari diterima di Aceh. Agaknya hal ini juga menjadi salah satu faktor sehingga setelah diketahui Jepang telah menyerah kalah, timbul keragu-raguan pada sebagian masyarakat Aceh terutama di wilayah-wilayah *afdeeling*, siapa sebenarnya, setelah Jepang, yang akan mendarat lagi ke Aceh, Amerika, Inggeris, Australia, China atau Belanda; bahkan orang China telah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tentara Tjiang Kai Sek pada waktu itu.[17] Tetapi keadaan segera berubah setelah berita Proklamasi Kemerdekaan diterima dengan pasti. Para pemuda segera bekerja keras mengorganisasi dirinya ke dalam barisan-barisan pemuda.

Sebelum berita Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Aceh umumnya rakyat di sana hanya mengetahui, bahwa dari Pulau Sumatera ada wakil yang ditunjuk untuk mewakili Sumatera sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

---

[14] Ismail Jacob, *op. cit.*, hal. 23–4.

[15] Ismuha, "Pengetahuan Saja Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945", Warta P dan K, no. 7 tahun 1971, Perw. Dep. P dan K propinsi Daerah Istimewa Aceh, hal. 5 - 6.

[16] *Ibid.*, Ismail Jacob., *loc. cit.*

[17] Abdullah Hussain, *op. cit, (II)*, hal. 14; Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *Modal Revolusi 45*, 1960, hal. 54; lihat juga bahan *Seminar Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia Daerah Tk. II Aceh Tengah*, (Takengon : 24 - 25 Pebruari 1965); Kolonel Haji Syahadat, *Perjuangan Rakyat Aceh Tenggara, sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan R.I. Mendatang Penjajahan*, Prasaran, 1976, hal. 124.

Mereka ini terdiri dari Mr. Teuku Mohd. Hasan, Dr. Amir dan Mr. Abbas, yang pada tanggal 7 Agustus 1945 berangkat ke Jakarta melalui Singapura untuk menantikan kembalinya Bung Karno dari Saigon. Dari Singapura tanggal 14 Agustus mereka bersama Bung Karno menuju ke Jakarta.[18] Mengenai kegiatan ke tiga wakil dari Sumatera itu sejak keberangkatannya tanggal 7 Agustus tidak diketahui dengan pasti, oleh karena komunikasi antara daerah Aceh dengan Jakarta, tidak lancar lagi, terutama sejak menjelang dan setelah kapitulasi Jepang.

Mr. Teuku Mohd. Hasan bersama dengan ke dua rekannya itu baru kembali ke Sumatera melalui Palembang pada tanggal 24 Agustus 1945. Di Palembang Mr. Mohd. Hasan, yang telah diangkat menjadi Wakil Pemimpin Besar untuk Sumatera sejak tanggal 22 Agustus, meminta Dr. AK Gani untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Sumatera Selatan dan mengharapkan agar dapat menyiarkan berita Proklamasi Kemerdekaan ke daerah-daerah lain menurut cara yang mungkin dapat ditempuhnya. Dari Palembang ke tiga tokoh Aceh ini meneruskan perjalanan menuju ke Medan dengan singgah di beberapa kota, seperti Jambi, Bukit Tinggi, Tarutung dan baru sampai di sana pada tanggal 29 Agustus 1945. Di kota-kota yang disinggahi itu Mr. T. Mohd. Hasan juga menganjurkan Pembentukan KNI daerah setempat serta menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan. Di Bukit Tinggi anjuran itu disampaikan tanggal 26 Agustus melalui Adinegoro dan Muhammad Syafii, selaku ketua dewan Perwakilan Rakyat Sumatera *(Soematera Tyuo Sangi In)*[19].

Setelah tiba di Medan, Mr. Teuku Mohd. Hasan sebagai wakil Pemerintah Pusat RI untuk Sumatera juga segera melaksanakan tugasnya seperti yang telah dilakukan sebelumnya di daerah-daerah lain di Sumatera, yaitu menyampaikan berita Proklamasi dan anjuran pembentukan KNI daerah di Sumatera bagian Utara, termasuk daerah Aceh. Namun sebelum datangnya berita ini, secara tidak resmi sebenarnya berita Proklamasi Kemerdekaan juga telah lebih dahulu di terima di daerah Aceh; hanya pada waktu itu belum meluas diketahui oleh seluruh rakyat di sana, tetapi terbatas pada beberapa orang pemuka masyarakat saja. Menurut Hoesin Yoesoef (bekas Panglima Divisi X TNI Sumatera) berita yang per-

---

[18] Teuku Mohd. Hasan, wawancara, tanggal 20 Juni 1979.

[19] *Ibid.*,

Dai Nippon selama ini[14].

Maklumat resmi yang dikeluarkan oleh *Atjeh Syu Tyokan* itu dalam waktu yang relatif singkat telah tersebar luas ke seluruh pelosok daerah Aceh. Harian *Atjeh Sinbun* yang terbit sebagai edisi terakhir pada hari keluarnya maklumat tersebut juga memuatnya, karena dianggap isinya penting untuk diketahui secepat mungkin oleh rakyat umum dan tentu juga sebagai kenang-kenangan terakhir pada penutup usianya itu[15]. Demikian pula halnya dengan para pemuda yang telah memperoleh maklumat tersebut; secara cepat diperbanyak dan ditempelkannya di setiap sudut kota, bahkan secara maraton dikirimkan ke luar Kutaraja, sehingga dalam waktu beberapa hari saja sebagian besar rakyat telah mengetahui keadaan yang sesungguhnya.[16]

Mengenai berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945 juga terlambat beberapa hari diterima di Aceh. Agaknya hal ini juga menjadi salah satu faktor sehingga setelah diketahui Jepang telah menyerah kalah, timbul keragu-raguan pada sebagian masyarakat Aceh terutama di wilayah-wilayah *afdeeling*, siapa sebenarnya, setelah Jepang, yang akan mendarat lagi ke Aceh, Amerika, Inggeris, Australia, China atau Belanda; bahkan orang China telah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tentara Tjiang Kai Sek pada waktu itu.[17] Tetapi keadaan segera berubah setelah berita Proklamasi Kemerdekaan diterima dengan pasti. Para pemuda segera bekerja keras mengorganisasi dirinya ke dalam barisan-barisan pemuda.

Sebelum berita Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Aceh umumnya rakyat di sana hanya mengetahui, bahwa dari Pulau Sumatera ada wakil yang ditunjuk untuk mewakili Sumatera sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

---

[14] Ismail Jacob, *op. cit.*, hal. 23–4.

[15] Ismuha, "Pengetahuan Saja Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945", Warta P dan K, no. 7 tahun 1971, Perw. Dep. P dan K propinsi Daerah Istimewa Aceh, hal. 5 - 6.

[16] *Ibid.*, Ismail Jacob., *loc. cit.*

[17] Abdullah Hussain, *op. cit, (II)*, hal. 14; Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *Modal Revolusi 45*, 1960, hal. 54; lihat juga bahan *Seminar Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia Daerah Tk. II Aceh Tengah*, (Takengon : 24 - 25 Pebruari 1965); Kolonel Haji Syahadat, *Perjuangan Rakyat Aceh Tenggara, sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan R.I. Mendatang Penjajahan*, Prasaran, 1976, hal. 124.

Mereka ini terdiri dari Mr. Teuku Mohd. Hasan, Dr. Amir dan Mr. Abbas, yang pada tanggal 7 Agustus 1945 berangkat ke Jakarta melalui Singapura untuk menantikan kembalinya Bung Karno dari Saigon. Dari Singapura tanggal 14 Agustus mereka bersama Bung Karno menuju ke Jakarta.[18] Mengenai kegiatan ke tiga wakil dari Sumatera itu sejak keberangkatannya tanggal 7 Agustus tidak diketahui dengan pasti, oleh karena komunikasi antara daerah Aceh dengan Jakarta, tidak lancar lagi, terutama sejak menjelang dan setelah kapitulasi Jepang.

Mr. Teuku Mohd. Hasan bersama dengan ke dua rekannya itu baru kembali ke Sumatera melalui Palembang pada tanggal 24 Agustus 1945. Di Palembang Mr. Mohd. Hasan, yang telah diangkat menjadi Wakil Pemimpin Besar untuk Sumatera sejak tanggal 22 Agustus, meminta Dr. AK Gani untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Sumatera Selatan dan mengharapkan agar dapat menyiarkan berita Proklamasi Kemerdekaan ke daerah-daerah lain menurut cara yang mungkin dapat ditempuhnya. Dari Palembang ke tiga tokoh Aceh ini meneruskan perjalanan menuju ke Medan dengan singgah di beberapa kota, seperti Jambi, Bukit Tinggi, Tarutung dan baru sampai di sana pada tanggal 29 Agustus 1945. Di kota-kota yang disinggahi itu Mr. T. Mohd. Hasan juga menganjurkan Pembentukan KNI daerah setempat serta menyebarluaskan berita Proklamasi Kemerdekaan. Di Bukit Tinggi anjuran itu disampaikan tanggal 26 Agustus melalui Adinegoro dan Muhammad Syafii, selaku ketua dewan Perwakilan Rakyat Sumatera *(Soematera Tyuo Sangi In)*[19].

Setelah tiba di Medan, Mr. Teuku Mohd. Hasan sebagai wakil Pemerintah Pusat RI untuk Sumatera juga segera melaksanakan tugasnya seperti yang telah dilakukan sebelumnya di daerah-daerah lain di Sumatera, yaitu menyampaikan berita Proklamasi dan anjuran pembentukan KNI daerah di Sumatera bagian Utara, termasuk daerah Aceh. Namun sebelum datangnya berita ini, secara tidak resmi sebenarnya berita Proklamasi Kemerdekaan juga telah lebih dahulu di terima di daerah Aceh; hanya pada waktu itu belum meluas diketahui oleh seluruh rakyat di sana, tetapi terbatas pada beberapa orang pemuka masyarakat saja. Menurut Hoesin Yoesoef (bekas Panglima Divisi X TNI Sumatera) berita yang per-

---

[18] Teuku Mohd. Hasan, wawancara, tanggal 20 Juni 1979.

[19] *Ibid.*,

tama diketahui tentang Proklamasi Kemerdekaan adalah di Bireuen pada tanggal 19 Agustus 1945. Berita itu diketahui oleh Hoesin Yoesoef, yang pada waktu itu bekerja pada staf intelijen resimen *Fojoka* dengan pangkat letnan *Gyugun*, melalui radio Jepang yang ditempatkan di sana. Kemudian berita tersebut segera disampaikan kepada perwira-perwira *Gyugun* lainnya, seperti kepada Agus Husen dan lain-lain, serta kepada pemuka-pemuka masyarakat di sekitar kota Bireuen[20].

Di Kutaraja berita tentang Proklamasi Kemerdekaan baru diketahui pada tanggal 21 Agustus 1945, yaitu melalui para pemuda (Ghazaly Yunus dan kawan-kawan) yang bekerja pada Kantor Berita Jepang, Domei. Mereka secara rahasia berhasil mendengar radio yang ditempatkan di sana dan setelah itu segera memberitahukannya kepada teman-teman akrab mereka, sehingga pada hari itu juga para pemuda Indonesia yang bekerja pada *Hodoka* (Kantor Penerangan Jepang) dan harian *Atjeh Sinbun* di Kutaraja telah mengetahui berita gembira itu[21] - Selanjutnya, beberapa hari kemudian Teuku Nyak Arief juga menerima kawat pemberitahuan tentang proklamasi Kemerdekaan dari Dr. AK Gani di Palembang, serta Muhammad Syafei dan Adinegoro di Bukit Tinggi yang secara resmi melalui Mr. Teuku Mohd Hasan yang telah mengetahui berita tersebut, seperti disebutkan di atas, masing-masing tanggal 24 dan 26 Agustus yang lalu.[22] Setelah itu, sampailah berita resmi dari wakil Pemerintah Pusat yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera, Mr. Teuku Mohd. Hasan. Pada akhir Agustus dan permulaan September 1945 berita Proklamasi Kemerdekaan dengan cepat mulai tersebar ke seluruh pelosok daerah Aceh, sejak dari pesisir Utara, Timur, Barat dan Selatan sampai ke daerah Aceh Tengah dan Tenggara[23].

---

[20] Hoesin Yoesoef, "Sejarah Perjuangan Pemuda di Daerah Aceh", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan*, no. 7 tahun 1971, hal. 30; Seksi Penerangan/Dokumentasi Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 41 – 2.

[21] Seksi Penerangan/Dokumentasi Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 54; A. Hasym dan T. Alibasyah, *op. cit.*, hal. 11; Jarahdam I/Iskandar Muda, *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda*, 1972, hal. 79; Aboe Bakar Bsf, op. cit., hal. 390.

[22] Ismuha, *op. cit.*, hal. 7; Ismail Yacob, *op. cit.*, hal. 26

[23] Mengenai tersiarnya berita Proklamasi ke daerah-daerah tersebut, lihat. Seksi Penerangan Angkatan 45, *op. cit.* Abdullah Hussain, *op. cit.*, *(II)*, Kolonel Haji Syahadat, *op. cit.*, hal. 123 dst; Panitia seminar Perjuangan Pemuda Aceh Tengah, *op. cit.*, hal. 9 dst.

Seiring dengan diterimanya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu di tiap tempat dilakukan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan di depan kantor-kantor resmi pemerintah Jepang selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari tentara Jepang[24] Sang Merah Putih juga dikibarkan di tempat-tempat umum, seperti tanah lapang, toko-toko dan lain-lain yang juga selalu dihalang-halangi oleh pihak penguasa Jepang yang masih berkuasa atas nama Sekutu pada waktu itu.

Pengibaran bendera Sang Merah Putih pada tanggal 24 Agustus 1945 di depan kantor *Keimubu* (kantor polisi Jepang, sekarang kantor *Baperis*. telah menimbulkan insiden dengan serdadu Jepang yang sedang mengawal *Tyokan* tidak jauh dari kantor itu (pendopo gubernur sekarang). Insiden ini terjadi sewaktu Muhammad Hasyim, Wakil Kepala Polisi yang diangkat Jepang, sedang memimpin penaikan bendera Merah Putih di sana. Pada waktu itu Muhammad Hasyim ditegur dan dihalang-halangi; bahkan kemudian bendera yang telah dikibarkan itu diturunkan pihak Jepang. Perbuatan serdadu Jepang itu tidak dapat diterima, dan pada saat itu pula seorang peserta, yaitu Muhammad Amin Bugis, dengan bersemangat merampas kembali bendera Merah Putih dari serdadu Jepang itu, lalu menaiki tiang bendera untuk memasangnya kembali. Tindakan yang berani dengan penuh semangat ini tidak berhasil dihalangi oleh pihak Jepang, mereka membiarkan saja bendera Merah Putih berkibar di depan Kantor *Keimubu* itu[25]. Dewasa ini di tempat tersebut telah dibangun sebuan tugu untuk memperingati peristiwa penaikan bendera Merah Putih yang heroik itu.

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1945, Pemuda A. Hasjmy beserta rekan-rekannya juga menaikan bendera Merah Putih di depan Kantor *Aceh Sinbun*. Di sini juga mendapat tantangan dari pihak pembesar Jepang, antara lain dari H Nagamatsu, seorang pejabat teras pada *Hodoka* (kantor Penerangan Jepang), namun usaha mereka menemui kegagalan[26]. Setelah itu kegiatan penaikan bendera Merah Putih semakin bersemangat dilakukan di tempat-tempat lain di Kutaraja dan sekitarnya. Pada bulan September

---

[24] Jarahdam I. *op. cit.*, hal. 80; Ismuha, op. cit., hal. 8.

[25] Jarahdam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 79.

[26] T.A. Yalsya, "Perjuangan Kemerdekaan di Aceh", *Santunan*, no : 18 - thn. III, April 1978, hal. 10; A. Hasjmy dan T. Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 8.13.

sampai awal Oktober 1945 pengibaran bendera Merah Putih telah berlangsung di kota-kota lain di seluruh Aceh, seperti: Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Lhok Sukon, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Kutacane, Takengon, Meulaboh, Tapak Tuan dan lain-lain[27].

Untuk lebih meratakan pengibaran bendera Merah Putih sampai ke pelosok-pelosok desa dan untuk memperingati dua bulan Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 13 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh, melalui maklumat no. 2 secara resmi memerintahkan pengibaran bendera Merah Putih sampai tanggal 17 Oktober pada tiap-tiap rumah di seluruh daerah Aceh. Adapun isi maklumat tersebut selengkapnya[28], ialah :

MAKLOEMAT NO. 2

Dipermakloemkan kepada segenap pendoedoek Bangsa Indonesia di daerah Aceh, soepaja dimoeka tiap-tiap roemah dikibarkan Bendera kebangsaan Indonesia, dengan ketentoean:

a. dikibarkan moelai ini hari sampai tanggal 17 Oktober 1945.
b. Bendera dikibarkan moelai jam 7 pagi sampai djam 6 sore (Soematera).
c. Djikalau waktoe hoedjan, bendera tidak oesah dikibarkan.

Koetaradja, 13 Oktober 1945

Ketoea Poesat
Komite Nasional
Toeankoe Mahmoed.

Mengenai pembentukan KNI daerah Aceh, yang sampai saat itu telah mengeluarkan tiga buah maklumat (yang pertama, tanggal 4 Oktober tidak bernomor mengenai pemerintahan RI di Sumatera dan Aceh; ke dua tanggal 10 Oktober maklumat no. 1 mengenai uang kertas Jepang masih berlaku dan uang kertas Belanda cetakan biru tidak berlaku di daerah Aceh[29]), sebenarnya telah dirintis sebelum bulan Oktober. Pada tanggal 28 Agustus 1945 Teuku Nyak Arief, setelah menerima kawat dari Dr. AK Gani dan

[27] Mengenai kegiatan penaikan bendera di kota-kota tersebut, lihat a.l., Seksi Penerangan Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.,;* Abdullah Hussain, *op. cit. (II),* hal. 52 dst.,; Kolonel Haji Syahadat, *op. cit.*, hal. 123 dan seterusnya.

[28] Foto asli maklumat itu, lihat. Seksi Penerangan/Dokumentasi Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 66.

[29] *Ibid.*, hal. 40; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 392.

Muhammad Syafei, telah mengambil inisiatip untuk itu. Sebagai ketua pertama terpilih Teuku Nyak Arief yang selama ini juga memangku jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh bentukan Jepang *(Atjeh Syu Sangi Kai)* dan sebagai wakil ketua terpilih Tuanku Mahmud. Tetapi pada waktu itu susunan anggotanya belum sempurna; baru setelah secara resmi pemerintahan RI di daerah Aceh terbentuk (Keresidenan Aceh sejak tanggal 3 Oktober 1945), Susunan anggotanya disempurnakan, yakni sejumlah 65 orang (lihat lampiran) yang ditunjuk (belum mungkin diadakan pemilihan) berdasarkan pencalonan dari partai-partai. Selanjutnya jabatan ketua, sejak tanggal 10 Oktober 1945, seperti terlihat dari maklumat yang dikeluarkan, digantikan oleh Tuanku Mahmud, sedang Teuku Nyak Arief tetap memangku jabatan Residen Aceh, yang telah dijabatnya sejak 3 Oktober 1945. Adapun kantor KNI Daerah Aceh yang pertama adalah bekas *Centraalkantoor de landschapskassen* di Kutaraja (Jalan Merdeka sekarang) dan kemudian berpindah ke sebuah gedung bekas milik seorang pengusaha Belanda, bernama *Kerlen* (sekarang menjadi Kantor Polisi Resort Kotamadya Banda Aceh/Kabupaten Aceh Besar di Jalan Nasional)[30].

Selain itu dapat juga ditambahkan, bahwa sejak berita Proklamasi Kemerdekaan diterima di daerah Aceh, Teuku Nyak Arief selalu mengibarkan bendera Merah Putih Kecil pada mobilnya[31]. Hal ini juga telah menyebabkan rakyat semakin berani bertindak untuk mengibarkan bendera, baik di tempat-tempat umum, maupun di depan rumahnya sendiri. Dan beriringan dengan kegiatan pengibaran bendera Sang Merah Putih di Seluruh Daerah Aceh berlangsung pula tindakan pengambilalihan kekuasaan dan perebutan senjata dari pihak Jepang serta pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di sana. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam bagian berikut di bawah ini.

B. Pembantukan Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Aceh

Meskipun berita Proklamasi Kemerdekaan telah tersebar luas di daerah Aceh sejak akhir Agustus dan permulaan September 1945, namun pemerintahan Republik Indonesia yang definitif

[30] Mardanas Safwan, *Teuku Nyak Arief*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional Departemen P dan K, (Jakarta : 1975), hal. 11,88; S.M. Amin, op. cit. hal. 35; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 568.

baru terbentuk dan digerakkan di sana sejak tanggal 3 Oktober 1945, yaitu setelah keluarnya pengumuman resmi Gubernur Sumatera yang menyatakan: "Pemerintahan Negara Republik Indonesia moelai dengan resmi dijalankan di poeloe Soematera, dengan pengangkatan residen-residen seluruh Soematera dan Staf Goebernoer dengan mempergoenakan kekoeasaan yang diberikan oleh Presiden Negara Republik Indonesia"[32] - Tetapi ini tidak berarti pada waktu sebelumnya para pemimpin di Aceh tidak berusaha ke arah itu, sehingga pengumuman tersebut lebih merupakan pengesahan dari pihak atasan kepada aparat pemerintah daerah Keresidenan Aceh yang telah disusun sebelumnya dan telah menyatakan sumpah setia kepada Negara Republik Indonesia, kendatipun adanya hambatan-hambatan dari pemerintahan pendudukan Jepang yang masih berkuasa atas nama Sekutu pada waktu itu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada bulan September 1945 Teuku Nyak Arief dalam kedudukannya selaku *Atjeh-syu Sangi kai tyo"* (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang secara tidak resmi juga telah menjadi Ketua Komite Nasional Daerah Aceh), telah membuat surat perintah kepada Teuku Panglima Polem Mohd. Ali (Panglima Sagi XXII Mukim Aceh Besar) untuk menemui *Atjeh Syu Seityo "Somubu-tyo"* (Kepala Urusan Pemerintahan umum pada kantor Keresidenan Aceh). Dalam surat itu Teuku Nyak Arief meminta agar *Somubu-tyo* menghadap *Atjeh Syu Tyokan* (Residen Aceh) S. Iino untuk membicarakan penyerahan pemerintahan dari Jepang kepada Teuku Panglima Polem. Ditegaskan juga, melalui Teuku Panglima Polem, bahwa sejak waktu itu Teuku Nyak Arief tidak bersedia lagi mengadakan hubungan dengan Jepang. Pembicaraan pada hari itu tidak memperoleh hasil yang positip; alasannya ialah *Tyokan* (Residen) tidak dapat bertindak lebih jauh selain dari yang telah ditentukan oleh Sekutu. Namun, tampaknya sikap Tyokan S Iino tidak keras lagi seperti pada waktu yang lalu. Hal ini tampak juga dari kedatangan *Somubu-Tyo* ke rumah Teuku Panglima Polem pada sore harinya dengan membawa uang sebanyak Rp. 100.000,– (seratus ribu rupiah Jepang) yang katanya berasal dari pemberian *Tyokan* untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Uang itu kemudian oleh Teuku Panglima Polem diserahkan kepada Teuku Nyak Arief yang

---

[32] Panitia Penerbitan Boekoe Peringatan, *Satoe Tahoen N.R.I. di Soematera* (17-8-1945 – 17-8-1946), diterbitkan oleh Pemerintah Poesat Soematera.

dipergunakan sebagai modal pertama untuk mengerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh[33].

Karena sikap *Tyokan S Iino* yang demikian menyebabkan para pemimpin di Aceh menentukan sikapnya sendiri. Mereka segera bertindak untuk menyusun aparat pemerintahan Keresidenan Aceh. Dan dalam bulan September 1945 itu juga semua pegawai bangsa Indonesia, yang selama ini bekerja pada Kantor pemerintahan Jepang di ibukota Kutaraja, disumpah oleh Teungku Ismail Ja'kub menjadi pegawai pemerintah Republik Indonesia[34]. Kegiatan pengambilalihan pemerintahan dari tangan Jepang secara bertahap terus dilaksanakan; tampaknya tentara Jepang tidak mampu mengatasinya, walaupun *Tyokan S Iino* sejak tanggal 25 Agustus 1945 telah mengeluarkan Maklumat yang mengancam: "Barang siapa yang merusakkan keamanan atau menganggoe kesentosaan negeri akan dikenakan hoekuman berat"[35]. Hal ini tentu erat hubungannya dengan semangat rakyat yang meluap-luap, terutama dalam rangka kegiatan mereka merebut senjata dari tentara Jepang, di samping sikap keras dan diplomatis para pemimpin Aceh dalam menghadapi pejabat teras pemerintahan Jepang di sana, sehingga membuat mereka yang pada waktu itu memang tidak bersemangat lagi, menjadi lemah dan tidak berdaya.

Langkah selanjutnya yang perlu mendapat perhatian segera adalah mengenai kepala pemerintahan di daerah-daerah seluruh Aceh. Untuk ini para pegawai Indonesia, yang selama ini ditetapkan oleh Jepang sebagai *Fuku Bunsyu-tyo* (Wakil Asisten Residen; Asisten-Residen adalah orang Jepang sendiri) sementara ditunjuk untuk menjabat Asisten Residen di daerahnya. Sedang *Guntyo (Contreleur* atau Kepala Wilayah) dan Suntyo yang mengepalai daerah Ulleebalang sebagaimana biasa tetap mengepalai pemerintahan di daerah mereka masing-masing-masing. Mengenai nama daerah-daerah tersebut pada mulanya dikembalikan seperti nama

---

[33] Wawancara Aboe Bakar Bsf. dengan almarhum Teuku Panglima Poleh Mohd. Ali tanggal 17 Nopember 1971, yang seluruhnya dimuat kembali oleh pewawancara sebagai halaman tambahan dari buku yang diterjemahkannya: H.C. Zent-graff *Atjeh, terjemahan* belum diterbitkan, hal. 409 – 10; juga dimuat dalam *memoires TMA Panglima Polem*, terjemahan J.H.J. Brendgen, 1972, hl. 13.

[34] *Ibid.*, hal. 410.

[35] Foto asli makloemat tersebut, lihat, seksi penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *opcit.*, hal. 83;

sebelum masa pendudukan Jepang, yaitu: daerah-daerah yang dikepalai oleh Asisten-Residen disebut *Afdeeling* (kemudian, tahun 1946, menjadi Kabupaten dikepalai oleh Bupati) dan daerah-daerah yang dikepalai oleh *Controleur* atau Kepala Wilayah disebut *Onderafdeeling (tahun* 1946 menjadi wilayah dan kemudian Kewedanaan) sedang daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang uleebalang (Teuku Chik, Keujreun, Raje dan sebagainya), namanya tidak dikembalikan menjadi daerah *Zelfbestuur* atau uleebalangschap seperti pada masa pemerintahan kolonial Belanda, melainkan tetap disebut daerah Uleebalang (setelah terjadi revolusi sosial, pada awal tahun 1946 daerah ini disebut *Negeri* dengan dikepalai oleh 5 orang Dewan Pemerintahan Negeri).

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas menjadi jelas, bahwa sekalipun ada tekanan dan hambatan dari tentara dan pemerintah Jepang yang pada waktu itu masih berkuasa atas nama Sekutu, secara tidak resmi unsur-unsur pemerintahan negara Republik Indonesia di daerah Aceh telah mulai bekerja sebelum keluarnya pengumuman dan penetapan resmi Gubernur Propinsi Sumatera (salah satu propinsi, yang membawahi beberapa keresidenan, termasuk keresidenan Aceh di Sumatera, dari 8 propinsi Negara Republik Indonesia sesuai dengan keputusan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945).

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Ir. Sukarno atas nama pemimpin Besar Bangsa Indonesia pada waktu itu mengangkat Mr. Teuku Muhammad Hasan, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari Sumatera, sebagai wakilnya di Sumatera; dan "mewajibkan beliau serta memberikannya kuasa untuk menyelenggarakan segala keputusan yang diambil dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan dan untuk mewudjutkan cita-cita yang lain, yang telah dilahirkan dalam sidang tersebut"[36]. Kemudian, untuk lebih mempertegas pengangkatan ini, pada tanggal 29 September 1945, Presiden Negara Republik Indonesia, Ir. Sukarno, menetapkan Mr. Teuku Muhammad Hasan menjadi Gubernur Propinsi Sumatera dan Wakil Pemerintah Pusat di sana. Berdasarkan wewenang yang diberikan itu, maka pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur Su-

[36]Kutipan dari surat Pengangkatan resmi yang ditandatangani oleh Pemimpin Besar Bangsa Indonesia Ir. Sukarno; *Dokumen*, Mr. Teuku Muhammad Hasan, sekarang bertempat tinggal di Jakarta. Dalam surat Pengangkatan ini, selain Mr T.M. Hasan, juga diangkat wakil untuk Borneo, Selebes Sunda ketjil dan Maloekoe masing-masing Ir. Pangeran Mohd. Noor, Dr. G.S S J. Ratu Langie, Mr. I Goesti Ketoer Poedja dan Mr. J. Latuharhari.

matera mengeluarkan pengumuman seperti yang telah disebutkan di muka yang kemudian disusul dengan ketetapan-ketetapan mengenai pengangkatan Residen di seluruh Sumatera. Susunan staf pemerintahan Sumatera dan Jawatan-jawatan beserta dengan Kepala Jawatan masing-masing, baik pada tingkat propinsi maupun tingkat keresidenan. Sebagai Wakil pemerintah pusat negara Republik Indonesia, Gubernur Sumatera juga menetapkan sejumlah peraturan yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah Pusat, seperti : Peraturan tentang pembentukan Dewan Perwakilan Sumatera (tanggal 12 April 1946), no. 8/M.G.S), Peraturan Gaji Pegawai Negeri di Sumatera (PGS. 1946), tanggal 22 Juli 1946, no. 128 a), Peraturan tentang pengeluaran uang/tanda pembayaran resmi di Sumatera (tanggal 8 April 1947, no. 92/K.O) dan masih banyak lagi.[37] Dengan ketetapan-ketetapan ini, maka administrasi pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mulai dijalankan di Sumatera, termasuk juga di daerah Aceh.

Sejak tanggal 3 Oktober 1945, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera No. 1/X, Teuku Nyak Arief yang selama ini seperti telah disebutkan di muka selaku Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh telah banyak berperanan dalam menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia di sana, diangkat menjadi residen Aceh.[38] Setelah itu disusul pula dengan sejumlah ketetapan lain, seperti Ketetapan Gubernur tanggal 28 Desember 1945, No. 71., tanggal 23 Pebruari 1946, No. 48, tanggal 11 Agustus 1946, No. 204 dan lain-lain, yang berhubungan dengan pembagian wilayah administrasi keresidenan Aceh, penunjukan kepala-kepala jawatan, asisten-residen dan kepala-kepala wilayah *(controleur)* di seluruh daerah Aceh (untuk daerah-daerah uleebalang kepala pemerintahan dipegang secara turun temurun dan segera beralih setelah terjadi revolusi sosial, di mana status daerah-daerah tersebut menjadi Negari yang dalam proses selanjutnya menjadi kecamatan). Pada dasarnya ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan itu adalah merupakan pengesahan terhadap kebijaksanaan yang telah ditempuh sebelumnya oleh para pemimpin daerah Aceh pada

---

[32] Penjelasam tentang kedudukan Mr. T.M. Hasan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Sumatera *Dokumen* milik Mr. T.M. Hasan.

[38] Isi lengkap Ketetapan Gubernur tanggal 3 Oktober 1945, no. 1/X, lihat Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional Teuku Nyak arief*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional Dept. P. dan K (Jakarta :, 1975), 154 (lampiran III).

umumnya dan Teuku Nyak Arief khususnya. Mengenai para pejabat yang diangkat itu pada umumnya terdiri dari pejabat-pejabat, seperti yang telah disinggung di muka, yang telah pernah ditetapkan oleh pemerintah Jepang sebelumnya *(Fuku Bunsyutyo, Guntyo dan* sebagainya); dan sebagian besar dari mereka adalah terdiri dari para uleebalang yang memang mempunyai keahlian untuk itu, berhubung dengan tingkat pendidikan mereka yang pernah diperoleh pada masa pemerintahan kolonial Belanda dulu. Hal ini akan banyak mengalami pergeseran nanti pada tahun 1946, setelah terjadinya revolusi sosial (mengenai nama-nama pejabat pemerintahan sampai tahun 1948, pembagian wilayah administrasi Keresidenan Aceh, lihat *lampiran* dan bandingkan nama-nama pejabat tersebut sebelum dan sesudah terjadi revolusi sosial).

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Residen T., Nyak Arief dibantu oleh Wakil Residen T.M. Ali Panglima Polem dan Badan Eksekutif, Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh yang diketuai Tuanku Mahmud (Wakil Ketua, kemudian Ketua KNI Daerah Aceh) dengan didampingi oleh anggota staf harian KNI yang terdiri dari M. Hoesin, Teuku Hanafiah, SM Geudong, Hasan Basri dan M. Mochtar.[39] Demikian juga di *afdeeling-afdeeling* (Kabupaten), asisten-residen menjalankan pemerintahan di sana bersama-sama dengan Komite Nasional setempat. Mengenai pembentukan Cabang Komite Nasional di sini, juga tidak luput dari hambatan-hambatan tentara Jepang, sehingga ada daerah-daerah yang baru pada awal tahun 1946 berhasil membentuknya, seperti daerah Aceh Tengah umpamanya secara definitif pembentukannya baru dapat dilakukan pada tanggal 19 Pebruari 1946, yang dilantik oleh Residen Teuku Muhammad Daudsyah (Residen Aceh yang ke dua) dengan susunan pengurusnya terdiri dari Ketua I dan II : Saleh Yafas dan Muda Sedang, sekretaris: Muchtar SK dan beberapa orang anggota.[40]

Untuk dapat diketahui secara lebih luas mengenai pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera umumnya dan di daerah Aceh khususnya serta mengenai situasi negara pada waktu itu, setelah satu hari pengangkatannya, Residen Teuku Nyak Arief selaku Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh

---

[39] Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 411.

40Panitia, *Seminar Sejarah Perjuangan Pemuda Daerah Tingkat II Aceh Tengah*, (Takengon : 24 – 25 Pebruari 1965), hal. 12.

pada tanggal 4 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada seluruh rakyat di daerah Aceh. Mengingat pentingnya maklumat tersebut, sebagai maklumat pertama (bukan Makloemat No. 1) yang secara resmi dikeluarkan oleh KNI Daerah Aceh, baiklah isi seluruhnya dikutip di sini.

Makloemat.[41]

1. Siaran pihak Belanda, bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Hatta di tangkap bohong semata-mata.
2. Repoeblik Indonesia de fecto diakoei, de jure beloem.
3. Van der Plas dan Van Mook ingin mengadakan moesjawarat dengan Soekarno – Hatta.
4. Belanda tidak dibolehkan oleh Sekoetoe mendatangkan lasjkarnja sebab moengkin terjadi peperangan antara Indonesia dan Belanda.
5. Goebernoer Soematera Mr. T.M. Hasan.
6. Residen Daerah Atjeh Teukoe Njak Arief.
7. Pemerintah Repoeblik Indonesia bekerdja sama antara tentara Inggeris dan India sebagai wakil Sekoetoe oentoek mendjaga keamanan.
8. Amerika, Inggeris, Sovjet dan Tjoengking sekarang sedang membentoek Madjelis Tinggi oentoek uroesan Asia Timoer Raja.
9. Sjech Djamil Djambek Menjeroekan kepada kaoem moeslimin seloeroeh Soematera oentuk mentjoerahkan segala tenaga lahir dan bathin oentoek Repoeblik Indonesia.
10. Di langsa dan Tapak Toean telah berdiri barisan pemoeda.

Pengoeroes Komite Nasional Daerah Atjeh
Teukoe Nyak Arif

Dengan terbentuknya badan pemerintah Republik Indonesia di Daerah Aceh dan disusul pula dengan maklumat tersebut di atas kedudukan pemerintah Jepang di sana semakin terdesak; apalagi setelah Tuanku Mahmud secara diam-diam menyerukan kepada pegawai-pegawai bangsa Indonesia yang bekerja pada kantor-kantor pemerintah Jepang di Kutaraja agar mereka tidak melakukan tugasnya selama 3 hari dan berhasil baik[42]. Sementara itu pada mobil residen Teuku Nyak Arief selalu dikibarkan bendera Merah Putih kecil yang juga turut memberi pengaruh psikologis pada pegawai-pegawai bangsa Jepang, terutama dalam kaitan dengan usaha pegawai-pegawai bangsa Indonesia untuk menguasai kantor-kantor pemerintahan. Dan berkat sikap diplomatis Tuanku Mahmud selaku Ketua Badan Eksekutif KNI Daerah Aceh dalam meng-

[41] Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 392; asli Maklumat tersebut ada tersimpan pada penulis ini.

[42] *Ibid.*, hal. 411; penulis ini (Aboe Bakar Bsf), sebagai pegawai pada waktu itu, turut serta dalam aksi tersebut.

hadapi perundingan-perundingan dengan *Tyokan S Iino*, satu demi satu kantor-kantor pemerintahan Jepang itu berhasil dikuasai oleh pegawai-pegawai bangsa Indonesia, yang sebenarnya, setelah disumpah pada bulan September 1945, telah menjadi pegawai negara Republik Indonesia, tanpa banyak menghadapi rintangan dan bentrokan.

Bagaimanapun, pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh, yang baru dibentuk di bawah pimpinan Residen Teuku Nyak Arief dan Tuanku Mahmud selaku Ketua Badan Eksekutif KNI daerah Aceh, harus menghadapi berbagai masalah yang mendesak sesuai dengan situasi negara pada waktu itu. Adapun masalah-masalah tersebut, yang memerlukan penyelesaian secepat mungkin, dalam garis besarnya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Masalah pertahanan negara yang menghadapkan pemerintah daerah dalam waktu singkat harus mengorganisasi kekuatan bersenjata di seluruh daerah Aceh.
2. Masalah tentara pendudukan Jepang yang belum meninggalkan daerah Aceh dan kedatangan utusan sekutu, yang katanya untuk menyelesaikan masalah tersebut, di samping tujuan lain yang mereka sembunyikan (dimaksudkan di sini adalah mempelajari situasi daerah Aceh untuk membuka jalan, kalau mungkin, bagi masuknya tentara kolonial Belanda kembali ke sana).
3. Perpecahan antara sesama pemimpin Aceh yang kemudian menjurus kepada pecahnya perang saudara yang dikenal dengan nama Revolusi Sosial.

Meskipun Teuku Nyak Arief, sebagai Residen Aceh, hanya 4 bulan memimpin pemerintahan di sana, namun ketiga masalah pokok yang disebutkan di atas berhasil diselesaikannya dengan baik sekali. Pada waktu ia meletakan jabatan, pada bulan Januari 1946, dasar-dasar pemerintahan RI yang permanen telah terwujud di sana, sehingga penggantinya, Residen Teuku Muhammad Daudsyah dapat meneruskan pembinaan ke arah kesempurnaan. Bagaimana peranan Teuku Nyak Arief, dalam mendarmabaktikan tenaganya bagi kepentingan negara Republik Indonesia selama masa jabatannya yang singkat itu, akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikut di bawah ini.

C. Pembentukan Organisasi Kemiliteran dan Kelasykaran Rakyat

Sejak berita proklamasi di terima di daerah Aceh, khususnya di

Kutaraja, para pemimpin di sana telah memikirkan dan berusaha ke arah pembentukan organisasi pertahanan dan keamanan rakyat di daerah Aceh, dalam rangka mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan itu. Inisiatif ini pada mulanya datang dari beberapa bekas perwira *Gyugun* (organisasi pertahanan rakyat atau tentara sukarela yang dibentuk Jepang dan kemudian dibubarkan) di Kutaraja, antara lain: Syammaun Gaharu, Nyak Neh Rika, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid Azwar, Sahid Usman, Bachtiar Idham dan masih banyak lagi.

Pada tanggal 27 Agustus 1945 (hari Senin) para perwira tersebut berkumpul di salah satu kamar Hotel Sentral, jalan Mohd Jam Kutaraja (sekarang sudah di bongkar). Pertemuan pertama kali yang dilakukan dengan diam-diam untuk menghindari pengawasan Jepang ini telah menghasilkan suatu keputusan, yaitu: mengirim utusan yang terdiri dari Syammaun Gaharu dan T Hamid Azwar kepada Teuku Nyak Arief guna mendengar pendapat beliau mengenai gagasan mereka. Hasil konsultasi itu ternyata sangat memuaskan. Teuku Nyak Arief, yang pada waktu itu belum menjadi Residen Aceh, tetapi selalu diminta pertimbangannya mengenai sesuatu hal oleh para pemimpin di sana, menyambut baik idee pembentukan suatu badan (organisasi) yang dapat mempersatukan semua bekas *Gyugun, Heiho, Tokubetsu Hikojo Kinmutai* dan *Tokubetsu Keisatutai,* yang akan menjadi dasar bagi tumbuhnya Angkatan Perang Indonesia di Aceh nanti. Disarankan juga agar dalam pembentukan itu diikutsertakan bekas tentara KNIL (tentara Hindia Belanda) dahulu, sehingga mereka dapat menyumbangkan pengalaman dan keahliannya bagi Negara Indonesia merdeka.[43]

Setelah melakukan pembicaraan yang mendalam melalui beberapa kali musyawarah, akhirnya diputuskan untuk mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di seluruh daerah Aceh. Maka pada permulaan bulan Oktober 1945 tersusunlah secara definitif struktur dan susunan pengurus API di Aceh, yang terdiri dari :

1. Markas Daerah, berkedudukan di Kutaraja (markasnya, mula-mula di Hotel Sentral, kemudian berpindah ke toko J Pinke

---

[43]Lihat lebih lanjut Usman Nyak Gade, *Sekitar pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh,* MSI (Banda Aceh) : hal. 2-3; Seksi Penerangan dan Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 27-30; A. Hasjmy dan T. Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 14 15: Majalah *Santunan,* no. 21. thn. III, hal. 9.

Ujung Peunayong, Toko B Naas sekarang Sabang Coy, asrama Kuta Alam dan akhirnya ke asrama Keuraton) dengan susunan pengurus, Ketua/Komandan : Syammaun Gaharu; Kepala Staf : TA Hamid Azwar; Sekretaris : Husin Yusuf; anggota Sekretariat : Ishak; Anggota : Nyak Neh Rika, Said Usman, Said Ali, TM Daud Samalanga, T Sarong, Bachtiar Idham, T. Abdullah dan Saiman.

2. Wakil Markas Daerah, untuk sementara terdiri dari 4 daerah, yaitu :
   2.1. Wakil Markas Daerah Aceh Besar dan Pidie, di bawah pimpinan Nyak Neh;
   2.2. Wakil Markas Daerah Aceh Utara dan Aceh Tengah, di bawah pimpinan TM Syah;
   2.3. Wakil Markas Daerah Aceh Timur, di bawah Pimpinan Bachtiar; dan
   2.4. Wakil Markas Daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan, di bawah pimpinan Tjut Rachman.[44]

Setelah staf pengurus API daerah Aceh berhasil disusun, pada tanggal 6 Oktober 1945, jam 13,00 waktu setempat, dikeluarkanlah seruan yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar membantu dan menyokong API yang baru lahir itu. Seruan yang telah mengejutkan pemerintah Jepang di Kutaraja pada waktu itu, selengkapnya berbunyi :

Seroean Tanah Air.[45]

Di seloeroeh Atjeh telah berdiri Angkatan Pemoeda Indonesia – A.P.I.
A.P.I. akan menjadi dasar tentara Republik Indonesia.
A.P.I. akan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
A.P.I. akan menjaga keamanan dan ketenteraman oemoem.

SOKONGLAH A.P.I.

Bentoeklah Badan penjokong–API (Bapa) disegala pelosok. Bapa moesti berdiri disamping API kalau tidak A.P.I. ta' moengkin bergerak. Kaoem hartawan!! Lemparlah keradjaan toen-toean pada ini waktoe oentoek Indonesia Merdeka.

Kaoem bangsawan!! Bangoen, sadar dan toendjanglah tjita-tjita jang soetji ini.

Segala lapisan dan segala golongan! Korbankanlah harta, tenaga dan pikiran harta djiwa sekalipoen asal oentoek Kemerdekaan INDONESIA.

A.P.I. mempoenjai poeloehan pasoekan dan Riboean Angkatan Pemoeda di seloeroeh ATJEH.

---

[44] Lihat, a.l. Usman Nyak Gade, *op.cit.*, hal. 3 – 4; Seksi Penerangan dan Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.* hal. 31.

[45] Lihat juga foto asli Seruan tersebut., dalam, *ibid.*, hal. 31.

A.P.I. menoenggoe B.A.P.A.

Markas Daerah Angkatan Pemoeda Indonesia (M.D.A.P.I)

Dengan lahirnya API di Daerah Aceh maka dasar yang kuat untuk tumbuhnya tentara resmi negara Republik Indonesia di sana telah mulai diletakkan. Dalam proses selanjutnya API bertukar nama menjadi TKR (Tentara Keamanan, kemudian Keselamatan, Rakyat), lalu menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan akhirnya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Pusat. Dan pada uraian-uraian berikut selanjutnya akan dikemukakan peranan API dalam mengemban tugasnya, seperti yang telah diikrarkan, jaga keamanan dan ketenteraman umum (lihat di atas).

Sementara itu, pada bulan September 1945, bekas anggota-anggota KNIL (tentara Hindia Belanda) juga mengambil inisiatif untuk membentuk Polisi Istimewa di Kutaraja. Pasukan kepolisian ini, setelah dibentuk polisi Tentara, pada bulan Pebruari 1946 dilebur menjadi Pasukan Meriam di bawah pimpinan bekas Letnan II KNIL, Lintong, yang berasal dari daerah Minahasa (Sulawesi Utara)[46] - Pasukan Meriam ini diperlengkapi dengan senjata-senjata berat yang direbut dari Jepang, terutama dalam pertempuran yang terjadi di Lhok Nga pada bulan Desember 1945 (lihat di bawah); dan telah turut berjasa di samping pasukan meriam lainnya, dalam menjaga pantai di sekitar Kutaraja selama Revolusi Kemerdekaan. Selanjutnya dari pihak kepolisian, mulai tampak kegiatan polisi-polisi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari ikatan pemerintah Jepang. Bahkan di Langsa, Aceh Timur, sejak 1 Oktober 1945 kepala polisi di sana,, Abdullah Husin telah mulai bertindak ke arah itu; dan dalam bulan Oktober itu juga ia beserta anak buahnya telah menyatakan diri menjadi Polisi dari Negara Republik Indonesia.[47] Di Kutaraja, Wakil Kepala Polisi Daerah Aceh, Muhammad Hasyim, setelah menerima kawat tanggal 1 Oktober 1945 dari bawahannya, Abdullah Husin di Langsa, juga segera bertindak untuk menguasai kantor polisi daerah Aceh. Seperti telah disebutkan di muka pada akhir Agustus 1945 dengan

[46] Aboe Bakar Bsf. *op. cit.*, hal. 391.

[47] Mengenai kegiatan Abdullah Hussain pada awal Revolusi Kemerdekaan lihat buku kenang kenangan yang ditulisnya sendiri, *Peristiwa*, Pustaka Antara (Kuala Lumpur, 1965), passim.

pestol di tangan ia telah memimpin penaikan bendera Merah Putih di samping Kantor Polisi Jepang. Atas inisiatifnya dalam waktu relatif singkat barisan kepolisian negara Republik Indonesia berhasil dibentuk di daerah Aceh dan Muhammad Hasyim pada awal Revolusi Kemerdekaan ditunjuk menjadi Kepala Polisi RI yang pertama di sana.[48]

Di pihak lain, para pemuda yang tidak tergabung dalam API juga berusaha untuk mendirikan badan perjuangan rakyat dengan tujuan yang sama, yaitu mempertahankan Proklamasi dari segala rongrongan musuh, baik yang datang dari luar, maupun dari dalam. Di kantor surat kabar *Atjeh Sinbun* (surat kabar masa pendudukan Jepang di bawah asuhan tenaga-tenaga Indonesia dan Jepang, setelah proklamasi tidak terbit lagi), para pengasuh surat kabar tersebut, seperti A. Hasymy, Talsya dan lain-lain, sejak berita Proklamasi diterima di sana telah melakukan kegiatan untuk mendirikan sebuah organisasi pemuda yang diberi nama Ikatan Pemuda Indonesia (IPI). Pada tanggal 4 Oktober 1945 susunan pengurus IPI yang pertama telah tersiar, terdiri dari, Ketua I dan II : A Hasjmy dan T Manyak Arif, sekretaris I dan II : Usman dan Anwar Manyak; Bendahara : Zaini Bakry ; Pembantu-pembantu: M. Soleh Rahmany, Muhammad Z, Tuanku Abdulwahab dan Muhammad Junet; dan diperlengkapi dengan komisaris-komisaris yaitu Tuanku Hasyim, Ghazaly Yunus, Murdani, Teungku Idris, Asman, Potan Harahap, Muchtar Lubis, Said Ahmad Dahlan dan H Jamin.[49] Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945 IPI bertukar nama menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dengan susunan pengurus yang diperbaharui, terdiri dari,, Ketua Umum I dan II : A Hasjmy, M Saleh Rahmany dan Muhammad ZZ; Sekretaris Umum, I, II, III dan IV, masing-masing terdiri dari : Tuanku Hasyim, Potan Harahap, Sulaiman Arsjad dan Abu Bakar Sang Syarif, Bendahara : H. Jamin; dan diperlengkapi dengan, badan Keuangan Ketua : Muhammad Junet; Badan Penerangan Ketua : Said Ahmad Dahlan; Badan Pengerahan Tenaga, Ketua : T. Manyak Arif; Badan keamanan, ketua : Sauni dan Zainy Bakri, Badan kepanduan, ketua : Murdani, dan Badan Palang Merah, ketua Asman.[50]

---

[48] Ibid.; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 391 – 2,568.
[49] *Ibid.*, hal. 393.
[50] *Ibid.*, hal. 394; juga. A. Hasjmu & Talsya, *op. cit.*, hal. 12–9.

Dengan terbentuknya API dan BPI berarti dasar-dasar organisasi kemiliteran dan perjuangan telah mulai diletakkan di Aceh. Dalam waktu relatif singkat ke dua organisasi itu meluas ke seluruh daerah. Dan hal ini, seperti telah disinggung di Kutaraja, Koran itu pada malamnya hari tanggal 6 Oktober 1945, setelah siangnya ke luar seruan API dan terbentuknya susunan pengurus BPI, *Atjeh Syu Thokan* S Iino mengundang para pemimpin Aceh ke rumahnya guna membicarakan situasi ibukota kresidenan Aceh, Kutaraja khususnya dan daerah Aceh umumnya. Mereka yang turut hadir pada malam itu, dari pihak Aceh : Teuku Nyak Arief (Residen RI daerah Aceh), Tuanku Mahmud (Ketua KNI Daerah Aceh), Teungku Mohd Daud Beureueh (Ketua PUSA dan Anggota KNI Daerah Aceh), Syamaun Gaharu (Ketua Markas API), A Hasymi (Ketua BPI), T Achmad Jeunib (Asisten Residen RI Aceh Besar), T Tjut Hasan (Konsul Muhammadiyah Daerah Aceh) dan Said Abu Bakar (pelopor *Fijiwara Kikan);* dari pihak Jepang : *Tyokan S. Iino sendiri,* Atjeh Syu Seityo S Masubutyi, *Keimutyo* (Kepala Polisi), *Bo-ei Taityo* (kepala Pertahanan), Kempetaityo (Kepala Polisi Militer) dan juru bahasa T Eiri. Dalam pertemuan itu S Iino menegaskan, bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun masih diberi kuasa oleh Sekutu dan bertanggungjawab di dalam hal pemerintahan dan keamanan daerah ini. Karena itu segala kegiatan yang dilakukan harus dengan seizin pemerintah Jepang. Dan diminta agar API dan BPI yang telah didirikan tanpa seizinnya serta mengarah seperti organisasi ketentaraan segera dibubarkan. Teuku Nyak Arief, seperti biasa kalau berhadapan dengan penjajah, menjawab dengan pedas, yang intinya, bahwa Jepang harus tahu diri mereka telah kalah dan tidak berhak lagi mengatur rakyat Indonesia, seperti pada masa mereka berkuasa dulu. Sedang Syamaun Gaharu menegaskan, bahwa tidak seorangpun berhak memerintahkan untuk membubarkan API, kecuali kalau Residen Negara Republik Indonesia yang memerintahkannya.[51] Dapat dikatakan pertemuan malam itu gagal total dan merupakan pukulan berat bagi pemerintah Jepang di daerah Aceh.

Pada tanggal 9 Oktober 1945 Teuku Nyak Arief, selaku Residen Aceh dari Negara Republik Indonesia memerintahkan agar API sebagai dasar dari Tentara Republik Indonesia harus lebih di-

---

[51] Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *op. cit.*, hal. 33-45; Usman Nyak Gade, *op. cit.*, hal. 6; Aboe Bakar, *op. cit.*, hal. 395-6.

sempurnakan, sehingga benar-benar mengarah kepada organisasi ketentaraan yang lengkap. Karena itu Syamaun Gaharu selaku Ketua Markas Daerah segera melaksanakan perintah itu. Wakil Markas Daerah (WMD) yang sebelumnya hanya ada 4 buah ditambah sehingga menjadi 8 WMD, dan pada tiap-tiap WMD dibentuk 3 sampai 4 Pasukan yang dipimpin oleh seorang Komandan Pasukan; kemudian disusul dengan Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh bekas prajurit *Gyugun, Heiho dan* lain-lain., agar dalam waktu singkat segera mendaftarkan diri pada WMD atau Pasukan setempat (mengenai nama-nama WMD dan Pasukan beserta komandannya masing-masing lihat lampiran).

Pada tanggal 12 Oktober 1945 Residen T Nyak Arief melantik API seluruh daerah Aceh secara serentak di Kutaraja (dalam surat edaran yang disebutkan di atas pelantikan itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober, jadi mundur dua hari dari rencana semula).[52] Semenjak itu secara resmi API Daerah Aceh menjadi organisasi Tentara Republik Indonesia yang sah di sana. Dalam proses selanjutnya, sejak tanggal 1 Desember 1945, API bertukar nama menjadi TKR (pada waktu itu tidak lagi Tentara Keamanan Rakyat, tetapi Tentara Keselamatan Rakyat) dengan Komandannya tetap seperti semula, yaitu Syamaun Gaharu (berpangkat Kolonel) dan Teuku Nyak Arief, selaku Residen Aceh, dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler, menjadi pelindungnya. Sejak tanggal 24 Januari 1945, sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat tanggal 8 Januari 1945 mengenal penggantian nama TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). TKR Aceh menjadi TRI Divisi V Sumatera. Dalam penyempurnaan selanjutnya, setelah penggantian komandan pada bulan Maret 1946 dari Syamaun Gaharu kepada Husin Yusuf, TRI Aceh (Divisi V Sumatera) dijadikan Divisi Gajah I/dengan pengecualian kesatuan di Kutacane yang dijadikan Batalyon I Resimen I Divisi Gajah II (Sumatera Timur); dan pada bulan April 1947. Divisi Gajah I digabung dengan Divisi Gajah II menjadi TRI Divisi X Sumatera, yang pada waktu aksi Militer Belanda pertama markasnya berkedudukan di Bireuen (Aceh Utara), dengan Panglima dan Kepala Stafnya masing-masing Kolonel Husin Yusuf dan Kolonel H Sitompul, bekas komandan Divisi Gajah II. Selanjutnya di Aceh juga dibentuk Angkatan Laut Daerah Aceh (ALDA), yang dipimpin oleh Said Usman (Kutaraja), H. Daud

[52] Seksi Penerangan/Dokumentasi *op. cit.*,; Usman Nyak Gade, *op. cit.*; lihat juga lampiran.

Daryah (Meulaboh) M Adam (Langsa) dan lain-lain.[53]

Sementara itu Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dalam rangka lebih meningkatkan organisasi itu sebagai barisan Kelasyakaran dan penyebaran ke seluruh daerah, pada tanggal 12 Oktober 1945 mengadakan konperensi pertama dengan mengambil tempat di rumah Tuanku Abdul Azis, Jalan Mohd Jam No. 1. Konperensi diikuti oleh para pemuda yang datang dari berbagai pelosok daerah Aceh atas undangan Husin Al Mudjahid yang pada mulanya dimaksudkan untuk membentuk suatu gerakan pemuda dengan tujuan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi berhubung telah ada BPI rencana itu dibatalkan. Dalam Konperensi itu diputuskan, bahwa pengurus pusat BPI yang telah disusun sebelumnya disetujui dan ditempatkan di Kutaraja, sedang di daerah-daerah Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Selatan, masing-masing ditempatkan seorang Wakil Majelis Daerah (WMD), yaitu: Teungku Abdul Djalil Amin, Teungku Abdul Gani, Teungku Usman Peureulak dan Teungku Muhammad Abduh Syam.[54]

Selanjutnya 5 hari kemudian, tepatnya pada 17 Oktober 1945, BPI bertukar namanya menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI); dan sejak waktu itu PRI daerah Aceh mulai membentuk cabang-cabangnya di seluruh wilayah daerah Aceh, bahkan juga ranting-rantingnya di *Kemukiman* (daerah di bawah Negeri atau Kecamatan sekarang). Pada hari itu juga PRI daerah Aceh mengeluarkan Maklumat no. 1, berisi "panggilan umum" yang ditujukan kepada seluruh pemuda Indonesia yang berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar diri menjadi anggota PRI di wilayah atau ranting setempat. Ditegaskan pula dalam maklumat itu, bahwa Kemerdekaan Tanah Air tidak didapati dengan jalan mengemis, tetapi ia harus diperjuangkan oleh puteranya sendiri (isi lengkap, lihat lampiran). Kemudian pada tanggal 20 Desember 1945, berdasarkan ketetapan Markas Tertinggi Pemuda Republik Indonesia di Yogyakarta, nama PRI daerah Aceh mengalami perubahan lagi, yaitu menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) Daerah Aceh, dengan ketuanya tetap seperti semula, ialah: A. Hasjmy. Dapat ditambahkan,

---

[53] Raden Soehardjo Hardowardjojo, Komandan tertinggi Tentara R.I. Soematera, 'Kearah Kesempoernaan", *Satoe Tahoen N.R.I., di Soematera* (17-8-1945 – 17-8-1946), Pemerintah Poesat Soematera, 1946, hal. 18-9; Hoesin Joesoef, "Detik Proklamasi di Atjeh", *Modal Revolusi* 45, 1960, hal. 41-51; S.M. Amin, *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 94-6; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 406.

[54] Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 397-8.

bahwa, meskipun Pesindo daerah Aceh bernaung di bawah Pesindo Pusat, namun orientasi idiologinya jauh berbeda, sehingga akibat sikapnya yang demikian Komisariat Dewan Pusat Pesindo Sumatera menganggap Pesindo daerah Aceh tidak sah; dan setelah meletus peristiwa Madiun (pemberontakan PKI/Muso), pada tanggal 19 Oktober 1948 Pesindo daerah Aceh melepaskan hubungan organisasinya dengan Pesindo Pusat yang telah turut dalam pemberontakan PKI itu.[55]

Karena Pesindo daerah Aceh mempunyai cabang dan ranting tersebut di seluruh wilayah, maka dengan tidak banyak menemui kesukaran organisasi itu berhasil baik mengkoordinasi lasykarnya, yaitu: Kesatria Pesindo, yang kemudian dikenal dengan nama: Divisi Rencong. Barisan kelasyakaran ini terdiri dari 7 Resimen, masing-masing ditempatkan di Kutaraja dan Sigli (Pidie), Lhoksemawe (Aceh Utara), Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan; ditambah dengan Resimen Wanita Pocut Baren dengan komandannya dari wanita sendiri, ialah: Zahara dan satu Batalyon Istimewa Altileri yang dipimpin langsung oleh komandan divisi, Nyak Neh Lhok Nga. Selain itu, divisi ini juga diperlengkapi dengan antara lain perbekalan/senjata di Lhok Nga, pelayaran di Ulee Lheue dan Bank di Kutaraja (mengenai struktur organisasi dan personalia Divisi Rencong selengkapnya, lihat lampiran).[56]

Divisi Rencong Pesindo merupakan badan kelasykaran yang terlengkap, baik dari segi struktur organisasinya, maupun dari segi persenjataannya. Divisi ini merupakan badan kelasykaran pertama yang lahir di daerah Aceh. Setelah itu, menjelang tahun 1946 dibentuk pula Barisan Mujahidin di bawah pimpinan Teungku Mohd Daud Beureueh dan Cek Mat Rachmany. Bagian kelasykaran Mujahidin dikenal dengan nama Divisi X/Teungku Chik Di Tiro dengan komandan Divisinya Hasballah Daud yang kemudian digantikan oleh Cek Mat Rachmany. Divisi X terdiri dari 5 resimen, yang masing-masing resimen membawahi beberapa batalyon (susunan selengkapnya, lihat lampiran). Pada pertengahan tahun 1946 dibentuk lagi Barisan Berani Mati Lasykar Teungku Chik

---

[55] *Ibid.*, hal. 399-0, 405; T.A. Talsya, "Fragmen Revolusi 45 Di Aceh (XVIII)", *Sinar Darussalam no. 75/76*, Pebruari/Maret, Banda Aceh, 1977, hal. 85-8.

[56] Jarahdam-I/Iskandar Muda, *Dua Windu Kodam-I/Iskandar Muda.* Jarahdam-I/Iskandar Muda, 1972 hal. 103-5; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 405-6.

Paya Bakong, sebagai penjelmaan dari Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) yang lahir pada permulaan tahun 1946. Markas Divisi ini tidak ditempatkan di Kutaraja seperti dua badan kelasyakaran yang disebutkan terdahulu, melainkan di Idi (Aceh Timur), yaitu kota kelahiran Tentera Perjuangan Rakyat (TPR), di bawah pimpinan Amir Husin al Mujahid. Adapun struktur organisasi divisi terdiri dari staf pimpinan divisi, komandan batalyon berani mati, anggota staf tentera perjuangan rakyat, staf istimewa/mobilisasi dan staf istimewa/mobilisasi wanita (personalia tiap bagian itu, lihat lampiran). Selain tiga badan kelasykaran yang telah disebutkan itu, di daerah Aceh juga terdapat dua resimen tentera pelajar, yaitu: pertama Tentera Pelajar Republik Indonesia (TRIP, dibentuk bulan September 1947); dan ke dua, yang dibentuk pada bulan Desember 1947 dan langsung berada di bawah komando Divisi X TNI Sumatera, adalah Tentera Pelajar Islam (TPI). Badan kelasykaran pelajar ini juga diperlengkapi dengan bagian Palang Merah dan Dapur Umum (Struktur organisasi dan personalia kedua resimen tentera pelajar ini, selengkapnya lihat lampiran.[57]

Perlu juga dikemukakan, bahwa selama Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) antara kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata resmi (TKR/TRI) dan badan badan kelasykaran di daerah Aceh, yang pada masa sekarang anggota-anggotanya itu dihitung sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan dan jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 60.000 orang, tetapi yang baru terdaftar secara resmi pada Kantor Administrasi Veteran I, Pusat Cadangan Nasional Daerah Aceh hanya 35.075 orang,[58] dalam berbagai kegiatan perjuangan yang mereka lancarkan, selalu tampak berada dalam suatu koordinasi yang utuh; tidak terdapat unsur-unsur perpecahan dan persaingan tidak sehat yang dapat melemahkan perjuangan pada waktu itu. Hal ini, terbukti setelah keluarnya penetapan Pemerintah (Berita Negara no. 24 tahun 1947) dan Ketetapan Wakil Presiden Negara no. 24 tahun 1947) dan Ketetapan Wakil Presiden, selaku Panglima Tertinggi TRI pada waktu itu, tertanggal Bukit Tinggi, 26 Agustus 1947, no. 3/BKPU/47 mengenai penyatuan TRI dengan lasykar-lasykar rakyat menjadi Tentera Nasional

[57] *Ibid.*, hal. 103 – 112; *Ibid.*

[58] Harian *Pelita*, Jumat, 27 April 1979, hal. III. (Jumlah yang terdaftar secara resmi itu adalah catatan terakhir berdasarkan Team Tibiminvet Puscadnas tahun 1977).

Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia. Maka proses penyatuan TRI dengan Badan-badan Kelasykaran (Divisi Rencong, Teungku Chik Ditiro, Teungku Chik Paya Bakong, Resimen Trip dan TPI) berjalan lancar.[59]

Setelah terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia dan Badan Perjuangan (API dan IPI/BPI) di daerah Aceh, maka dimulai direncanakan perebutan senjata dari Jepang secara lebih intensif. Sebelumnya kegiatan pengumpulan senjata juga telah dilakukan, yaitu senjata-senjata yang berasal dari kesatuan *Gyugun*, direbut secara diplomasi atau disembunyikan pada saat organisasi militer itu dibubarkan oleh Jepang. Dalam hubungan ini, umpamanya seperti yang disembunyikan di sebelah Utara kota Bakongan (Aceh Selatan) sebanyak 12 pucuk senjata beserta 6000 peluru atas inisiatif Abdullah Syarief dan kemudian diserahkan kepada kesatuan API di sana[60]; juga di Calang (Aceh Barat), atas inisiatif AK Jailani beserta kawan-kawannya, 2 senapan mesin, 4 bren dan 50 pucuk karabin tidak berhasil dilucuti oleh pihak Jepang[61].

Ada dua faktor yang juga turut memberi dorongan dan semangat kepada seluruh rakyat Aceh dalam merebut senjata dari Jepang, yaitu : Maklumat ulama Seluruh Atjeh dan seruan kepada kaum muslimin, berasal dari seorang ulama besar di Aceh, Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, mengenai kewajiban mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamirkan itu. Maklumat ulama tersebut, tertanggal Kutaraja 15 Oktober 1945, ditandatangani oleh 4 orang Ulama besar, yaitu: Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, Teungku Muhd Daud Beureueh, Teungku Haji Jakfar Sidik Lamjabat dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri serta disetujui oleh Residen Aceh, Teuku Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional daerah Aceh, Tuanku Mahmud. Isi pokoknya adalah, selain seruan bersatu padu di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno, juga penegasan bahwa perjuangan mempertahankan Kemerdekaan adalah perjuangan suci yang disebut dengan "Perang Sabil" (perang di jalan Allah), suatu penegasan yang mendahului resolusi Muktamar ummat Islam Indonesia di Yogyakarta, tanggal 7-8 Nopember 1945 dengan isi yang serupa, yaitu : 60 Miljun Kaum Muslimin Indonesia siap Berjihad *Fi Sabilillah*. Perang

---

[59] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 96-7; Jarahdam-I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 103, 118.

[60] *Ibid.*, hal. 102.

[61] *Ibid.*, hal. 100; Komite Musyawarah Angkatan 45, *op.-cit*.hal. 91.

di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan"[62] (mengenai isi selengkapnya maklumat Ulama itu, lihat lampiran). Mengenai seruan yang dikeluarkan oleh Teungku Haji Hasan Krueng Kalee pada tanggal 18 Zulkaedah 1364 H (akhir Oktober 1945) dan kemudian disiarkan oleh Pimpinan Daerah PRI secara meluas ke seluruh Aceh dengan surat pengantar tanggal 8 Nopember 1945, no. 116/1945[63], isinya tidak berbeda dengan maklumat ulama yang terdahulu, yaitu kewajiban mengorbankan jiwa dan harta untuk memerangi penjajah, membela kemerdekaan tanah air (isi selengkapnya, dengan tulisan Arab, lihat lampiran). Tegasnya ke dua pernyataan tersebut telah memberi kekuatan batin bagi rakyat Aceh dalam berjuang selama Revolusi Kemerdekaan yang diawali dengan perebutan kekuasaan dan senjata dari tentera pendudukan Jepang.

Dalam proses perebutan senjata tersebut, langkah-langkah yang ditempuh oleh rakyat Aceh umumnya dan badan perjuangan/ketentaraan (API/TKR, BPI/PRI) khususnya, adalah pada mula-mula dengan jalan diplomasi dan intimidasi, tetapi kalau menemui kegagalan, diikuti pula dengan tindakan kekerasan, yaitu dengan melakukan penyerangan terhadap pos-pos konsentrasi tentera Jepang. Cara ini, dalam garis besarnya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula sekelompok rakyat yang dikoordinasi oleh API/TKR dan/atau BPI/PRI dengan bersenjatakan rencong, tombak, pedang dan sebagainya, turun ke kota-kota dan membayangi pos-pos tentera Jepang di sana. Kadang-kadang sebelum tindakan ini dimulai, lebih dahulu telah dikeluarkan selebaran-selebaran, berisi berbagai ancaman, yang pada dasarnya seakan-akan keselamatan Jepang tidak terjamin lagi di Aceh. Hal ini menjadikan tentera Jepang, yang sudah kalah dan tidak bersemangat lagi pada waktu itu, gelisah dan ketakutan. Karenanya mereka segera memanggil para pemimpin rakyat di kota tersebut, baik yang duduk dalam badan-badan pemerintahan RI., ketenteraan, ataupun kelasykaran. Dalam pertemuan yang berlangsung itu, para pemimpin rakyat menekankan, bahwa yang diinginkan oleh rakyat adalah senjata dari Jepang, dan apabila Jepang tidak memberikannya, rakyat akan menyerang. Dan memang kalau pertemuan gagal penyerangan segera dimulai, yang setelah berlangsung beberapa

[62] Harian *Kedaulatan Rakyat*, tahun 1, jumat, 9 Nopember 1945, halaman pertama.

[63] Dada Meraxa (ed), *Ungkapan sejarah Aceh*, tanpa penerbit, 1976, hal. 23.

waktu, kadang-kadang dilanjutkan dengan perundingan kembali yang berakhir dengan kemenangan di pihak pemimpin rakyat.

Dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan perebutan senjata dari pihak Jepang selalu terjadi di kota-kota/tempat-tempat di mana tentera Jepang di tempatkan, di seluruh daerah Aceh. Dalam wilayah Aceh Besar, di Seulimeum, tanggal 25 Nopember 1945 tentera Jepang terpaksa menyerahkan 180 pucuk senjatanya, akibat dari kepungan API bersama dengan barisan rakyat di sana dan besoknya dilanjutkan dengan penyerahan 3 pucuk meriam dan 3 gudang amunisi[64]. Akibat kepungan API dan barisan rakyat itu, tanggal 3 Desember 1945 pasukan Jepang meninggalkan Seulimeum menuju lapangan udara Blang Bintang, tempat pemusatan tentara Jepang untuk diberangkatkan ke luar daerah Aceh. Kemudian, di Lhok Nga setelah terjadi pertempuran sengit tanggal 1 Desember, pihak Jepang menyerahkan 10 pucuk senjata; dan pada waktu pasukan Jepang mengosongkan Lhok Nga tanggal 6 Desember 1945 untuk selamanya menuju Blang Bintang, pihak TKR dan PRI berhasil menguasai sejumlah besar meriam pantai bersama dengan 7 gudang amunisi[65]. Sasaran berikutnya ialah Blang Bintang; penyerangan dilakukan pada tanggal 7 Desember, tetapi pihak TKR dan barisan rakyat (PRI) tidak berhasil menguasainya berhubung kuatnya pertahanan tentera Jepang di sana. Sementara itu *Tyokan* (Residen) Aceh, S. Iino, berhubung adanya tekanan yang terus menerus, juga telah menyerah terimakan 600 pucuk senjata kepada pihak TKR[66].

Demikian pula di tempat-tempat lain di luar wilayah Aceh Besar. Dengan taktik yang serupa TKR bersama dengan barisan rakyat selalu berhasil memperoleh senjata dari pihak Jepang. Umpamanya, di Sigli (Aceh Pidie), akhir Nopember 1945, sebanyak 200 pucuk senjata; di Aceh Utara; yaitu : di Bireun dan Lhok Seumawe (tanggal 18 Nopember, masing-masing sebanyak 320 dan 300 pucuk, di Juli (20 Nopember, 6 buah tank, 3 meriam pantai, 3 senapan mesin, 2 buah truk, 72 karabin dan 7 gudang amunisi), di Gelanggang Labu (22 Nopember, sebanyak 620 pucuk), dari Krueng Panjoe (tanggal 24 Nopember, di sini terjadi pertempuran sengit selama 3 hari dan berakhir dengan penyerahan 300 pucuk

---

[64] Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, *op.cit.*, hal. 88

[65] *Ibid.*, hal. 89; Harian *Waspada*, Medan 17 Agustus 1979.

[66] T.A. Talsya, "Perjuangan Kemerdekaan di Aceh", *Santunan*, No. 28, Pebruari 1979, hal. 10.

senjata); di Aceh Timur, terutama di Idi dan Langsa, masing-masing tanggal 9 dan 13 Desember 1945 sebanyak 220 dan 300 pucuk senjata[67]. Selain itu juga di daerah-daerah Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Tengah (Aceh Tenggara pada waktu itu termasuk wilayah Aceh Tengah)[68].

Untuk sekedar perbandingan mengenai hasil yang dicapai selama kegiatan perebutan dan pelucuran senjata dari Jepang itu dapat dicatat: pada upacara memperingati 6 bulan Kemerdekaan Indonesia (17 Pebruari 1946) di lapangan Blang Padang Kutaraja TRI telah dapat mengadakan parade dengan satu resimen pasukan lengkap dengan persenjataannya[69]. Ini belum lagi persenjataan yang dimiliki oleh TRI dan lasykar-lasykar rakyat di daerah-daerah kabupaten dan kewedanan di seluruh Aceh.

Rupanya aksi perebutan dan perlucutan senjata yang dilancarkan oleh API/TKR bersama dengan barisan rakyat telah menyebabkan posisi tentera Jepang semakin terdesak. Tampaknya mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi di Aceh. Oleh karenanya tentera Jepang yang telah dikonsentrasikan di Blang Bintang, pada tanggal 15 Desember 1945 meninggalkan lapangan terbang itu menuju pelabuhan Ulee Lheu. Dalam perjalanan sampai di Kutaraja, mereka sempat juga menyandera beberapa tokoh pimpinan TKR, seperti Syamaun Gaharu, Teuku A. Hamid Azwar, Teuku Mohd Syah dan lain-lain., yang mereka bawa ke Ulee Lheu. Tetapi kemudian, setelah melalui perundingan yang dilakukan oleh Tuanku Mahmud dengan para pejabat Jepang dan disusul pula dengan ultimatum yang dikeluarkan oleh Residen Teuku Nyak Arief, para perwira TKR itu dibebaskan kembali. Dan pada tanggal 18 Desember 1945 tentera Jepang bersama dengan semua pegawai sipil pemerintahannya dengan kapal Sekutu meninggalkan

---

[67] Jarahdam-I/Iskandar Muda, *Loc. cit.*, hal. 91-6; Komite Musyawarah Angkatan 45, *op. cit.*,; *Santunan*, No. 28, Pebruari 1979, hal. 10.

[68] *Ibid.*,; Untuk Daerah Aceh Tengah/Tenggara, lihat juga Panitia Seminar, *Sejarah perjuangan Pemuda Indonesia Daerah Tk. II Atjeh Tengah*, Takengon, 24-25 Pebruari 1965, hal. 9–12; Haji Syahadat, *Perjuangan Aceh Tenggara Sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan R.I. Menentang Penjajahan*, Seminar perjuangan Aceh Sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan R.I., Medan, 2226 Maret 1976, hal. 123-9.

[69] Komite Musyawarah Angkatan 45, *loc. cit.*; *Santunan*, No. 28 Banda Aceh, Pebruari 1979.

Ulee Lheu setelah lebih dahulu meledakkan sebagian besar kendaraan bermotornya[70].

Selain itu tentera Jepang yang dikonsentrasikan di Langsa (Aceh Timur), pada tanggal 22 Desember 1945 juga meninggalkan Aceh menuju Sumatera Timur (Medan). Tetapi kemudian pihak Sekutu memerintahkan mereka kembali ke Aceh untuk mengambil senjata yang ditinggalkan di sana, yakni senjata-senjata yang telah berhasil direbut oleh TKR dan lasykar rakyat, bukan senjata yang ditinggalkan dengan sengaja yang memang tidak ada. Ini berarti tentera Jepang harus menghadapi kembali TKR dan lasykar rakyat yang sudah lengkap persenjataannya, yang hampir seluruhnya berasal dari mereka pula, sehingga sudah dapat diperkirakan, bagaimanapun, mereka akhirnya akan menemui kegagalan; namun karena perintah itu datang dari Sekutu yang telah mengalahkannya, mereka tidak bisa mengelak dan terpaksa harus melaksanakannya.

Untuk membendung tentera Jepang yang menyerbu ke wilayah Aceh Timur itu pihak TKR mendatangkan pasukan tambahan dari Kutaraja, Bireun, Takengon, Lhokseumawe dan Lhok Sukon, sedang pasukan TKR dan lasykar rakyat yang berada di bagian Timur Aceh Timur, seperti dari Idi dan lain-lain, sebagian besar dipusatkan di sekitar kota Langsa. Tujuan tentera Jepang pertama-tama adalah menduduki kembali Kota Kuala Simpang dan Langsa. Maka terjadilah pertempuran sengit di sekitar kedua kota tersebut, seperti : Kampung Durian dan Kampung Ketupak (tanggal 24 Desember 1945); pada hari itu juga Kuala Simpang berhasil diduduki dan menyusul Langsa tanggal 25 Desember setelah terjadi pertempuran di Kampung Upak dan Bukit Meutuah; tetapi pasukan Jepang itu tanggal 26 Desember terpaksa mundur kembali ke Kuala Simpang. Dan setelah pertempuran berlangsung selama hampir satu bulan, maka pada tanggal 20 Januari 1946 pihak TKR bersama lasykar rakyat berhasil memukul mundur tentera Jepang kembali ke Medan[71]. Dengan demikian daerah Aceh berhasil dibersihkan dari tentera Pendudukan Jepang; dan kekalahannya itu merupakan pukulan berat, tidak saja bagi Jepang, tetapi juga bagi Sekutu sendiri.

---

[70] Aboe Bakar Bsf., *op. cit.*, hal. 405.

[71] Jarahdam-I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 96-100; Pemerintah Poesat Soematera, *op. cit.*, hal. 6.

D. Kedatangan tentera Sekutu dan tentera Nica di Daerah Aceh

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, bahwa satu-satunya wilayah daerah Aceh yang berhasil diduduki oleh Sekutu/Belanda selama Revolusi Kemerdekaan adalah pulau Weh (Sabang). Pulau yang terletak di ujung paling Utara Sumatera itu dilihat dari segi kemiliteran memang cukup strategis sebagai basis pertahanan terdepan dari arah Barat Laut Indonesia; karenanya tidak mengherankan, apabila Jepang menjelang saat kekalahannya menempatkan kira-kira 10.000 kekuatan tentaranya di sana di bawah komando Vice Admiral Hirose[72]. Demikian pula dengan tentera Sekutu/Belanda, pertama-tama perhatiannya diarahkan kepulau tersebut.

Pada tanggal 25 Agustus 1945 armada Sekutu yang terdiri dari beberapa kapal perang Inggeris telah berada di muka pelabuhan Sabang. Dalam pasukan ini ikut serta Kesatuan Marine Belanda dan juga Pemerintah Belanda yang menjadi bagian dari AMACAB *(Allied Military Administration Civil Affairs Branch).* Pada hari itu juga Hirose menyerah terimakan pulau Weh kepada Sekutu yang disusul dengan pendaratan tentara serta pengibaran bendera Inggeris dan bendera Belanda di kota pelabuhan tersebut. Kemudian, untuk menggerakkan administrasi pemerintahan, di pulau Weh ditetapkan seorang perwira Belanda, Letnan Hamers yang bertindak atas nama Panglima Sekutu, tetapi dengan tidak langsung, seperti ternyata kemudian atas nama Pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu diperintahkan pula agar Jepang segera mengembalikan ribuan kuli kebun, yang berasal dari daerah Aceh. Sumatera Timur da Tapanuli yang selama ini bekerja sebagai *rumusha* di sana, ke tempat asal mereka masing-masing[73].

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sekutu memanggil *Guntyo* Sabang, Teuku Abaih, ke kapalnya untuk diberitahukan, bahwa Jepang telah menyerah dan karenanya pulau Weh telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hubungan ini, Teuku Abaih, sebagai kepala pemerintahan angkatan Jepang, khususnya dan rakyat pada umumnya, mengingat kekuatan tentara Sekutu dan Jepang yang besar di sana, tidak mungkin melakukan tindakan apa-apa selain dari menerima pemberitahuan ten-

---

[72] T.A. Talsya, "Republik Indonesia Bukan Microfoonse Regeering", *Sinar Darussalam,* no. 71, Agustus 1976, hal. 59.

[73] A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan,* W. Van Hoeve, Bandung, 1949, hal. 246; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.,* hal. 424; T.A Talsya, *op. cit.,* hal. 58-9.

tara Sekutu tersebut. Semenjak itu, dengan dukungan Sekutu, pemerintahan NICA *(Netherlands Indies Civil Administration)* mulai dirintis di pulau Weh. Dan sejak tanggal 3 September 1945, Letnan Hamers, yang selama ini bertindak atas nama Sekutu, digantikan oleh seorang pegawai Nica, bernama CA Sani yang bertindak selaku Commanding Officer. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, CA Sani dibantu oleh seorang kepala PID *(Politieke Inlichtingen Dienst)* yang bernama Emil Daniel[74].

Dengan berhasilnya di duduki pulau Weh berarti Tentara Nica mempunyai basis pertahanan yang kuat di ujung Barat Laut Indonesia. Dari sini, selama Revolusi Kemerdekaan, mereka selalu melancarkan operasi militer, melakukan pengawasan yang ketat di perairan Selat Malaka dan Samudera Indonesia, terutama dalam kaitan dengan usaha mereka untuk mendarat ke daratan Aceh dan membendung kegiatan rakyat Aceh mengadakan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Namun usaha-usaha mereka itu dapat dikatakan selalu menemui kegagalan; sampai pengakuan Kedaulatan Indonesia, mereka tidak pernah berhasil mendarat di sana dan rakyat Aceh selalu berhasil menembus blokade Belanda itu.

Di daerah Aceh lainnya, Sekutu juga berusaha untuk mendaratkan tentaranya. Beberapa waktu menjelang kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945, sekelompok pasukan dari *1.3.6. force,* di bawah pimpinan bekas Kepala Pabean Belanda di Sigli, BW Lefrandt, telah berada di sekitar pegunungan Seulimeum (Aceh Besar) dalam rangka membuat persiapan untuk memungkinkan penerjun an pasukan payung Sekutu yang akan menunjang rencana penyerbuan pertahanan pantai Jepang di pesisir Aceh[75]. Tetapi penyerbuan ini tidak jadi dilaksanakan berhubung Jepang telah lebih dahulu menyerah.

Selanjutnya kira-kira dua bulan setelah Jepang menyerah, satu kelompok dari *A.D.C.8. 1.3.6. force* di bawah pimpinan Mayor Maarten J. Knottenbelt tiba di Kutaraja dalam rangka penyelidikan mengenai keadaan militer, politik dan ekonomi di Aceh. M.J. Knottenbelt adalah anggota pasukan Belanda yang datang ke Aceh atas perintah SACSEA *(Supreme Allied Commander South East Asia).* Tanggal 1 Oktober 1945, ia bersama dengan seorang kapten Inggeris dan seorang Letnan Belanda diterjunkan di dekat Medan;

---

[74] A. Hasjmy & T.A. Talsya, *op. cit.*, hal. 30.

[75] A.J. Piekaar, *op. cit.*, hal. 246; terjemahan karangan A.J. Piekaar untuk bagian ini (hal. 246 – 251), lihat Aboe Bakar Bsf., *op. cit.*, hal. 423 - 30.

untuk sampai ke tujuannya, yaitu ke ibu kota daerah Aceh, Kutaraja, di Medan Knottenbelt menghubungi para pejabat Jepang guna memperoleh perlengkapan dan tambahan rombongan. Pada tanggal 4 Oktober 1945 sebagian rombongannya berangkat melalui darat, sedang besoknya tanggal 5 Oktober, Kottenbelt berangkat dengan pesawat pembom ringan milik Jepang dan mendarat di Lhok Nga (lapangan udara militer yang dibuat oleh Jepang, kira-kira 14 kilometer arah ke selatan Kutaraja)[76].

Meskipun Knottenbelt datang selaku wakil Sekutu, namun pada mobilnya selalu dikibarkan bendera kecil Belanda, sehingga menjadikan suasana semakin panas, karena meluapnya amarah rakyat. Selama di Kutaraja, dalam rangka tugasnya, ia berusaha untuk mengadakan kontak dengan para pemimpin Indonesia; dan kepada berbagai instansi Jepang ia mengirimkan sejumlah angket yang menyangkut keadaan militer, politik dan ekonomi di Aceh. Berdasarkan jawaban angket yang diterima dari para pejabat Jepang, pada tanggal 14 Oktober 1945 Knotttenbelt mengirimkan laporan kepada Markas Besarnya; dan sejak itu ia mengingati tugasnya telah selesai, meskipun belum berhasil menghubungi para pejabat Indonesia.

Berdasarkan saran-saran yang diterima dari pihak Jepang, rombongan segera akan meninggalkan Kutaraja kembali ke Medan atau ke Sabang. Tetapi berhubung datangnya perintah atasan untuk mengamati perkembangan selanjutnya, maka rencana keberangkatan tersebut diurungkan. Karena itu Knottenbelt kembali berusaha untuk mengadakan kontak dengan para pemimpin Indonesia, meskipun dihalangi oleh para pejabat Jepang yang merasa takut, kalau-kalau mereka akan dituduh oleh pihak Sekutu, bahwa mereka banyak memberi "angin" kepada para pemimpin rakyat dalam menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh.

Pada tanggal 15 Oktober 1945, atas "jasa baik" seorang Cina peranakan, Goh Moh Wan yang dimasa pendudukan Jepang menjadi juru bahasa *Kempeitai*, Knottenbelt berhasil bertemu dengan Residen Aceh Teuku Nyak Arief. Dalam pertemuan yang diliputi oleh suasana ketegangan itu, Teuku Nyak Arief sambil mengepalkan tangannya dengan nada keras menegaskan, bahwa ia suka be-

---

[76] Uraian secara lebih luas, lihat tulisan Knottenbelt sendiri, "Kontak Dengan Aceh' dalam, *Crij Nederland, tahun* 6 no. 26, London, 19 Januari 1946 lihat juga, A.J. Piekaar, *loc. cit.*, ; dan Aboe Bakar Bsf., *loc. cit.*

kerja sama dengan Sekutu, tetapi tidak dengan orang-orang Belanda, Penguasa-penguasa Belanda, babi-babi sombong, tentara Belanda yang keparat.[77] Selanjutnya Teuku Nyak Arief menegaskan lagi, bahwa masaalah perlucutan senjata Jepang menjadi tanggungannya; oleh karena itu tentera Sekutu tidak ada gunanya datang dengan beberapa tokoh pemimpin Indonesia lainnya, seperti dengan Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, Tuanku Mahmud, namun pertemuan-pertemuan tersebut banyak menemui kegagalan, karena itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh utusan SACSEA itu justeru telah turut lebih memperuncing suasana di daerah Aceh.

Sampai dengan awal Nopember 1945 semakin terasa lagi bagi Knottenbelt, bahwa keselamatan dirinya di daerah Aceh kian hari semakin tidak terjamin : hampir tiap malam selalu datang ancaman, berupa pelemparan batu dari jauh dan sebagainya ke arah rumah tempat tinggalnya di pinggiran lapangan Blangpadang. Karena itu ia mengambil keputusan untuk tidak perlu lagi lama-lama tinggal di Kutaraja, pada tanggal 10 Nopember ia kembali ke Medan. Betapa gawat keadaan waktu itu dapat dilihat pada hari keberangkatan rombongan Knottenbelt; kenderaan Teuku Nyak Arief terpaksa berjalan di depan sekali untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat mengancam jiwa utusan SASCEA itu[78].

Hasil penyelidikan Knottenbelt selama satu bulan lebih di daerah Aceh dituangkan dalam bentuk laporan Sementara yang sekaligus juga merupakan sebuah rekomendasi yang berharga bagi Sekutu dan Belanda dalam menentukan sikap selanjutnya. Adapun isi laporan itu seluruhnya adalah sebagai berikut :

> "Hendaknya dianggap sebagai kewajiban saya untuk memperingatkan di sini, bahwa, menurut hemat saya, adanya utusan Sekutu di Aceh dapat lebih memperburuk suasana. Sebab-sebabnya ialah: pertama, perselisihan paham yang timbul antara pihak Jepang dengan Indonesia mengenai masaalah "siapa yang berkuasa sekarang" yang sehari ke sehari menjadi semakin parah, ke dua, dengan adanya utusan Sekutu di tempat tahulah orang-orang Jepang, bahwa tindak tanduk mereka itu diamat-amati dan tahu pula orang-orang Indonesia, bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi orang-orang Jepang untuk tidak mentaati perintah-perin-

---

[77] Knottenbelt, *op. cit.*, menurut terjemahan, Aboe Bakar, PDIA, 13 Mei 1979.

[79] Lihat lebih lanjut, A.J. Piekaar, *op. cit.*, 248; Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 394, 402, 426; A. Hasymy & T.A. Talsya, *op. cit.*, hal. 30-3; T.A. Talsya, "Perjuangan Kemerdekaan di Aceh", *Santunan*, Tahun ke IV, no. 34, Agustus 1979, hal. 20.

tah SACSEA; ke tiga, Aceh dapat diibaratkan sebagai sebuah tong mesiu yang untuk meledaknya hanya diperlukan sebuah nyala api kecil, sementara seorang utusan SACSEA yang bijaksana dan ahli tidak akan mungkin dapat memadamkannya jika ia telah meledak, akan tetapi ia akan berguna sekiranya tangan yang mematikan api itu belum sempat mendatangkan suatu malapetaka"[79].

Berdasarkan laporan tersebut, maka pihak Sekutu tidak mendatangkan lagi utusannya ke Aceh dan rencana untuk menduduki daerah ini juga diurungkan. Demikian pula dengan pihak NICA, meskipun tidak sepenuhnya, mereka juga terpengaruh oleh rekomendasi Knottenbelt itu. Di sini ditulis "tidak sepenuhnya" dan "terpengaruh", karena, seperti juga telah disinggung di muka, tentara Nica, baik yang ditempatkan di Sabang maupun di Medan, selalu berusaha untuk mendarat di daerah Aceh, tetapi dengan perhitungan yang teliti dan hati-hati. Rencana pendaratan ini lebih digiatkan lagi setelah pecahnya aksi militer Belanda II, 18 Desember 1948. Pada waktu itu berkali-kali dilancarkan serangan udara terutama terhadap Komando Baterai Arteleri TNI di lapangan udara Lhok Nga dan beberapa kota lainnya, seperti Ulee Lheu, Sigli, Lhoksemawe, Langsa, Meulaboh dan sebagainya. Terhadap serangan-serangan tersebut selalu dibalas dengan meriam-meriam anti pesawat, yang di Aceh pada waktu itu dikenal dengan nama: *pompom*[80] Demikian pula dengan marine Belanda selalu berusaha melakukan percobaan pendaratan pada tempat-tempat yang strategis dan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Aceh, seperti: Ulee Lheu, Ujong Batee, Krueng Raya, Sigli, Ulee Kareung, Lhok Seumawe, Kuala Langsa, Meulaboh, Tapak Tuan dan lain-lain. Armada-armada perang Belandayang sering beroperasi di perairan Aceh pada waktu itu, antara lain Jan van Bukker, Banda dan Jan van Gallen[81] : Tetapi karena kuatnya pertahanan pantai yang diperlengkapi dengan meriam-meriam pantai hasil rampasan dari tentara Jepang serta dilandasi pula oleh semangat rakyat yang bergelora untuk mempertahankan kemerdekaan maka rencana pendaratan Belanda itu selalu menemui kegagalan. Rupanya apa yang ditunggu Belanda agar pada suatu waktu Aceh tidak lagi, sebagaimana disebutkan oleh Knottenbelt, sebagai tong mesiu yang kalau

---

[80] Uraian lebih lanjut, lihat, A.G. Mutiara, "Banda Aceh Pernah Berperan Sebagai Ibukota R.I.", *Seminar Perjuangan Aceh Sejak 1873 sampai dengan Kemerdekaan Indonesia,* Medan, Maret 1976; lihat juga, Hoesin Joesoef, *op. cit.,* hal. 50-1; A. Hasjmy & T.A. Talsya., *op. cit.,* hal. 25 – 8.

[81] Mengenai rencana dan usaha Belanda untuk mendarat di Aceh, lihat lebih lanjut dalam buku-buku pada cattatan kaki no. 80 di atas.

dinyalakan, dengan nyala api yang kecil sekalipun, akan mendatangkan malapetaka (tentunya bagi si penyala sendiri), tidak pernah tiba.

BAB IV
PERJUANGAN DI DAERAH ACEH

A. Masa Sebelum Aksi Militer Belanda I

Sehubungan dengan kegiatan perjuangan pada permulaan Revolusi Kemerdekaan di daerah Aceh, ada dua peristiwa penting yang terjadi di sana, yaitu : Peristiwa Cumbok dan Gerakan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) di bawah pimpinan Teungku Amir Husin Al Mujahid. Kedua peristiwa ini dapat disebutkan sebagai "perang saudara"; dan oleh karena dengan peristiwa ini pula, antara lain telah menyebabkan terhapusnya lembaga pemerintahan adat yang telah berdiri selama berabad-abad di Aceh (pemerintahan uleebalang yang di masa pemerintahan Belanda disebut *zelfbesturende landschappen, uleebalangschappen* dan sebagainya), maka sering juga disebut dengan istilah "Revolusi Sosial". Bagaimanapun dengan terjadinya peristiwa ini telah banyak membawa pengaruh ke dalam proses selanjutnya selama Revolusi Kemerdekaan di daerah Aceh; karena itu sudah selayaknya dalam bagian ini akan diuraikan secara lebih luas dan terperinci.

1. Peristiwa Cumbok.

Dalam bagian terdahulu telah dikemukakan, bahwa setelah berdirinya pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh (Keresidenan Aceh sejak 3 Oktober 1945) para pejabat pemerintahan yang diangkat oleh Jepang di wilayah *onderafdeeling*, yaitu para *guntyo*, masih tetap diakui sebagai kepala pemerintahan di sana. Mereka umumnya terdiri dari para uleebalang yang memang mempunyai keahlian untuk jabatan tersebut. Demikian juga dengan daerah-daerah uleebalang yang tetap diakui sebagai daerah berpemerintahan sendiri yang diperintah oleh para uleebalang (Teuku Chiek Raje, Datuk dan sebagainya) secara turun menurun sejak masa kerajaan Aceh Darussalam dan diperkuat kembali oleh pemerintah Kolonial Belanda sampai masa pendudukan Jepang. Tampaknya pemerintah RI di daerah Aceh pada waktu itu, yang umurnya baru beberapa bulan, belum ada kesempatan untuk memikirkan bagaimana status daerah-daerah "istimewa"[1] tersebut di

[1] "daerah istimewa" adalah istilah yang digunakan oleh, S.P.T.B. Goebernoer Soematera dari N.R.I., "Memperingati Satoe Tahoen Berdirinya N.R.I." *Satoe Tahoen N.R.I. Di Soematera* (17-8-1945 – 17-8-1946), Pemerintah Poesat Soematera, 1946, hal. 11

masa mendatang.

Sementara itu, para pemimpin rakyat yang selama masa pendudukan Jepang hampir tidak mendapat kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan, berhubung sikap permusuhan mereka terhadap Jepang baik secara terang-terangan maupun di "bawah tanah", sehingga mereka selalu dicurigai oleh pihak Jepang, semakin berperanan dalam pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh. Mereka semakin giat mengatur diri, terutama dalam organisasi perjuangan BPI/PRI, dalam rangka mempertahankan Kemerdekaan yang baru diproklamasikan itu; dan para pemimpin mereka terutama berasal dari kalangan ulama, tetapi ada juga dari kalangan bangsawan yang memakai gelar Tuanku, Teuku, Pocut dan sebagainya. Hal ini, antara lain yang menyebabkan timbulnya kecurigaan dari pihak para uleebalang, khususnya para uleebalang yang memerintah di daerah Pidie, baik sebagai *Guntyo* maupun sebagai kepala Pemerintahan daerah uleebalang. Maka khawatir kalau-kalau kedudukan mereka segera akan tergeser. Pertentangan ini sudah mulai nampak sejak pertama kali dinaikkan bendera Sang Merah Putih di sana, seperti yang terjadi dengan penaikan bendera di kantor *Guntyo* Teuku Cut Hasan di Sigli yang dilakukan oleh BPI, Teuku Cut Hasan menolaknya, sehingga Residen Teuku Nyak Arief terpaksa turun tangan, mengirim kawat ke sana, bahwa di tiap-tiap kantor pemerintah harus dikibarkan bendera Merah Putih[2]. Demikian juga di kota kedudukan uleebalang Cumbok, Lammeulo (sekarang Kotabakti, kira-kira 18 km dari Sigli), kota yang kemudian menjadi pusat kegiatan Peristiwa Cumbok itu.[3]

Perlu juga lebih dahulu dikemukakan di sini, untuk tidak menimbulkan salah pengertian, bahwa yang dimaksud dengan para uleebalang dalam uraian ini adalah kelompok uleebalang yang memegang pemerintahan, bersama-sama dengan pengikutnya. Jadi tidak dalam pengertian kaum uleebalang sebagai golongan bangsawan seluruhnya. Selama ini sering secara tajam dipisahkan, bahwa peristiwa yang terjadi itu adalah merupakan perang saudara antara golongan ulama dan golongan uleebalang. Dengan istilah uleebalang itu, seakan-akan mengandung pengertian golongan bangsawan seluruhnya, apa lagi bagi para pembaca yang kurang

---

[2] Nazaruddin Syamsuddin, The Course of the National Revolution in *Aceh, 1945-1949*, Thesis yang belum diterbitkan, (Monash University : 1974), hal. 122.

[3] *Ibid.*, hal. 123.

memahami kelompok sosial yang ada dalam masyarakat Aceh. Jangankan golongan bangsawan seluruhnya, di antara para uleebalang yang memegang pemerintahan, termasuk di daerah Pidie sendiri, seperti yang disebutkan di muka, ada yang tidak sependapat dan menentang Peristiwa Cumbok tersebut. Demikian juga dengan golongan ulama, seakan-akan ulama semua bersama-sama dengan pengikutnya. Padahal di antara mereka ada yang menggunakan gelar Tuanku, Teuku dan sebagainya (golongan bangsawan) banyak juga yang menduduki berbagai fungsi penting dalam kelompok yang diistilahkan dengan ulama, tetapi yang sebenarnya ulama lebih berperanan di dalamnya, itu. Bahkan ada di antara mereka yang selama ini dikenal sebagai pejuang kemerdekaan dan telah berjasa dalam menegakkan badan pemerintahan RI di daerah Aceh telah menjadi korban Peristiwa Cumbok maupun Gerakan Tentara Perjuangan Rakyat.

Dalam rangka penyusunan strategi perlawanan, tanggal 22 Oktober 1945 sejumlah uleebalang di daerah Pidie mengadakan pertemuan di kediaman Teuku Keumangan Umar (uleebalang IX Mukim Keumangan) di Beureunun. Pada waktu itu dalam wilayah, yang sekarang menjadi Kabupaten Pidie, ada 27 daerah uleebalang[4]; dan diantara uleebalang yang dengan tegas menolak untuk menghadiri pertemuan tersebut adalah uleebalang III Mukim Pineung, Teuku Bintara Pineung (ayah dari Mr. Moehammad Hasan yang pada waktu itu menjadi Gubernur Sumatra).[5] Dalam pertemuan itu dibahas berbagai masalah yang menyangkut ancaman terhadap kedudukan para uleebalang. Mereka berpendapat ancaman itu segera akan datang dalam negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan itu. Untuk menghadapi segala kemungkinan diputuskan: membentuk sebuah organisasi yang diberi nama *Markas Uleebalang* bersama dengan sebuah barisan ketentaraan yang namanya *Barisan Penjaga Keamanan* (BPK). Markas ini berkedudukan di Lammeulo dan di pimpin oleh Teuku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbok Muhammad Daud (uleebalang V Mukim Cumbok). Selain itu, dalam usaha mengkoordinasi kegiatan uleebalang di seluruh Aceh, pertemuan juga me-

[4] Mengenai nama daerah-daerah uleebalang tersebut, lihat Muhammad Ibrahim (Ketua), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, P3KD. Dep. P dan K, Jakarta, 1978/1979, hal. 44

[5] Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 123; lihat juga, Pemerintah R.I. Daerah Atjeh, *Revolusi Desember '45 di Atjeh*, tanpa angka tahun penerbitan, hal. 18.

nyetujui penunjukan Teuku Cut Hasan untuk mengambil inisiatif mendirikan organisasi *Perhimpunan Indonesia* yang markas besarnya akan ditempatkan di Kutaradja di bawah pimpinan Teuku Ahmad Danu kemudian ternyata bahwa organisasi ini tidak berkembang, terutama karena adanya penolakan dari Teuku Haji Chiek Muhammad Johan Alam Syah, uleebalang Peusangan yang pada waktu itu besar pengaruhnya di Aceh dan Teuku Chiek Muhammad Daud Syah, uleebalang Idi Rayeuk yang pada waktu itu menjabat *Guntyo* Langsa dan kemudian Residen Aceh).[6]

Untuk memperkuat Barisan Penjaga Keamanan (BPK) sebagai barisan ketentaraan, Markas Uleebalang berusaha giat untuk memperoleh senjata sebanyak mungkin dari Jepang, di samping permintaan bantuan keuangan serta sokongan lainnya dari para uleebalang di seluruh daerah Aceh. Karena itu tidak mengherankan apabila persenjataan tentara mereka pada waktu itu jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan tentara pemerintah, TKR dan barisan-barisan kelasykaran lainnya yang menjadi lawan mereka.[7] Kemudian Teuku Muhammad Daud Cumbok, selaku Ketua Markas Uleebalang, mengangkat adiknya, Teuku Mahmud untuk memimpin Barisan Penjaga Keamanan (BPK); dan oleh Teuku Mahmud, barisan ketentaraan itu dikelompokkan menjadi tiga kesatuan, yaitu :

a. Barisan Cap Bintang dengan tugas utama menghadapi perlawanan rakyat yang menentang kekuasaan para uleebalang itu.
b. Barisan Cap Sauh, dengan tugas utama di bidang usaha keuangan untuk membiayai gerakan mereka.
c. Barisan Cap Tumbak, dengan tugas utama menangkap para pemimpin rakyat yang menentang atau menghalang-halangi gerakan mereka.[8]

Dalam pada itu ketiga kesatuan Barisan Penjaga Keamanan (BPK) tersebut terus dilatih dan tampaknya sampai menjelang Nopember 1945, mereka telah siap untuk menyerang atau menghadapi penyerangan lawannya.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Markas Uleebalang mulai bertindak dengan memerintahkan tentaranya untuk menangkapi

---

[6] Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 123 – 4.

[7] S.M. Amin., *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hal. 132; Pemerintah R.I. Daerah Atjeh, *op. cit.*, hal. 16-8.

[8] Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 125-6. *Ibid.*, hal. 17.

anggota Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga Kantor Pos dan Kantor Telepon di Lammeulo[9]. Tanggal 3 Nopember 1945 beberapa pemuda yang dianggap lawannya dipukuli dan tanggal 8 Nopember 1945 Kantor PRI di Lameulo direbut, sehingga anggota organisasi itu terpaksa menyingkir dari sana[10] -Dengan demikian Lammeulo dan sekitarnya berhasil dikuasai oleh Markas Uleebalang.

Tindakan-tindakan Markas Uleebalang tersebut telah menggelisahkan Pemerintah Daerah di Kutaradja, karena itu Tuanku Mahmud, selaku Ketua Komite Nasional Daerah, mengirimkan wakilnya ke Lammeulo dalam rangka usahanya untuk menyelesaikan persengketaan dan kesalahapahaman secara damai. Tetapi tampaknya tidak mendapat sambutan dari Markas Uleebalang, bahkan di sana utusan pemerintah Daerah diperlakukan secara tidak wajar.[11] Hal ini telah membangkitkan amarah sebagian besar rakyat, yang tidak dapat menyetujui tindakan Markas Uleebalang itu, baik terhadap utusan pemerintah, maupun terhadap PRI, yang selama dua bulan ini diketahui telah berperanan dalam menggerakkan massa untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan. Dalam keadaan begini, di pihak lain muncul pula para pemimpin rakyat yang mulai mempersiapkan barisan perjuangan dalam rangka menghadapi kemungkinan tindakan yang lebih keras lagi dari pihak Markas Uleebalang. Karena para pemimpin dalam kelompok ini terdiri dari para Ulama dan pemuda maka tidak mengherankan apabila mereka didukung pendukung Markas Uleebalang, apalagi mereka juga selalu berdampingan dengan pihak Pemerintah Daerah.

Sementara itu suasana semakin bertambah tegang, terutama setelah tersiar secara luas dalam masyarakat, berita tentang pembentukan apa yang disebut, *Comite van Ontvangst* (Panitia penerimaan Belanda) di Lammeulo[12] (mungkin yang dimaksud adalah Markas Uleebalang itu sendiri, sebab tim peneliti tidak menemukan data mengenai adanya susunan pengurus panitia tersebut). Dan kemudian ditambah lagi dengan tertangkapnya beberapa anggota Markas Uleebalang, seperti yang terjadi di Bireun dan

---

[9] *Ibid.*

[10] *Ibid.*

[11] S.M. Amin, *loc. cit.*

[12] H.C. Zentgraaff, *Atjeh,* Terjemahan Aboe Bakar Bsf, pada halaman tambahan, hal. 416. Lihat juga Biro Sejarah Prima, *Medan Area Mengisi Prokalamasi,* jilid I, 1976, hal. 69; *Republik Indonesia. Propinsi Sumatera Utara,* 1953, hal. 63-4.

Idi pada permulaan Desember 1945,[13] yang dikatakan sebagai utusan untuk mengadakan kontak dengan Belanda di Medan. Disebutkan juga, dari mereka yang ditangkap itu telah ditemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti tentang adanya hubungan tersebut (sayangnya tim peneliti tidak berhasil menemukan dokumen-dokumen yang cukup meyakinkan, bahwa Markas Uleebalang telah berhasil mengadakan hubungan resmi dengan Belanda, baik di Medan, ataupun di Sabang, meskipun usaha ke arah ini mungkin saja dilakukan, mengingat tujuan gerakan mereka antara lain untuk mempertahankan status mereka, sebagai kepala pemerintahan adat di Aceh, yang pada waktu pemerintahah kolonial Belanda tetap dipertahankannya. Berita-berita mengenai adanya hubungan tersebut, juga diperoleh dari hasil interogasi beberapa tokoh Markas Uleebalang yang berhasil ditangkap pada akhir peristiwa itu, antara lain dari Teuku Cut Hasan dan Teuku Mahmud, Komandan Barisan Penjaga Keamanan yang pernah menegaskan sambil memperlihatkan kepada Mr. Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera yang ketika itu berada di Sigli tanggal 9-12 Desember 1945 dalam rangka perjalanan kerjanya ke Aceh, bahwa tentaranya juga menyematkan lencana Merah Putih pada pecinya, tidak seperti yang dituduh lawannya, lencana merah putih biru (bendera Belanda).[14] Sedang Teuku Muhammad Daud Cumbok, Ketua Markas Uleebalang yang dilaporkan telah menolak untuk mengucapkan kata-kata "Merdeka", ketika di interogasi tidak pernah menyebutkan tentang adanya hubungan dengan Belanda itu.[15] Sehubungan dengan ini, Mr. SM Amin, salah seorang pemimpin perjuangan selama Revolusi Kemerdekaan di Aceh, juga menyangsikan kebenaran adanya kontak tersebut, meskipun tidak bisa dibantah, pada saat-saat tersiarnya berita tentang kekalahan Jepang, ada unsur-unsur yang menghendaki kembalinya Belanda ke Aceh.[16] Bagaimanapun, dalam masalah ini, untuk adanya kejelasan sejarah diperlukan penelitian lebih lanjut!).

Setelah wilayah Lammeulo berhasil dikuasai sepenuhnya, Markas Uleebalang merencanakan lagi untuk menduduki kota Sigli

[13] Pemerintah R.I. Daerah Atjeh, *op. cit.*, hal. 23.

14 Nazaruddin Syamsuddin, op. cit., hal. 130 dan 145; juga wawancara kami dengan Mr. Muhammad Hasan.

[15] Ibid., lihat juga, Abdullah Hussain, Peristiwa, Kuala Lumpur, 1965, hal. 263., yang menyebutkan juga adanya hubungan tersebut.

[16] S.M. Amin, op. cit., hal. 152-6.

(sekarang ibukota kabupaten Pidie). Tanggal 25 Nopember 1945, sekitar jam 12 malam, tentara mereka Barisan Penjaga Keamanan (BPK) telah memasuki kota itu, dengan tujuan utama untuk memperoleh senjata dari tentara Jepang yang pada waktu itu masih menduduki kota tersebut. Tetapi sementara itu barisan rakyat di bawah komando para pemuda, terutama dari PRI, juga memasuki kota untuk mencegah jatuhnya senjata kepada pihak Markas Uleebalang. Ini berarti tahap bentrokan bersenjata secara frontal telah berada di ambang pintu; kedua belah pihak mulai melepaskan senjata mereka.

Dalam keadaan demikian, untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar, pihak TKR menuntut agar Jepang bersedia menyerahkan senjata kepada mereka, sebagai tentara resmi Pemerintah Republik Indonesia. Tetapi tuntutan TKR ini ditolak. Jepang menegaskan, bahwa mereka hanya bersedia menyerahkan senjata kepada "rakyat"; suatu penegasan yang menunjukkan bahwa Jepang ingin mengambil kesempatan untuk mengeruhkan suasana. Dengan ini Jepang mengharapkan dapat mempertahankan senjata yang ada di tangannya, sampai datang perintah lebih lanjut untuk meninggalkan kota tersebut.[17]

Karena itu, setelah ternyata Jepang menyerahkan sebagian senjatanya kepada pihak Markas Uleebalang, pada permulaan Desember 1945 terjadilah pertempuran sengit di kota Sigli dan sekitarnya. Puncak pertempuran yang telah menyebabkan banyak jatuh korban terjadi sejak tanggal 4 sampai 6 Desember 1945. Para pemimpin rakyat, Pemerintah Daerah dan TKR di bawah pimpinan Kolonel Syamaun Gaharu dan Mayor Teuku A. Hamid Azwar berusaha keras untuk menghentikan pertempuran. Atas usaha para pemimpin yang sadar akan bahaya yang mengancam persatuan itu, akhirnya pada tanggal 6 Desember pertempuran dapat dihentikan. Kedua belah pihak harus mengosongkan kota Sigli dan kembali ke tempat masing-masing; sedang senjata yang telah diserahkan oleh Jepang kepada Markas Uleebalang, BPK, harus diserahkan kembali kepada tentara resmi yang syah, yaitu TKR untuk dibawa ke Kutaradja. Untuk seterusnya kota Sigli berada di bawah penjagaan TKR dan polisi; dan apabila terjadi kembali kekacauan, kedua belah pihak harus bertanggung jawab.[18]

---

[17] Sejarah Militer Kodam-I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 92; S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 133-4.

[18] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 135; keputusan bersama tersebut, secara lengkap, lihat Pemerintah R.I. Daerah Atjeh, *op. cit.*, hal. 21-22.

Dengan terhentinya pertempuran di kota Sigli tidak berarti perdamaian telah tercapai. Ketetapan yang telah disetujui bersama itu, tidak seluruhnya ditaati. Pertempuran masih saja berlangsung di luar kota; dan Markas Uleebalang ternyata tidak mengembalikan seluruh senjata yang diperoleh dari Jepang kepada TKR. Kemudian, tanggal 10 Desember Markas Uleebalang untuk kedua kalinya mengadakan pertemuan di kediaman Teuku Laksamana Umar, Uleebalang Njong, di Lueungputu. Hasil pertemuan ini telah turut memperuncing suasana kembali dan ini berarti tidak menghiraukan lagi ketentuan yang telah disepakati bersama di Sigli, mereka bersepakat agar Markas Uleebalang bertindak lebih tegas lagi untuk menangkapi dan kalau perlu membunuh para pemimpin yang menentang gerakan mereka. Dan diharapkan akhir Desember 1945 pelaksanaan rencana ini sudah dapat selesai.[19]

Sehubungan dengan realisasi keputusan pertemuan Lueungputu, tentara Markas Uleebalang, BPL, segera bertindak. Mereka mulai melepaskan tembakan-tembakan terhadap kampung-kampung yang diperkirakan sebagai tempat pemusatan kekuatan lawan mereka; kemudian disusul pula dengan aksi pembakaran gedung-gedung yang diperhitungkan akan digunakan sebagai basis pertahanan atau tempat pertemuan pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin lawannya itu. Tanggal 16 Desember 1945 BPK, dengan senjata-senjata berat yang dimilikinya, menembaki kampung-kampung di sekitar Leungputu dan Metareum yang memang selama ini menjadi tempat pemusatan para pemuda, terutama dari organisasi PRI. Dan tanggal 20 Desember 1945 mereka membakar gedung sekolah agama di Tieteu serta kantor-kantor kehakiman di beberapa tempat.[20]

Untuk menghadapi tindakan Markas Uleebalang yang semakin meningkat itu, di pihak lain para pemimpin dan pemuda yang jiwanya tampak semakin terancam, mulai pula menyusun kekuatan secara lebih terpadu. Pada tanggal 22 Desember 1945 mereka mendirikan suatu organisasi yang diberi nama: Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) yang sementara berkedudukan di Gampong Garut, kemudian dipindahkan ke kota Sigli. Organisasi ini ternyata mendapat sambutan hangat dari sebagian besar rakyat; di mana-mana di seluruh daerah Pidie, didirikan barisan-barisan perjuangan yang tunduk di bawah komando MBRU itu. Akibatnya Markas

---

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*,

Uleebalang lebih meningkatkan lagi serangan-serangannya; tanggal 30-31 Desember tembakan-tembakan mereka kembali di arahkan ke Metareum, Langga, Ilot dan Lala, sehingga kampung-kampung ini dan sekitarnya mengalami kerusakan berat.[21]

Dalam pada itu Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) juga mulai bergerak. Gerakan mereka diawali dengan sebuah Maklumat yang ditujukan kepada kaum muslimin pengikut mereka yang pokok isinya adalah jangan membakar rumah dan mengambil harta orang serta orang-orang yang ditangkap harus diperlakukan dengan baik.[22] Suatu seruan yang secara psikologis telah dapat menarik simpati rakyat tetapi sebelumnya dilupakan oleh pihak Markas Uleebalang - walaupun mungkin saja, seperti umumnya dalam suatu pertempuran, isi maklumat tersebut tidak akan terlaksana sepenuhnya. Sementara itu kekacauan tidak saja terjadi di wilayah-wilayahnya Lammeulo, Beureunun dan Leuenputu, tetapi telah meluas hampir ke seluruh daerah Pidie, sejak dari Meureudu pada perbatasan Aceh Utara sampai ke daerah Uleebalang XII Mukim Pidie pada perbatasan Aceh Besar.

dengan bertambah meluasnya "perang saudara" di wilayah Pidie itu, Pemerintah Daerah di Kutaradja semakin khawatir akan bahaya yang sedang mengancam, terutama dalam kaitan dengan kekuatan perjuangan yang pada waktu itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi kemungkinan tentara NICA, yang memang sebagaimana diuraikan di muka telah merencanakan, melancarkan penyerbuan ke daerah Aceh. Karena itu, tanggal 6 Januari 1945 Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh (badan yang mengkoordinasi kegiatan militer di daerah Aceh, didirikan dalam bulan Desember 1945) mengadakan sidangnya yang pertama untuk membahas situasi di Pidie. Dan kemudian dilanjutkan dengan sidangnya yang kedua tanggal 8 Januari; dalam sidang-sidang ini tokoh-tokoh yang telah berperanan, dalam memberikan pendapat dan juga tokoh yang telah berperanan, dalam memberikan pendapat dan juga laporan ialah Ketua Markas Umum sendiri (Syamaun Gaharu, dari TKR), Teungku Mohd Daud Beureuh dari Mujahiddin,,,, Ali Hasjmy dari Pesindo (keduanya dalam sidang pertama tidak hadir), Ismail Yakob (salah seorang tokoh PUSA, tetapi di sini mewakili PNI) serta Husin Yusuf dan

---

[21]. *Ibid.*,

[22]ke empat fasal ini maklumat tersebut, lihat *ibid*,, hal. 27.

Teuku Muhammad Syah, yang keduanya mewakili TKR.[23] Setelah sidang selesai dan setelah adanya desakan dari Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh, pada tanggal 8 Januari itu Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh, bersama dengan Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh (disingkat : Markas Umum Daerah Aceh) mengeluarkan Maklumat dan Ultimatum yang ditunjukan kepada Markas Uleebalang di Lammelo. Kedua pernyataan ini ditandatangani oleh Wakil Residen Aceh, Teuku Panglima Polem Mohd Ali dan Syamaun Gaharu, selaku Ketua Markas Umum Daerah Aceh.

Dalam Maklumat tersebut Pemerintah Daerah dan Markas Umum Daerah Aceh menyatakan, setelah diadakan penyelidikan secara mendalam, bahwa mereka yang mengadakan perlawanan di daerah Cumbok, Lammeulo dan di tempat-tempat lain dalam wilayah Pidie adalah "musuh Negara Republik Indonesia". Dan diperingatkan bagi orang-orang yang telah terpengaruh agar menghindari diri dari mereka, kalau tidak mereka juga akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahannya.[24] Sedang Ultimatum yang mengiringi Maklumat tersebut, isinya memerintahkan mereka, yang telah dinyatakan sebagai musuh Negara Republik Indonesia itu, mulai hari Kamis tanggal 10 Januari 1945, jam 12 siang, supaya menghentikan perlawanan dan menyerah; kalau tidak, mereka akan ditundukkan dengan kekerasan.[25]

Ternyata Ultimatum yang dikeluarkan Pemerintah itu tidak diindahkan sama sekali oleh pihak Markas Uleebalang. Aksi-aksi mereka tidak menjadi reda, bahkan semakin meningkat. Daerah yang cukup parah dilanda oleh aksi perlawanan mereka, selain Lammeulo, juga Meureudu, dan lain-lain. Ada dua faktor yang cukup menentukan, sehingga Markas Uleebalang menolak untuk menyerah. Pertama, perhitungan mengenai adanya kemampuan mereka untuk bertempur sampai tercapai kemenangan, mengingat persenjataan yang dimilikinya jauh lebih kuat, bila dibandingkan dengan TKR, apalagi dengan senjata yang dimiliki barisan pengikut Markas Besar Rakyat Umum (MBRU). Kedua, "hukuman" yang dijatuhkan kepada mereka, justeru oleh Pemerintah sendiri, melalui Maklumatnya itu sebagai pengkhianat dan musuh Negara,

---

[23] Uraian selengkapnya, lihat Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 141-3

[24] Isi selengkapmnya Maklumat tersebut, lihat S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 137.

[25] Isi selengkapnya Ultimatum tersebut, lihat, *Ibid.*, Juga, Pemerintah R I. Daerah Atjeh, *op. cit.*, hal. 27.

bahkan dipertegas lagi oleh kelompok lawannya, sebagai kakitangan NICA[26] pengkhianat Bangsa dan Agama,[27] tampaknya terlampau berat dirasakan dan besar sekali konsekuensinya. Dengan ancaman "hukuman" yang dijatuhkan itu mereka memperkirakan bahwa setelah menyerah akhirnya juga mereka, setidak-tidaknya terbatas terhadap para pemimpin mereka, akan dihadapkan ke "pengadilan revolusi" sesuai dengan suasana revolusi pada waktu itu. Karena itu mereka bertekad lebih baik meneruskan perlawanan dan mati di medan pertempuran.

Setelah batas waktu yang ditentukan berlalu, maka TKR dengan didukung oleh barisan yang berada di bawah komando MBRU mulai bertindak.. Satu demi satu kota-kota, seperti Meureudu, Leungputu, Beureunun dan lain-lain, dalam waktu yang relatif singkat berhasil dibersihkan dari pengikut Markas Uleebalang. Kemudian seluruh kekuatan di arahkan ke Lammeulo, yang belum dapat dikuasai. Dengan di dukung oleh satuan-satuan tambahan yang khusus didatangkan dari Kutaradja akhirnya pada tanggal 13 Januari 1946, TKR berhasil merebut kota kedudukan Markas Uleebalang itu, meskipun selama ini tentara mereka, Barisan Penjaga Keamanan (BPK) dengan sekuat tenaga telah mempertahankannya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam suasana kemenangan, pada hari itu juga (13 Januari) Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) mengeluarkan sebuah Maklumat yang memberitahukan bahwa kekuatan Markas Uleebalang telah dapat dipatahkan dan karena itu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang. Ditegaskan lagi, bahwa merampas dan menggelapkan harta pihak lawan dilarang keras; sedang senjata-senjata yang dirampas dari mereka harus diserahkan kembali kepada Markas Besar Rakyat Umum (MBRU).[28]

Setelah kota Lammeulo jatuh, sisa-sisa pasukan Barisan Penjaga keamanan (BPL) bersama dengan para pemimpin Markas Uleebalang lainnya, termasuk Teuku Muhammad Daud Cumbok sendiri, mengundurkan diri ke gunung-gunung dengan maksud

---

[26] Maklumat Penjelasan Markas Besar Rakyat Umum, tanggal 17 Januari 1966.

[27] S.M, Amin *op. cit.*,hal. 152-3

[28] Isi selengkapnya Maklumat tersebut, lihat Pemerintah R.I. Daerah Atjeh *op. cit.*, hal. 28 – 9.

hendak meneruskan perlawanan secara bergerilya. Namun dalam waktu tiga hari saja, pada tanggal 16 Januari 1946, mereka dapat ditangkap semuanya. Mereka yang tertangkap itu, terutama para pemimpin mereka, dibawa ke Sigli, lalu ke Sanggeue untuk dimintai berbagai keterangan sehubungan dengan kegiatan mereka selama ini; dan selanjutnya untuk "diadili". Kemudian untuk lebih diketahui dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat mengenai gerakan Markas Uleebalang yang telah berhasil dipatahkan itu, pada tanggal 17 Januari 1946 sekali lagi Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) mengeluarkan sebuah Maklumat. Pada dasarnya isi Maklumat, yang diberi nama "Maklumat Penjelasan" itu, adalah merupakan kelengkapan penjelasan dari Maklumat yang terdahulu (13 Januari).[29]

Selain itu dapat ditambah, salah satu faktor yang juga turut mempercepat kekalahan pihak pengikut Markas Uleebalang meskipun mereka kuat di bidang persenjataan, adalah, bahwa aksi-aksi mereka tidak terkoordinasi dengan baik. Mereka bertempur di daerahnya masing-masing dan selama pertempuran itu kontak dengan daerah Uleebalang lainnya dapat dikatakan putus sama sekali. Sebaiknya kekuatan mereka dipusatkan di daerah-daerah yang dipandang cukup strategis untuk dipertahankan bersama; tidak terkurung di daerah masing-masing sampai tiba saatnya untuk menerima kekalahan.[30] Sebaliknya pihak Markas Besar Rakyat Umum (MBRU), meskipun lemah di bidang persenjataan, mereka mempunyai kekyatan yang cukup menentukan untuk merebut kemenangan, yaitu dukungan rakyat dari segenap lapisan. Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah dan TKR, yang berada di pihak MBRU, dalam mengakhiri perlawanan Markas Uleebalang dan pengikut-pengikutnya itu.

Dengan demikian peristiwa Cumbok yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan itu, secara fisik telah dapat dipatahkan. Namun, ini tidak berarti bahwa berbagai akibat yang ditimbulkannya, seperti masalah harta peninggalan Markas Uleebalang, perlunya perlindungan Pemerintah Daerah terhadap famili/keluarga mereka yang ditinggalkan dan lain-lain dengan sendirinya telah terselesaikan pula. Bahkan lanjutan "perang saudara" itu segera

---

[29] Isi selengkapnya Maklumat tersebut, lihat, *Ibid.*, hal. 32-5; juga S.M. Amin, op. cit.m hal. 139-41.

[30] Lihat lebih lanjut, *A.J. Piekaar,* Atjeh en de Oorlog met Japan, *1949, hal.* 250.

mulai nampak kembali, meskipun tidak sehebat yang pertama. Rupanya penyakit yang menurut Tuanku Mahmud dijangkitkan oleh, suntikan "serum" buatan Belanda dan Jepang, yakni "penyakit pecah belah"[31]. masih saja berjangkit dalam kalangan masyarakat Aceh dan tidak sembuh bersamaan dengan berakhirnya peristiwa Cumbok itu. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam uraian-uraian berikutnya.

2. Gerakan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR).

Gerakan ini bermula di Idi, Ibu kota *Onderafdeeling* Idi, termasuk wilayah *Afdeeling* Aceh Timur dan juga menjadi kedudukan Uleebalang Idi Rayeuk. Kota ini semakin penting kedudukannya dan menjadi lebih dikenal di seluruh daerah Aceh, setelah pada tahun 1940, Kwartir Induk gerakan kepanduan PUSA, Kasyafatul Islam, ditempatkan di sana di bawah pimpinan Teungku Amir Husin Al Mujahid. Sebagaimana diketahui, gerakan kepanduan PUSA itu dalam waktu yang relatif singkat sudah tersebar ke pelosok-pelosok daerah dan termasuk organisasi kepanduan yang terkuat, baik dalam jumlah anggotanya, maupun dalam disiplinnya, di Aceh pada masa itu.[32]

Setelah berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai ke daerah Aceh, karena di dorong oleh semangat yang bergelora dan rasa tanggung jawab untuk mempertahankan Proklamasi itu, para anggota Kasyafatul Islam bersama dengan pemuda-pemuda lainnya, segera mengorganisasi diri dalam barisan-barisan kelasykaran, yang bersama-sama dengan Alat Negara resmi, yaitu API kemudian TKR, juga telah ikut berperanan, pada permulaan Revolusi, dalam kegiatan mengalihkan senjata-senjata tentara Jepang kepada pihak Indonesia. Demikian juga dengan Kwatir Induknya di Idi; di bawah pimpinan ketuanya sendiri, Teungku Amir Husin Al Mujahid, telah disusun menjadi salah satu laskar rakyat yang cukup kuat di Aceh Timur, kalau tidak dikatakan seluruh Aceh. Barisan kelasyakaran inilah kemudian, pada awal Pebruari 1946 menjelma menjadi Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) yang pada bulan Juni 1946 namanya diganti lagi menjadi Barisan Berani Mati Divisi Teungku Chiek Paya Bakong (lihat BAB III).

---

[31] Toeankoe Machmoed, "Setahoen N.R.I.", Pemerintah Poesat Soematera, op. cit., hal. 49 – 50.

[32] Mengenai gerakan kepanduan PUSA itu, lihat lebih lanjut, Muhammad Ibrahim (ketua), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Aceh, P3KD*, 1978, hal. 124–8.

Pada Akhir Desember 1945 anggota-anggota lasykar pimpinan Teungku Amir Husin al Mujahid itu juga ikut bersama-sama dengan TKR membendung tentara Jepang yang berusaha hendak masuk kembali ke Aceh melalui Aceh Timur (lihat juga BAB III). Pada akhir Januari 1946 tentara Jepang tersebut berhasil dipukul mundur kembali ke Medan dan setelah itu para anggota lasykar juga kembali ke induk pasukannya masing-masing. Sedang sebelumnya, yaitu pada pertengahan Januari 1946 sebagaimana telah diuraikan di muka, pihak TKR bersama-sama dengan Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) juga telah berhasil mengakhiri Peristiwa Cumbok di Pidie. Dengan demikian untuk masa selanjutnya tampaknya Aceh akan mengarah kepada keadaan aman dan damai.

Namun dalam suasana "mengaso" pada waktu itu, dari kalangan para pemimpin barisan kelasykaran di Idi, termasuk Teungku Amir Husin al Mujahid sendiri, mulai timbul rasa tidak puas sehubungan dengan masalah penyelesaian Peristiwa Cumbok. Menurut penilaian mereka perebutan Markas Uleebalang di Lammeulo dan penghancuran kekuatannya di perbagai tempat dalam wilayah Pidie oleh TKR dan MBRU (mereka sendiri tidak ikut) tidak sempurna. Mereka berpendapat masih ada para pengikut Markas Uleebalang yang tetap duduk dalam badan-badan pemerintahan, tidak saja di Pidie bahkan di seluruh daerah Aceh. Karena itu mereka berkesimpulan Revolusi Sosial belum lagi selesai dan masih perlu dilanjutkan untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang menurut anggapan mereka, "berbahaya" bagi keutuhan dan kelanjutan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh.

Untuk melaksanakan rencananya itu, Teungku Amir Husin al Mujahid mengadakan hubungan dengan Mayor Husin Yusuf, Ajudan Staf Umum Divisi V TRI (TKR yang diganti namanya sejak awal Januari 1946), yang pada waktu itu atas keizinan Komandan Divisi, Kolonel Syamaun Gaharu, berada di Bireun. Dalam pertemuan itu telah dibahas berbagai persoalan yang menyangkut rencana yang akan digerakkan itu.[33] Rupanya kedua tokoh ini sependapat mengenai perlunya dilanjutkan revolusi sosial tahap kedua di daerah Aceh; dan ternyata apa yang direncanakan itu tidak pernah dilaporkan oleh Husin Yusuf kepada atasannya di Kutaradja.[34]

---

[33] Lihat lebih lanjut, Aboe Bakar, Bsf, *op. cit.*, hal. 43-44; Nazaruddin Syamsuddin, op. cit., hal. 152-3.

[34] *Ibid.*

Setelah rencana mereka matang dan lasykarnya diperkuat serta diganti namanya seperti telah disebutkan di atas menjadi TPR (Tentara Perjuangan Rakyat), maka pada awal Pebruari itu juga mereka mulai melancarkan gerakannya. Sasaran pertama gerakan TPR itu adalah wilayah Aceh Timur sendiri. Di daerah ini, terutama di Idi, Langsa dan Kuala Simpang (daerah Teumiang) telah ditangkap, dan kalau perlu "diamankan", sejumlah orang-orang yang dicurigai dan dianggap sebagai lawan mereka, antara lain, yang termasuk tingkat pimpinan, ialah: Teuku Ali Basyah (Wedana Langsa), Teuku Abdullah Paloh, Keujreun Karang dan masih banyak lagi. Mengenai Teuku Abdullah Paloh, atas kebaikan Teuku Mohd Amin, salah seorang tokoh pimpinan Pusat PUSA, berhasil diselamatkan; ia dibebaskan dan dipindahkan ke Kutaradja. Sedang Teuku Ali Basyah bersama dengan tahanan lain yang selamat, lepas dari maut, kemudian dibawa ke Takengon. Sebagai Wedana Langsa yang baru mereka tunjuk Abdullah Hussain (pada waktu itu Kepala Polisi Langsa) dan untuk Asisten Residen Aceh Timur ditunjuk pula Teuku Mohd Ali, adik Teuku Chiek Muhammad Daudsyah yang pada waktu itu telah ditarik ke kantor Residen di Kutaradja.[35]

Selanjutnya, setelah wilayah Aceh Timur berhasil "dibersihkan" dari, apa yang disebutkannya, anasir-anasir anti Republik, maka TPR bergerak menuju ke Aceh Utara. Di sana mereka berhadapan dengan lawannya yang kuat, yaitu Barisan Teuku Ibrahim Panglima Agung, suatu gerakan yang muncul bersamaan dengan lahirnya TPR itu. Teuku Ibrahim adalah anak dari Uleebalang Cunda dan keponakan Teuku Raja Bujang, Uleebalang Nisam, salah seorang pejuang kemerdekaan yang pernah dibuang ke Boven Digul (Irian Jaya) oleh Pemerintah Kolonial Belanda dulu.[36] Oleh karena itu, sebagai keponakan seorang pejuang yang dicintai rakyat, tidak mengherankan apabila Teuku Ibrahim yang menyebut dirinya sebagai "Panglima Agung" mendapat dukungan kuat di Aceh Utara. Dan ternyata TPR tidak mampu mengalahkan gerakan Teuku Ibrahim Panglima Agung itu, sehingga Teungku Mohd Daud Beureueh perlu mengirimkan pasukan tambahan berdasarkan permintaan Teungku Amir Husin Al Mujahid di bawah pimpinan Daud Tangse.[37] Perlu juga dikemukakan, bahwa selama ke-

---

[35] Abdullah Hussain, *op. cit.*, hal. 176-86.

[36] Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 154. Mengenai kegiatan Teungku Raja Bujang, lihat Muhammad Ibrahim (ketua), *op. cit.*, hal. 57.

[37] Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 154-5.

kacauan di wilayah Aceh Utara itu, telah turut korban Teuku Raja Sabi, yang pada waktu itu Uleebalang Keureto, seorang pejuang kemerdekaan yang telah menghabiskan sebagian usia mudanya bergerilya di gunung-gunung (sampai tahun 1919) mengikuti jejak orang tuanya, Cut Nyak Meutia, menentang penjajahan Belanda.[38] Setelah Proklamasi ia juga tidak tinggal diam, giat menyusun kekuatan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang memang selalu menjadi cita-citanya.[39]

Kemudian, langkah berikutnya dari gerakan TPR adalah daerah Pidie, pusat gerakan Markas Uleebalang yang telah dihancurkan itu. Dapat ditambahkan selama operasinya itu, TPR selalu mendapat tambahan pengikut di tempat-tempat yang disinggahi, sehingga pada waktu mereka sampai di Aceh Besar dan Kutaradja, kekuatannya sudah cukup besar. Dan setelah pasukannya diperkuat lagi dengan sejumlah anggota Kesatria Pesindo[40] dari Kutaradja mereka bergerak pula menuju pesisir Barat Aceh dalam rangka menyelesaikan "tugasnya" yang terakhir.

Di Kutaradja, selain melakukan penangkapan terhadap diri Teuku Husin Trumon (Asisten Residen Aceh Besar), juga TPR pimpinan Teungku Amir Husin al Mujahid itu menuntut agar Teuku Nyak Arief mengundurkan diri, baik sebagai Residen Aceh, maupun sebagai anggota Staf Umum TRI Komandemen Sumatera. Selain itu mereka juga menuntut agar Kolonel Syamaun Gaharu meletakkan jabatannya sebagai Komandan Divisi TRI Aceh (Divisi V TRI Sumatera). Karena pada waktu Kolonel Syamaun Gaharu tidak lagi menjabat sebagai Ketua Markas Umum, TPR tidak perlu lagi meminta dia berhenti. Markas Umum itu, setelah peristiwa Cumbok, pada tanggal 29 Januari 1946 telah dihapuskan dan diganti dengan Dewan Perjuangan Daerah Aceh dengan ketua dan wakil ketuanya masing-masing, Teuku Mohd Amin dan Ali Hasjmy.[41]

Demi untuk tetap terpeliharanya keutuhan dan persatuan bangsa yang sangat dibutuhkan pada waktu itu dan untuk tidak

---

[38] Mengenai perjuangan Teuku Raja Sabi, lihat Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 200 dst.

[39] Atas jasa-jasanya itu, Pemerintah Ri telah mengangkatnya menjadi Perintis Kemerdekaan (Keputusan Menteri Sosial, tanggal 28 Juli 1965, No. pol. 585/65/PK).

[40] SM Amin, *op. cit.*, hal. 158

[41] Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 150

terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi, maka Teuku Nyak Arif dan Syamaun Gaharu bersedia meletakkan jabatannya. Pada awal bulan Maret 1946 Teuku Nyak Arif menyerah terimakan jabatan Residen Aceh kepada Teuku Muhammad Daud-Syah, Uleebalang Idi Rayeuk yang sebelumnya telah memangku jabatan sebagai Asisten Residen Aceh Timur dan kemudian sebagai asisten residen diperbantukan pada kantor Residen Aceh. Sedang jabatan Teuku Nyak Arif sebagai Staf Umum TRI Komandemen Sumatera dengan pangkat Jendral Mayor Tituler, tanpa lebih dulu mendapat persetujuan Komandan Tertinggi TRI Sumatera, telah diserah terimakan bersama dengan pangkatnya kepada Teungku Amir Husin Al Mujahid, pimpinan tertinggi TPR itu. Kemudian Teuku Nyak Arief diasingkan ke Takengon dan pada tanggal 4 Mei 1946 Pemimpin Rakyat yang telah menghabiskan usianya untuk kemerdekaan tanah airnya itu meninggal dunia di sana.[42] Selanjutnya, setelah staf divisi TRI mengadakan pertemuan di rumah kediaman Teuku Panglima Polem Mohd Ali (Wakil Residen Aceh), maka Kolonel Syamaun Gaharu juga menyerah-terimakan jabatannya kepada Husin Yusuf, salah seorang bawahannya (Ajudan Staf Umum Divisi dengan pangkat Mayor) yang telah pernah mengadakan pertemuan rahasia di Bireun dengan Teungku Amir Husin Al Mujahid sehubungan dengan rencana gerakan TPR itu.[43] Dan tanggal 12 Maret 1945, berdasarkan Maklumat TRI No. 4 tahun 1946 yang dikeluarkan oleh "Jendral Mayor Teungku Amir Husin al Mujahid", selaku "Anggota Staf Umum TRI Komandemen Sumatera" (pangkat dan jabatan yang diperoleh dari Teuku Nyak Arief) disusunlah staf pimpinan TRI Aceh (Divisi V TRI Sumatera) yang baru, yaitu: sebagai Komandan Divisi, Husin Yusuf dengan pangkat, sama dengan Syamaun Baharu, kolonel; wakil, Nurdin Sufi dengan pangkat Letnan Kolonel dan Kepala Staf Divisi, Bachtiar dengan pangkat Mayor; serta dilengkapi dengan personalia kepala-kepala bahagian divisi sampai kepada staf pimpinan resimen.[44]

Tindakan-tindakan Teungku Amir Husin al Mujahid bersama dengan TPR-nya itu, rupanya telah menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat Aceh, termasuk dalam kalangan militer sendiri.

---

[42] Mengenai hidup dan perjuangan Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief, lengkapnya, lihat, Hardanas Safwan, *Teuku Nyak Arief*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional Departemen P dan K, Jakarta 1975.

[43] Mengenai serah terima jabatan itu, lihat selengkapnya wawancara Aboe Bakar Bsf dengan T. Mohd. Syah, Aboe Bakar Bsf, *op. cit.*, hal. 431-4.

[44] Susunan selengkapnya staf pimpinan yang diperbaharui itu, lihat, Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 114-6.

Banyak orang yang tersinggung akibat perlakuan mereka, yang dianggap tidak wajar, terhadap para pemimpin yang selama ini dinilai oleh rakyat besar jasanya dalam membina Negara Republik Indonesia di daerah Aceh. Rasa tidak senang itu semakin meluas, setelah ternyata Teungku Amir Husin al Mujahid sendiri, kemudian menjadi orang terkemuka dalam militer dan berkuasa di Aceh. Karena itu tidak mengherankan ketika dari kalangan militer timbul sebuah kelompok yang merencanakan untuk menjatuhkan Teungku Teungku Amir Husin al Mujahid dari kedudukannya. Pada akhir April 1946 kelompok ini berhasil menculik Teungku Amir Husin al Mujahid di tempat ia menginap, Hotel Aceh, Kutaradja. Kemudian ia dibawa ke Sigli dan diserahkan kepada Teungku Abdul Wahab Seulimeum, seorang tokoh Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) yang pada waktu itu telah ditunjuk sebagai pejabat Bupati Kabupaten Pidie (sebagai Bupati yang definitif, baru pada bulan Agustus 1946, setelah datang surat ketetapan Gubernur Sumatera, lihat, lampiran). Di Sigli, Teungku Amir Husin al Mujahid, direncanakan oleh kelompok yang menculiknya, akan dipertemukan dengan Syamaun Gaharu dan dalam pertemuan itu ia akan diminta untuk memberi penjelasan serta sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya selama ini. Tetapi di sana, berkat usaha para pengikutnya, Teungku Amir Husin al Mujahid berhasil dibebaskan dan selamat dari bahaya yang sedang mengancamnya, sehingga ia dapat kembali menduduki jabatannya semula.[45]

Dengan demikian, setelah peristiwa penculikan Teungku Amir Husin al Mujahid, maka berakhir pula revolusi sosial yang telah banyak menelan korban jiwa, harta dan tenaga justru di saat sedang bergeloranya Revolusi Kemerdekaan Indonesia di daerah Aceh. Setelah itu daerah-daerah Uleebalang, yang dianggap sebagai sumber yang menyebabkan terjadinya "perang saudara" tersebut, dihapuskan dan diganti dengan "Negeri", yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Kecamatan. Untuk menggerakkan roda pemerintahan di Kenegerian itu, dibentuk Dewan Pemerintahan Negeri yang anggotanya terdiri dari 5 orang dan salah satu dari mereka ditunjuk menjadi ketuanya (Kepala Negeri).[46]

---

[45] Mengenai penculikan Teungku Amir Husin al Mujahid, lihat lebih lanjut wawancara Aboe Bakar Bsf dengan Abdullah Masry, Aboe Bakar Bsf, *op. cit.* hal. 434-48. Lihat juga Nazaruddin Syamsuddin, *op. cit.*, hal. 169-70.

[46] HTM Amin, *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*, MSI. 1976, hal. 5-6

Dengan berakhirnya revolusi sosial tidak berarti kegelisahan dalam masyarakat Aceh berakhir pula. Adanya usaha-usaha dari anasir yang tidak berhak untuk mengambil harta peninggalan pihak uleebalang yang telah dikalahkan itu dan tidak terjaminnya keselamatan jiwa, dengan adanya penganiayaan-penganiayaan terhadap, famili mereka atau yang dianggap sebagai sisa-sisa pengikut mereka, bukan tidak mustahil akan menyebabkan meletusnya perang saudara kembali. Untuk itu pemerintah daerah harus mengatasinya secepat mungkin. Sehubungan dengan masalah peninggalan harta mereka, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, pada tanggal 24 Juni 1946 telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1/1946, yaitu: "Peraturan Tentang Menguasai atau Memiliki Harta Benda Peninggalan Uleebalang-Uleebalang Daerah Aceh".[47] Dalam peraturan itu (pasal 1) dikemukakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Daerah ditugaskan untuk membentuk Majlis Penimbang. Adapun susunan pengurus Majlis Penimbang yang kemudian dibentuk oleh Pemerintah Daerah itu, adalah sebagai berikut: sebagai ketua I, II, III, IV, V dan VI, masing-masing ditunjuk, Teungku Abdul Wahab Seulimeun (Bupati Pidie), M. Husen, Teungku Haji Mustafa Ali, Hasan Ali, Teuku Mohd Amin dan Teungku Itam Peureulak; sedang Panitera umum ditunjuk Teungku Nyak Umar.[48]

Sehubungan dengan masalah adanya gangguan/penganiayaan terhadap famili atau yang dituduh sebagai sisa-sisa pengikut Markas Uleebalang, dalam rangka menjamin keselamatan mereka, juga Pemerintah Daerah mengeluarkan sebuah ketetapan, yaitu: Ketetapan Residen Aceh tertanggal 13 Agustus 1946, No. 59/NRI.[49] Dalam ketetapan itu disebutkan tempat tinggal khusus bagi mereka dan selama di sana kepada mereka diberikan sokongan sebanyak 100 Rupiah, sebulan ditambah dengan sumbangan beras seperti yang dibagikan kepada pegawai negeri pada waktu itu. Adapun tempat yang dimaksud sebagai tempat tinggal mereka yang dianggap "berbahaya" itu tidak lain adalah Kota Takengon dan sekitarnya. Di sana mereka ditempatkan pada tiga tempat yang terpisah, yaitu: desa Sadong (Teuku Nyak Arief ditempatkan di sini), penjara Takengon dan penginapan Suka Jaya.[50] Dan di antara me-

[47] Isinya, pasal demi pasal, lihat, S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 147-51.
[48] H.T.M. Amin, *op. cit.*, hal. 7.
[49] Isi selengkapnya ketetapan ini, lihat, S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 144-6.
[50] Nazaruddin Syamsuddin, op. cit., hal. 161-2.

reka yang dinyatakan ditahan, tetapi tidak sempat dibawa ke Tekengon berhubung telah ke luar dari daerah Aceh, ialah Syamaun Gaharu dan Teuku A Hamid Azwar, dan tokoh militer yang sebelumnya aktif berusaha untuk mengakhiri perang saudara di daerah Pidie, namun karena keduanya berselisih paham dengan pihak TPR, maka mereka dinyatakan juga sebagai orang yang "berbahaya" dan karenanya perlu "diamankan". Mengenai mereka yang ditahan itu, kemudian secara bertahap mulai dibebaskan, yaitu setelah dilakukan penilaian oleh Badan Penyelidik Keadaan Orang-orang Tahanan Rakyat, suatu Badan yang dibentuk Pemerintah Daerah pada bulan April 1947 dengan anggota-anggotanya terdiri dari Teuku Mohd Amin (mewakili pemerintah), Teungku Abdul Rachman dari Masyumi dan Teungku Ishak Amin dari Pesindo.[51] Namun baru pada tahun 1949 para tahanan itu dinyatakan bebas semuanya.

Dengan usaha-usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah, sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan perang saudara yang telah berlangsung selama 6 bulan lebih itu tidak akan terulang lagi. Dengan demikian seluruh tenaga dapat diarahkan sepenuhnya bagi perjuangan menghadapi ancaman pihak kolonial Belanda yang pada waktu itu semakin giat berusaha untuk menduduki Indonesia kembali.

B. Masa Aksi Militer Belanda Pertama

Sebagaimana dapat kita lihat dalam uraian terdahulu, sejak awal Proklamasi sampai Aksi Militer Belanda Pertama, daerah Aceh masih dapat dikatakan terhindar dari ancaman Belanda secara langsung. Tampaknya Belanda, yang sudah cukup berpengalaman dalam menundukkan perlawanan rakyat Aceh sejak tahun 1873, hingga perempatan pertama abad ini, perlu mengadakan perhitungan yang lebih matang untuk menyerang Aceh, pada waktu agresi militer mereka yang pertama terhadap daerah-daerah lain di Republik ini. Di pihak lain, para pemimpin rakyat di Aceh, dengan bercermin kepada peristiwa-peristiwa sejarah, yakin bahwa pada suatu ketika Belanda juga akan menyerang Aceh bila daerah-daerah lainnya di Indonesia telah berhasil mereka taklukkan.

Berdasarkan pemikiran itu, para pemimpin revolusi kemerdekaan telah menyusun kekuatan bersenjata. Di samping mem-

---

[51] SM. Amin, *op. cit.*, hal. 146-7.

bangun kekuatan fisik, mereka juga tidak mengabaikan pembinaan mental rakyat dengan membangkitkan semangat jihad mereka. Dengan demikian rakyat telah dipersiapkan kekuatan lahir-batin untuk menghadapi segala kemungkinan.

Seperti juga telah diuraikan di muka, sebelum pecahnya aksi militer Belanda I, di seluruh Aceh telah tersusun/terbina kekuatan bersenjata, yaitu Kesatuan Tentara Resmi Pemerintah dan lasykar-lasykar rakyat (tentara resmi bermula dari API kemudian TKR Aceh dan pada bulan Maret 1946 menjadi TRI Divisi Gadjah I Aceh). Dalam perkembangannya pada bulan Pebruari 1947 TRI Komandemen Sumatra dibagi atas 3 sub Komandemen. Satu di antaranya Sub Komandemen Sumatra Utara yang berkedudukan di Kutaradja. Sebagai pimpinannya ialah, Residen Aceh TM Daud Syah dengan pangkat Jendral Mayor Tituler. Sejalan dengan perubahan ini Divisi Gadjah I Aceh, (sebagai pecahan dari Divisi V TRI Komandemen Sumatra) yang berada di bawah pimpinan Kolonel Husin Yusuf, dalam perkembangannya digabung dengan Divisi Gadjah II di Sumatra Timur dan menjadi Divisi X TRI Komandemen Sumatra.[52] Pada tanggal 26 April 1947 Jendral Mayor R. Suhardjo Hardjo Wardoyo selaku Panglima TRI Komandemen Sumatra meresmikan penggabungan ini, dalam suatu upacara militer di Taman Merdeka Pematang Siantar. Divisi ini mempunyai kekuatan 7 Resimen. Resimen I, II dan III berlokasi di Sumatra Timur, sedang 4 Resimen lainnya di Aceh: yaitu: Resimen IV berkedudukan di Kutaradja dipimpin oleh Letnan Kolonel Hasballah Haji; Resimen V berkedudukan di Bireun, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Tjut Rachman; Resimen VI di Meulaboh di bawah pimpinan Letnan Kolonel A Wahab Makmur; Resimen Artileri di Kutaradja di pimpin oleh Letnan Kolonel Nurdin Sufi.[53] Berdasarkan kedudukan-kedudukan Resimen ini dapat dilihat bahwa Resimen IV dan Resimen Artileri berada di ibu kota daerah Aceh, Kutaradja, Resimen V di pantai Aceh bahagian Timur, sedang Resimen VI di pesisir Barat daerah Aceh. Dengan demikian sebagian besar pantai Aceh telah terkawal oleh pasukan-pasukan TRI.

Selain barisan-barisan tentara resmi tersebut, menjelang agresi Militer Belanda I, di Aceh juga telah tersusun barisan-barisan kelaskaran bersenjata lainnya yang terdiri dari :

---

[52] Sendam I Iskandar Muda, *Dua Windhu Kodam-I/Iskandar Muda*, Kutaradjam 1972, hal. 116 dan 117. Lihat juga Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *Modal Revolusi 45*, Kutaradja, 1960, hal. 49.

[53] *Ibid.*, hal. 117 dan 118.

a. Divisi Rencong Kesatria Pesindo; sebagai pimpinan umum Divisi ini adalah A Hasjmy, sedang Komandan Divisinya adalah Nyak Neh Lhok Nga. Divisi ini mengikuti susunan kemiliteran dan memiliki potensi sebagai berikut, – Resimen I di Kutaraja dipimpin oleh A Gani Adam, Resimen II di Sigli dengan Komandan Putih Mauni, Resimen III di Lhok Seumawe, dipimpin oleh T Syamaun Latif, Resimen IV di Takengon, dengan komandannya M Zaharuddin, Resimen V di Langsa, dengan Komandannya Tgk Usman Azis, Resimen VI di Meulaboh di bawah pimpinan H Daud Dariah, Resimen VII di Tapak Tuan, yang dipimpin oleh M Sahim Hasymi, Resimen Wanita Pocut Baren di Kutaradja, di bawah pimpinan Mayor Zahara, dan yang terakhir Batalyon Istimewa Artileri di bawah pimpinan Nyak Neh.
b. Divisi X Tgk Chiek Di Tiro, dipimpin oleh Chek Mat Rahmany. terdiri dari: Resimen I di Kutaraja, dengan Komandan Said Usman; Resimen II di Sigli, dengan Komandan Said Usman; Resimen III di Bireun, Lhok Seumawe dan Langsa dengan Komandan A Mythalib; Resimen IV di Meulaboh, Komandannya Tgk Hasan Hanafiah; Resimen V di Takengon dan Kutacane, Komandannya Ilyas Leube.
c. Divisi Tgk Chiek Paya Bakong. Markas besar Divisi ini berkedudukan di Idi, Aceh Timur dengan Panglimanya Tgk Amir Husin al Mujahid, sedang pelaksana tugas panglima dipegang oleh Ajad Musi; Divisi ini mempunyai :
   1) Batalyon Divisi Berani Mati yang anggotanya juga merata di seluruh Aceh.
   2) Tentara Keamanan Rakyat.
   3) Staf Istimewa/Mobilisasi.

Dari ketiga barisan kelasykaran ini Divisi Rencong adalah Divisi yang lebih teratur susunannya dan mempunyai persenjataan yang lebih lengkap, juga jumlah persenjataannya yang dipunyainya lebih banyak dari yang dimiliki oleh Divisi X/TRI.[54]

Selain dari ketiga Divisi Kelasykaran di atas, dibentuk pula "Barisan Hisbullah", yang diprakarsai oleh Ulama-ulama terkenal di Aceh, yaitu, Tgk H Hasan Krueng Kale, Tgk M Daud Beureueh, Tgk Hasballah Indrapuri, Tgk A Wahab Seulimum dan lain-lain. Barisan ini lebih banyak terdiri dari Teungku-Teungku, orang-

[54] Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 102-110.

orang dewasa dan orang-orang tua yang belum tergabung ke dalam salah satu kelasykaran. Dengan demikian diharapkan seluruh lapisan masyarakat lebih mudah diatur dan diorganisasi demi perjuangan. Antara Divisi X/TRI dengan barisan kelasykaran, terjalin hubungan yang lebih baik dan positif. Ini sangat menguntungkan untuk masa-masa selanjutnya, kalau tokoh-tokoh Divisi X/TRI adalah bekas-bekas perwira pada masa penjajahan Jepang, maka tokoh-tokoh barisan Kelasykaran adalah orang-orang yang berwibawa di tengah-tengah masyarakat dan sebagian memegang jabatan dalam pemerintahan sipil.[55]

Berhubung daerah Sumatera Timur menghadapi serangan gencar dari Belanda maka rakyat Aceh pada bulan Desember 1946, telah mengirim pasukan dan lasykar bersenjata ke daerah ini. Dari bulan ke bulan makin bertambah pasukan Aceh yang ikut bertempur di Medan Area. Untuk mengkoordinasi pasukan-pasukan tersebut, dibentuk suatu Resimen Istimewa Medan Area, yang lebih dikenal dengan sebutan RIMA. Pimpinan RIMA mula-mula adalah Mayor Hasan Ahmad, kemudian Mayor Tjut Rahman. Susunan dan kedudukan dari pasukan RIMA adalah sebagai berikut:

1) Batalyon I dipimpin oleh Kapten Hanafiah berkedudukan di Kp. Ralang..
2) Batalyon II pimpinannya Kapten Nyak Adam Kamil, berkedudukan di Kerambil Lima.
3) Batalyon III, berkedudukan di Kelumpang. Pimpinannya berganti-ganti, yaitu Kapten Alamsyah, Kapten Ali Hasan dan Kapten Hasan Saleh.
4) Batalyon IV pimpinan Kapten Burhanuddin, berkedudukan di Binjai.
5) Batalyon di bawah pimpinan Wiji Alfiah, di Sunggal.
6) Batalyon dari Divisi Rencong di bawah pimpinan Mayor Nyak Neh berkedudukan di Kampung Lalang.

Kesatuan lasykar dari Divisi Teungku Chik Di Tiro dan dari Divisi Teungku Chiek Paya Bakong masing-masing dipimpin oleh Tgk Thaleb dan Gam Basyah Samalanga. Ditambah lagi lasykar dari Aceh Tengah di Bawah pimpinan Tgk. Ilyas Leube.[56]

Dari gambaran di atas jelas, meskipun Belanda belum memasuki daerah Aceh, rakyat Aceh telah mengerahkan pasukan

---

[55] *Ibid.*, hal. 107.

[56] *Ibid.*, hal. 127 dan 128. Lihat juga Komite Musyawarah 45 Daerah Istimewa Aceh, op. cit., hal. 67 dan 68.

dan lasykar bersenjata ke daerah Sumatera Timur, bukan hanya untuk membantu perlawanan di sana, tetapi juga sekaligus untuk menutup pintu bagi Belanda masuk ke Aceh.

Dengan dilakukannya agresi militer Belanda I, pada tanggal 21 Juli 1947, maka hampir seluruh wilayah Tanah Air kita dilanda oleh serangan Belanda tersebut. Daerah Aceh yang mempunyai kawasan pantai yang ratusan kilo meter panjangnya siap menghadapi blokade Belanda. Sehari sebelum meletusnya agresi tersebut, di Kutaradja, telah dipersiapkan pertahanan pantai dan pengawalan umum untuk menghadapi setiap kemungkinan. Pada hari agresi itu, terjadi serangan angkatan Udara Belanda di Lhok Nga, suatu lapangan terbang dekat Kutaradja. Pesawat Belanda tersebut datang dari Sabang melalui Ulee Lheue,[57] dan serangan atas Lhok Nga tersebut berlangsung sekitar 30 menit, yang dilakukan dengan senapan mesin dan granat, Lhok Nga merupakan pangkalan Udara RI di Aceh yang tangguh dan memiliki perlengkapan perang yang cukup baik menurut ukuran masa itu. Memiliki senjata berat dan ringan, meriam penangkis udara, meriam pantai, bengkel persenjataan yang mampu membuat senjata-senjata ringan dan memperbaiki senjata berat. Pangkalan Udara ini dibangun oleh Belanda menjelang pecahnya Perang Dunia ke II.[58] Selain Lhok Nga, Ule Lheue, Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe, Idi, Langsa, Calang, Meulaboh, Tapak Tuan, Ujung Batee, Krueng Raya dan Lhok Seudu juga mendapat beberapa serangan baik dari laut maupun dari udara.

Akibat kegawatan ini, maka pada tanggal 12 Agustus 1947 di Kutaradja dalam suatu pertemuan Dewan Pertahanan Daerah, dibentuk suatu Badan Koordinasi Daerah Aceh, yang dihadiri oleh partai-partai dan organisasi-organisasi seperti Masyumi, PNI, Pesindo, PGRI, PUSA dan Muhammadiyah. Sebagai Ketua adalah Amelz, dibantu oleh Osman Raliby dan M Abduh Syam. Tujuan Badan Koordinasi Daerah Aceh ini adalah :

1. Mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan 100% Negara Repyblik Indonesia atas dasar kesatuan dan persatuan.
2. Membina NRI yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial.

---

[57] A H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* V, (Bandung: Angkasa, 1979), hal. 289 dan 291.

[58] A. Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978)., hal. 145.

3. Mengusahakan dan menegakkan suatu pemerintahan yang kokoh, progresif dan berdaulat.
4. Melaksanakan Mobilisasi umum.
5. Menyesuaikan kehidupan politik, ekonomi dan sosial untuk kepentingan pertahanan Tanah Air.[59]

Sehubungan dengan agresi I tersebut, Panglima Sumatra Suhardjo Hardjo Wardoyo mengirim sebuah radiogram yang berbunyi sebagai berikut :

pemimpin-pemin rakyat Aceh.
pengembalian kota Medan terletak di tangan saudara-saudara segenap penduduk aceh ttk
jangan sangsi ttk
alirkan terus kekuatan aceh ke medan dan jangan berhenti sebelum medan jatuh ttk hbs
panglima sumatera.[60]

Dengan adanya radiogram tersebut, bertambah beban yang harus dipikul rakyat Aceh. Soal membantu Medan Perang Sumatera Timur sudah dimulai sejak akhir tahun 1946, kini tinggal meningkatkannya lagi. Tugas yang diinstruksikan Panglima Sumatera itu, disambut rakyat Aceh dengan penuh tanggung jawab.

Pada tanggal 17 Agustus 1947, bertepatan dengan Hari Raya Idil Fitri, dibuka suatu Tugu Peringatan Kemerdekaan yang terletak di Taman Sari Kutaraja. Residen Aceh TM Daud Syah membaca Teks Proklamasi, dan A. Hasjmy selaku anggota Badan Pekerja Perwakilan, membuka selubung Tugu yang berwarna merah putih. Setelah mengheningkan cipta, Residen membaca amanat Presiden. Dan pada malam harinya diadakan suatu rapat umum di salah satu gedung bioskop Kutaraja.[61]

Berhubung dengan masuknya tentara Belanda di beberapa daerah di bawah tanggung jawab Divisi X, maka pada tanggal 22 Agustus 1947, di Bireun disusun kembali sektor-sektor yang berada di bawah Divisi X, antara lain :

Sektor I daerah pertempuran RIMA dipimpin oleh Letnan Kolonel Hasballah Haji, terdiri dari 3 batalyon lebih.

Sektor II Tanah Karo, Deli dan Serdang, dipimpin oleh Letnan Kolonel Djamin Gintings, terdiri dari 2 Batalyon.

Sektor III di Simalungun, dipimpin oleh Letnan Kolonel R Siahaan, terdiri dari 2 batalyon.

---

[59] A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 581.
[60] Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 124.
[61] A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 582.

Sektor IV di Asahan dan Labuhan Batu dipimpin oleh Letnan Kolonel Kasim Nasution, terdiri dari 3 batalyon.
Sektor V Aceh Tengah dipimpin oleh Mayor T Manyak, terdiri dari 1 batalyon lebih.
Sektor VI, dipimpin oleh Tjut Rachman dengan daerah tanggungjawab Resimen V Divisi X, terdiri dari 4 batalyon.
sektor VII daerah tanggung jawab Resimen IV Divisi X dipimpin oleh Mayor Hasan Ahmad.
Sektor VIII daerah tanggung jawab Resimen Divisi X dipimpin oleh Letnan Kolonel A Wahab Makmur, terdiri dari 2 batalyon. Untuk kelancaran Komando maka di Sumatera Timur, dibentuk Sub Komando Divisi X dipimpin oleh Mayor AH Siahaan.

Sejak awal agresi I dipimpin Angkatan Bersenjata yang telah disebutkan di atas, tumbuh pula dua resimen Tentara Pelajar, yaitu Resimen Tentara Pelajar Islam (TPI) di bawah pimpinan AK Yacoby dan Resimen Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di bawah pimpinan Yahya Zamzamy. TRIP dibentuk secara resmi pada tanggal 24 September 1947, dihadiri oleh Wakil Gubernur Militer Mayor Sofyan Harun. Yang menjadi anggota TRIP adalah pelajar-pelajar SMP, Sekolah Guru, Sekolah Tehnik dan SMA, sedang anggota TPI umumnya berasal dari pelajar Sekolah Menengah Islam dan Perguruan Islam lainnya.[63]

Sebagai akibat dari beberapa serangan pihak Belanda, yang berlangsung sejak tanggal 17-8-1947 sampai dengan Oktober 1947, atas beberapa tempat strategis di Aceh, yang berarti juga peningkatan ancaman Belanda terhadap Aceh, maka Gubernur Militer Daud Beureueh pada tanggal 4 Oktober 1947, menyampaikan seruannya kepada seluruh rakyat Aceh. Tentara dan lasykar supaya tabah dalam perjuangan dan agar setiap tindakan yang dilakukan hendaklah disesuaikan dengan kepentingan negara yang sedang menjadi perhatian Internasional.[64]

Penyempurnaan susunan ketentuan berjalan terus. Pada tanggal 10 Nopember 1947, diresmikan pembaharuan susunan Staf Divisi Ksatria Pesindo dan pelantikan Resimen I dengan batalyon-bayalyon dan kompi-kompi yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Suatu Komunike pada tanggal 13 Desember 1947 dari jurubicara Divisi Rencong menyatakan, bahwa Kepala Staf Umum Divisi

---

[62] Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 125 dan 127.
[63] A.H. Nasution, op. cit., hal. 584.
[64] *Ibid.*, hal. 207 – 209.

Rencong telah melantik Abdurrachman dan Hasan Abbas, masing-masing dengan pangkat Senapati dan Senopati Muda pada Resimen Istimewa Pertambangan. Pada tanggal 14 Desember 1947, dilangsungkan konfrensi Mujahidin seluruh Aceh untuk Reorganisasi barisan-barisannya. Pada hari itu pula berlangsung Konperensi Kilat Kesatria Pesindo Divisi Rencong, yaitu antara para Komandan Resimen, untuk memperbincangkan soal-soal sekitar pembentukan TNI. Dan pada tanggal 18 Desember 1947, instruksi Pesindo daerah Sumatera mengeluarkan pengumuman sebagai berikut :

1. Mulai tanggal pengumuman, segenap angkatan perang Kesatria Pesindo seluruh Sumatera serentak untuk mengambil bagian dalam usaha pembentukan TNI secara resmi.
2. Tentang pelaksanaan dalam praktek berkenaan dengan tehnik, dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan bijaksana atas dasar perundingan bersama di seluruh Keresidenan oleh pimpinan-pimpinan Dewan Daerah dengan penuh bertanggung jawab kepada Dewan Pusat dalam waktu secepat mungkin.

Akan tetapi masih banyak tindakan yang perlu dilakukan sebelum terwujud satu Tentara Nasional Indonesia yang sungguh-sungguh.[65]

Setelah kota Tanjungpura jatuh ke tangan musuh, Tentara dan lasykar kita mundur ke Pangkalan Brandan dan kota ini dijadikan Pusat Markas Komando Pertahanan kita di sektor Barat.. Utara (KSBO) Medan Area. Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1947 mengumumkan perintah penghentian tembak menembak sesuai dengan seruan Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Karena beberapa kesulitan perintah gencatan senjata di daerah Komando Sektor Barat Utara (KSBO) baru dapat dilaksanakan pada bulan Pebruari 1948. Pada tanggal 6 Agustus 1947 Panglima Divisi 10 Kolonel Husin Yusuf membentuk Staf Komando Sektor Barat Utara dengan Komandannya Letnan Kolonel Hasballah Haji. Kekuatan KSBO ini terdiri dari 11 Batalyon dan pasukan-pasukan lasykar rakyat lainnya.[66] Memang agak sulit bagi pasukan kita melawan Belanda di Sumatera Timur. Keadaan medan yang datar

---

[65] *Ibid.*, hal. 209 – 210.

[66] Sendam I Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 139 – 140. Lihat juga A.H. Nasution, IV, *op. cit.*, hal. 288.

tidak cocok untuk pertempuran gerilya. Keadaan persenjataan kita tidak sesuai untuk pertempuran frontal apalagi untuk menghadapi tank dan pesawat udara.

Pada tanggal 20 Maret 1948, berlangsung Konperensi ke-4 Pesindo daerah Aceh, dengan mengambil keputusan sebagai berikut,

1. Memperkokoh susunan organisasi ke dalam untuk menuju Masa organisasi.
2. Menuju sentralisasi organisasi Pesindo Sumatera Utara.
3. Melaksanakan rencana 6 pasal Pesindo daerah Aceh, menuju pembangunan dalam masa 3 tahun. Mengusahakan penyempurnaan TNI dan adanya pertahanan Rakyat semesta.
4. Mengajak segenap rakyat agar menyokong dan berusaha segiat-giatnya sebagai faktor yang penting bagi pemerintah untuk melaksanakan program politik 6 pasal.

Pada tanggal 23 Mei 1948, Panglima Divisi Rencong dan Ketua Umum Pesindo daerah Aceh mengumumkan, bahwa mulai tanggal 1 Juni 1948, Kesatria Pesindo Divisi Banteng bergabung dalam TNI. Gubernur Militer Aceh, Daud Beureueh mempersiapkan dekritnya untuk men-TNI-kan seluruh badan-badan bersenjata di Aceh. Usaha ini terbengkelai karena akan datangnya Presiden Sukarno pada waktu itu.[67]

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa selama masa Agresi Militer Belanda I, di Aceh sudah tersusun suatu kekuatan yang terpadu antara Pemerintah, Tentara, Lasykar-lasykar bersenjata termasuk pelajar-pelajar dan seluruh lapisan masyarakat. Rakyat Aceh dengan segala potensi yang ada, sudah mampu menggagalkan seluruh usaha Belanda yang mengancam kota-kota dan tempat-tempat lainnya yang strategis baik di pantai sebelah Timur di Perairan Selat Malaka maupun pantai sebelah Barat di perairan Samudra Hindia (Samudra Indonesia). Kemudian Rakyat Aceh secara aktif mengerahkan kekuatan di daerah pertempuran Medan Area Sektor Barat-Utara dan telah berhasil membendung usaha Belanda memasuki Aceh melalui Daerah Sumatera Timur.

C. Masa Aksi Militer Belanda ke-II.

Seperti juga di daerah-daerah lain, sesudah persetujuan "Renville", keadaan di Aceh semakin bertambah sulit. Situasi yang

[67] A.H. Nasution, *op. cit.*, hal. 265.

demikian ini menyebabkan daerah Langkat untuk sementara digabungkan dengan daerah Aceh. Tetapi kemudian timbul suatu masalah, yaitu, pelaksanaan satu organisasi tentara tidak dapat direalisasi, karena tiap-tiap komponen mempunyai hubungan dengan golongan politik tertentu. Pimpinan Divisi X, yang dipegang oleh Kolonel Husin Yusuf serta Kolonel Sitompul, tidak dapat menguasai seluruh badan bersenjata. Gubernur Militer Tgk Muhammad Daud Beureueh menjadi satu-satunya pergantungan *gezag* negara dewasa itu di Aceh. Akan tetapi pembatasan hak/kewajiban antara Gubernur Militer, Panglima dan Pemerintah Sipil, tidak jelas/tegas. Daerah Sumatera Timur yang dihabungkan dengan Aceh, tetap menunjukkan gejala hendak melepaskan diri. Bekas-bekas lasykar yang belum mendapat penempatan yang wajar, seperti T Yusuf dkk tampak sebagai suatu golongan yang tidak berdiam diri dan menerima begitu saja keadaan baru. Dalam pada itu, di kalangan tertentu tetap terdapat ikhtiar-ikhtiar untuk menjadikan Aceh suatu daerah Istimewa.[68]

Divisi X sebagai gabungan Divisi Gajah I (Aceh) dan Divisi Gajah II (Sumatera Timur), adalah suatu gabungan yang tidak utuh oleh karena penggabungan itu tidak mempunyai dasar yang kuat tetapi hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa orang-orang Aceh dan Tapanuli, dapat bersatu. Lagi pula Divisi yang begitu besar tidak dapat dikomando oleh tenaga-tenaga manusia yang ada pada waktu itu, mengingat faktor-faktor geografis, etnologis, psikologis dan lain-lain faktor. Aliran pikiran pada waktu itu sudah mengarah ke sentralisasi komando, sedangkan hal-hal di atas ditambah dengan kecakapan perwira-perwira yang ada, mengharuskan adanya desentralisasi. Dengan demikian perasaan kesukuan belum dapat teratasi, dan orang Tapanuli merasa tidak dapat hidup di Aceh dan kembali ke Tapanuli tanpa perintah.[69]

Pada tanggal 3 Juni 1947 Pemerintah mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Berita Negara No. 24 tahun 1947, antara lain berbunyi :

a. Mulai tanggal 3 Juni 1947 disyahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia.
b. Segenap anggota Angkatan Perang dan segenap Lasykar-Lasykar bersenjata mulai saat ini dimasukkan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia.

---

[68] *Ibid.*, hal. 477.
[69] *Ibid.*, hal. 478.

c. Pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia dipegang oleh Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia.

Berhubung seluruh perhatian sedang diarahkan untuk menghadapi Agresi Militer Belanda, maka realisasi penggabungan semua lasykar bersenjata ke dalam Tentara Nasional Indonesia di Daerah Aceh belum dapat diselenggarakan tepat pada waktunya.[70]

Guna merealisir penetapan Pemerintah tersebut, dalam rangka penyusunan Tentara Nasional Indonesia di Daerah Aceh, maka bulan Desember 1947 Staf Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo mengadakan sidang-sidang pendahuluan bersama-sama dengan Divisi X/TRI Komandemen Sumatera di satu pihak, dan kesatuan-kesatuan lasykar bersenjata di lain pihak, yaitu Divisi Rencong, Divisi X Tegk Cik Ditiro, Divisi Tgk Cik Paya Bakong dan Divisi Hisbullah. Sidang-sidang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Militer Jendral Mayor Tituler Tgk Mohd Daud Beureueh dan dibantu oleh penasehat-penasehat militernya. Adapun wakil dari masing-masing kesatuan ditentukan, yaitu Komandan/Panglimanya dengan disertai oleh 3 orang pengikutnya sebagai berikut:

a. Divisi X/TRI Komandemen Sumatera : Kolonel Husin Yusuf dengan 3 orang pengikutnya.
b. Divisi Rencong: Nyak Neh dengan 3 orang pengikutnya.
c. Divisi X/Tgk. Cik Ditiro : Cek Mat Rahmany dengan 3 orang pengikutnya.
d. Divisi Tgk. Cik Paya Bakong: Ajad Musi dengan 3 orang pengikutnya.
e. Divisi Hisbullah: Zainal Arifin Abbas dengan 3 orang pengikutnya.

Pada tanggal 8 Desember 1947 mula-mula dibentuk Panitia Badan Perancang Pembentukan TNI dengan susunan anggota sebagai berikut :

a. Ketua : Kolonel R.M. Suryosularso.
b. Pembantu-pembantu: Jendral Mayor Tituler Tgk Amir Husin al Mujahid, Letnan Kolonel Tituler Tgk. A Wahab, Letnan Kolonel Tituler Sutikno P Sumarto, Mayor Tituler A Adami, Mayor Tituler Hasan Ali

Badan Perancang ini setelah menyelesaikan rencananya, mengajukannya kepada sidang Staf Gubernur Militer yang dilangsungkan berturut-turut sejak tanggal 28 s/d 31 Desember 1947, suatu konsepsi Dewan Pimpinan Sementara TNI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Ketua : Letnan Kolonel Tituler Tgk. A Wahab
b. Wakil Ketua : Kolonel RM Kolonel Suryosularso.
c. Penasehat-penasehat :
1. TM Daud Syah Residen Aceh.
2. Tuanku Mahmud Residen Inspektur.
3. TM Amin, Kepala Bahagian Pemerintahan Umum.
d. Staf Umum :
Ketua : Kolonel Suryosularso.
Anggota-anggota : 1. Komandan Divisi X TRI Komandemen Sumatera.
2. Komandan Divisi Rencong.
3. Komandan Divisi X Tgk Cik Ditiro.
4. Komandan Divisi Tgk Cik Paya Bakong.[71]

Pada akhir bulan Mei 1948, Gubernur Militer Daud Beureueh berhasil menyatukan Badan-badan bersenjata Aceh menjadi satu organisasi TNI. Pada tanggal 13 Juni 1948 dikeluarkan penetapan Gubernur Militer Aceh No. GB/59/S-Pen. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 1 Juni 1948 dalam daerah kemiliteran Aceh, Langkat dan Tanah Karo telah ditetapkan "TNI" yang buat sementara waktu dinamakan APRI Divisi X Sumatera.
2. Mulai tanggal tersebut di atas seluruh kesatuan kelasykaran Mujahidin Divisi C Tgk Cik Di Paya Bakong, dan lain-lain kesatuan bersenjata di daerah Kemiliteran Aceh, Langkat dan Tanah Karo menjadi lebur dan digabungkan menjadi angkatan Perang Divisi X Sumatera.
3. Mulai tanggal pembentukan Komando dan Staf Komando dari angkatan Perang TNI Divisi tersebut, pimpinan ketentaraan seluruhnya berada di bawah pimpinan Komando dan Staf Komando Angkatan Perang TNI Divisi X Sumatera.

Selain itu diumumkan pula susunan Divisi X TNI Sumatera sebagai berikut :

1. Komandan Divisi Jendral Mayor Tituler Tgk Mohd Daud Beureuh yang pada bulan Oktober 1948 diganti oleh Kolonel Husin Yusuf.

---

[70] Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 118 – 119.
[71] Ibid. hal. 141 – 142.

2. kepala Staf adalah, Letnan Kolonel Cek Mat Rahmany. Anggota Staf lainnya adalah Abdul Muthalib, Letnan Kolonel M Nasir, Kapten A Bakar Majid, Mayor Nyak Neh, Mayor Hasan Ahmad, Mayor Dr. Sudono, Mayor T Hamzah, Mayor A. Muzakir Walad, Letnan Satu T Ibrahim, Kapten M Husin, Kapten M Adam, Mayor AG Mutiara, Mayor Z Arifin Abbas.
3. Resimen-resimen yang tergabung dalam Divisi ini adalah :
   Resimen I di Kutaradja dipimpin oleh Letnan Kolonel Hasballah Haji.
   Resimen II di Bireun, dipimpin oleh Mayor A. Rachman.
   Resimen III di Meulaboh, dipimpin oleh Mayor T Manyak.
   Resimen IV di Kutacane, dipimpin oleh Mayor Jamin Gintings.
   Resimen V di Kuala Simpang, dipimpin oleh Letnan Kolonel A Wahab Makmur.[72]

Kalau kita perhatikan susunan Staf nampaklah tokoh-tokoh gabungan dari TRI Divisi X, Divisi Rencong dan Divisi Tgk Cik Di Tiro. Oleh karena itu peleburan segala pasukan bersenjata ke dalam wadah TNI tidak mengalami kesukaran. Dengan demikian di Aceh hanya ada satu Angkatan Perang yaitu TNI; dan Acehlah yang mula pertama berhasil membentuk TNI seperti yang direncanakan Pemerintah Pusat.[73]

Ketika Presiden Sukarno datang di Aceh dengan pesawat RI-002 mendarat di lapangan Udara Lhok Nga, pada tanggal 15 Juni 1948, disambut dengan meriah, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pemimpin-pemimpin TNI yang baru saja terbentuk. Di lapangan udara Lhok Nga, Presiden memeriksa barisan kehormatan dan menyaksikan senjata-senjata berat yang kita miliki. Kedatangan Presiden ini di samping untuk membakar semangat rakyat yang memang belum pernah dilakukannya di Aceh, sekaligus pula menyaksikan kekuatan rakyat Indonesia di Aceh. Selain itu dalam suatu rapat raksasa dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh, Presiden mengharapkan bantuan Pemerintah dan Rakyat Aceh untuk membeli pesawat terbang, dalam rangka melancarkan komunikasi antar pulau di Indonesia dan dengan Luar Negeri (uraian lanjutan mengenai pembelian pesawat terbang ini, lihat dalam Sub D di bawah ini).

Sesuai dengan perkembangan maka Medio Nopember 1948,

---

[72] A.H. Nasution, *op. cit.*, VIII, hal. 499 – 500. Lihat juga Sendam I Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 142 – 144.

[73] A. Hasymi, *op. cit.*, hal. 153.

Wakil Presiden mengadakan reorganisasi di Komando Sumatera. Mayor Jendral Suhardjo ditarik ke Jawa. Penggantinya Kolonel Hidayat, sedang jabatan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diserahkan kepada Letnan Kolonel Askari.[74]

Jatuhnya Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, baru diketahui di Aceh pada sore hari-nya. Setelah menerima berita ini A Gani Mutyara selaku perwira dan Kepala Penerangan TNI Divisi X Sumatera melaporkan peristiwa tersebut, kepada Gubernur Militer Teungku Mohd Daud Beureueh. Setelah itu A Gani Mutyara berpidato di Studio Radio Republik Indonesia Kutaradja, menjelaskan situasi yang sedang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil. Kemudian berpidato pula Osman Raliby, Kepala Jawatan Penerangan Daerah Aceh dalam nada dab isi yang sama. Keesokannya baru berpidato Gubernur Militer dengan penuh semangat yang ditujukan kepada seluruh rakyat, tentara dan pasukan gerilya di Medan Area. Beliau menganjurkan supaya penyerangan yang sudah dimulai dilaksanakan dengan kemenangan.[75]

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa di Aceh sebelum agresi II telah tersusun TNI tanpa ada ekses-eksesnya. Juga pemerintahan sipil telah mempunyai aparatnya sampai ke desa-desa. Oleh karena itu dalam menghadapi agresi ke II bagi Aceh sudah lebih baik keadaannya bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam menghadapi agresi Militer Belanda Aceh telah menyiapkan rencana sebagai berikut :

a. Mempersiapkan kekuatan bersenjata untuk perang gerilya, bila keadaan menghendaki demikian. Dan memberi penjelasan seluas-luasnya kepada masyarakat; tugas ini dilakukan oleh Penerangan TNI Divisi X, Penerangan sipil, serta badan-badan penerangan dari partai-partai dan organisasi massa lainnya.
b. Mempersiapkan tambahan senjata dari luar negeri, terutama dari Malaya. Senjata itu diangkut oleh TNI yang ditugaskan untuk itu atau diselundupkan dengan tongkang dan motor boot oleh para saudagar. Salah seorang tokoh yang terkenal yang memasukkan senjata itu adalah Mayor John Lie, sebagai pejuang dan pelaut yang ulung sejak Perang Dunia II.
c. Mempersiapkan aparat-aparat yang harus mengenal tempat-tempat penting seperti lapangan udara, pemancar radio dan

[74] AH Nasution, *op. cit.*, hal. 471 dan 501; lihat juga A. Gani Mutyara, *Banda Aceh pernah Berperan sebagai ibu kota Republik Indonesia*, (Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh, 1976).

[75] A.G. Mutyara, *Ibid.*, hal. 1

lain-lain.

d. Mempersiapkan dana untuk biaya pertahanan daerah Aceh sendiri, untuk biaya pasukan di Sumatera Timur, biaya para diplomat RI di luar negeri. Sumber dana ini adalah dari hasil ekspor Aceh dan dari dana yang dikumpulkan oleh pedagang-pedagang Aceh, seperti NV Permai di Penang.

e. Mempersiapkan logistik dan menentukan lokasi logistik bila terjadi perang gerilya. Dan memindahkan gudang-gudang perbekalan ke arah pedalaman.

f. Mempersiapkan dislokasi baru bagi pasukan, bila kota direbut musuh. Mempersiapkan Kutaradja, Tangse dan Takengon sebagai ibu kota Republik Indonesia untuk menggantikan Yogya.[76]

Karena kegagalan agresinya melalui beberapa serangan laut di beberapa tempat di Aceh, maka Belanda mencoba menempuh cara lain. Yaitu mereka mengadakan propokasi melalui Radio Medan yang sudah mereka kuasai. Pada awal Januari 1949, Radio Medan menyiarkan bahwa seluruh Aceh telah dikuasai oleh Tentara Belanda. Kota-kota besar seperti Kutaradja, Sigli, Langsa dan lain-lain telah direbut oleh tentara kerajaan Belanda. Berita ini disiarkan pada siang hari dan ditangkap oleh Kepala Pewartaan Jawatan Penerangan TNI Divisi X Sumatra, Letnan II Muchtar Nasution. Tetapi berita ini kemudian dibantah oleh Radio Rimba Raya (Radio Pemerintah RI di Aceh pada masa itu).

D. Inter-aksi di Daerah Dengan Berbagai Kejadian Bersejarah Tingkat Nasional

Seperti telah diuraikan dalam BAB II bahwa pada masa awal Revolusi, terjadi pertempuran-pertempuran antara barisan-barisan bersenjata Indonesia dan pasukan-pasukan Jepang di semua kota-kota besar di Indonesia. Pihak Indonesia beranggapan bahwa dalam wilayah kekuasaan Negara Indonesia yang merdeka hanya boleh ada satu pemerintah berdaulat, dan kedaulatan itu dilambangkan oleh kekuatan bersenjata yang menegakkannya. Pengalaman-pengalaman pahit selama minggu-minggu pertama merdeka, telah menimbulkan keyakinan bahwa diplomasi tanpa dukungan angkatan bersenjata tidak ada hasilnya. Diplomasi harus berlandaskan kedudukan yang kuat. Salah satu unsur kekuatan

[76] Ibid., hal. 1-4., Lihat juga A.H. Nasution, op. cit., jilid VI, hal. 392.

itu adalah angkatan bersenjata. Karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden mengeluarkan sebuah Maklumat, mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.[77] Dengan dikeluarkannya Maklumat tersebut, maka di Aceh juga didirikan API (Angkatan Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang Indonesia), kemudian agar sesuai dengan Maklumat Presiden tersebut, dirubah namanya menjadi TKR.

Agresi Militer Belanda yang pertama, pada tanggal 21 Juli 1947, terhadap Republik Indonesia, menjadikan persoalan Indonesia dibicarakan di forum Internasional. Sehubungan dengan ini dibentuk suatu komisi jasa-jasa baik yang lebih dikenal dengan nama KTN (Komisi Tiga Negara) yang anggota-anggotanya terdiri dari negara Australia (pilihan Republik Indonesia), Belgia (pilihan Belanda), dan Amerika Serikat (pilihan anggota Australia dan Belgia). Salah satu tugas komisi ini adalah menyelesaikan masalah pelaksanaan gencatan senjata. Dalam rangka membicarakan pelaksanaan masalah ini, tiga opsir KTN, pada tanggal 10 Maret 1948, telah mengadakan kunjungan ke Aceh untuk melihat situasi di sana. Selama di Aceh ketiga opsir ini telah diterima oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tgk Mohd Daud Beureueh di Kutaradja. Dan dalam menyambut opsir-opsir KTN ini, (diantaranya terdapat seorang opsir Tiongkok), oleh perkumpulan Chung Hua Chung Hui (suatu perkumpulan orang-orang Cina) Kutaradja, telah diadakan suatu resepsi yang dihadiri juga oleh beberapa tokoh masyarakat Aceh.[78]

Hasil kerja KTN, mengecewakan pejuang-pejuang Indonesia, karena dalam kenyataannya Republik Indonesia diharuskan mengakui hasil agresi Militer Belanda. Sesudah diadakan lagi perundingan-perundingan antara RI dengan Belanda, maka pada tanggal 17 Januari 1948, dicapai lagi suatu persetujuan baru, yaitu *Persetujuan Renville.* Dalam persetujuan ini Republik Indonesia mengakui garis yang ditetapkan van Mook (yaitu suatu garis yang menghubungkan pucuk pasukan Belanda yang oleh pihak Belanda merupakan tapal-tapal batas antara daerah Republik dan daerah pendudukan Belanda). Juga ditekankan lagi mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat di mana Republik Indonesia me-

---

[77] "Pembentukan Angkatan Bersenjata Kita", dalam harian *Kompas, (Djakarta* : 14 Agustus 1970), hal. III.

[78] Radik Utoyo, Sudirdjo Cs, *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950.* (Jakarta : C.V. Alda, 1976), hal. 200.

rupakan salah satu negara bagian.[79] Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan Renville ini, diterima oleh rakyat Aceh dengan perasaan was-was, tetapi mereka tidak mengatakan menolak.[80]

Setelah persetujuan Renville, van Mook meneruskan pembentukan negara-negara boneka, yang kemudian disusunnya dalam suatu federasi boneka. Daerah Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia, tidak luput dari incaran van Mook untuk dijadikan sebagai salah satu Negara Federal. Tgk Dr. Mansur, yang menjadi Wali Negara Sumatera Timur (sebagai salah negara federal), mengajak Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tgk. Mohammad Daud Beureueh, untuk membentuk Negara Federal Aceh, serta ikut menghadiri "Muktamar Sumatera".[81] Ajakan ini disampaikan dalam bentuk surat yang dijatuhkan dari pesawat terbang di atas Kutaradja selain itu juga disebarkan pamflet-pamfelt atau surat selebaran di beberapa tempat di Aceh, untuk mempengaruhi pendapat umum, agar mendesak Gubernur mereka, menerima ajakan itu. Isi surat yang ditanda-tangani Dr. Mansur tersebut, berbunyi sebagai berikut :

Kehadapan Paduka Yang Mulia
Gubernur Militer Aceh
di Kutaradja.

Perkembangan perjalanan politik di Indonesia menunjukkan semakin jelas, bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera untuk mencapai suatu kerja sama yang akan dapat terkoordinir bukan saja dalam lapangan politik, ekonomi, tetapi juga dengan beberapa banyak cara lain.

Itulah sebabnya maka saya boleh memulai menggerakkan untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera buat turut serta dalam Muktamar Sumatera yang akan dilangsungkan di Medan pada tanggal 28 Maret ini. Tujuan konperensi ini yang 5 hari lamanya mengadakan perhubungan yang pertama di antara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera yang berbagai-bagai itu, dan saya menyatakan penghargaan saya moga-moga perhubungan yang pertama ini berangsur-angsur menjadi pertalian yang bertambah tambah eratnya untuk kebahagian bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnya. Negara Sumatera Timur akan merasa suatu kehormatan untuk menerima perutusan Tuan sebagai tamu selama Muktamar ini. yang diundang ialah :

Aceh	Bengkalis
Tapanuli	Bangka
Nias	Belitung
Minangkabau	Sumatera Selatan

[79] Nugroho Notosusanto, *Sedjarah Dan Hankam,* (Djakarta : Lembaga Sedjarah Hankam, 1968), hal. 114.

[80] Insider, *Atjeh Sepintas Lalu,* (Djakarta : Fa. Archapada, 1950), hal. 42

[81] Sendam I-/Iskandar Muda, *op. cit.,* hal. 152.

Lampung
Indragiri

Bengkulu
Jambi
Riau.

Terlepas dari segala perbedaan paham politik saya menyatakan penghargaan saya, supaya Aceh juga akan mengirim suatu perutusan mewakilinya pada Muktamar pertama dari suku-suku bangsa Sumatera ini. Pembesar-pembesar di Sabang telah diperintahkan untuk menyambut perutusan Tuan dan mengawaninya ke Medan dengan kapal terbang.

Wali Negara Sumatera Timur
Tgk Dr. Mansur.[82]

Sehubungan dengan surat ajakan Wali Negara Sumatera Timur itu, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tgk Mohd Daud Beureueh, mengeluarkan suatu selebaran yang dimuat dalam surat kabar *Semangat Merdeka* tanggal 23 Maret 1949 di Kutaradja, yang isinya menolak ajakan Tgk Dr. Mansur tersebut.[83] Isi lengkap surat selebaran tersebut adalah, : Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk satu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republiken. Sebab itu juga undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, oleh karena itu tidak kita balas. Di Aceh tidak terdapat salah paham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu, bahkan kita mengerti betul apa yang dimaksud Belanda dengan Muktamar Sumatera itu. Maksud Belanda ialah mendikte Tgk Dr. Mansur supaya menjalankan politik *devide et impera*-nya. Aceh telah siap menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan itu. Kita yakin bahwa mereka yang telah menerima baik undangan Tgk Dr. Mansur tersebut, bukanlah orang Republiken, tetapi adalah kaki tangan dan budak kolonialisme Belanda.[84]

Berdasarkan surat tanggapan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo tersebut, jelas bahwa rakyat Aceh tidak menginginii bentuk Negara Federal gaya van Mook tersebut.

Mengingat Republik Indonesia masih dalam cengkraman Belanda dan sulitnya komunikasi antar pulau di Indonesia, serta hubungan ke luar, dan hubungan dengan peningkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Udara, maka

---

[82] *Ibid.*, hal. 153-154.

[83] Lihat, Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *Modal Revolusi 45*, (Kutaradja : Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, 1960), hal. 63.

[84] Sendam I/Iskandar Muda, *loc-cit.*

pemerintah telah menginstruksikan kepada semua Residen dalam wilayah Republik Indonesia, supaya membentuk suatu panitia *(Dakota Fonds)* dalam rangka mengumpulkan biaya buat pembelian pesawat udara Dakota.[85] Pada waktu kunjungan Presiden Sukarno ke Kutaradja, dalam suatu rapat raksasa di hadapan ribuan rakyat Aceh, Presiden telah menyinggung pula masalah itu. Dan dalam suatu pertemuan antara Presiden beserta rombongannya dengan GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) bertempat di Atjeh Hotel Kutaradja, Presiden selain telah membicarakan berbagai hal sehubungan dengan situasi Negara pada waktu itu, juga telah mengusulkan kepada pihak GASIDA apakah mereka sanggup menyediakan sebuah pesawat terbang Dakota (bekas pakai) yang berharga 120.000 Dollar Malaya atau sekitar 25 kg emas. Menjelang akhir pertemuan itu, Presiden mengatakan, tidak akan mau makan sebelum mendengar jawaban dari GASIDA Ya atau Tidak, atas usul tersebut. Ketua GASIDA M Djuned Yusuf, Pak Haji Zainuddin dan sesepuh GASIDA lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, mengisyaratkan kepada TM Ali Panglima Polem (selaku juru bicara) bahwa mereka menerima usul Presiden tersebut. Selanjutnya GASIDA membentuk suatu panitia (untuk pelaksanaan pembelian pesawat itu), yang diketuai oleh TM Ali Panglima Polem.[86] Berdasarkan pembicaraan dengan Residen Aceh, kemudian diputuskan Aceh akan membeli 2 pesawat terbang Dakota, yang satu atas nama GASIDA dan yang satu lagi atas nama seluruh rakyat Aceh.

Pada bulan Agustus 1948, TM Ali Panglima Polem selaku Ketua Panitia pembelian pesawat tersebut, menerima sebuah surat dari Residen Aceh beserta sebuah Telegram yang bertanggal 1 dan bernomor 23 Agustus 1948, No. 3470/KSU/48 dan No. 3461/KSU/48, yang berasal dari Kepala Staf Angkatan Udara Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi, Soejono. Isi telegram tersebut menyebutkan bahwa cek sebesar 120.000 dan 140.000 M$, telah diterima; yang tersebut terakhir diterima pada waktu kunjungan Presiden ke sana. Dan kedua cek tersebut, telah diteruskan ke Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia di Yogya. Kommodor Suryadharma selaku Kepala Staf, mengucapkan ba-

[85] T. Muhammad Ali Panglima Polem, *Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem*, (Kutaradja, 17 Agustus 1972), hal. 34. Terjemahan ke dalam bahasa Belanda oleh J.HJ. Brendgen, Haarlem, Nederland.

[86] Ibid., hal. 32.

nyak terima kasih kepada rakyat Aceh atas bantuan itu.[87] Kedua pesawat yang dibeli dengan rakyat Aceh tersebut, masing-masing diberi nama Seulawah I dan Seulawah II. Pesawat-pesawat ini mulanya mengambil route luar negeri, yaitu Ranggoon (Burma) dan India. Sehubungan dengan pembelian pesawat Dakota ini, team peneliti belum mengetahui, apakah keresidenan-keresidenan lain yang juga membentuk panitia *(Dakota Fonds)* pada waktu itu, juga berhasil membeli pesawat tersebut, seperti yang dilakukan oleh rakyat Aceh.

Selain memberikan sumbangan 2 pesawat Dakota, untuk kepentingan Revolusi Republik Indonesia, rakyat Aceh juga menyumbang biaya-biaya untuk Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Pada tahun 1949, Pemerintah Daerah Aceh telah mengeluarkan biaya untuk keperluan Pemerintah Pusat di Yogyakarta, sebesar S$. 500.000 *(Straits Dollar)* dengan perincian, untuk perwakilan luar negeri (Mr. Maramis) S$ 100.000, untuk *Indonesia Office Singapore* S$ 50.000, untuk Angkatan Perang S$ 250.000 dan untuk pengembalian Pemerintah ke Yogya S$ 100.000.[88] Ketika semakin meningkatnya pertempuran di sekitar Medan (Medan Area), banyak pejuang-pejuang Aceh yang dikirim ke sana (lihat Sub bab B di atas). Dan untuk membantu pejuang-pejuang itu, atas inisiatif TM Ali Panglima Polem, Aceh telah mengirim pula 48 ekor kerbau ke sana; dan berdasarkan surat yang diterima oleh TM Ali Panglima Polem dari Bahagian Perbekalan Front KSBO (Komando Sektor Barat Utara) di Langsa, kiriman tersebut telah diterima di sana.[89]

E. Perjuangan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kegiatan

Munculnya bermacam-macam organisasi pertahanan lokal di Aceh pada periode Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1950), seperti telah disinggung di atas (Bab III), juga ikut membantu jalannya pemerintahan lokal di Aceh, yang pada periode itu sedang mengalami transisi dalam koordinasinya, yaitu dari sistem birokrasi tradisional seperti dalam bentuk daerah-daerah *Uleebalang* atau daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri *(Uleebalangschappen* atau *Zelfbesturende landschappen),* ke arah sistem birokrasi mo-

[87] Ibid., hal. 33.

[88] S.M. Amin, *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hal. 103.

[89] T.M. Ali Panglima Polem, *op. cit.,* hal. 32.

deren seperti dalam bentuk-bentuk Kecamatan, Kabupaten dan sebagainya. Dan seperti di daerah-daerah lain di Indonesia yang juga mempunyai berbagai corak barisan kelasykaran dan kepemudaan yang berkriteria sendiri-sendiri, maka di daerah Aceh juga mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya dalam setiap usaha dari gerakan perjuangan kelasykaran/kepemudaan di daerah Aceh senantiasa menyandarkan dan menempatkan dirinya sebagai aparat pendukung pemerintah.[90]

Pada masa Revolusi Kemerdekaan, organisasi-organisasi seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia atau angkatan Perang Indonesia), BKR (Barisan Keamanan Rakyat), TKR (Tentara Keamanan Rakyat), BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI (Pemuda Republik Indonesia, PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia) dan berbagai organisasi kepemudaan dan kelasykaran lainnya, ikut menentukan kelancaran pemerintahan di Aceh. Dalam penyusunan dan penempatan pejabat-pejabat dalam berbagai lembaga pemerintahan tingkat daerah, organisasi-organisasi lokal tersebut ikut serta menentukannya.

Sebagai titik awal perubahan pemerintahan di daerah Aceh ialah pecahnya *"Peristiwa Cumbok"* atau yang lebih dikenal dengan istilah "Revolusi Sosial", pada awal tahun 1946. Setelah peristiwa itu mulai terjadi pergeseran-pergeseran dan pergantian-pergantian kepemimpinan dalam beberapa lembaga pemerintahan tradisional di Aceh. Misalnya sebelum tahun 1946, istilah Kecamatan dan Kabupaten belum dikenal di daerah Aceh. Dan istilah-istilah ini baru populer digunakan masyarakat Aceh setelah pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada awal tahun 1950. Sebelum itu apa yang sekarang disebut wilayah Kecamatan adalah daerah-daerah Uleebalang seperti telah disebutkan di atas, yang jumlahnya melebihi seratus banyaknya. Daerah-daerah ini adalah daerah yang sejak berabad-abad lamanya tidak mengenal pemerintahan yang bercorak *Collegiaal.* Dan sejarah daerah-daerah ini meriwayatkan bahwa penduduknya sejak beratus tahun lamanya hidup di bawah perintah para Uleebalang yang melaksanakan pemerintahan secara *dictatoriaal.*

Setelah tahun 1946, seperti yang telah disinggung pada awal Bab ini, bahwa dalam waktu yang relatif singkat, daerah-daerah Uleebalang *(zelfbestuur)* itu terhapus dan sebagai gantinya berdiri

[90] Lihat Sendam I-/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 103.

kesatuan-kesatuan daerah dengan sebutan "negeri". Sebagai pimpinan negeri ini kemudian penetapannya dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia di Kutaradja.

Pada awal masa kemerdekaan (tahun 1945), daerah Aceh masih berstatus sebagai satu Keresidenan otonom yang berpusat pada Propinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Pematang Siantar. Seperti telah disinggung dalam Bab III di atas, bahwa daerah Aceh pada masa itu merupakan bagian dari Propinsi Sumatera. Dan pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di Aceh, mulai resmi berjalan setelah Teuku Nyak Arief pada tanggal 29 September 1945, diangkat sebagai Residen Republik Indonesia yang pertama untuk Daerah Aceh, serta Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (anak Panglima Polem Muhammad Daud, pejuang terkenal pada akhir abad ke XIX dan awal abad ke XX), sebagai Wakil Residen, yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Mr. TM Hasan.[91] Residen pertama Teuku Nyak Arief, dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh suatu lembaga yang juga baru dibentuk, yaitu suatu badan perwakilan daerah yang dinamakan Komite Nasional Daerah. Badan ini terdiri dari beberapa anggota yang ditentukan dari hasil pemilihan rakyat yang telah ditunjuk atas pencalonan partai-partai.[92] Dan juga suatu Badan Eksekutif Komite Nasional Daerah Aceh, yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih oleh dan dari kalangan anggota-anggota Komite Nasional Daerah sendiri.

Dengan adanya kedua lembaga seperti tersebut di atas, berarti telah terjadi suatu perubahan pokok dalam sistem pemerintahan yang berlaku sebelumnya. Pada masa Hindia Belanda, di seluruh Aceh baik di daerah yang disebut *Zelfbestuurgebied* atau daerah yang berpemerintahan sendiri, maupun di daerah yang disebut *Rechtstreeks bestuurd gebied* atau daerah yang diperintah langsung oleh Belanda, pemerintahan dijalankan oleh perseorangan (Uleebalang), yang memperoleh jabatan itu secara turun-temurun. Dan pemerintahan itu dijalankan oleh pejabat itu atas kebijaksanaan sendiri yang tidak terikat oleh suatu badan hukum lain.[93] Juga dengan adanya lembaga Eksekutif Komite Nasional Daerah itu, maka mulai tampak adanya Demokratisasi dalam sistem pemerintahan otonomi lokal di Aceh. Tetapi karena sistem itu baru dalam tingkat awal, tentu saja tidak dapat berjalan dengan sempurna

[91] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 36.
[92] Insider, *op. cit.*, hal. 14
[93] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 37.

atau belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian pemerintahan Republik Indonesia yang pertama di daerah Aceh di bawah pimpinan Teuku Nyak Arief, yang merupakan pemerintahan pertama dalam alam kemerdekaan, adalah suatu langkah penting ke arah pemerintahan rakyat.[94]

Karena beberapa persoalan, mengakibatkan pemerintahan pertama di bawah pimpinan Teuku Nyak Arief, tidak berlangsung lama. Pada pertengahan bulan Juni 1946, Residen Teuku Nyak Arief meletakkan jabatan dan sebagai gantinya diangkat Teuku Muhammad Daud Syah bekas *Zelfbestuurder* atau Uleebalang Landschap *Idi, di Aceh* Timur. Dan pengurus Badan Eksekutif Komite Nasional Daerah juga mengalami perubahan. Ketuanya yang lama, Tuanku Machmud diganti dengan Mr. SM Amin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kehakiman Keresidenan Aceh.

Seperti telah disinggung di atas, organisasi-organisasi kelasykaran juga ikut menunjang jalannya pemerintahan di daerah Aceh, terutama pada masa-masa awal kemerdekaan. Baik semasa Residen Teuku Nyak Arief maupun di bawah Residen Teuku Daud Syah, kedua-duanya sama-sama mengikut sertakan unsur-unsur kelasykaran berpartisipasi si dalam pemerintahan. Karena berbagai kesulitan (adanya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, masalah-masalah dengan Jepang dan lain sebagainya), harus dihadapi oleh pemerintah pertama, maka Residen Teuku Nyak Arief dalam kenyataannya lebih menyerupai pimpinan daripada TKR (Tentara Keamanan Rakyat).[95] Begitu juga masa Residen Teuku Daud Syah, karena timbul berbagai masalah (seperti perselisihan antar golongan, Peristiwa Cumbok, masalah Husin Al Mujahid, dan lain sebagainya), juga mengikut-sertakan keaktifan organisasi PESINDO, khususnya Badan Keamanan PESINDO, untuk menjalankan pekerjaan kepolisian atau tugas-tugas lain yang berhubungan dengan masalah keamanan.[96] Dan berkat adanya kerja sama di antara pemerintah dengan lasykar-lasykar rakyat dan kepemudaan, maka Komite Nasional di bawah pimpinan Residen Teuku Daud Syah, segala sesuatu baik yang mengenai pemerintah-

---

[94] *Ibid.s,*

[95] Mengenai peranan Teuku Nyak Arief dan TKR, lihat misalnya, Syamaun Gaharu, ' Teuku Nyak Arief, Profil Seorang Pejuang", dalam harian *Mimbar Umum,* (Medan : 12 Mei 1979).

[96] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 38;

an dalam arti yang terbatas, maupun yang mengenai perekonomian, kesehatan, pertanian, kepolisian, keuangan dan sebagainya, berlangsung dengan memuaskan.[97]

Pada permulaan tahun 1947, karena kesulitan Komunikasi antara Gubernur Sumatera dengan daerah-daerah di Sumatera, maka untuk melancarkan roda pemerintahan ini, Sumatera dibagi dalam tiga bagian administratif, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Dan pada masing-masing daerah ini ditempatkan Wakil-wakil Gubernur dengan sebutan Gubernur Muda. Untuk Sumatera Utara sebagai Gubernur Muda, diangkat Mr. SM Amin (yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Aceh), untuk Sumatera Tengah, Mr. M Nasroen dan untuk Sumatera Selatan, Dr. Muhammad Isa.

Sebagai akibat kegawatan agresi Militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947, yang telah berhasil menduduki sebagian daerah Republik Indonesia, termasuk di antaranya Pematang Siantar, tempat kedudukan Gubernur Sumatera, maka Gubernur beserta stafnya terpaksa mengungsi ke Bukit Tinggi. Gubernur Muda Sumatera Utara dapat ditawan oleh Belanda dan dibawa ke Medan, kemudian via Penang kembali ke Kutaradja.[98] Meskipun daerah Aceh bebas dari agresi itu, tetapi karena kesibukan-kesibukan yang berhubungan dengan masalah peningkatan keamanan, juga kegawatannya semakin meningkat. Sehubungan dengan hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta, dalam fungsinya sebagai Wakil Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia, yang sedang menjalankan kekuasaan Pemerintah Pusat Republik Indonesia untuk Sumatera di Sumatera, berdasarkan Surat Keputusannya No. 3/BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947, yang dikeluarkan di Bukit Tinggi, menetapkan bahwa Daerah Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Tanah Karo, sebagai suatu Daerah Militer. Dan sebagai pimpinannya diangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh (yang sebelumnya menjabat Kepala Jawatan Agama Daerah Keresidenan Aceh), sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Jendral Mayor Kehormatan. Selanjutnya ditetapkan pula Penasehat Gubernur Militer dan pembantunya, yaitu Kolonel RM Suryosularso sebagai Kepala Staf Ajudan Umum Komandemen Sumatera dan Letnan Kolonel M Nasir, se-

[97] Insider *loc. cit.*,
[98] *Ibid.*, hal. 42.

bagai Kepala Seksi II.[99]

Tugas utama Gubernur Militer ialah menyusun dan menyatukan Tentara dan Lasykar-lasykar rakyat ke dalam Daerah kekuasaan Gubernur Militer, supaya terdapat satu kesatuan Komando. Selain itu juga mengkoordinasi urusan-urusan umum, baik yang mengenai sipil maupun militer, asal urusan-urusan ini termasuk dalam lingkungan pertahanan. Jadi Residen dan aparat-aparat pemerintahan sipil lainnya tetap menjalankan pemerintahan sipil sebagaimana biasa. Dengan demikian sebenarnya tugas dan kewajiban Gubernur Militer adalah tetap terletak pada masalah yang berhubungan dengan bidang pertahanan atau kemiliteran saja.[100] Dasar hukum keputusan tugas dan kewajiban ini adalah, Undang-Undang keadaan dalam bahaya, tanggal 6 Juni 1946 No. 6 dan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 30, pasal I, Surat dari Panglima Tentara Komandemen Sumatera tanggal 25 Agustus 1947 No. 5/PLL/BKP/47.[101]

Tahun 1948 terjadi perubahan lagi dalam status pemerintahan Keresidenan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1948, dibentuk Propinsi Sumatera Utara yang terdiri atas daerah-daerah Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Sebagai Gubernur yang pertama diangkat Mr. S.M Amin (jabatan sebelumnya Gubernur Muda Sumatera Utara). Pelantikan Gubernur ini dilaksanakan oleh Presiden Sukarno yang kebetulan pada waktu itu sedang berada di Kutaradja dalam perlawatannya ke daerah Aceh. Perubahan pemerintahan ini menjadikan Pulau Sumatera terbagi atas tiga Propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Juga dengan penetapan Komisaris Negara untuk Sumatera, Kota Sibolga (yang sebelumnya sebagai ibu kota Keresidenan Tapanuli) menggantikan Kutaradja (sebagai tempat kedudukan Gubernur Muda Sumatera Utara) sebagai ibu kota sementara Propinsi Sumatera Utara.

Dengan pembagian itu, mulai tampak lagi perubahan-perubahan, terutama dengan munculnya beberapa lembaga baru dalam bidang pemerintahan di Sumatera umumnya dan di Aceh khususnya. Keresidenan Aceh dan Tapanuli yang sebelumnya menyerupai Keresidenan otonom, dihapuskan, sedangkan Residen-Residennya diperbantukan pada Gubernur. Seterusnya dibentuk Kabupaten-

---

[99] Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 125.
[100] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 40-41.
[101] *Ibid.*,

Kabupaten sebagai kesatuan-kesatuan wilayah yang memperoleh otonomi di bawah pimpinan Bupati, bersama dengan Dewan Kabupaten yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih. Para Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh suatu Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Kabupaten yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Kabupaten.[102]

Akibat dari pada perubahan dalam lapangan pemerintahan ini, timbul masalah-masalah baru yang menyangkut reaksi dari sebagian rakyat. Di antara mereka ada yang pro, yang anti dan yang tidak menunjukkan sesuatu reaksi atas perubahan itu. Sehubungan dengan penunjukan Sibolga sebagai ibu kota sementara Sumatera Utara, sebagian besar rakyat Aceh menganggap penetapan itu tidak tepat dan mereka berusaha supaya penetapan itu dicabut kembali dan Kutaradja dijadikan sebagai penggantinya, sebelum Medan dapat direbut kembali.[103] Berbagai pernyataan atau resolusi dari organisasi-organisasi kelasykaran, partai-partai dan surat-surat kabar dikeluarkan, yang nadanya semua menginginkan Kutaradja supaya ditetapkan sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Utara.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa pelaksanaan Undang-Undang pembagian Sumatera dalam tiga propinsi, dimulai dengan pembentukan suatu Dewan Perwakilan Sumatera Utara yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Sumatera yang telah dihapuskan dan yang di dalam Dewan Perwakilan Sumatera ini duduk wakil-wakil Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Rapat pembentukan itu dilaksanakan di Tapak Tuan (Aceh Selatan). Dan pada saat sidang pertama dilangsungkan (pada tanggal 13-12-1948), Gubernur Sumatera Utara Mr SM Amin (sebagai Ketua Dewan Perwakilan) mengucapkan sambutan pengarahannya, yang antara lain adalah sebagai berikut :

> " . . . . kita semua pada saat ini berkumpul di ruangan ini di kota Tapa'tuan dipantai Atjeh Barat jang indah permai ini, dengan maksud melaksanakan kewadjiban jang diletakkan atas bahu kita masing-masing, jaitu kewadjiban membentuk Dewan Perwakilan Provincie Sumatera Utara. Kewadjiban ini adalah untuk menjempurnakan bunji Undang-Undang No. 10 tahun 1948 jang telah disusun sebagai akibat dari Undang-Undang Dasar kita jang menghendaki supaja daerah-daerah kesatuan dalam Republik kita ini mempunjai Pemerintahan jang bertjorak demokratisch. Bilamana nanti Dewan Perwakilan Provincie Sumatera Utara telah terbentuk, maka dapatlah dinjatakan, bahwa kita telah memperoleh kemadjuan selangkah lagi dalam usaha kita menudju kearah pem-

[102] Insider, *op. cit.*, hal. 43-44.
[103] *Ibid.*,

bentukan Negara jang berdasarkan kedaulatan rakjat.[104]

Dewan perwakilan Sumatera Utara ini beranggotakan 45 orang, yang mewakili golongan-golongan dan partai-partai (Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, SOBSI, Partai Komunis Indonesia, PESINDO, Parkindo dan Barisan Tani Indonesia), yang ada di Sumatera Utara pada waktu itu. Ke 45 anggota-anggota tersebut ialah: 1. Tgk. Ismail Yaccub, 2. Sutikno Padmo Sumarto, 3. Amelz 4. H. Mustafa Salim, 5. Karim Muhammad Duryat, 6. M. Isa Daud, 7. Abdul Mukti, 8. Apan Daulay, 9. Tgk Abdul Wahab, 10. M. Abduh Syam, 11. M. Saridin, 12. Bagindo Bujang, 13. Tgk M Nur El Ibrahimy, 14. Hadely Hasibuan, 15. A. Sutarjo, 16. A. Karim MS, 17. Agus Salim, 18. Herman Siahaan, 19. Abdul Rahman Syihab, 20. M. Yusuf Abdullah, 21. Dr. Gindo Siregar, 22. Dr. R Sunario, 23. Bachtiar Yunus, 24. Dr. Casmir Harahap, 25. D. Dyar Karim, 26. M. Siregar, 27. Kario Siregar, 28. Nulung Sirait, 29. M. Hutasoit, 30. M. Yunus Nasution, 31. SM Tarigan, 32. Lokot Batubara, 33. A St Soaloan, 34. SM Simanjuntak, 35. Mr. H Silitonga, 36. Mr. RL Tobing, 37. Dr. HL Tobing, 38. Dr. Warsito, 39. Fachruddin Nasution, 40. Abdul Hakim, 41. Rustelumbanua, 42. Patuan R Natigor, 43. St Mangaraja Muda, 44. Haji A Azis, 45. Yahya Siregar.[105] Di antara ke 45 anggota-anggota yang tersebut di atas, yang hadir dalam sidang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya 29 anggota. Dan pada kesempatan itu juga telah dipilih 5 orang anggota untuk duduk dalam suatu Badan Eksekutif, yaitu Tgk Muhammad Nur El Ibrahimy, (Partai Masyumi), Yahya Siregar (Partai Masyumi), Muhammad Yunan Nasution (Partai Masyumi), Amelz (Partai Syarikat Islam Indonesia), dan Melanton Siregar (Partai Kristen Indonesia).[106]

Sidang pembentukan Dewan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara ini, berakhir pada tanggal 16 Desember 1948. Karena adanya berbagai pernyataan atau resolusi yang dikeluarkan oleh bermacam media massa, sehubungan dengan keinginan rakyat Aceh supaya Kutaradja ditetapkan sebagai ibukota sementara Propinsi Sumatera Utara, maka di antara keputusan yang diambil dalam sidang itu adalah memenuhi hasrat rakyat Aceh tersebut. Dengan sendirinya keputusan Komisaris Negara untuk Sumatera sebelum-

---

[104] Insider, *op. cit.*, hal. 104.
[105] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 42.
[106] *Ibid.*, hal. 52.

nya, yang telah menetapkan Sibolga sebagai ibu-kota Propinsi Sumatera Utara, dicabut kembali. Dan mereka yang menghendaki supaya Sibolga dijadikan ibu kota tersebut, mematuhi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat itu. Keputusan lain yang diambil dalam sidang tersebut, adalah penetapan pembentukan empat Kabupaten di Keresidenan Tapanuli, setelah mendengar usul dari salah seorang anggota sidang yang kemudian di dukung oleh beberapa anggota lainnya. Selain itu, sebuah usul supaya Wakil Wanita juga terdapat dalam Dewan Perwakilan Rakyat itu, juga diterima sidang dengan suara bulat.[107]

Baik dari tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara itu, maupun dari sambutan Gubernur Sumatera Utara Mr. SM Amin, dan diantara keputusan-keputusan yang diambil dari sidang itu, mulai tampak lagi kecenderungan-kecenderungan ke arah Kesatuan Republik Indonesia, dengan suatu pemerintahan yang demokratis. Suatu Negara yang segala sesuatu dilaksanakan atas dasar keinginan rakyat, dan setiap tindakan dilakukan untuk kepentingan bersama.

Akibat kegawatan yang ditimbulkan oleh agresi Militer Belanda yang kedua kali atas Republik ini pada tanggal 19 Desember 1948, yang dalam waktu singkat telah berhasil menduduki hampir seluruh Daerah di Indonesia, termasuk Yogyakarta (pusat kegiatan Pmerintah Republik Indonesia pada waktu itu), maka Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara (selaku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia pada waktu itu), untuk membentuk suatu Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatera. [108] Dan berdasarkan mandat ini Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama dengan beberapa kawan seperjuangannya di Bukit Tinggi (Sumatera Barat), pada tanggal 22 Desember 1948, membentuk suatu Pemerintahan Republik Indonesia Darurat, dengan susunan jabatan dan personalia sebagai berikut: 1. Ketua merangkap Pertahanan, Penerangan dan mewakili urusan Luar Negeri, Mr. Syafruddin Prawiranegara, 2. Menteri Luar Negeri, Mr. AA Maramis, 3. Menteri Pengajaran, Pendidikan, Kebudayaan, mewakili urusan Dalam Negeri dan Agama, Mr. Teuku Muhammad Hasan, 4. Menteri Keuangan dan mewakili Kehakiman, Mr. Lukman Ha-

---

[107] Ibid., hal. 53.

[108] Radik Utoyo, Sudirdjo Cs., *Album Perjuangan* Kemerdekaan 1945 – 1950, (Jakarta : C'V. Alda, 1976), hal. 238.

kim, 5. Menteri Perburuhan Sosial, Pembangunan dan Pemuda serta Keamanan, Mr. Sutan Muhammad Rasyid, 6. Menteri Pekerjaan Umum dan mewakili Kesehatan, Dr. Sitompul, 7. Menteri Perhubungan dan mewakili Kemakmuran, Ir. Indracahya.[109]

Untuk kelancaran roda pemerintahan di daerah Aceh, Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi telah menetapkan pejabat-pejabat pada lembaga-lembaga pemerintahan daerah, yaitu, Osman Raliby, sebagai Kepala Jawatan Penerangan, JP. Pusposucipto, sebagai Kepala Jawatan Keuangan, Ali Hasmy, sebagai Kepala Jawatan Sosial, Dr. M. Mahyuddin, sebagai Kepala Jawatan Kesehatan, R. Hadri, sebagai Kepala Jawatan Pertanian, Perikanan dan Kehewanan, Ir. Muhammad Taher, sebagai Kepala Jawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung, serta Karim M. Duryat, sebagai Kepala Jawatan Perguruan, Pendidikan, Kebudayaan.[110]

Hampir bersamaan waktunya dengan serangan terhadap Yogyakarta (Agresi Militer Belanda yang kedua), tentara Belanda juga menyerang dan merebut Bukit Tinggi (Ibu kota Republik Indonesia Darurat) dari tangan pejuang-pejuang Republik. Mr. Syafruddin Prawiranegara beserta stafnya terpaksa menyingkir dari sana. Karena di Sumatera daerah Aceh sebagai satu-satunya daerah yang bebas dari agresi ini, maka Mr. Syafruddin kemudian pindah ke Aceh (Kutaradja).

Dalam sidangnya pada tanggal 27 Januari 1949, Dewan Pemerintah Daerah, telah menetapkan "Peraturan Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Daerah Aceh" (Ketetapan No. 5/GSO/ tahun 1949) dengan bertitik tolak pada Undang-Undang No. 10 tahun 1948, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara di Tapak Tuan.[111] Sehubungan dengan perubahan dalam sistem pemerintahan ini, beberapa tokoh masyarakat yang juga anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (di antaranya Tgk Muhammad Nur El Ibrahimy dan M Junan Nasution), telah mengadakan perjalanan keliling ke beberapa Kabupaten di Aceh, untuk memberi penjelasan kepada rakyat, tentang makna dan isi dari pada unsur otonomi dalam pemerintahan demokrasi dan perwakilan yang harus dilakukan melalui suatu pemilihan umum yang sebenar-benarnya.

---

[109] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 65 – 66.
[110] Ibid., hal. 54.
[111] Ibid.,

Propinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari daerah Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur, yang dibentuk di Tapak Tuan pada bulan Desember 1948, hanya berlangsung kurang lebih 6 bulan. Perubahan sistem pemerintahan yang menyangkut daerah tersebut di atas, terjadi untuk kesekian kalinya. Daerah Aceh bersama dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo disatukan lagi menjadi satu daerah militer, dan sebagai pimpinannya (Gubernur Militer) diangkat lagi Tgk Muhammad Daud Beureueh dengan pangkat Jendral Mayor tituler.[112] Perubahan ini berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1949, No. 21/pem./PDRI. Dalam ketetapan ini ditegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan, baik sipil, maupun militer, dialihkan kepada Gubernur Militer. Jadi dengan sendirinya posisi dari Propinsi Sumatera Utara menjadi berakhir. Dan dengan keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1949, No. 22/Pem/PDRI, pasal I menetapkan bahwa "Dengan berlakunya pemusatan kekuasaan sipil dan militer kepada Gubernur Militer di daerah-daerah militer istimewa, jabatan Gubernur-Gubernur Propinsi di Sumatera buat sementara dihapuskan".[113]

Karena kesulitan komunikasi antara daerah-daerah yang dibawahi oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, maka untuk memudahkan koordinasinya ditetapkan Kapten Nip Karim sebagai petugas Militer dan Teungku Maimun Habsyah sebagai petugas dalam pemerintahan sipil di daerah Langkat. Sedangkan untuk Tanah Karo ditetapkan Mayor Jamin Gintings sebagai petugas Militer dan Bupati Rakutta Sembiring sebagai petugas dalam bidang pemerintahan sipil.

Dalam rangka penertiban aparat-aparat pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia Darurat, pada tanggal 17 Mei 1949, telah mengeluarkan sebuah keputusan No. 24/Pem/PDRI, mengenai ketentuan-ketentuan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemindahan pegawai-pegawai negeri. Dan sehubungan dengan ketetapan ini, Kepala Polisi Sumatera, telah pula me-

---

[112] Seperti telah disinggung di atas, berdasarkan surat keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia, Moh. Hatta, sebagai Wakil Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia, No. 3/BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947, yang dikeluarkan di Bukit Tinggi, juga telah pernah menetapkan Daerah Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo, sebagai suatu Daerah Militer, lihat Sendam I/Iskandar Muda, *loc., cit.*,

[113] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 70.

ngeluarkan sebuah instruksi tanggal 21 Mei 1949 No. Pol./153/uG untuk pelaksanaan daripada keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tersebut. Adanya berbagai perubahan dalam struktur pemerintahan di daerah, terutama pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, seperti telah di utarakan di atas, menimbulkan kebimbangan-kebimbangan, baik bagi aparat-aparat Negara, sebagai pelaksana peraturan-peraturan Negara maupun bagi rakyat awam. Karenanya Komisaris Pemerintah pada tanggal 11 Juni 1949, telah mengirim suatu radiogram kepada Pemerintah Republik Indonesia Darurat, untuk meminta penjelasan tentang keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut.[114]

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1949, Pemerintah Republik Indonesia Darurat dibubarkan, dan Mr. Syafruddin Prawiranegara diangkat selaku Wakil Perdana Menteri, untuk mewakili Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Kutaradja. Mengingat masa Revolusi Kemerdekaan merupakan masa transisi, maka tidak mengherankan bila setiap waktu terjadi perubahan-perubahan. Misalnya dengan pembubaran pemerintah Republik Indonesia Darurat dan penempatan Mr. Syafruddin Prawiranegara di daerah Aceh sebagai Wakil Perdana Menteri, maka untuk kesekian kalinya terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan di Aceh. Dengan wewenang yang ada padanya, Wakil Perdana Menteri, mengadakan penetapan-penetapan baru yang menurut anggapannya baik, atas pulau Sumatera. Dalam pelaksanaan tugasnya Wakil Perdana Menteri dibantu oleh suatu Badan Penasehat yang terdiri dari Komisaris Pemerintah, Panglima Territorial Territorium Sumatera dan beberapa orang yang ditunjuk.[115] Berdasarkan ketetapan Wakil Perdana Menteri, sebagai pengganti peraturan Pemerintah No. 8/Des./WKPM, tahun 1949, Propinsi Sumatera Utara dibagi lagi menjadi dua Propinsi, yaitu : Propinsi Aceh dan Propinsi Tapanuli Sumatera Timur, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1950.[116] Masing-masing Propinsi ini dipimpin oleh Tgk. Mohammad Daud Beureuh (sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo), dan Dr FL Tobing (bekas anggota Dewan Per-

[114] *Ibid.*, hal. 71.
[115] Insider, *op. cit.*, hal. 49.
[116] Lihat Muhammad Ibrahim Cs., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.* (Banda Aceh : PPKD, 1977/1978), hal. 211.

wakilan Razkyat Propinsi Sumatera Utara), sebagai Gubernur.

Setelah terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia Serikat, atau setelah Pengakuan Kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Indonesia, maka susunan pemerintahan di seluruh Indonesia mengalami perubahan lagi, yakni sebagai hasil daripada persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat (yang berkedudukan di Jakarta) dan Republik Indonesia (yang berkedudukan di Yogyakarta). Dengan tercapainya persetujuan itu sidang Dewan Menteri tanggal 8 Agustus 1950, telah melahirkan peraturan pemerintah No. 21 tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950, yang menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 10 Propinsi yang telah menimbulkan suatu masalah baru, bagi daerah Aceh.[117] Daerah Aceh ditetapkan sebagai bagian daripada Propinsi Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan berbagai protes dari pemuka-pemuka masyarakat Aceh, baik dari kalangan Pamongpraja (mulai dari tingkat Gubernur sampai kepada kepala-kepala mukim) maupun dari kalangan pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya di luar kalangan pemerintahan. Mereka menginginkan supaya Aceh tetap berstatus Propinsi yang berdiri sendiri.[118] Terjadi beberapa pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Kutaradja, tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Pusat tetap pada pendiriannya, Propinsi Aceh dihapus, dan Aceh berada di bawah Propinsi Sumatera Utara. Di Aceh ditempatkan seorang koordinator yang mewakili Pemerintah Sumatera Utara yaitu Residen RM Margono Danubroto.[119] Rentetan-rentetan peristiwa di atas, merupakan awal dari kemelut yang timbul di Aceh sesudah beberapa tahun berikutnya.

Seperti telah disinggung di atas, di Aceh pada masa awal revolusi kemerdekaan, telah terdapat sebuah pemancar Radio dengan kekuatan 1 kilowatt. Mulanya radio ini ditempatkan di wilayah Bireun (Aceh Utara, yaitu di Krueng – Simpo', 20 km ke jurusan Takengon, dan kemudian dipindahkan ke daerah Aceh Tengah dan ditempatkan di Rimba Raya (62 km dari Bireun ke arah Takengon).Mungkin itulah sebabnya maka pemancar tersebut pada mulanya dikenal dengan nama "Radio Rimba Raya". Radio

---

[117] Lihat T. Alibasyah Talsya, *Sedjarah dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan di Atjeh*, (Djakarta : Kesuma, tanpa angka tahun), hal. 29. Lihat juga Amrah Muslim, Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958, (Djakarta : Lembaga Administrasi Negara, 1960), hal. 53.

[118] T. Alibasyah Talsya, *loc. cit.*,

[119] T. Muhammad Ali Panglima Polem, *op. cit.*, hal. 38.,

ini memakai gelombang 19 – 25 atau 60 meter, berada di udara dari jam 5 petang sampai jam 6 pagi.[120] Menurut buku Semdam I Iskandar Muda, Dua Windhu Kodam I Iskandar Muda, Radio Rimba Raya ini mempunyai riwayat sendiri, sebagai berikut: pada masa agresi Militer Belanda I, berhasil dimasukkan sebuah pemancar radio dari Malaya melalui Tanjungpura ke Aceh dengan Speed Boat yang dipimpin oleh Mayor John Lie. Radio ini mula-mula ditempatkan di Krueng Simpo' dan kemudian dipindahkan ke Kutaradja. Sehari sesudah agresi Militer Belanda ke II, pemancar ini ditempatkan di sebuah desa, yaitu Rimba Raya. Dan yang berjasa dalam pemasangan ini adalah seorang Indo keturunan Jerman yang sudah menjadi warga negara Indonesia, namanya W. Schultz. Mengenai sasaran penyiaran radio ini dipegang oleh Kolonel Husin Yusuf, sedang koordinasi dan tehnik penyiaran dilakukan oleh A. Gani Mutyara dan tehnik penyiaran dilakukan oleh A Gani Mutyara. Berita-berita disiarkan dalam 6 bahasa, yaitu Indonesia, Inggeris, Belanda, Arab, Cina dan Urdu. Radio Rimba Raya ini telah memegang peranan penting dalam menyiarkan dan mengorbarkan semangat perjuangan, membantu siaran bohong Belanda yang dipancarkan melalui radio Medan dan Batavia. Radio Rimba ini juga dapat berhubungan dengan pemancar radio Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Suliki, Sumatera Barat. Juga dapat berhubungan dengan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Jendral Mayor Simatupang di Banaran. Melalui Siaran ini juga instruksi-instruksi dari Pemerintah Darurat RI disalurkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, Dr. Sudarsono di India dan Palar di PBB. Karenanya radio ini tidak saja berperanan sebagai alat komunikasi umum, tetapi juga sebagai alat perang yang amat strategis.[121]

Selama berlangsungnya Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, di daerah Aceh juga terdapat beberapa mass media lainnya, seperti surat-surat kabar dan majalah-majalah. Surat kabar yang paling awal terbit pada masa itu adalah "Semangat Merdeka", yang terbit pada tanggal 18 Oktober 1945, di Kutaradja.[122] Selanjutnya muncul pula majalah-majalah seperti "Pendekar Rakyat",

---

[120] Lihat Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 49 – 50.

[121] Sendam I Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 155 – 157. Lihat juga Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 50, 87, 89 dan 90.

"Pahlawan", yang merupakan majalah tengah bulanan resmi Tentara Republik Indonesia Divisi Gadjah Sumatera, dengan Pemimpim Umum AG Mutyara dan Wakilnya Suryadi, dan mulai terbit 1 Januari 1947; "Fragmenta Politica", yang diterbitkan oleh Pejabat Penerangan Aceh yang merupakan majalah Tri Bulanan Politik; sebagai Ketua Pelaksana serta Editornya Osman Raliby, Perencana pembantu Mr. SM Amin, Soetikno Padmo Soemarto dan Talsya.[123] Juga majalah "Kebangunan Islam", "Dharma", "Dunia Peladjar", "Mimbar Rakjat", "Bebas" "Puspa" dan "Kesuma". Sedangkan majalah yang distensil adalah, "Mestika", "Dewan Pers", "Perpindo" (Persatoean Peladjar Islam Indonesia), dan "Bagian Karang – Mengarang Daerah Atjeh Kutaradja".

---

[122] *Ibid.*, hal. 19

[123] Lihat, *Fragmenta Politica*, dalam rangka menyambut Tahun Baru 1947.

BAB V

KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)

A. Masa Menjelang Persetujuan KMB

Perkembangan-perkembangan yang dilalui bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaannya hingga terwujudnya Negara Kesatuan Repiblik Indonesia, dapat dilihat melalui bentuk-bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan dari bermacam gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang dari dalam. Peperangan dan diplomasi (yang diakhiri dengan Konperensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda pada bulan Nopember 1949), merupakan sarana-sarana perjuangan untuk mencapai tujuan pada masa itu.[1] Ancaman akan kembalinya kekuasaan kolonial telah menimbulkan kegelisahan yang eksplosif pada setiap pejuang yang mendambakan kemerdekaan. Karenanya mereka selalu berada dalam situasi kesiap-siagaan. Mereka membentuk berbagai organisasi, baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat nasional, yang merupakan barisan perjuangan dan pertahanan bersama mereka. Organisasi-organisasi ini pada dasarnya mengandung nilai-nilai umum revolusi,[2] yang telah memberikan corak-corak khusus kepada organisasi itu berupa ekspresi kerja sama mereka, yang dapat dikaitkan dengan motivasi rakyat yang bersedia untuk mempertaruhkan segala-galanya.[3]

Dalam bidang keamanan dan pertahanan pada masa itu, kegiatan golongan pemuda dan pelajar di Aceh lebih menonjol daripada golongan lain. Mereka ikut berpartisipasi dalam berbagai organisasi kelasykaran perjuangan. Berdasarkan sebuah Maklumat

---

[1] Mengenai kegiatan-kegiatan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya pada periode Revolusi Fisik, lihat misalnya, Sartono Kartodirdjo (ed)., *Sejarah Nasional* VI, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 29-59. Dan Leslie Palmer, *Indonesia and The Dutch*, (London : Oxford University Press, 1965), hal. 46-72.

[2] Beberapa konsep pokok tentang pengertian nilai-nilai umum revolusi, lihat Sartono Kartodirdjo, "Beberapa masalah Teori dan Metodelogi Sedjarah Indonesia", *Lembaran Sedjarah* No. 6, (Yogyakarta : Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1970), hal. 12-14.

[3] A.B. Lapian, "Sejarah dan Sejarawan dan Masa Depan" dalam Prisma No. 7, (Jakarta : LP3ES, 1976), hal. 5.

yang berisi panggilan umum yang ditujukan kepada segenap pemuda Indonesia di Aceh yang berumur 18 tahun ke atas, agar ikut mengambil bagian dalam suatu wadah kepemudaan, dapat dilihat bagaimana peranan golongan pemuda di Aceh pada masa itu.[4] Sedangkan pada golongan angkatan tua masih memperlihatkan keragu-raguan mereka, masih terdapat kebimbangan, ketidak kompakan, masih ada yang saling bertentangan dan kurang kesadaran nasionalnya.[5] Sehubungan dengan situasi golongan tua ini, sekelompok pemuda yang telah bergabung dalam organisasi-organisasi kepemudaan, mengeluarkan sebuah peringatan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Ketua Komite Nasional Daerah Aceh, supaya diteruskan kepada angkatan tua.[6] Inti dari isi surat tersebut yaitu, golongan pemuda mengharapkan petunjuk-petunjuk dan contoh-contoh yang baik dari generasi tua. Dan mereka tidak mau lagi mendengar adanya perpecahan dan perselisihan dalam masyarakat Aceh.[7] Sementara itu para Ulama yang tergabung dalam organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) juga belum menampakkan keaktifannya ikut berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan terutama pada masa-masa awal revolusi.[8] Tetapi ada juga para pemuda yang bergabung dalam PUSA yang memasuki berbagai organisasi kelasykaran yang ada pada masa itu. Dan ada pula empat tokoh Ulama yang terkemuka, yang mengatasnamakan Ulama seluruh Aceh mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang berisikan ajakan Perang Sabil kepada seluruh rakyat Aceh dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.[9] Memang pada setiap perjuangan menentang penjajahan seperti ini, semangat agama juga ikut berperanan mengikat persatuan rak-

---

[4] Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *Modal Revolusi 45*, (Kutaradja : Dokumentasi dan Penerangan Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, 1960), hal. 71.

[5] Ibid. hal. 56.

[6] Surat ini ditanda tangani oleh Syamaun Gaharu dan Ali Hasymi, masing-masing sebagai Ketua Markas Daerah Angkatan Pemuda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia. *Ibid.*, hal. 57.

[7] Ibid.

[8] Abdullah Arief, *Konggres Besar Pusa dan P. Pusa Tindjauan Sedjarah Pergerakan di Atjeh.*, (Kutaradja : Panitia Raya Kongres Besar Pusa dan P. Pusa 1970), hal. 30.

[9] Lihat A. Hasymi, T. Alibasyah Talsya, *Hari-hari Pertama Revolusi 45 di Daerah Modal*, (Banda Aceh : Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976), hal. 33. Dan Maklumat Keempat Ulama ini lihat lampiran No . . . . .

yat seluruhnya. Daerah-daerah yang kuat berpegang pada agama seperti Aceh, Banten dan Sulawesi Selatan sukar dimasuki oleh Belanda (baca penjajah).[10]

Karena tekanan-tekanan emosional para pemuda dan pelajar siap untuk menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi kepemudaan dan kelasykaran. Para pelajar banyak yang meninggalkan bangku sekolah untuk bergabung dalam kesatuan-kesatuan bersenjata. Seperti telah disinggung dalam BAB III di atas, bahwa sejak diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, organisasi pertahanan bersama rakyat Aceh yang berstatus sebagai pertahanan lokal ialah API (Angkatan Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang Indonesia), yang lahir pada awal bulan Oktober 1945, sebagai hasil pertemuan dan pembicaraan antara Residen Republik Indonesia yang pertama untuk daerah Aceh, Teuku Nyak Arief dengan beberapa bekas opsir **Gyugun** (tentara suka-rela pada masa pendudukan Jepang), di antaranya Syamaun Gaharu, Usman Nyak Gade, Teuku Azwar Hamid, Nyak Neh Rika, Said Usman dan Said Abdullah. Sebagian dari mereka ini juga duduk sebagai pengurus Markas Daerah dan Wakil-wakil Markas Daerah API yang pertama kali untuk daerah Aceh.[11] Dalam perkembangannya organisasi API diubah namanya menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), agar sesuai dengan Maklumat yang telah dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1945, yang berbunyi : "Untuk Memperkuat Perasaan Keamanan Umum Maka diadakan Satu Tentara Keamanan Rakyat."[12]

Organisasi API cepat berkembang dan tersebar ke seluruh *mukim-mukim* dan *gampong-gampong* di Aceh, melalui suatu lembaga yang disebut BAPA (Badan Penyokong API), yang berfungsi mengumpulkan dana dan memperluas keanggotaan API di Aceh.[13] Organisasi-organisasi lain yang lahir hampir bersamaan dengan waktu lahirnya API ialah IPI (Ikatan Pemuda Indonesia), BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI (Pemuda Rakyat Indonesia), PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia), *Lasykar Mujahidin Pa-*

---

[10] Lihat Abdullah Hussain, *Peristiwa,* (Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1965), hal. 207.

[11] Syamaun Gaharu, "Beberapa Catatan Tentang Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan di Aceh Sejak Proklamasi Sampai Dengan Pengakuan Kemerdekaan Republik Indonesia", *Prasaran pada* Seminar Perjuangan Aceh Sejak Tahun 1873 s/d Kemerdekaan Indonesia, (Medan : Panitia Peringatan Pahlawan Nasional Dari Aceh, 22 s/d 25 Maret 1976), hal. 17.

[12] "Pembentukan Angkatan Bersenjata Kita", dalam harian *Kompas,* (Jakarta: 14 Agustus 1970), hal. III.

[13] Alfian (ed.), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh,* (Jakarta, : LP3ES, 1977), hal. 59. Lihat juga Syamaun Gaharu, *op. cit.,* hal. 19.

sukan Berani Mati dan kemudian berbagai organisasi kelasykaran lokal lainnya, yang semuanya merupakan wadah kegiatan pemuda dan pelajar pada waktu itu. Dalam perkembangannya agar berbagai ragam organisasi kepemudaan dan kelasykaran terkoordinasi dalam suatu wadah persatuan, maka dianggap perlu untuk "membubarkan" lasykar-lasykar ini. Dan berdasarkan Ketetapan Presiden Republik Indonesia Soekarno tanggal 5 Mei 1947, yang menginstruksikan Persatuan Tentara Republik Indonesia dengan lasykar-lasykar rakyat, menjadi tentara resmi dengan nama TNI (Tentara Nasional Indonesia).[14]

Berkat koordinasi yang berjalan sempurna dari berbagai organisasi kelasykaran dan kepemudaan, maka percobaan-percobaan agresi Militer Belanda ke Daerah Aceh dapat digagalkan. Dua kali agresi Militer Belanda yang dilancarkan terhadap Republik yang akibatnya sangat dirasakan di daerah-daerah lain di Indonesia, di Aceh bebas dari agresi ini. Dan karena daerah Aceh sebagai satu-satunya daerah yang tidak berhasil dimasuki lagi oleh Belanda (kecuali Pulau Weh, Sabang), sejak kekalahan mereka dengan Jepang pada tahun 1942, maka daerah Aceh mendapat julukan kehormatan sebagai "Daerah Modal Perjuangan Republik Indonesia."[15] Sebutan ini pertama kali diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, ketika menyampaikan amanatnya pada tanggal 16 Juni 1948, kepada rakyat Aceh dalam suatu rapat raksasa yang diadakan di lapangan "explanade" (sekarang lapangan Blang Padang) Kutaradja (sekarang Banda Aceh) dan dalam wajangan beliau kepada anggota-anggota Badan Pemerintahan Daerah Keresidenan Aceh di Pendopo Keresidenan Aceh pada waktu itu.[16]

B. Sikap Masyarakat Terhadap Cita-Cita Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ideologi revolusi yang mencakup idee persamaan nasib telah membangkitkan harapan-harapan baru. Untuk lebih mempererat kesatuan dan kebulatan tekad, diciptakan pula simbol-simbol dan semboyan-semboyan umum yang berhubungan dengan semangat

---

[14] S.M. Amin, *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau, (Jakarta;* Pradnya Paramita, 1978), hal. 96.

[15] T. Alibasyah Talsya, *Sedjarah Dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan di Atjeh,* (Djakarta : Kesuma, tanpa angka tahun), hal. 27.

[16] "Presiden Di Tengah Rakjat Atjeh", dalam harian *Kedaulatan Rakjat,* (Yogyakarta : Kamis 17 Juni 1978).

bangsa. Hampir pada setiap lengan baju, ikat kepala dan topi-topi yang dikenakan pejuang-pejuang kemerdekaan pada waktu itu dihiasi dengan tempelan-tempelan merah putih yang merupakan simbul perjuangan mereka. Hal ini juga tercermin dalam berbagai slogan dan semboyan-semboyan, baik yang dikumandangkan lewat udara, maupun yang dicoretkan pada dinding-dinding tembok dan dilukiskan di atas kain-kain bagor selama masa itu. Pekik "Merdeka" dengan tangan yang dikepalkan ke atas adalah salam resmi pada masa revolusi kemerdekaan (revolusi fisik). Dan di mana-mana di seluruh Indonesia diteriakkan semboyan-semboyan yang senada, yang membuktikan adanya integrasi nasional pada masa revolusi kemerdekaan itu.

Demikian pula di Aceh, semboyan-semboyan seperti "Merdeka 100%", "Sekali Merdeka Tetap Merdeka", "Merdeka atau Mati", "Kami Cinta Damai Tetapi Lebih Cinta Kemerdekaan", "Enyahlah Penjajah", "Hidup Merdeka Atau Syahid", dan beberapa yang ditulis dalam bahasa Inggris yang mungkin ditujukan kepada dunia luar, seperti "Freedom of Death", "Once Free Forever Free", menghiasi dinding-dinding tembok toko, dinding *Meunasah* balai-balai-balai pemuda, gerbong-gerbong kereta api, kendaraan-kendaraan umum dan di tempat-tempat lainnya.[17] Bagi mereka yang tidak mau menjawab dengan merdeka atau "Tetap", dicap sebagai antek "NICA" *(Netherland Indies Civil Administration),* suatu badan yang dibentuk oleh Belanda terutama di kota-kota yang telah diduduki oleh Sekutu, yang merupakan pusat administrasi kolonialnya untuk melicinkan jalan ke arah pemulihan kedaulatan Belanda kembali atas Indonesia. Merdeka dan NICA adalah dua hal yang sangat bertentangan ketika itu, bagi orang-orang Republik NICA adalah sesuatu yang harus dihancurkan, sedang bagi Pemerintah Belanda dan kaki-tangannya "Merdeka" adalah sesuatu yang harus mereka hindarkan.

Untuk perasaan yang diperlihatkan rakyat di daerah Aceh sebagai tanda kecintaan mereka terhadap kemerdekaan, dapat dilihat antara lain dalam sambutan yang mereka berikan ketika kunjungan

---

[17] Lihat Usman Nyak Gade, "Sekitar Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh", *Paper* yang disampaikan pada acara diskusi Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh: Masyarakat Sejarahwan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976), hal. 7.

Presiden Soekarno ke Aceh pada bulan Juni 1948.[18] Kunjungan ini dianggap rakyat Aceh sebagai kunjungan bersejarah. Cinta rakyat kepada Presidennya, kesediaan mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan negara, semangat bertempur, keinginan hendak merdeka, segalanya ini dapat dilihat dalam kesempurnaan yang telah mereka berikan dalam menyambut kedatangan Kepala Negara mereka yang pertama ke Aceh.[19]

Maklumat No. 2/1948/G.S.O., yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatra Utara Mr. S.M Amin di Kutaradja pada tanggal 6 September 1948, sehubungan dengan penyelesaian masalah "Cumbok Affaire" di Aceh,[20] mengandung nada ke arah persatuan bangsa. Kebijaksanaan yang diambil karena ekses-ekses yang terjadi sebagai akibat peristiwa tersebut, lebih diutamakan kepentingan-kepentingan ke arah persatuan dan kesatuan bangsa dari pada kepentingan-kepentingan lainnya. Isi daripada Maklumat tersebut adalah sebagai berikut: "Terhadap mereka yang baik dengan langsung maupun tidak langsung, telah campur tangan pembunuhan-pembunuhan yang bersangkutan dengan Peristiwa Cumbok, tidak akan dilakukan tuntutan oleh karena kepentingan Negara menghendaki diletakkan di luar tuntutan."[21] Kebijaksanaan lainnya yang diambil oleh pemerintah di Aceh yang nadanya juga sama dengan yang tersebut di atas, yaitu lebih mengutamakan kepentingan keselamatan kelangsungan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan-kepentingan lainnya, dapat dilihat pula dari beberapa kasus seperti di bawah ini. Dalam bulan Agustus 1948, di Kutaradja timbul suatu gerakan yang dikenal dengan nama "Gerakan Sayid Ali Cs.". Gerakan ini dipimpin oleh seorang penduduk Kutaradja yang bernama Sayid Ali Al Sagaff dan dibantu oleh beberapa teman-temannya (mungkin itulah sebabnya dinamakan gerakan Sayid Ali Cs). yaitu, Waki Harun, Haji Muchsin, Teuku Syamaun Latif, Teungku Muhammad Asyik, Muhammad Meuraksa dan Nyak Sabi. Tujuan gerakan ini adalah menuntut pergantian

---

[18] Kunjungan Presiden Republik Indonesia yang pertama kali ke Aceh, tepatnya berlangsung pada tanggal 15 Juni 1948. Rombongan Presiden ini terdiri dari 17 orang, di antaranya terdapat Komisaris Negara Urusan Umum di Sumatera, Teuku Hasan, Jendral Mayor Suhardjo dan Residen Tapanuli Dr. Tobing. Ratusan ribu rakyat Aceh, di antaranya 6000 murid sekolah ikut serta mengelu-elukan rombongan Kepala Negara ini. Lihat harian *Kedaulatan Rakjat*, Yogyakarta, *loc-cit.*

[19] Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, (Djakarta : Fa. Archapada, 1950), hal.

[20] Uraian mengenai "Peristiwa Cumbok", lihat pada BAB III di atas.

[21] Teuku Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 26.

beberapa personalia pemerintahan di Aceh, dengan jalan memutasikan beberapa penjabat pemerintahan yang memegang posisi penting dalam pemerintahan pada masa itu, yang mereka anggap telah melakukan penyelewengan-penyelewengan dan melalaikan kepentingan nasib rakyat. Sehubungan dengan gerakan ini, pemerintah telah mengeluarkan dua buah Maklumat, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 1948 oleh Gubernur Sumatera Utara Mr SM Amin, dan yang kedua pada tanggal 4 Nopember 1948, oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh. Maklumat yang terakhir ini terkenal dengan nama Maklumat No. G.M. 14-M. Isi kedua Maklumat tersebut secara garis besarnya adalah, Pemerintah menganggap gerakan tersebut menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku dan karenanya dapat menimbulkan kekeruhan dan kekacauan yang sangat merugikan keselamatan Negara dan rakyat pada umumnya.[22] Pada mulanya terhadap pelaku-pelaku gerakan tersebut ditahan, tetapi dalam perkembangannya, mengingat demi kepentingan Negara, maka pada tanggal 27 Desember 1949, atas nama Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara memberikan abolisi (pembebasan dari tuntutan hukum) kepada mereka dengan syarat bahwa mereka buat sementara waktu harus meninggalkan daerah Aceh, dan dengan ketentuan bahwa mereka akan ditahan dan dituntut kembali, bila janji itu mereka langgar.[23]

Pada waktu dimulai pelaksanaan Undang-Undang pembagian Sumatera dalam tiga Propinsi, yang dimulai dengan pembentukan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara, yang dilaksanakan di Tapak Tuan (Aceh Selatan) pada tanggal 13 sampai 16 Desember 1948, rakyat Aceh umumnya dan rakyat Aceh Barat khususnya, telah memberikan bantuan dan sokongan kepada panitia rapat pembentukan Dewan itu. Hal ini juga sebagai bukti adanya kecintaan rakyat Aceh dan keinginan mereka untuk melangkahkan kakinya ke arah persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.[24]

Agresi-agresi Militer Belanda (yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947, dan yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948), baik atas Jawa maupun di beberapa tempat di Sumatera dengan tujuan

---

[22] *Ibid.*, hal. 45 – 48.
[23] Ibid.,
[24] Insider, *op. cit.*, hal. 45.

untuk melenyapkan Negara Republik Indonesia, telah meningkatkan kesiap siagaan rakyat Aceh ke daerah pertahanan negara. Dengan kebulatan tekad persatuan dan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya telah menghapuskan perselisihan-perselisihan paham di antara golongan-golongan dalam lapisan masyarakat Aceh, seperti yang telah diutarakan di atas.[22]
kebulatan tekad persatuan dan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya telah menghapuskan perselisihan-perselisihan paham di antara golongan-golongan dalam lapisan masyarakat Aceh, seperti yang telah diutarakan di atas.[25]

Akibat kegawatan agresi Militer Belanda yang kedua di beberapa tempat di Jawa dan Sumatra, maka Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Komandemen Sumatera Kolonel Hidayat (Angkatan Darat), Kolonel Subiakto (Angkatan Laut) dan Overste Suyono Karsono (Angkatan Udara), telah memindahkan markas-markasnya ke Aceh.[26] Di Aceh bersama-sama dengan rakyat, TNI telah melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan peningkatan pertahanan. Dan hasilnya seperti telah disinggung di atas, selain hanya beberapa gangguan yang dialami oleh pertahanan pantai dan pertahanan udara dari beberapa serangan musuh, maka daerah Aceh tidak berhasil dimasuki lagi oleh Belanda.

Keeratan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah atau rakyat Aceh, yang juga mengandung unsur-unsur persatuan dapat dilihat pula dari beberapa kunjungan tokoh-tokoh Pusat Pemerintahan dari Jawa ke daerah Aceh. Rombongan tamu dari Pemerintah Pusat yang pertama kali mengunjungi Aceh ialah rombongan Mr. Hermani dan Mr. Abdul Madjid Djojoadiningrat. Selama berada di Aceh mereka telah memberikan wejangan-wejangan yang sangat berharga bagi rakyat Aceh, terutama mengenai makna dan arti kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu yang hampir bersamaani datang lagi rombongan DR. A.K. Gani yang pada waktu itu menjabat Koordinator Keamanan Pusat. Selama di Aceh DR. A.K. Gani juga telah memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut masalah-masalah keamanan di Indonesia umumnya dan di daerah Aceh khususnya.[27] Dan seperti telah disinggung di atas, pada tanggal 15 Juni 1948 daerah Aceh juga mendapat kunjungan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soe-

---

[25] *Ibid.*, hal. 41.
[26] *Ibid.*, hal. 47.
[27] *Ibid.*, hal. 39.

karno. Dan dalam suatu rapat raksasa di lapangan Blang Padang Kutaradja (Banda Aceh) Presiden Soekarno selain telah menyebut daerah Aceh sebagai "Daerah Modal Perjuangan Bangsa Indonesia", antara lain juga mengatakan sebagai berikut :

> ". . . . Dari ribuan kilometer kami datang disini spesial untuk bertemu dengan rakyat Atjeh jang terkenal sebagai satu rakjat jang selalu berdjuang untuk kemerdekaan, jang selalu mendjadi kampiun dan pelopor perdjuangan kemerdekaan rakjat Indonesia. Segenap rakjat Indonesia di tanah Djawa, Sumatera, lain-lain kepulauan, Sunda Ketjil, Kalimantan, Sulawesi, mengarahkan matanja kepada saudara-saudara".[28]

Lebih lanjut dalam pidatonya di depan ribuan rakyat Aceh tersebut, Presiden Soekarno juga menandaskan : "Rakyat Aceh adalah contoh perjuangan Kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh Rakyat Indonesia mengetahui hal ini, seluruh rakyat Indonesia melihat ke Aceh, mencari kekuatan batin dari Aceh, dan Aceh tetap menjadi obor perjuangan rakyat Indonesia".[29]

Pada tanggal 5 Juni 1949, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Mohammad Hatta beserta rombongannya, yang antara lain terdiri dari Mr. A.G. Pringgodigdo sebagai Sekretaris Negara, Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, DR. Sukiman sebagai Menteri Dalam Negeri, Mohammad Natsir sebagai Menteri Penerangan, Z. Baharuddin sebagai anggota Badan Pengurus Komite Nasional Pusat, A.R. Baswedan sebagai Pegawai Tinggi Negara dan Syarif Kasim Sultan Siak, juga mengadakan kunjungan kerja ke Aceh, dalam rangka peningkatan pertahanan dan pembangunan Negara. Dalam menyambut rombongan Wakil Presiden dan pembesar-pembesar Negara lainnya, rakyat Aceh telah mengadakan suatu pawai atau arak-arakan yang megah dan berdefile di hadapan rombongan Wakil Presiden yang berdiri di tangga Pendopo Kegubernuran Militer Aceh, Langkah dan Tanah Karo pada waktu itu. Dan pada kesempatan itu, Wakil Presiden juga telah memberikan amanatnya dalam suatu rapat Samudra yang dikunjungi puluhan ribu rakyat. Sebagian dari amanat Wakil Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

---

[28] Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal 17.

[29] *Ibid.* hal. 101

[30] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 78.

"Sering kita mendengar sembojan, bersatu kita teguh, berpetjah kita djatuh. Tjamkanlah sembojan ini dalam hati saudara-saudara. Baiklah untuk sementara kita lupakan perselisihan antara kita sesama kita jang perselisihan itu dikemudian hari mungkin dapat dibereskan setjara damai, setjara mudah sekali, akan tetapi pokok tudjuan kita bersama adalah, mentjapai rakjat jang makmur, rakjat jang merdeka, rakjat jang sedjahtera. Tetapi dalam masih kita memperdjuangkan tjita-tjita kita, padulah persatuan, djagalah persatuan. Kalau kita dengan persatuan kita akan hantjur".[30]

Pada tanggal 23 Agustus 1949, Wakil Perdana Menteri Mr. syafruddin Prawiranegara bersama dengan Menteri Agama Kiay Haji Masykur juga mengadakan kunjungan kerja ke Aceh. Selanjutnya pada tanggal 23 September 1949, datang pula Menteri Pertahanan merangkap Acting Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono beserta rombongan yang terdiri dari Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat Mr. Assaat dan Menteri Penerangan Mr. Syamsuddin. Dan pada tanggal 18 Oktober 1949, berdatangan pula Menteri Keuangan Mr. Lukman Hakim, Menteri Kemakmuran Ir. Kasimo dan Menteri Sosial & Perburuhan Kusnan.

Sebaliknya juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang mengadakan kunjungan ke Pusat Pemerintahan di Jawa, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Negara. Misalnya pada awal tahun 1947, beberapa tokoh yang mewakili masyarakat Aceh yang juga sebagai anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang telah dipilih oleh partai-partai yaitu, Mr. S.M. Amin sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Komite Nasional Aceh, Sutikno Padmosumarto, sebagai Wakil Kepala Kehakiman Daerah Aceh dan Amelz sebagai pemimpin harian *Semangat Merdeka* di Kutaradja pada waktu itu, mengadakan kunjungan kerja ke Jawa untuk menghadiri rapat pleno Komite Nasional Pusat, yang akan membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana Persetujuan Linggarjati.[31]

Kesediaan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan amanatnya pada tanggal 19 Maret 1948 dari Yogyakarta, untuk dibacakan pada Kongres Pembangunan PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia) Aceh, yang berlangsung pada tanggal 20 Maret 1948, juga menunjukkan tanda adanya keharmonisan hubungan antara Pemerintah Pusat (yang pada waktu itu berkedudukan di Yogyakarta) dengan Daerah Aceh. Sebagian isi amanat Wakil Presiden tersebut adalah sebagai berikut: "Besok adik-adikku mengadakan

---

[31] Insider, *op. cit.*, hal. 40.

kongres di dasarkan kepada pembangunan Negara. Kami doakan mudah-mudahan kongres berhasil dengan peninjauan yang tegas bahwa pemuda berjuang untuk kemerdekaan Nusa dan Bangsa dan pula menjadi pelopor dalam pembangunan Negara dan masyarakat agar supaya bangsa Indonesia di masa mendatang menjadi bangsa yang makmur. Kita berjuang untuk mencapai Kemerdekaan, bukan semata-mata untuk merdeka saja, melainkan supaya kemerdekaan yang kita capai itu memberi kemakmuran rohani dan jasmani bagi rakyat jelata seluruhnya. Berjuanglah terus dengan darah muda, yang sudi berkorban dan berbakti kepada kepentingan umum dengan menyingkirkan kepentingan sendiri.[32]

Jadi kesemua perhatian timbal-balik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dari kunjungan Wakil-Wakil Pemerintah Pusat ke Aceh seperti telah diutarakan di atas, menandakan adanya suatu jalinan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan rakyat di daerah Aceh. Dan kerja sama ini, tentu saja telah ikut menentukan keberhasilan-keberhasilan perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada umumnya dan di daerah Aceh khususnya.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa pada tanggal 29 September 1945, Teuku Nyak Arief diangkat sebagai Residen Pertama Republik Indonesia untuk daerah Aceh. Hal ini berarti bahwa mulai sejak itu sebagai satu-satunya pemerintahan yang ada di daerah Aceh adalah Pemerintah Republik Indonesia. Masa antara tahun 1945 sampai tahun 1950 adalah masa penuh transisi. Berbagai kegiatan telah ditempuh oleh bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Aceh khususnya, dalam menegakkan, mempertahankan dan mengamankan Negara Republik Indonesia. Bermacam idee ke arah persatuan bangsa telah terlihat melalui kegiatan-kegiatan seperti telah disebutkan di atas. Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh pada masa itu, seperti dari uraian berikut ini, juga banyak ditemui idee-idee persatuan.

Sebagian isi pidato Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin dalam sidang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang berlangsung di Tapak Tuan (Aceh Selatan) pada tanggal 13 – Desember 1948, jelas mengandung idee-idee tersebut. Mr. S.M. Amin menegaskan bahwa adanya pengkotakan-kotakan pada pemerintahan-pemerintahan lokal seperti kesatuan Keresidenan,

---

[33] Lihat Insider, op. cit., *hal. 105–106.*

[32] Amanat Bung Hatta Pada Kongres Pembangunan Pesindo Atjeh", dalam harian *Kedaulatan Rakjat,* (Yogyakarta: Sabtu 20 Maret 1948.

yang di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kelompok Ethnis atau kesatuan kesukuan yang sempit, seperti Keresidenan Aceh di dasarkan atas kesatuan suku Aceh, Keresidenan Tapanuli atas kesatuan suku Batak, Keresidenan Sumatera Timur atas kesatuan suku Melayu, adalah tidak seharusnya dipergunakan lagi di Republik ini. Oleh karena itu, pembentukan suatu Propinsi, janganlah di dasarkan atas dasar kelompok Ethnis yang sempit seperti tersebut di atas, tetapi atas dasar baru, seperti atas dasar kesatuan ekonomi, persatuan politik dan sebagainya.[33] Pada bagian lain dari pidato tokoh masyarakat Aceh tersebut mengatakan sebagai berikut :

> "Kita mengetahui, bahwa oleh Wakil Presiden kita dengan pihak Belanda, sekarang sedang dilakukan pembitjaraan sebagai persiapan untuk perundingan jang akan dilaksanakan kembali. Nampaknja belum dapat djuga diatasi segala kesulitan-kesulitan jang menjadi halangan dan rintangan untuk memperoleh persetudjuan antara Republiek dengan Belanda. Mengingat keadaan jang demikian rupa maka adalah pada tempatnya, bilamana seluruh rakjat Indonesia tetap memberi sokongan jang sebaik-baiknja kepada Pemerintah Pusat; sokongan bathin maupun sokongan lahir. Salah satu dari bantuan jang berharga adalah, discipline nasional, jang harus kita tundjukkan. Seterusnja keinsjafan jang sungguh-sungguh pada setiap Warga Negara tentang kewadjiban mereka terhadap Negara."[34]

Dari kutipan kalimat di atas, juga terkandung idee-idee ke arah persatuan Bangsa Indonesia.

Ketika tercapai suatu persetujuan antara RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan RI (Republik Indonesia), mengenai penetapan 10 buah Propinsi di Seluruh Indonesia (yaitu persetujuan tanggal 19 Mei No. 21, 1950) di mana Aceh ditetapkan sebagai bagian daripada Propinsi Sumatera Utara, rakyat Aceh melalui wakil-wakilnya (Dewan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh), pada tanggal 12 Agustus 1950, telah mengeluarkan suatu Mosi sehubungan dengan penetapan itu. Dalam Mosi itu dikemukakan keinginan-keinginan dan alasan-alasan mengapa rakyat Aceh berkeberatan dan mengapa mereka tetap bersikeras mempertahankan Aceh sebagai Propinsi Sendiri di bawah Pemerintah Pusat. Hampir bersamaan dengan Mosi tersebut, telah dikeluarkan pula suatu pernyataan mengenai alasan-alasan dan tentang manfaatnya Aceh menjadi propinsi sendiri, sebagai daerah Otonomi yang langsung

---

[34] *Ibid.*, hal. 109.

[35] T. Alibasyah Talsya, op. cit., hal. 34.

di bawah Pemerintah Pusat. Sebagai kesimpulan dari pernyataan tersebut, ditekankan bahwa persatuan yang berabad-abad yang telah berlangsung itu, jangan dipisah-pisah dengan berpusat ke "kiblat" yang baru. Dengan segala potensi yang ada, Aceh meminta mengurus dirinya sendiri di bawah pengawasan Pemerintah Pusat. Karena Aceh berkeinginan mempersiapkan dirinya dahulu supaya lebih mudah untuk ditempatkan di dalam kerangka Indonesia. Dalam kesimpulan tersebut juga ditekankan bahwa Aceh bukan hendak menyisihkan atau memisahkan diri dari saudara-saudaranya yang lain di Indonesia, tetapi Aceh tetap setia pada Pemerintah Pusat dan kepada saudara-saudaranya yang lain di seantero Tanah Air.[35] Demikian pokok-pokok kesimpulan dari pernyataan rakyat Aceh, yang juga mengandung unsur-unsur atau idee-idee ke arah persatuan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 13 Mei 1950, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta rombongan berkunjung ke Aceh dalam rangka menjajaki apakah Aceh akan tetap menjadi propinsi tersendiri atau akan ditempatkan di bawah Propinsi Sumatera Utara yang akan dibentuk. Dalam suatu pertemuan yang dilangsungkan di kediaman Gubernur Aceh, Teungku Muhammad Daud Beuereueh guna membahas masalah tersebut, beberapa tokoh masyarakat Aceh telah memberikan pandangan-pandangan mereka. Salah seorang tokoh masyarakat Aceh tersebut yang juga menjadi Anggota Dewan Pemerintahan Daerah Aceh, yaitu T.M. Amin mengemukakan pandangannya antara lain, "Kami mengharap supaya Negara kita menjadi Negara Kesatuan, dalam mana Aceh menjadi Daerah Propinsi' .[36]

Pada saat berlangsung pertemuan yang kedua antara rombongan Pemerintah Pusat (yang tiba di Aceh pada tanggal 26 September 1950), dengan pejabat-pejabat pemerintah di Aceh atau wakil-wakil rakyat aceh, guna mencari penyelesaian persoalan Propinsi Aceh, telah berbicara pula Gubernur Aceh, Teungku Muhammad Daud Beuereueh (yang pada kesempatan itu sebagai pembicara terakhir). Sehubungan dengan persoalan Propinsi Aceh tersebut, Gubernur telah menyangkal dengan keras pendapat yang disinyalir oleh oknum-oknum tertentu, yang mengatakan bahwa, bila tuntutan Otonomi daerah Aceh tidak dikabulkan, maka tidak ada jamin-

---

[36] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 86-87.
[37] *Ibid.*, hal. 90.

an keamanan dan mungkin akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut tokoh masyarakat Aceh itu, juga mengatakan bahwa sekalipun tuntutan Otonomi Aceh ditolak oleh Pemerintah Pusat, rakyat Aceh akan tetap berdiri di belakang Pemerintah Pusat bila masih diperlukan.[37]

Berdasarkan atas beberapa data yang telah diutarakan di atas, kiranya telah cukup membuktikan adanya sikap masyarakat Aceh ke arah cita-cita persatuan bangsa Indonesia, seperti yang telah diperlihatkan dalam berbagai tindakan terutama melalui wakil-wakil mereka. Dan tentunya juga tidak dapat disangkal bahwa, unsur-unsur persatuan itu telah membawa keberhasilan-keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

C. Kegiatan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kehidupan

Sebagai negara yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, Republik Indonesia pada waktu itu mengalami berbagai krisis dalam segala lapangan kehidupan. Situasi yang demikian ini dialami oleh hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia. Aceh sebagai daerah yang letaknya cukup jauh dari Pusat Pemerintahan, juga tidak luput dari situasi krisis tersebut. Stabilitas politik, ekonomi dan sosial belum terjamin. Sebagai contoh misalnya keadaan kehidupan rakyat yang serba kekurangan, terutama bagi pegawai-pegawai pemerintah yang seringkali tidak menerima gaji secara teratur dan juga karena gaji yang diterimanya tidak mencukupi kebutuhannya.[38] Gaji seorang polisi yang berpangkat Inspektur Kl. II, ialah lima ratus enam puluh lima rupiah uang Jepang. Gaji ini dibayar sebagian dengan uang Jepang dan sebagian lagi dengan URIPSU (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara). Dengan uang Jepang dibayar sejumlah dua ratus enam puluh lima rupiah dan sisanya dibayar dengan URIPSU sebanyak 10 rupiah. Satu rupiah URIPSU sama dengan 300 uang Jepang.[39] Karena gaji tidak mencukupi maka pegawai Negeri di daerah Aceh terutama mereka yang bukan asli dari Aceh (pendatang) sangat memerlukan adanya perbaikan. Pemberian *Catu* dan tunjangan tambahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pada bulan Desember 1949, tetap belum dapat memberikan perbaikan yang diperlukan mereka. Sedangkan harga bahan keperluan hidup sehari-hari semakin meningkat.[40]

---

[38] Abdullah Hussain, *op. cit.*, hal. 267

[39] Ibid.,

[40] Insider, *op. cit.*, hal. 75.

Pada awal revolusi kemerdekaan alat pembayaran atau uang yang digunakan di Aceh adalah uang Republik Indonesia. Kemudian karena sulitnya komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat di Jawa seperti telah disinggung di atas, maka Propinsi Sumatera Utara terpaksa mengeluarkan uang sendiri. Dan dengan semakin gawatnya keadaan serta sulitnya hubungan Pusat Pemerintahan Sumatera dengan Keresidenan Aceh, maka Keresidenan Aceh juga terpaksa harus mengeluarkan uang sendiri, yang dikenal dengan nama URIDA (Uang Republik Indonesia Daerah Aceh). Sesudah daerah Aceh dimasukkan menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara yang dibentuk pada akhir tahun 1948, Propinsi Sumatera Utara juga mengeluarkan uang sendiri, dengan alasan karena banyak uang kertas Propinsi Sumatera yang telah dipalsukan. Dan uang Sumatera Utara ini dikenal dengan nama URIPSU seperti tersebut di atas. Uang ini khusus dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Kutaradja dan berlaku syah untuk seluruh Propinsi Sumatera Utara. Pengeluaran pertama URIPSU ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949.[41] Selain URIPSU dan URIDA juga terdapat alat pembayaran khusus lainnya berupa *Bon Contan* atau cek, yang dikeluarkan oleh Markas-Markas Pertahanan setempat di Aceh. Misalnya Bon Contan yang dikeluarkan oleh Markas Pertahanan Aceh Timur di Langsa pada tanggal 2 Januari 1949, yang ditanda tangani oleh Usman Adamy selaku Ketua Markas Pertahanan Aceh Timur dan dipersaksikan oleh Bupati Aceh Timur, Tk. Maimun, Bon Contan ini dianggap syah dan diterima serta dipercaya oleh masyarakat. Bon Contan ini juga dipergunakan untuk membiayai pasukan-pasukan pejuang Aceh yang berada di wilayah Aceh Timur, di daerah perbatasan dengan Sumatera Timur, daerah Langkat dan Tanah Karo setelah agresi Militer Belanda yang kedua.[42]

Sistem pembayaran, gaji-gaji pegawai pemerintah, pada waktu itu berbeda dengan sistem sekarang. Pada waktu itu setiap kantor menerima Bon Contan atau cek tersebut dari kantor Keuangan setempat. Oleh kantor-kantor tersebut Bon Contan ini kemudian dijual kepada saudagar-saudagar atau pedagang-pedagang dengan

---

[41] Contoh URIPSU ini lihat misalnya Radik Utoyo, Sudirdjo Cs., *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 – 1950.* (Jakarta : C.V' Alda, 1976), hal. 263.

[42] *Ibid.*,

[43] Abdullah Hussain, *loc. cit.*

[44] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 107.

memberikan komisi untuk mereka atau kepada orang yang menukarkannya. Misalnya kalau Bon Contan itu bernilai Rp. 200.000 maka kepada yang menukarkannya itu dijual dengan harga Rp. 180.000 atau Rp. 175.000 saja.[43] Jadi si pembeli menerima keuntungan sekitar 10 sampai 15%.

Mulanya uang kertas Propinsi Sumatera Utara (URIPSU) dapat dipertahankan kursnya, meskipun dicetak dalam jumlah yang banyak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, jumlah uang kertas yang dicetak sejak tanggal 2 Mei sampai 8 Mei 1949 (berarti dalam waktu tujuh hari) dicetak sejumlah Rp. 156.750.000 URIPSU terdiri atas lembaran Rp. 250 URIPSU sebanyak 405.000 lembar dan lembaran Rp. 500 URIPSU sebanyak 111.000 lembar.[44] Tugas mengurusi percetakan dan pengedaran URIPSU ini, diserahkan kepada salah seorang karyawan pegawai Keuangan yang bernama Abdul Muid. Nilai URIPSU dibanding dengan Dollar Singapore pada waktu itu dapat dipertahankan, karena terdapat keseimbangan antara produksi dengan uang yang beredar. Tetapi dalam perkembangannya keseimbangan ini tidak dapat dipertahankan. Untuk mengatasi hal ini pada tanggal 16 Mei 1949, Pemerintah mengeluarkan suatu ketetapan No. 302/G.S.O., RI., yaitu menarik dari peredaran URIPSU sebanyak Rp. 500.000.000.[45]

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa keadaan kehidupan rakyat pada waktu itu serba kekurangan dan agak sukar. Bermacam kesulitan timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari berbagai sebab pula, seperti naiknya harga barang-barang keperluan rakyat dan sukarnya mendapatkan makanan pokok seperti beras yang menghilang dari pasaran.[46] Dan jikapun beras ada di pasaran, tetapi harganya cukup tinggi. Situasi yang demikian itu merupakan tantangan, tidak saja bagi rakyat tetapi juga bagi Pemerintah Daerah. Dan pemerintah juga menyadari bahwa bila perbaikan tidak cepat diusahakan, mungkin sekali akan menimbulkan efek-efek negatif yang akan mengganggu kestabilan pemerintahan dan keamanan.[47] Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan penghidupan rakyat, pemerintah telah mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya dengan mengeluarkan uang (alat pembayaran) sendiri, seperti telah dijelaskan di atas. Pembentukan suatu Badan yang

---

[45] *Ibid.*,
[46] Abdullah Hussain, *op. cit.*, hal. 268.
[47] Insider, *loc. cit.*
48 S.M. Amin, *loc. cit.*

diketuai oleh anggota Badan Eksekutif, Teungku Muhammad Nur el Ibrahimy untuk berusaha meningkatkan produksi dari berbagai usaha rakyat dan mengusahakan import barang-barang yang diperlukan dari luar negeri, juga sebagai salah satu usaha Pemerintah ke arah perbaikan penghidupan rakyat.[48] Selain usaha Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Pusat juga mencoba mengatasi keadaan dengan mengirimkan wakilnya ke Sumatera Utara. Misalnya pada bulan Agustus 1949 dikirim Mr. Syafruddin Prawiranegara, dan di sana telah mengeluarkan beberapa peraturan. Antara lain yang dikenal dengan nama Peraturan Wakil Perdana Menteri yang bertanggal 22 September 1949, No. 2/1949/WPM, yang berhubungan dengan masalah larangan ekspor barang-barang dari daerah Sumatera Utara. Juga peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 17 Oktober 1949, No. 1/1949/WPM, yang mencabut Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera tanggal 14 Agustus 1948 No. 7/1948, yang mengatur pemungutan bea ekspor dan perhitungan Dollar untuk pembelian hasil bumi. Apa yang dijalankan oleh Wakil Perdana Menteri ini sebenarnya bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah, karena kebijaksanaan yang dijalankan Wakil Perdana Menteri itu berarti menghentikan pemasukan barang dari luar negeri dan mengurangi persediaan barang dalam negeri, serta peningkatan harga barang-barang dan mengurangi pendapatan daerah. Kebijaksanaan yang ditempuh Wakil Perdana Menteri itu, tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, sebaliknya situasi malahan menjadi bertambah buruk.[49] Tetapi kesemua usaha Pemerintah tersebut merupakan suatu bukti adanya perhatian Pemerintah untuk mengatasi keadaan.

Meskipun situasi pada masa Revolusi Kemerdekaan diliputi suasana ketidak pastian, tetapi berbagai pola kehidupan rakyat dalam bentuk-bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetap berjalan. Kegiatan-kegiatan dalam bidang Pertanian, Perdagangan, Pertambangan, Pertukangan, Perikanan dan sebagainya berjalan sebagaimana lazimnya. Malah beberapa sektor seperti perdagangan, perkebunan dan pertambangan merupakan sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah dan ikut menunjang perbelanjaan buat kepentingan kelancaran roda pemerintahan dan revolusi pada waktu itu. Beberapa pedagang swasta, yang ber-

[49] *Ibid.*, hal. 108.
[50] *Ibid.*, hal. 103.

kecimpung dalam sektor perdagangan antara lain, Muhammad Saman dari PT PUSPA, Nyak Neh dari Lhok Nga Co., Muhammad Hasan dari PIM (Perdagangan Indonesia Muda) dan Abdul Gani Mutiara, telah memainkan peranan mereka dalam melakukan perdagangan antara Aceh dengan Malaya (sekarang Malaysia) dan Singapore pada waktu itu.[50] Dan dengan adanya perdagangan itu, hasil-hasil produksi Daerah Aceh, seperti karet, kelapa sawit, damar, teh, kopi dan lain sebagainya, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh Pemerintah, dapat diperdagangkan ke kedua daerah tersebut. Dalam sektor perkebunan, dapat disebutkan bahwa sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau sejak bulan Oktober 1945, perkebunan-perkebunan yang sebelumnya diurus oleh Jepang, mulai diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian untuk melancarkan sektor ini, di Kutaradja didirikan sebuah Kantor Pusat Perkebunan Daerah Aceh, yang dipimpin oleh Raden Elon (Raden Hadri). Selain Kantor Pusat Perkebunan ini, didirikan pula suatu Badan Kemakmuran dengan tugas untuk menjual hasil-hasil perkebunan dan menyediakan sarana-sarana untuk keperluan perkebunan. Kemudian pada tahun 1947, Badan Kemakmuran ini dibubarkan dan diganti dengan Kantor Perdagangan yang juga mempunyai tugas yang sama dengan Badan Kemakmuran. Pada mulanya hasil-hasil perkebunan ini tidak memberi hasil seperti yang diharap, tetapi sejak tahun 1948 hasilnya sudah mulai memuaskan. Dan pada bulan Oktober tahun 1948, Pemerintah Pusat mengambil alih pengurusan perkebunan yang ada di Aceh dan mengeluarkan ketetapannya sebagai berikut, Kantor Pusat Perkebunan Daerah Aceh di Kutaradja dihapuskan, Kebun-kebun bekas milik orang asing dan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Aceh (Sumatera Utara) menjadi milik Pemerintah Pusat dan dijadikan Perkebunan Negara (PPN); Kebun-kebun bekas milik orang Kepang dan kebun-kebun milik Pemerintah Hindia Belanda dijadikan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia.[51]

Sektor pertambangan sebagai salah satu sektor penting, juga

---

[51] *Ibid.*, hal.108 – 109.

[52] Lihat T. Ali Panglima Polem, *Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem.* (Kutaradja : 17 Agustus 1972), hal. 30. Terjemahan ke dalam Bahasa Belanda oleh J.J.H Brendgen, Hearlem, Nederland.

[53] S.M. Amin, loc. cit.

merupakan sumber pendapatan bagi daerah Aceh pada masa awal revolusi kemerdekaan,[52] Tambang minyak Pangkalan Brandan merupakan sumber keuangan utama Pemerintah Daerah Aceh pada masa itu. Tambang minyak ini sebelumnya dikuasai oleh Jepang dan ketika Jepang meninggalkan Pangkalan Brandan, mereka menghancurkan tambang ini. Tetapi kemudian oleh pekerja-pekerja Indonesia dapat dibetulkan kembali sehingga dapat menghasilkan minyak lagi. Tambang ini mendapatkan minyak dari Perlak (Aceh Timur) yang disalurkan melalui pipa-pipa ke Pangkalan Brandan. Pada masa itu terdapat sekitar 3000 pekerja pada tambang minyak itu.[53] Seperti telah disinggung bahwa kehidupan perekonomian rakyat pada masa itu agak sukar. Hal ini juga dialami oleh pekerja-pekerja pada tambang minyak itu. Mereka tidak cukup terjamin kesejahteraannya. Karenanya mereka yang tergabung dalam suatu perkumpulan, yaitu "Serikat Buruh Minyak Sumatera Utara" yang berkedudukan di Langsa (Aceh Timur) di bawah pimpinan R. Senikentara, mengorganisasi suatu pemogokan dalam rangka menuntut perbaikan nasib mereka, sehubungan dengan penerimaan gaji dan catu mereka yang selalu terlambat, dan mereka juga menuntut perubahan struktur organisasi di pertambangan minyak itu.[54]

Ketidakstabilan situasi tidak saja terjadi dalam lapangan ekonomi, tetapi juga dalam lapangan politik dan keamanan. Perubahan yang terus-menerus terjadi dalam lapangan Pemerintahan (lihat BAB IV di atas), munculnya berbagai gerakan seperti Revolusi Sosial yang timbul sebagai akibat akumulasi bermacam unsur dari latar belakang yang lama, Gerakan Teungku Amir Husin Al Mujahid, yang merupakan lanjutan dari pada Revolusi Sosial (lihat BAB III di atas), Gerakan Sayid Ali Al Sagaff yang menginginkan adanya *clen government* atau pemerintahan yang bersih di Aceh, Resolusi Partai Syarikat Islam Indonesia Cabang Aceh yang tidak puas terhadap sistem pemerintahan Daerah Aceh. Peristiwa Langsa yang menuntut perbaikan nasib pekerja-pekerja tambang minyak serta protes terhadap penguasa setempat, Gerakan Badan Keinsyafan Rakyat yang menginginkan pemerintahan yang bersih, cukup membuktikan belum terdapat stabilitas politik serta keamanan yang mantap pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia di daerah Aceh.

---

[55] *Ibid.*, hal. 54.

Kegelisahan sehubungan dengan perubahan pemerintahan dapat dikemukakan contoh sebagai berikut, berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1949, Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia (Mr. Syafruddin Prawiranegara) pada tanggal 18 Desember 1949 mengeluarkan suatu peraturan mengenai pembagian Propinsi Sumatera Utara dalam dua Propinsi, yaitu Propinsi Aceh dan Propinsi Tapanuli – Sumatera Timur. Penetapan ini telah menimbulkan banyak pendapat dalam masyarakat Aceh, yang menurut Mr. S.M. Amin dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Mereka yang sebagian besar, tidak merasa berkepentingan (interesse) dalam soal dua atau satu Propinsi, dan tidak mengetahui serta tidak mempunyai pengertian sedikit juapun tentang masalah ini.
2. Mereka yang sebagian kecil, tidak menghendaki pembagian ini.
3. Mereka yang sebagian lebih kecil lagi, yang mengingini pembagian ini dan berusaha dengan giat menciptakan keinginan ini menjadi suatu kenyataan.[55]

Mereka yang termasuk golongan intelektuil yang tidak menghendaki pembagian ini, menganggap penetapan itu tidak pada tempatnya, mengingat situasi Negara Republik Indonesia pada waktu itu masih dalam konflik dengan Kerajaan Belanda. Karena hasil KMB (Konperensi Meja Bundar) yang akan berakhir pada tanggal 17 Desember 1949, belum diketahui. Dan mungkin saja setiap saat Belanda akan mengulangi lagi Agresi Militernya terhadap Negara Republik Indonesia.[56] Dengan adanya masalah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada akhir tahun 1949 (menjelang Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia), iklim di Aceh diliputi perasaan gelisah (terutama pada golongan intelektuil).

Sungguh tepat apa yang dikatakan oleh Alfian untuk generasi kita sekarang, bahwa salah satu hal yang sangat menonhol sebagai hasil Kemerdekaan ialah perkembangan dalam bidang Pendidikan, terutama Pendidikan Umum.[57] Tetapi apa yang dikatakan Alfian

---

[55] *Ibid.*, hal. 54.

[56] *Ibid.*, hal. 55-56.

[57] Lihat Alfian, *Cendekiawan Dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh*, (Ban-Da Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh Darussalam, 1975), hal. 18.

[58] Muhammad Ibrahim, Cs. *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hal. 222.

itu tentu belum dirasakan oleh mereka yang hidup pada masa awal Revolusi. Pada permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak saja untuk daerah Aceh tetapi untuk seluruh daerah di Indonesia keadaan dalam bidang Pendidikan masih sangat menyedihkan. Diperkirakan sekitar 93% penduduk Indonesia pada masa itu, masih buta huruf.[58] Hal ini tentu berkait dengan masa-masa sebelumnya (masa kolonial) di mana pintu sekolah pada masa itu sengaja diusahakan agar hanya terbatas kepada kelompok anak-anak dari golongan tertentu saja.

Seperti halnya dalam bidang pemerintahan, perubahan dalam lapangan pendidikan pun di Aceh mulai tampak sesudah pecahnya Revolusi Sosial pada akhir tahun 1946. Sesudah peristiwa itu pintu sekolah umum juga mulai terbuka lebar bagi semua lapisan masyarakat di Aceh. Tetapi karena masa itu merupakan masa Revolusi, masa yang penuh dengan berbagai pergolakan, di mana perhatian Pemerintah lebih diarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan revolusi, maka sekolah-sekolah yang ada sebagai warisan dari masa kolonial, banyak yang terbengkelai dan ditutup. Hal ini berkaitan juga dengan banyaknya guru dan murid-muridnya yang meninggalkan bangku sekolah masuk ke dalam barisan-barisan kepemudaan dan kelaskaran seperti telah disinggung di atas. Meskipun demikian ada juga usaha-usaha dari pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan guru, seperti KPKPKB (Kursus Pengajar Kursus Pengantar Kewajiban Belajar), dan kursus PBH (Pemberantasan Buta Huruf).[59]

Dibandingkan dengan Pendidikan Umum, Pendidikan Agama boleh dikatakan lebih menonjol di Aceh pada masa Revolusi Kemerdekaan. Sebagai contoh dapat disebutkan, pada tahun 1949 di Kutaradja didirikan sebuah SMIA (Sekolah Menengah Islam Atas), sebagai lanjutan dari SMI (Sekolah Menengah Islam) yang sudah ada sebelumnya dan sudah dinegerikan. Selanjutnya atas inisiatif Teungku Ismail Yakkub selaku Kepala Kantor Pendidikan Agama Daerah Aceh, SMIA ini diusahakan pula supaya menjadi Negeri. Tetapi akibat adanya usul dari Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Mr. Syafruddin Prawiranegara yang pada waktu

---

[59] *Ibid.* hal. 123.

[60] Ismuha, *Proses Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh. (Banda Aceh: Kantor* Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh 1976), hal. 13.

[61] *Ibid.*,

itu berkedudukan di Kutaradja, agar SMIA itu dijadikan SMA (Sekolah Menengah Atas) bagian C yang khusus menerima lulusan SMI, maka penegerian SMIA tersebut tidak jadi terlaksana,[60] dan SMIA tersebut tetap berstatus swasta sampai tanggal 31 Desember 1950.[61] Kemudian terhitung sejak tanggal 1 Januari 1951, berdasarkan Ketetapan Menteri Agama No. 5/1951, SMIA tersebut diambil alih pengurusannya oleh Pemerintah dan dijadikan SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama).

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Mahkamah Agama Daerah Aceh yang pada masa Jepang bernama *Atjeh Syu Syukyo Hooin,* diubah namanya menjadi Dewan Agama Islam Aceh dan sebagai kepalanya ditunjuk Teungku Abdul Rachman Meunasah Meucap, sebagai pengganti Teungku Haji Dja'far Sidiq Lamjabat, yang sudah memangku jabatan itu semenjak masa pendudukan Jepang. Yang tersebut terakhir ini berhenti dari jabatan itu karena sudah berusia lanjut. Pada waktu daerah Aceh sebagai daerah Keresidenan yang berada di bawah Propinsi Sumatera Utara, di Kutaradja dibentuk suatu Panitia yang diketuai oleh Muhammad Nur El Ibrahimy, untuk menyusun suatu struktur pejabat agama Aceh. Dalam Struktur baru ini ditetapkan bahwa bahagian Pendidikan Agama berada di bawah Pejabat Agama Keresidenan Aceh. Sebagai Kepala Pejabat Agama, ditunjuk Teungku Muhammad Daud Beureueh dan sebagai Kepala Pendidikan Agama, ditunjuk Teungku Muhammad Nur El Ibrahimy.[62] Selanjutnya oleh pejabat-pejabat agama ini, ditetapkan sekolah-sekolah Agama yang sebelumnya berstatus swasta, diserahkan pengurusannya kepada pemerintah. Karenanya pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh, Kepala Bahagian Pendidikan Agama Daerah Aceh, telah menerima penyerahan 180 sekolah Madrasah *Ibtida-iyah* di seluruh Aceh yang nama-namanya dirubah menjadi SRI (Sekolah Rendah Islam). Penyerahan ini dilakukan dengan sepucuk surat penyerahan yang dinamakan "Qanun Penyerahan sekolah-Sekolah Agama Kepada Pemerintah Daerah Aceh."[63] Dan semenjak penyerahan itu, terdapat lebih kurang 750 orang guru untuk 180 buah sekolah Madrasah Ibtidaiyah, yang menjadi guru negeri dan menerima gaji dari Pemerintah.

Meskipun negara masih dalam suasana revolusi, tetapi kegiatan-

---

[62] *Ibid.*, hal. 12.
[63] *Ibid.*

kegiatan dalam rangka untuk menggalakkan peningkatan kecerdasan rakyat, tetap tidak dilupakan oleh Pemerintah. Sebagai contoh dapat disebutkan sebagai berikut, ketika akan dilangsungkan Konperensi Penerangan Daerah Aceh di Kutaradja pada akhir Desember 1947 sampai awal Januari 1948, Oleh Panitia Konperensi tersebut (dalam hal ini Departemen Penerangan) telah disebarkan poster dan pamfelt-pamflet di seluruh Aceh, yang seperti lukisan-lukisan, poster-poster, pemandangan-pemandangan, gambar-gambar orang Besar dan Pahlawan-Pahlawan Tanah Air, baik yang dahulu maupun yang sekarang, kerajinan tangan, sulam-menyulam, dan berbagai hasil karya baru pada masa Kemerdekaan. Juga kepada pengarang-pengarang dan penerbit-penerbit buku, pernah mereka hasilkan atau terbitkan pada masa itu. Bagi mereka yang karyanya dianggap indah dan baik menurut penilaian Panitia, akan diberikan hadiah yang lumayan.[64]

D. Pelaksanaan Hasil KMB di Daerah

Berita mengenai Pengakuan Belanda atas Kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah airnya (sebagai salah satu hasil Konperensi Meja Bundar yang akan ditanda tangani oleh Ratu Belanda Juliana pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag Negeri Belanda),[65] menjadikan kegembiraan yang luar biasa pada sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagai luapan kegembiraan ini di mana-mana, baik di Pusat Pemerintahan maupun di daerah-daerah seluruh Indonesia, diadakan upacara-upacara yang bersifat kenegaraan untuk menyambut berita gembira itu. Juga di Aceh, khususnya di Kutaradja (sebagai ibu-kota Propinsi), pada tanggal yang sama atau 27 Desember 1949 dilangsungkan suatu rapat raksasa yang dihadiri selain oleh tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan Pemerintahan juga oleh ribuan rakyat Aceh. Pada kesempatan itu, beberapa tokoh masyarakat Aceh telah memberikan pidato sambutan mereka, di antaranya termasuk Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin. Sebagian dari pidato Mr. S.M.

---

[64] *Poster/Pamflet*, yang dikeluarkan oleh Panitia Konperensi Penerangan Daerah Aceh di Kutaradja dalam rangka Konperensi Penerangan Daerah Aceh di Kutaradja, pada tanggal 27 Desember 1947 1 Januari 1948. Poster ini sekarang dimiliki oleh Drs. Muhammad Ibrahim Fakultas Keguruan Universitas Syah Kuala, Darussalam, Banda Aceh..

[65] Jan Pluvier, *Indonesie"* (Nijmegen: Sun, 1978), hal. 112.

[66] Insider, *op. cit.*, hal. 116.

[67] *Ibid.*, hal. 120.

Amin ini adalah sebagai berikut, "Pada saat yang bersejarah ini, saat yang membuka pintu gerbang kedaulatan yang akan memberikan jaminan lebih besar kepada bangsa Indonesia, tercapainya cita-cita kita bersama, kebahagiaan, kesentosaan, kesejahteraan, kemakmuran, ketentraman dan keamanan . . . ."[66] Pada bagian lain dari pidato tersebut antara lain juga dikatakan,

> " . . . Bangsa Indonesia pada saat ini, berdiri dihadapan pintu gerbang untuk memasuki suatu zaman jang baru, suatu zaman kedjajaan dan kebesaran. Akan tetapi, dalam menuju kearah kedjajaan dan kebesaran jang kekal abadi, bangsa Indonesia masih akan melakukan perubahan dalam beberapa hal jang mengenai djiwanja untuk dapat mengatasi segala kesulitan kesulitan dan rintangan-rintangan jang masih akan dihadapinja",[67]

Dari sebagian sambutan tokoh masyarakat Aceh seperti disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya Pengakuan Kedaulatan itu, mulai timbul harapan-harapan baru bagi rakyat Indonesia umumnya dan rakyat Aceh khususnya terutama dalam menghadapi masa depan mereka. Dan harapan akan masa depan yang lebih cerah, tercermin dalam berbagai kegembiraan rakyat. Sebenarnya Republik Indonesia Serikat yang merupakan suatu bentuk federasi yang pertama kali dalam negara Republik Indonesia, belum memuaskan tokoh-tokoh bangsa Indonesia baik di Pusat maupun di Daerah. Meskipun kemerdekaan dan Kedaulatan telah tercapai tetapi perjuangan bangsa Indonesia di dalam mencari susunan dan memperbaiki ikatan-ikatan mereka belum selesai.[68] Bentuk federalisme dianggap belum sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari pandangan tokoh masyarakat Aceh lainnya, yaitu T.M. Amin Anggota Dewan Pemerintahan Daerah) yang telah disebutkan di muka tampak jelas bahwa rakyat Aceh sangat mengharapkan bentuk Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan.[69]

Dalam perkembangannya berkat perjuangan yang tidak kenal lelah dari tokoh-tokoh bangsa dan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, terbentuklah susunan Negara yang lebih memuaskan perasaan bangsa Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

[68] Lihat Pidato Perdana Menteri Mohammad Natsir, melalui corong RRI (Radio Republik Indonesia) Kutaradja (sekarang Banda Aceh) sehubungan dengan masalah Propinsi Aceh, pada tanggal 22 Januari 1951, dalam T. Alibasyah Talsya, *op. cit.*, hal. 39.

[69] S.M. Amin, *op. cit.*, hal. 86 – 87.

DAFTAR BACAAN

1. Dokumen-dokumen

Kantor Gubernur Propinsi Sumatera, Bagian Dokumentasi, *Salinan Daftar Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera,* tahun 1948, No. 1 sampai No. 49, Bukittinggi, 1948.

., *Daftar Pembagian Daerah Atjeh tahun 1948, Bukittinggi,* 1948.

Ketetapan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia, No. 204, 11 Agustus 1946.

Ketetapan Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, Ir. Soekarno, tanggal 22 Agustus 1945.

Keputusan Presiden R.I. No. 7/A/19, 4 Agustus 1949.

Makloemat Atjehsyu Tyokan, 25 Agustus 1945.

Makloemat Atjehsyu Tyokan, 25 Oktober 1945.

Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh, 15 Oktober, 1945.

Makloemat Goebernur Soematera, 30 Agustus 1946.

Ma'loemat No. 1, Panggilan Oemoen PRI. Daerah Atjeh, 17 Oktober 1945.

Makloemat Pengoeroes Komite Nasional Daerah Atjeh, 4 Oktober 1945; No. 1, 10 Oktober 1945, No. 2 dan 3; 13 Oktober 1945.

Nasehat kepada sekalian Muslimin (dalam tulisan Arab) dari Tgk. H. Hasan Kruengkale (Teungku Mohammad Hasan), 18 Zulkaedah 1364 H.

Petikan Daftar Ketetapan Komandan Divisi Rentjong, No. 10/P/1948, 23 Pebruari 1948.

Penetapan Staf Resimen Ksatrya Pesindo Kewedanan Takengon, No. 122, tanggal 6 Januari 1947.

Poster, Panitia Konperensi Penerangan Atjeh di Kutaradja, dalam rangka Konperensi Penerangan Atjeh di Kutaradja pada tanggal 27 Desember 1947 sampai 1 Januari 1948.

Seroean Tanah Air API, tanggal 6 Oktober 1945.

Soerat Edaran API, tanggal 9 Oktober 1945.

Soerat Edaran Atjehsyu Tyokan, tanggal 24 Oktober 1945.

Soerat Bersama Markas Daerah API dan PRI Daerah Atjeh, kepada J.M.L. Padoeka toean-toean Pengoeroes Poesat Komite Nasional di Kutaradja, 18 Oktober 1945.

Uang Republik Indonesia Propinsi Soematera, seri dua puluh lima rupiah, 17 Januari 1948.

2. **Majalah dan Surat Kabar**

Analisa, 16 Agustus 1975.
Atjeh Post, No. 29, Agustus 1979.
Atjeh Sinbun, No. Istimewa, 8 September 1944; 15 Pebruari 1945; 15 Pebruari 1945 dan No. Istimewa, 7 Agustus 1945.
Berita Buana, 22 – 23 Mei 1977.
Duta Pancacita, 23 Maret 1973.
Fragmenta Politica, No. I tahun 1947.
Harian Kedaulatan Rakjat, Yogyakarta, tahun I, 9 Nopember 1945; Kamis 17 Juni 1948; Sabtu 20 Maret 1948.
Kompas, Djakarta 14 Agustus 1970.
Madjalah Minami, nomor khusus Atjeh.
Mimbar Umum, Medan, 12 Mei 1979.
Pahlawan, Tahun I No. 4 dan 8 tahun 1947.
Pelita, 27 April 1979.
Peristiwa, No. I Agustus 1979.
Prisma No. 7, Jakarta : LP3ES, 1976.
Santunan, No. 6 tahun I, Agustus 1976; tahun II, No. 8 dan No. 9, tahun III No. 17, 18, 19, 20, 21; tahun IV No. 24, 26, 27, 28, 34.
Semangat Merdeka, No. Istimewa, 22 Oktober 1945; No. 19 1 Desember 1945.
Sinar Darussalam, No. 62; 63; 69; 70; 71; 75/76; 88; 89; 92/93.
Vrij *Nederland*, tahun 6 No. 26, 19 Januari 1946.
Waspada, 13 dan 17 Agustus 1979.

3. **Thesis yang Belum Diterbitkan.**

Alamsyah B, *Suatu Tinjauan Historis Daerah Keuleebalangan Peusangan dari Abad ke 19 – 20*, Thesis Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan, Unsyiah, Darussalam, 1977.

Dahlan Hasan, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Suatu Studi tentang Peranan PUSA dalam Pendidikan dan Pergerakan Nasional di Aceh*, Thesis Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan, Unsiyah, Darussalam, 1977.

Djamaluddin Abdullah, *Pergerakan Muhammadiyah di Aceh*, Thesis Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan, Unsyiah Darussalam, 1975.

Nazarudin Sulaiman, *Perguruan Taman Siswa di Aceh*, Thesis Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan, Unsyiah Darussalam, 1975.

Rusli Wahid, *Pengaruh Revolusi Fisik Terhadap Rakyat Aceh*, Thesis Sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 1978.

4. Buku-buku dan Artikel

Abdul Muthallib, Muhammad, *Riwajat Prang Pandrah Masa Djiduk Djepang*, Kutaradja : Maktabah Atjeh Raja, 1960.

Abubakar, Said, "Dewan Perwakilan Rakyat Aceh", *Makalah DPRD Daerah Istimewa Aceh* No. 2 tahun 1977.

Alfian, *Cendekiawan Dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh : Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, Darussalam, 1975.

Amin, S.M., *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978.

———————., *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Djakarta : N.V. Soeroengan, tanpa angka tahun.

Arif, Abdullah, *Konggres Besar PUSA/P. PUSA., Tindjauan Sedjarah Pergerakan di Atjeh*, Kutaradja : Panitia Raja Konggres Besar PUSA/P. PUSA., 1950.

Arif., Abdullah, *Sekitar Peristiwa Pengkhianat Tjoembok*, Semangat Merdeka, Kutaradja, tanpa angka tahun.

Amin, H.T.M., *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*, Banda Aceh : Kanwil Dep. P dan K dan K. Prop. Daerah Istimewa Aceh & Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976.

Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer VII, Penyelesaian Peristiwa Atjeh*, Djakarta : Mega Bookstores & Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, tanpa angka tahun.

Atjeh Press Service, *Almanak Umum*, Kutaradja : 1959.

Beberapa Pemandangan Tentang Kehakiman di Daerah Atjeh. Kutaradja, 1944.

Biro Sejarah PRIMA, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, jilid I, Medan : Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976.

Dalimunte, A. Hakim, *Gerak-gerik Partai Politik*, Langsa : Toko Buku Gelora, 1951.

Hasjmy, A., *Peranan Agama Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh Sejak 1873 sampai Kemerdekaan Indonesia, 1976.

——————————., "Karena Aceh Menentang, Gagallah Pembentukan Negara Sumatera", *Sinar Darussalam.* No. 89., April 1978.

——————————., "Teungku Abdul Wahab Seulimeum", *Sinar Darussalam,* No. 70, Juli 1976.

——————————., "Pangkalan Lhoknga yang Bersejarah", *Sinar Darussalam,* No. 62., Juli 1975.

——————————., "Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah", *Sinar Darussalam,* No. 63, Agustus/September 1975.

——————————., "Mengenang Kembali Perjuangan Missi Haji R.I. ke II, *Sinar Darussalam,* No. 88, Maret 1978.

——————————., "Suka-Duka Koran-Koran Kiblik Dalam Tahun-Tahun Revolusi Fisik", Harian *Waspada,* 13 Agustus 1979.

——————————., dan T. Alibasyah Talsya, *Hari-hari Pertama Revolusi '45 di Daerah Modal. Banda aceh : Kanwil* Dep. P.K. Prop. Daerah Istimewa Aceh dan MSI Aceh, 1976.

Hasan Basrie, Z.T., "Pangkalan Berandan Dibumihanguskan", Harian *Waspada,* 17 dan 18 Agustus 1979.

Hussain, Abdullah, *Terjebak,* Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1965.

——————————., *Peristiwa,* Kuala Lumpur : Pustaka Antara, 1965.

Hasyim, Twk., "Detik-Detik Proklamasi 1945", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan,* No. 7 tahun 1971.

Insider, *Atjeh Sepintas Lalu,* Djakarta : Fa. Archapada, 1950.

Ismail Jacob, "Riwajat Gema Proklamasi di Atjeh", *Warta Pendidikan dan Kebudayaan* No. 7, Banda Atjeh : Perwakilan Dep P dan K. Prop. Daerah Istimewa Atjeh, 1971.

Ismuha, *Pendidikan Agama di Aceh,* Banda aceh : Kanwil Dep. P dan K. Prop. Daerah Istimewa Aceh dan MSI Daerah Aceh, 1986.

——————————., *Pendidikan Agama di Aceh,* Banda Aceh : Kanwil Dep. P dan K. Prop. Daerah Istimewa Aceh dan MSI Daerah Aceh, 1976.

——————————., "Pengetahuan Saja Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945", *Warta Pendidikan dan Kebudajaan,* No. 7, Perwakilan Dep. P. dan K. Prop. Daerah Istimewa Atjeh, 1971.

——————————., *Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama di Aceh,* Banda aceh : Majlis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 1978.

Jajasan Pembina Darussalam, *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,* Darussalam: 1969.

Joenoes Djamil, M., *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan),* Banda aceh : Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1975.

Joesoef, Hoesin, "Sedjarah Perdjuangan Pemuda di Daerah Atjeh", *Warta Pendidikan dan Kebudajaan,* No. 7, tahun 1971.

Jongejans, J., *Land en Volk van Atjeh, Vroeger en Nu,* Baarn : Hollandia Drukkerij, 1939.

Kementerian Penerangan R.I., *Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Utara,* Djakarta : 1953.

——————————., *Keterangan dan Djawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh,* Djakarta : 1953.

Kementerian Peneranngan R.I., *Pendapat Pemerintah Mengenai Laporan Panitia DPR-RI tentang Keadaan di Atjeh, Djakarta* : 1954.

Kelompok Kerdja SAB, *Sedjarah Singkat Perdjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia,* Staf Angkatan Bersendjata, 1964.

Knottenbelt, Maarten, "Kontak Dengan Aceh", *Vrij Nederland,* London : Thn. 6, No. 26 Januari 1946. Terjemahan Aboe Bakar, 1979.

Lapian, A.B., "Sejarah dan Sejarawan dan Masa Depan", *Prisma* No. 7, Jakarta : LP3ES, 1976.

Menjambut Konperensi Muhammadijah Wilajah Daerah Istimewa Atjeh, Kutaradja : Panitia Konperensi Muhammadijah Daerah Istimewa Atjeh ke 26, 1962.

Meuraxa, Dada, *Atjeh 1000 Tahun dan Peristiwa Teungku Daud Beureueh Cs.,* Medan : Pustaka Masmar, tanpa angka tahun.

——————————., *Ungkapan Sejarah Aceh,* Medan : tanpa penerbit, 1976.

——————————., Perdjuangan Rakjat di Atjeh, Medan : Megabook Store, tanpa angka tahun.

Mochtar J. Hasbi & Fauzi Hasbi, *Perang Bayu,* Medan : Panitia

Seminar Perjuangan Aceh, 1976.
Muhammad Ibrahim, *et. al.*, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Jakarta : P3KD, Dep. P dan K dan K., 1977.
——————————., Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Jakarta : P3KD., Dep. P dan K., 1978.
Mutyara, A.G., *Banda Aceh Pernah Berperanan Sebagai Ibu Kota R.I.*, Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh, 1976.
Nasution, A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid I, Bandung: Disjarah Angkatan Darat & Penerbit Angkasa, 1977.
——————————., *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, Djakarta : Mega Book Store, 1964.
Nasution, A.H., *Tentara Nasional Indonesia I*, Djakarta : Seruling Masa, cetakan ketiga, 1970.
Notosusanto, Nugroho, *Sedjarah Dan Hankam*, Djakarta : Lembaga Sedjarah Hankam, 1960.
Palmer, Leslie, *Indonesia and The dutch*, London : Oxford University Press, 1965.
Panitia Penerbitan Boekoe Peringatan, *Satoe Tahoen N.R.I. Di Soematera, 17 – 8 – '45 Sampai 17 – 8 – '46*, Pemerintah Poesat Soematera, 1946.
Panitia Pusat Peringatan Lahirnja Pemerintah Darurat R.I., *Beberapa Tjatatan Tentang : Lahirnja Tugas Dan Perdjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia*, 1969.
Panitia, *Seminar Sedjarah Perdjuangan Pemuda Indonesia, Daerah Tk. II Atjeh Tengah*, Takengon : 1965.
Pluvier, Jan, *Indonesie, Kolonialisme Onafhankelijkheid Neo-Kolonialisme*, Nijmegen : Sun, 1978.
Piekaar, A.J., *Atjeh en de Oorlog met Japan*, Den Haag : van Hoeve, 1949.
Polem, Teuku Muhammad Ali Panglima, *Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem*, Kutaradja, 17 Agustus 1972. Terjemahan ke dalam bahasa Belanda oleh J.H.J. Brendgen.
Pemerintah R.I. Daerah Atjeh, *Revolusi Desember '45 di Atjeh atau Pembasmian Pengkhianatan Tanah Air*, Kutaradja : 1950.
Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, *Seminar Hasil*

Sofwan, Mardanus, Pahlawan Nasional *Teuku Nyak Arief*, Jakarta : Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Dep. P dan K., 1975.

Sartono Kartodirdjo, "Beberapa Masalah Teori dan Metodelogi Sedjarah Indonesia", *Lembaran Sedjarah* No. 6, Yogyakarta : Fakultas Sastra dan Kebudajaan Universitas Gadjah Mada, 1970.

----------., (ed)., *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid VI, Jakarta : Dep. P dan K., 1975.

Sejarah Militer Kodam-I/Iskandar Muda, *Dua Windhu Kodam* I/Iskandar Muda, Kutaraja : 1972.

Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, *Modal Revolusi 45*, Kutaradja: Komite Musjawarah Angkatan '45 Daerah Istimewa Atjeh, 1960.

Syammaun Gaharu, *Beberapa Catatan Tentang Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan di Aceh*, Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh, 1976.

----------., "Teuku Nyak Arief, Profil Seorang Pejuang", Harian *Mimbar Umum*, Medan 12 Mei 1979.

Syahadat, Haji, *Perjuangan Rakyat Aceh Tenggara Sejak tahun 1873 s/d Kemerdekaan R.I.*, Medan : Panitia Seminar Perjuangan Aceh, 1976.

Syam, Abdullah, "Lho 'Nga adalah Salah satu Basis Perjuangan Indonesia Merdeka", *Waspada*, Medan : 17 Agustus 1979.

Secretariat DPRD-GR. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, *Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh, Dalam Sedjarah Pembentukan dan Perkembangan Pemerintahan di Atjeh Sedjak Proklamasi 1945 Sampai Awal Tahun 1968 Dan Produk-produk Legislatif*, 1968.

Talsya, T., Ali Basyah, *10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh*, Banda Atjeh : Pustaka Putroe Tjanden, 1969.

----------., *Sedjarah dan Dokumen-dokumen pemberontakan di Atjeh*, Djakarta : Kesuma, tanpa angka tahun.

----------., "Perjuangan Kemerdekaan di Aceh", *Santunan*, thn. III, No. 17, 18, 19, 20 21. : thn. IV, No. 24, 27, 28, 34.

----------., "Pesawat Terbang itu Bernama Seulawah" *Santunan*, thn. I, No. 6 thn. II, No. 8 dan 9.

Penelitian Lapangan, tahun 1976, 1977 ; 1978, Darussalam – Banda Aceh.

————————., "Fragmen Revolusi 45 di Aceh", *Sinar Darussalam,* No. 71 dan 75/76.

Ubit, T. Sabi, "Rakyat yang berjiwa patriotik melawan penjajahan Fasisme Jepang", *Berita Buana,* Jakarta, 22 Mei 1975.

Usman Ismail, "Mengenang Detik-detik Sejarah Proklamasi 17 Agustus 1945 di Aceh Timur", *Analisa,* Medan: 16 Agustus 1975.

Usman Nya' Gade, Sekitar Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh, Banda Aceh : Kanwil Dep. P dan K. Prop. Daerah Istimewa Aceh & Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Aceh, 1976.

Utoyo, Radik, Cs., *Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 – 1950,* Jakarta : C.V. Alda, 1976.

Veer, Paul Van't, *De Atjeh-Oorlog,* Amsterdam : Uitgeverij De Arbeiderspers, 1969.

Zentgraaff, H.C., *Atjeh* Terjemahan Aboe Bakar Bsf, dengan halaman tambahan dari penterjemah, belum diterbitkan.

DAFTAR INFORMAN

Ali Hasjmy, Prof. (lahir 26 Maret 1914), tempat tinggal Banda Aceh; jabatan/pekerjaan sekarang Rektor IAIN Ar-Raniry, bekas Gubernur Aceh dan kegiatan selama Revolusi Kemerdekaan antara lain Ketua IPI/BPI/PRI/Pesindo Daerah Aceh.

Ali Keureukon, T. (Umur 66 tahun), pensiunan, bekas Anggota BPH Daerah Aceh.

A. Gani Mutyra, (lahir 1923), tempat tinggal Medan, Direktur P.T. Parasawita, Staf Redaksi Atjeh Sinbun, Majalah Pahlawan dan Kepala Jawatan Penerangan TNI Divisi X Sumatera.

Amir Husin Al-Mujahid, Tgk. (lahir 1901), Idie, ex Ketua Pemuda PUSA, Wakil Koordinator Pertahanan Sumatera, Panglima TPR/Lasykar Divisi Tgk. Chiek Paya Bakong.

Aboe Bakar Bsf, Sekarang tenaga penterjemah PDIA, pensiunan kantor Residen/Gubernur Daerah Aceh.

Ali Basyah, T.H. (tahun 1911), ex. Zelfbestueder, Suntyo dan Wedana.

Adam Ismail, Pensiunan TNI (berpangkat Mayor), bekas Sekwilda Kotamadya Banda Aceh.

A. Muthalib, (thn. 1916), Julok-Langsa, Pedagang, ex. Pemuda PUSA, aktif dalam Muhammadiyah Langsa.

Abdullah, Tgk. (75 tahun), pensiunan Hakim, Tanah Luas (Aceh Utara).

Abdul Rani, Tgk (73 tahun), pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tanah Luas (Aceh Utara).

Djohan, T. (50 tahun), Pegawai Sekretariat DPRD Kotamadya Banda Aceh, Banda Aceh.

Darul Aman, ex. Camat Bebesan (Aceh Tengah), tempat tinggal Blang Koloq. I.

Elia Sinar, (WNI Cina; lahir 1914), Banda Aceh, anggota Veteran, pada masa Revolusi Kemerdekaan, bekerja pada bahagian Pengangkutan dan Perbekalan Pesindo.

Hasan Syah, T (tahun 1928), Lhok Seumawe, Anggota MPR-RI. ex Pesindo.

Ismuha, SH, Drs. H ex Rektor IAIN Ar-Raniry, sekarang Rektor IAIN Medan, ex. PB, PUSA.

Ibrahim Abduh (1917), Banda Aceh, pensiunan, ex Bupati Pidie aktif dalam Pemuda PUSA dan Mujahidin.

Ismail Ahmad (64 tahun), Banda Aceh, saudagar, aktif sebagai pimpinan dalam mengumpulkan dan perjuangan selama Revolusi Kemerdekaan di Kutaraja.

Ismail Arief (tahun 1914), Kuala Simpang, ex anggota BPH Aceh Timur, selama Revolusi Barisan Hisbullah – Mujahidin.

Ismail Usman, H. Simpang Ulim, ex Seinedan dan Ketua Mujahidin Simpang Ulim.

Ismail Muhammad (65 tahun), pensiunan, Lhok Seumawe.

Ibrahim, T. Cut. Sekwilda Kabupaten Aceh Utara, Lhok Seumawe.

Jafar Kornilius (WNI Cina, lahir 1914), anggota Veteran, tahun 1945 s/d 1947 bekerja pada bidang pengangkutan dan perbekalan Batalyon 13 TRI/TNI Aceh Banda Aceh.

Muhammad Hasan, Mr. T (lahir, 4 April 1906 di Sigli), anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili Sumatera, selama Revolusi Kemerdekaan banyak pekerjaan yang dipangkunya, antara lain, Gubernur Sumatera, Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan PDRI.

M. Arief Amiruddin (tahun 1926), ex Komandan Batalyon IV, Resimen III Divisi Rencong Kesatrya Pesindo Tekangon (Aceh Tengah).

M. Dahlan Merapi (tahun 1922), Kuala Simpang, Group Kesinian Minang.

Muhammad, T., Sabang, ex. Zelfbesturrder Sabang.

Muhammad Basyah (tahun 1918), ex Wartawan Atjeh Sinbun, Semangat Merdeka, Sekretaris Umum Pemuda PUSA, tempat tinggal, Langsa.

Muhmud Harun, Tgk. (lahir Damar Putih, Idie, 1919), Pensiunan Bupati, pernah menjadi Wedana, al. di Kuala Simpang, Singkil, Bireun.

Marzuki Abubakar, Bireun, ex anggota DPRD Aceh, dan anggota Taman Siswa Bireun.

Tgoesman Banda Aceh, ex. Kepala Inspeksi SMP Daerah aceh, Guru/anggota Taman Siswa Aceh.

Pengulu Kebet (65 tahun), pensiunan PPN, Blang Kolaq I Takengon.

Syammaun Gaharu, H. (lahir, Teupun Raya, 10 Nopember 1913), tempat tinggal sekarang, Medan, ex Panglima Kodam I – Iskandar Muda, masa Jepang Lettu (Tjui) Gyugun; masa Revolusi, antara lain, Ketua Markas Daerah API Daerah

Aceh.

Soeryoatmodjo, RMD, (Solo, tahun 1900), Medan, Komandan Kaibodan Peureulak, anggota KNI mewakili Peureulak, aktifis Masyumi (145 – 1959) di Langsa.

Soegondo Kartoprodjo, K. (Yogya,, 15 Juli 1908), Medan ex. Pimpinan Taman Siswa aceh, aktifis PNI dan sekarang sebagai anggota Perintis Kemerdekaan.

Soetikno Padmo Soemarto, Banda Aceh, ex. Pengurus Taman Siswa Aceh, Anggota Badan eksikutif KNI Daerah Aceh, anggota DPR Sumatera dan ex. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Syahbuddin Razi, T., (P. Susu, 16 Juli 1928), Medan, ex. aktifis Masyumi/GPII, pengarang tentang sejarah Aceh.

Sufi Ismail, Tgk. Indrapuri – Aceh Besar, ex. anggota Fujiwara Kikan (barisan "F").

Usman Azis, Tgk. (70 tahun), pensiunan Bupati pertama Kabupaten Aceh Utara, Lhok Seumawe.

Ya'qub Ali, Drs. T.H. (Meureudu, 25 Maret 1917), Sigli Dekan Fakultas Syariah Al-Hilal Sigli, aktifis Pemuda PUSA Cabang Sigli, ex. Kepala Negeri, Wedana dan anggota BPH Kabupaten Pidie.

LAMPIRAN I. Djakarta, 22-8-2605

Saja Ir. Soekarno, Pemimpin Besar Bangsa Indonesia :

I. mengangkat sebagai Wakil diseloeruh daerah
   a. Sumatera
   b. Borneo
   c. Selebes
   d. Sunda – Ketjil
   e. Malukoe

   bertoeroet
   a. tn. Mr. Teukue Hasan
   b. tn. Ir. Pangeran Mohd. Noor
   c. tn. Dr. G.S.S.J. Ratu Langie
   d. tn. Mr. I. Goesti Ketoet Poedja
   e. tn. Mr. J. Latuharhari

II. Mewajibkan beliau serta memberikannja koeasa oentoek menjelenggarakan segala kepoetoesan jang diambil dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan dan oentoek mewoedjoedkan tjita-tjita jang lain, jang telah dilahirkan dalam sidang terseboet.

Pemimpin Besar Bangsa Indonesia

Soekarno

Kepada
Jang terhormat
P.T. Mr. Teukoe Hasan
MEDAN

Lampiran II

PETIKAN dari Daftar Ketetapan Gubernur Sumatera dari Negara Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 1945 No. 1/X

KITA GOEBERNOER SUMATERA DARI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca surat kawat Presiden Negara Republik Indonesia tanggal 29 September 1945;

MEMOETOESKAN :

Sementara menoenggoe pengesahan Presiden Republik Indonesia diangkat sebagai Residen Aceh paduka tuan Teuku Nyak Arief di Kotaraja.

P E T I K A N ini dikirimkan kepada yang berkepentingan oentoek dimakloemi.

KITA GOEBOERNOER SUMATERA DARI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Atas namanya;
Sekretaris.

(Mas Tahir)

K e p a d a
p.t. Teu Koe Nyak Arif,
Residen Aceh
di

Kotaraja

LAMPIRAN III

(1)

SALINAN dari daftar Ketetapan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 1946. No. 204.

KITA GUBERNUR SUMATERA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa untuk kesempurnaan perjalanan pemerintah keresidenan Aceh perlu dirobah susunan pamong-praja dalam keresidenan tersebut.;

Membaca surat kawat Residen Aceh tanggal 8 April 1946 No. 223/rahasia dan tanggal 2 Agustus 1946 No. 428/rah;

Membaca lagi surat Ketetapan kita tanggal 28 Desember 1945 No. 71 dan tgl. 23 Pebruari 1946 No. 48;

Mengingat bunyi kawat kementerian Dalam Negeri Tanggal 6 Juli 1946 No. p. 326 dan kawat Presiden Negara Republik Indonesia tanggal 29 September 1945;

MEMUTUSKAN;

Mulai ia tidak lagi memangku jabatannya memperhentikan dari pekerjaannya :

1. Teuku Abdullah Umar Muli,
2. T. Ahmad Djeunib,
3. T. Husin Troemon,
4. T. Mohammad Said,
5. T. Mohammad Djohan Alamsjah,
6. T. Husin,
7. T. Moehammad,
8. T. Mohammad Ali Teunom
9. T. Oesman,
10. Djohan,
11. Oesman Ralibi,
12. T. S a b i,
13. T. Mohammad Daoed,
14. T. Machmud,

15. R.M. Zainoeddin,
16. T.R. Husin,
17. Radja Mariboen,
18. T. Mohamad Basjah,
19. T. Idris.
20. T. Radja Pidie,
21. T. Radja Basjah Langsa,
22. T. Radja Basjah Lho'Sukon.
23. T.R. Soeloeng,
24. T. Mohamad Adji,
25. T. I tuam,
26. T. Sjaroel,
27. T. Radja Neh,
28. T. Hasan Bakongan,
29. T. Mohamad Joesoef,
30. Hadji Haroen,
31. T. Joesa,
32. Godang,
33. Amiroeddin,

1. Pemimpin Penerangan daerah Aceh,
2. Asisten Residen yang diperbantukan kepada Residen Aceh.
3. Asisten Residen Aceh Besar,
4. Asisten Residen Pidie,
5. Asisten Residen Aceh Tengah.
6. Asisten Residen Aceh Utara.
7. Kepala Wilayah yang diperbantukan kepada Residen Aceh.
8. Kepala Wilayah Kotaraja,
9. Kepala Wilayah yang diperbantukan kepada Asisten Residen Aceh Besar.
10. Kepala Wilayah yang diperbantukan kepada Asisten Residen Pidie.
11. Kepala Wilayah yang diperbantukan kepada Asisten Residen Aceh Tengah.
12. Kepala Wilayah Sigli.
13. Kepala Wilayah Lammeulo.
14. Kepala Wilayah I Meureudoe.
15. Kepala Wilayah Takengon.

16. Kepala Wilayah Blangkeujeren,
17. Kepala Wilayah Koetatjane
18. Kepala Wilayah kl. I Lho'Seumawe.
19. Kepala Wilayah Bireuen.
20. Kepala Wilayah yang diperbantukan kepada Asisten Residen Aceh Timur.
21. Kepala Wilayah Langsa.
22. Kepala Wilayah Idi.
23. Kepala Wilayah Kuala Simpang.
24. Kepala Wilayah Meulaboh.
25. Kepala Wilayah Singkel
26. Pembantu Kepala Wilayah Kwala Simpang
27. Pembantu Kepala Wilayah yang diperbantukan kepada Asisten Residen Aceh Barat.
28. Pembantu Kepala Wilayah yang diperbantukan kepada Kepala Wilayah Meulaboh.
29. Pembantu Kepala Wilayah Sigli.
30. Pembantu Kepala Wilayah Lho'Sukon.
31. Pembantu Kepala Wilayah Meureudu.
32. Pembantu Kepala Wilayah Lammeulo.
33. Pembantu Kepala Wilayah Idi.

KEDUA : Sementara menunggu pengesahan Pemerintah Agung, terhitung mulai ia menjabat pekerjaannya, mengangkat sebagai Bupati :

1. P i d i e
2. Aceh Tengah
3. Aceh Timur
4. Aceh Utara
5. Aceh Besar

dengan gaji f. 500,– (lima ratus rupiah) sebulan. terhitung mulai 1 Mei 1946.

1. Tgk. Abd. Wahab Seulimeun.
2. Radja Wahab
3. T. Mohd. Ali
4. Tgk. Soelaiman Daoed Boengkaih
5. Ali Hasan

KETIGA : Sementara belum diangkat Bupati untuk Aceh Selatan menunjukkan sebagai Bupati Aceh Selatan merangkap pekerjaannya sekarang

Ibn. Saadan

Bupati Aceh Barat .....

Terhitung mulai ia menjabat pekerjaannya mengangkat sebagai :

1 sampai 12 wedana

13 sampai 16 wedana yang diperbantukan kepada

17 sampai 27 camat

1. Kutaraja
2. Sigli
3. Lammeulo
4. Meureudoe
5. Takengon
6. Blangkejeren
7. Aceh Utara (Lhok Seumawe)
8. Bireuen
9. Lhok Sukon
10. Langsa
11. I d i
12. Tamiang
13. Bupati Aceh Besar
14. Bupati Aceh Tengah
15. Bupati Aceh Utara
16. Bupati Aceh Timur
17. Kutaraja.
18. Sigli
19. Lammeulo.
20. Meureudoe
21. Takengon
22. Blangkejeran
23. Kotacane
24. Lhok Seumawe
25. Lhok Sukon
26. Idi
27. Tamiang

dengan gaji .....

1. sampai 16 f.300 – (Tiga ratus rupiah)
17. sampai 27 f. 200,– (dua ratus rupiah).

1 sampai 27 sebulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1946

1 sampai 27 sebulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1946

1. Tgl. Sjeck Narchaban
2. M. Hoesin Ieleubeue
3. T.A. Hasan Idi
4. Tgk. M. Daoed
5. Moeda Sedang
6. M. Saleh Aman Sari
7. Tgk. Abd. Wahab Beureugang
8. Tgk. M. Noer
9. Tgk. Mohd. Oesman Aziz.
10. Abdullah
11. T. Djohan
12. Tgk. Maimoen Habsjah
13. Tgk. Zainibakri
14. A.R. Hadjat
15. Tgk. Madam P. Tjoenda
16. Tgk. Mahmoed Haroen
17. Abd. Kadir Karim
18. Nya Abas Beureunoen
19. Tgk. Ibrahim Metereuen
20. Tgk. Abdullah
21. Anwar Badan
22. M. Said
23. Khabar Ginting
24. T. Ali Basjah Lhok Sukon
25. Tgk. M. Hasbi Usman
26. Aboe Bakar Adamy
27. Joebahar

Segala sesuatu diperbuat dengan perjanjian untuk merubah mana-mana yang salah.

Salinan keterangan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Purwokerto.
2. Residen Aceh (10 rekaman),
3. Residen yang diperbantukan kepada Gubernur Sumatera di Kutaraja.
4. Kantor Pengurusan Uang Negara di Kutaradja untuk diketahui.

Petikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi.

GUBERNUR SUMATERA DARI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

atas namanya :
Sekretaris,
d.t.o.
(Mas Tahir)

Kepada
PT. Residen Aceh
di
Kutaradja

LAMPIRAN IV.

Kantor Gubernur Propinsi
Sumatera
Bah. Dokumentasi
Bukittinggi

Daftar Pembahagian Daerah
Aceh tahun 1948.

Keresidenan Aceh Terdiri dari :
7 Kabupaten
21 Kawedanan
102 Negeri

1. Residen	:	Teuku Moehammad Daoedsjah
2. Bupati d/p (Urusan) Pemerintahan Umum)	:	T.M. Amin
3. Patih d/p (Sekretaris	:	Oesman
4. Patih d/p	:	Teungkoe Maimoen Habsjah
5. Wedana d/p	:	Said Aboebakar
6. Wedana d/p	:	Nja' Mansoer
7. Wedana d/p (Urusan Bangsa Asing)	:	Amiroeddin
8. Wedana d/p (Bah. Otonomi)	:	Teungkoe Mahmoed Haroen
9. Wedana d/p	:	Toeankoe Ibrahim
10. Tjamat d/p	:	Zainal Abidin
11. Kepala Tata usaha	:	M. Hoesin
12. Penyantun Usaha	:	Potan Harahap
13. Penyantun Usaha	:	T. Pakeh
14. Penyantun Usaha	:	H. Sjamoean
15. Penyantun Usaha	:	T. Alibasjah.

Kabupaten	Kewedanaan	Camat-Camat Wakil Wedana di	Nama-nama Bupati/Wedana/Camat
1. Aceh Besar (kota Raja)			Teungkoe Zaini Bakri
	1. Kota Raja		Tengkoe Sjech Marhaban
		1. Kota Raja	Marzoeki
		2. Lho'nga	Teukoe Tjoet Adik
	2. Seuliemeum		Ahmad Abdullah
	3. Sabang		Achmad Kamil (Camat)
2. Pidie (Sigli)			Teungkoe Abdoel Wahab
	4. Sigli		Teungkoe H. Ibrahim
		3. Sigli	Ibrahim Abdoeh
	5. Kota Bakti		Teukoe Poetih
	6. Meoereudoe		Nja' Abbas
		4. Meureudoe	Teungkoe Abdoel lah
3. Aceh Utara (Lho'Seumawe)			Teungkoe Soelaiman Daoed
	7. Lho'Seumawe		Teungku Moehammad Daoed
		5. Lho'Seumawe	Moehammad Ali Balwi
	8. Bireuen		Moehammad Adam
	9. Lho'Soekon		Teungku Moehammad Oesman Aziz
		6. Lho'Soekon	Teungku Abdoel Rani
4. Aceh Timur (Langsa)	10. Langsa		Teukoe A.Hassan
			Teukoe Abdoel Wahab Dahlawy
		7. Langsa	Teukoe Mohd.

Kabupaten	Kewedanaan	Camat-Camat Wakil Wedana di	Nama-nama Bupati/Wedana/Camat
			Hasby Oesman
	11. Idi		Teukoe Moehammad Thaib
		8. Idie	Moehamad Karim Arsjad
	12. Tamiang		Ishak Amin
		9. Kwala Simpang.	Teukoe Moehammad Moesa
5. Aceh Tengah (Takengon)	13. Takengon		Radja Abdoel Wahab Moeda Sedang (patih)
	14. Blangkejeren		Moehammad Saleh
	15.		
6. Aceh Barat (Meulaboh)			Moehammad sein Toeankoe Abdoellah.
	16. Meulabih		
		10. Meulaboh	Teukoe Tjoet Mamat
	17. Calang		Teukoe Raja Adijan
		11. Calang	Amin Saleh
	18. Simeuloer (Sinabang)		Radja Machmoed
7. Aceh Selatan (Tapaktuan)			M. Sahim Hasjimy.
	19. Tapaktuan		Abdoel Gafoer
		12. Blang Pidie	Teungkoe Moenier Byth.
		13. Tapaktuan	Moehammad Djoened
	20. Bakongan		Teukoe Teuboh
	21. Singkel		Mohammad Sjam
		14. Singkel	Moehammad Ilyas B.A.

LAMPIRAN V.

Nama-nama Pembantu Pemerintahan Daerah Aceh dan Kepala-kepala Jawatan pada awal Revolusi Kemerdekaan (sejak bulan Oktober 1945)*

I. **Pembantu Pemerintahan** :

1. Tgk. M. Daud Beureueh, Bupati yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Aceh dengan tugas urusan Agama.
2. T.M. Amin, Bupati diperbantukan pada urusan pemerintahan Umum.
3. T.M. Ali Panglima Polem, Bupati yang diperbantukan pada urusan Ekonomi.
4. Usman diangkat menjadi Sekretaris Pemerintah Daerah Aceh.

II. **Kepala-kepala Jawatan** :

1. Tgk. Abdurrahman Matang Glumpang II Kepala Jawatan Agama Daerah Aceh.
2. Dr. Mahyudin Kepala Jawatan Kesehatan Daerah Aceh.
3. Ir. Tahir Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Aceh.
4. Said Dahlan Kepala Jawatan Penerangan Daerah Aceh kemudian T. Abdullah Umar Muli dan pada tahun 1946 digantikan oleh Usman Ralibi.
5. Tgk. Ali Hasjmy Kepala Jawatan Sosial Daerah Aceh.
6. M. Hasyem Kepala Kepolisian Daerah Aceh.
7. Tgk. M. Hasan Ali Kepala Kejaksaan Daerah Aceh.
8. Mr. M. Amin Kepala Kehakiman/Keahlian Daerah Aceh.
9. Tgk. H.M. Hanafiah Kepala Jawatan Penerangan Daerah Aceh.
10. Raden Hadri Kepala Jawatan Pertanian Daerah Aceh.
11. Raden Inson Kepala Jawatan Kereta Api Daerah Aceh.
12. Gani Adam Kepala Jawatan Perindustrian Daerah Aceh.
13. Ali Martholo Kepala Pendidikan Daerah Aceh.
14. A. Muid diangkat menjadi Kepala Keuangan Daerah Aceh.
15. Kamasurid diangkat menjadi Sekretaris Komite Nasional Daerah Aceh.
16. Tgk. H. Hasballah Indrapuri Kepala Mahkamah Syari'ah Daerah Aceh.

---

* *Sumber* : H.T.M. Amin, *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*, MSI Daerah Aceh, hal. 3 – 4.

LAMPIRAN VI.

Susunan Pengurus Komite Nasional Indonesia (K.N.P.I.) Daerah Aceh.*

Ketua : Teuku Nyak Arief, Wakil Ketua Tuanku Mahmud (kemudian menjadi Ketua).

Anggota : 1. Dokter M. Mahjudin, 2. H.M. Zaunuddin, 3. Kamarusid, 4. Oemar Husni, 5. P. Lemahelu, 6. Tgk. Ismail Yakub, 7. Haji Bustaman, 8. Mr. S.M. Amin, 9. Sutikno Padmo Sumarto, 10. Tgk. Abdussalam, 11. Thamrin Amin, 12. Ir. M. Thahir, 13. Ibrahim, 14. Muhammad ZZ., 15. Osmansyah, 16. Tk. Ali Lam Lagang, 17. Tgk. Abdul Rachman, 18. Muhammad Hanafiah, 19. R. Isnun, 20. Ng. Suratno, 21. Raden Suwandi, 22. Tuanku Johan Ali, 23. M. Mokhtar; 24. Ahmad Abdullah, 32. Afan Daulay, 33. Nurdin St. M., 34. Tgk. Zainul Abidin, 35. Mohd. Saridin, 36. Ahmad Binuali, 37. Karim M. Durjat, 38. Abd. Rachman, 39. Abd. Gani, 40. T. Ahmadsyah, 41. O.K. Dahlan, 42. Abduh Syam, 43. A. Munir, 44. Hasyim, 45. Nya' Haji, 46. Nyonya Abdul Azis, 47. Teungku M. Daud Beureuih, 48. Saleh, 49. Ahmad, 50. Husin Yusuf, 51. Hasymi, 52. Hasan, 53. T.M. Amin, 54. Nyonya Sutikno Padmo Sumarto, 55. Idham, 56. Sayid Abubakar, 57. T.H.M. Jamin, 58. Amelz, 59. Ali Hasan, 60. M. Husin, 61. Sahim Hasyimi, 62. Raja Wahab, 63. Tgk. Suleiman Daud, 64. Tgk. Abdul Wahab, 65. T.A. Hasan.

---

* Sumber : S.M. Amin, *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hl. 35.

LAMPIRAN VII.

Susunan Pengurus API di Aceh.

1. Markas Daerah API Berkedudukan di Kutaraja dengan :

Komandan	:	Syammaun Gaharu
Kepala Staf	:	T.A. Hamid Azwar
Sekretaris	:	Husin Yusuf
Anggota	:	Nyak Neh Rica, Said Usman, Said Ali, T.M. Daud Samalanga, T. Sarung, Bachtiar Idham, T. Abdullah, Saiman.

2. Wakil Markas Daerah–I (WMD–I) berkedudukan di Kutaraja, di bawah pimpinan Nyak Neh dengan Komandan-komandan pasukannya : Said Ali (Kutaraja), Usman Nyak Gade (Kutaraja), Said Abdullah (Kutaraja), Teuku Manyak (Seulimun).
3. Wakil Markas Daerah–II (WMD–II) berkedudukan di Sigli di bawah pimpinan T.A. Rahman dengan Komandan pasukannya : T. Rica (Sigli), Abdul Gani (Sigli), T. Abdurahman (Lammeulo), Hasballah Haji (Meuredu).
4. Wakil Markas Daerah–III (WMD–III) berkedudukan di Bireuen di bawah pimpinan T.M. Daud Samalanga dengan Komandan pasukannya : Teuku Hamzah (Samalanga), Agus Husin (Bireuen), Husin Yusuf (Bireuen).
5. Wakil Markas Daerah–IV (WMD–IV) berkedudukan di Lho' Sukun di bawah pimpinan T. Moad. Syah/Ibrahim Hatta dengan komandan pasukannya : Hasbi Wahidi (Panton Labu), Nurdin Hatta, Ajad Musi (Lho' Sukun), A. Gani Dadeh, T. Usman Mahmud (Lho' Seumawe), T. Zulkifli, T. Yacop Muli (Lho' Seumawe).
6. Wakil Markas Daerah–V (WMD–V) berkedudukan di Langsa di bawah pimpinan Bachtiar/Dahlan dengan Komandan pasukannya : Ayub (Langsa), Nurdin Sufie (Idi), Daud Malem, B. Nainggolan (Kuala Simpang), Abu Samah, Petua Husin (Langsa).

7. Wakil Markas Daerah–VI (WMD–VI) berkedudukan di Kutacane di bawah pimpinan Muhammad Dien dengan Komandan-komandan pasukannya :

   Bahrum, Maaris, Maat, A. Rahim, A. Jalim Umar.

8. Wakil Markas Daerah–VII (WMD–VII) berkedudukan di Meulaboh di bawah pimpinan T. Usman Yacob/T. Cut Rahman dengan Komandan-komandan pasukannya :

   Hasan Ahmad (Meulaboh), Raub, Hamidi Hs. (Suak Timah), A. Hanafiah, T. Ga-Dung, A.K. Jailani (Calang), Indah.

9. Wakil Markas Daerah–VIII (WMD–VIII) berkedudukan di Tapak Tuan di bawah pimpinan M. Nasir/Nyak Adam Kamil dengan Komandan-komandannya :

   Abdullah Sani (Tapak Tuan), H.M. Syarif (Blang Pidie), B.B. Jalal, Nyak Hukum (Bakongan), Iskandar.

LAMPIRAN VIII.

Susunan Pengurus Kelasykaran di Aceh.

1. Divisi Rencong

   a. Pimpinan Divisi :
      Pimpinan Umum : A. Hasymi
      Komandan Divisi : Nyak Neh Lho' Nga
      Kepala Staf : M. Saleh Rachmany

   b. Resimen-resimen :

      (a) Resimen Pocut Baren di Kutaraja.
      Komandan : Zahara.

      (b) Resimen–I di Kutaraja
      Komandan : A. Gani Adam
      Kepala Staf : Jarimin

      (c) Resimen–II Sigli
      Komandan : Putih Mauni, Sigli
      Kepala Staf : Zainuddin Hs.

      (d) Resimen–III Lhok Seumawe.
      Komandan : T. Syammaoen Latief
      Kepala Staf : T. Banta Sulaiman

      (e) Resimen–IV Aceh Tengah
      Komandan : M. Zaharuddin, Takengon
      Wakil : M. Sjukur
      Kepala Staf : Asep Jalil.

      (f) Resimen–V Aceh Timur Langsa
      Komandan : Tgk. Usman Aziz.
      Wakil : Ismail.

      (g) Resimen–VI Aceh Barat
      Komandan : H. Daud Dariah
      Wakil : T.R. Iskandar.

      (h) Resimen–VII Aceh Selatan
      Komandan : M. Sahim Hasymi
      Kepala Staf : A. Gafur Akir.

2. Divisi–X/Tgk. Cik Ditiro.

(1) Pimpinan Divisi :

Komandan	:	Cak Mat Rachmany
Kepala Staf	:	Abdul Muthalib.

(2) Resimen :

a. Resimen Aceh Besar di Kutaraja :

Komandan Resimen I	:	Said Usman
Wakil	:	–
Kepala Staf	:	–

b. Resimen II Aceh Pidie di Sigli :

Komandan Resimen	:	Said Usman
Wakil	:	Tgk. Amin Syamy

c. Resimen III Bireuen – Lhok Seumawe – Langsa :

Komandan Resimen	:	A. Muthalib, Bireuen
Wakil	:	Tgk. Yusuf Berawang.

d. Resimen IV Aceh Barat di Meulaboh :

Komandan Resimen	:	Tgk. Hasan Hanafiah
Wakil	:	Tgk. Nyak Cut
Kepala Staf	:	T.R. Idris Putih.

e. Resimen V Aceh Tengah Takengon – Kutacane :

Komandan Resimen	:	Ilyas Leube, Takengon
Kepala Staf	:	Saleh Adry

3. Divisi Tgk. Cik Paya Bakong.

(1) Pimpinan	:	Tgk. Amir Husin Al Mujahid
Wakil Panglima bahagian Keuangan	:	Tgk. Makhmud
Pelaksana Tugas Panglima	:	Ajad Musyi

(2) Komandan Batalyon Divisi Berani Mati.

Aceh Timur	:	Tgk. Usman Peudada.
Aceh Utara	:	Tgk. M. Kasim Rasyidi.
Aceh Tengah	:	Tgk. Banta Cut/Saleh Adry.
Aceh Pidie	:	Tgk. Abdurrachman Buloh.
Aceh Besar	:	Tgk. Nyak Sandang
Aceh Barat	:	Said Sulaiman
Aceh Selatan	:	Tgk. Nyak Raja.

(3) Anggota Staf Perjuangan Rakyat.

Panglima Revolusi	:	Tgk. Amir Husin Al Mujahid
Wakil Panglima	:	Tgk. Abu Bakar Amin.
Kepala Staf	:	Tgk. Nurdin Sufi.

(4) Staf Istimewa/Mobilisasi Wanita.

Ibu Maryam.
Tgk. Aisyah Amin.
Ti Aman Im Latif.
Khatijah Aba.
dan lain-lain.

4. Komando TPI Resimen Aceh/Divisi–X TNI.

Komandan Resimen	:	A.K. Yacobi.
Wakil	:	M. Saleh Banta.
Kepala Staf Umum	:	M. Hasan Ben.
Wakil Kepala Staf	:	M. Amin Hanafiah.

5. Komando Resimen TRIP (Tentara Pelajar Republik Indonesia)

Komandan Resimen	:	Yahya Zamzami
Staf Inti	:	T. Yacob Sulaiman.
	:	Awaluddin Awai.
	:	Alaudin Cut.
	:	T. Zaini.
	:	T. Sulaiman.
	:	Syamsuddin Ishak.
	:	T. Samidan.
	:	Ilyas N.R.
	:	T. Husin.
	:	T.M. Nur Arifin.
	:	Maemun Saleh.

LAMPIRAN IX.

MAKLUMAT ULAMA SELURUH ACEH

MAKLOEMAT OELAMA SELOEROEH ACEH.

Perang Doenia kedoea jang maha dahsjad telah tammat. Sekarang di Barat dan di Timoer oleh 4 Keradjaan yang besar sedang diatoer perdamaian Doenia jang abadi oentoek keselamatan machloek Allah. Dan Indonesia tanah toempah darah kita telah dimakloemkan kemerdekaannja kepada seloeroeh doenia serta telah berdiri Repoeblik Indonesia dibawah pimpinan jang moelia maha pemimpin kita Ir. SOEKARNO.

Belanda adalah satoe keradjaan yang ketijil serta miskin satoe negeri jang ketjil, lebih ketjil dari daerah Atjeh, dan telah hantjoer leboer, mereka telah bertindak melakoekan kechianatannya kepada tanah air kita Indonesia yang soedah merdeka itoe, oentoek didjadjahnja kembali. Kalaoe maksoed jang djahannam itoe berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakjat, merampas semua harta benda negara dan harta rakjat dan segala kekajaan jang kita koempoelkan selama ini akan moesnah sama sekali. Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia mendjadi hambanja kembali dan mendjalankan oesaha oentoek menghapoes agama Islam kita jang soetji serta menindis dan menghambat kemoeliaan dan kemakmoeran bangsa Indonesia.

Di Djawa bangsa Belanda dan kaki tangannja telah melakoekan keganasannja terhadap Kemerdekaan Repoeblik Indonesia hingga terdjadi pertempoeran dibeberapa tempat jang achirnya kemenangan berada dipihak kita. Soengoehpoen begitoe, mereka beloem djoega insaf.

Segenap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patoeh berdiri dibelakang maha pemimpin Ir. SOEKARNO oentoek menoenggoe perintah dan kewadjiban jang akan didjalankan. Menoeroet kejakinan kami bahwa perdjoeangan ini adalah perdjoeangan soetji jang diseboet "PERANG SABIL". Maka pertjajalah wahai bangsakoe, bahwa perdjoeangan ini adalah sebagai samboengan perdjoeangan dahoeloe di Atjeh jang dipimpin oleh Almarhoem Tengkoe Tjhi di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan jang lain. Dari sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe menjoesoesn bahoe mengangkat langkah madjoe kemoeka oentoek mengikoet djedjak perdjoeangan nenek kita dahoeloe, toen-

doeklah dengan patoeh akan segala perintah-perintah pemimpin kita oentoek keselamatan Tanah Air, Agama dan Bangsa.

KOETARADJA, 15–10–1945

Atas nama Oelama Seloeroeh Atjeh,

Tgk. Hadji HASAN Kroeeng Kale	Tgk. M. DAOED Beureueh	Tgk. Hadji DJA'FAR SIDIK Lamdjabat

Tgk. Hadji AHMAD HASBALLAH
Indrapoeri

Diketahoei oleh Jml. T.B. Residen Atjeh T. NYA' ARIF	Disetoedjoei oleh Jml. Ketoea Comite Nasional TOEANKOE MAHMOED

DAFTAR KATA–KATA DAN PENJELASANNYA

Atjeh Syuu (dalam buku ini, ditulis : *Ajteh Syu*)
: Keresidenan Aceh
: Residen Aceh

Atjeh Syu Sangi-Kai : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang dibentuk oleh Jepang.

Atjeh Syu Sangi-Kai-tyo : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh.

Atjeh Syu Seityo Sangyu Kotabutyo : Kepala Urusan Ekonomi pada Kantor Keresidenan Aceh.

Atjeh Syu Setyo Somubutyo : Kepala Urusan Pemerintah Umum pada Kantor Keresidenan Aceh.

Atjeh Syu Kokuzi : Maklumat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang di Aceh.

Atjeh Syu Min Kao Hoko Kai : Badan Kebaktian penduduk untuk membina Asia, salah satu organisasi yang dibentuk Jepang di Aceh.

Atjeh Syu Seityo Sendenka Sinbunhantyo : Kepala Urusan Penerangan Daerah Aceh yang bertugas memberi penerangan kepada rakyat untuk kepentingan Jepang.

Barisan "F" atau Barisan Fujiwara Kikan : Organisasi yang dibentuk Jepang sebelum mereka mendarat di Aceh

Bunsyutyo : Kepala Wilayah afdeeling (asisten-residen), dapat disamakan dengan Bupati sekarang, tetapi Bunsyutyo diangkat oleh Jepang (tidak dipilih oleh DPRD).

Cut, Cut Nyak, Cut Putro atau Pocut (tjut atau potjut) : gelar di depan nama golongan bangsawan/keturunan Sultan di Aceh, misalnya Cutnyak Meutia.

Daerah Uleebalang : daerah yang diperintah oleh seorang uleebalang dengan mendapat *sarakata* dari Sultan Aceh (sebelum kedatangan Belanda); daerah ini diperintah secara tu un-temurun dan mempunyai kebebasan untuk mengatur pemerintahan dalam wilayahnya.

Dayah : pada umumnya lembaga pendidikan tradisionil tingkat tinggi di daerah Aceh, tetapi ka-

dang-kadang di beberapa tempat/daerah diartikan sebagai tempat berkumpul para wanita di suatu *gampong* untuk shalat atau belajar pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Dikee Maulud : Doa selamat untuk Nabi Muhammad SAW yang dibacakan bersama-sama secara berirama (berlagu) pada upacara peringatan lahirnya Nabi Muhammad Saw; upacara itu umumnya diadakan di Meunasah, Mesjid dan sebagainya.

Gampong : kesatuan teritorial yang terkecil di bawah daerah *Mukim* (dapat disamakan dengan desa).

Guntyo : kontroleur pada masa kolonial Belanda (pada masa Kemerdekaan disebut Kepala Wilayah, kemudian Wedana).

Imum : Jabatan dalam bidang keagamaan; juga dalam pemerintahan; asal kata dari Imam (bahasa Arab).

Imum Mesjid : seseorang yang memimpin mesjid, kadang-kadang disebut juga *Teungku Khatib*.

Imum Meunasah : seseorang yang memimpin meunasah di sebuah gampong; kadang-kadang disebut juga *Peutua Meunasah*.

Imum Mukim : Kepala daerah *Mukim;* pada zaman kerajaan Aceh diangkat secara turun-temurun, tetapi sejak Kemerdekaan diangkat melalui pemilihan rakyat; sekarang lebih terkenal dengan sebutan *Kepala Mukim*.

Kaphee Belanda : ditujukan kepada orang Belanda dan pengikut-pengikutnya, tidak menjadi persoalan apakah di kalangan mereka ada orang Islam atau tidak; jadi pada masa Belanda dan Revolusi Kemerdekaan tidak dikhususkan bagi orang di luar agama Islam saja (dapat disamakan dengan musuh kemerdekaan).

Keuchiek : Kepala *Gampong* yang pada waktu kerajaan Aceh diangkat secara turun-temurun, tetapi setelah Kemerdekaan dipilih oleh rakyat gampong.

Keujruen (Teungku Keujruen) : jabatan atau gelar yang diberikan

kepada seorang penguasa daerah uleebalang; sama dengan Teuku, Chiek, Raja, Datuk, Bentara dan Laksamana.

Kutyo : Kepala Daerah *Mukim* yang diangkat oleh Pemerintah Jepang.

Kumityo : Kepala daerah *Gampong* yang diangkat oleh Pemerintah Jepang.

Maibkatra : organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang artinya: Majlis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya Aceh.

Meunasah : Lembaga musyawarah/balai musyawarah di *gampong-gampong* yang berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan rendah/dasar dan tempat shalat.

Mukim : Kesatuan teritorial yang menjadi bagian dari wilayah daerah uleebalang; sekarang menjadi wilayah Kecamatan.

Nanggro : lihat daerah uleebalang; pada awal Revolusi Kemerdekaan, setelah revolusi sosial, menjadi *Negeri* dan sekarang menjadi Kecamatan.

Negeri : daerah uleebalang yang setelah Revolusi sosial diperintah oleh Komisi Pemerintahan Negeri *(Bestuur-Komisi)*.

Panglima Polem : Gelar kepala daerah Sagi XXII Mukim di Aceh Besar; setelah revolusi Sosial status daerah Sagi dihapuskan.

Syukyo Hoin : Mahkamah Agama (Islam) yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang di Aceh.

Teuku Chiek (T. Chiek) : lihat Keujruen, tetapi wilayah daerah T. Chiek biasanya lebih luas; dan gelar T. Chiek setelah hapus daerah uleebalang (menjadi Negeri) tidak dipergunakan lagi.

Teuku (T) : Gelar di depan nama laki-laki golongan bangsawan/uleebalang.

Teungku (Tgk.) : Gelar di depan nama (bagi laki-laki dan wanita) seseorang yang telah belajar berbagai masaalah/hukum Islam; dapat disamakan dengan pengertian Ulama. Kadang-kadang orang Aceh yang belum dikenal juga dipanggil *Teungku*.

Uleebalang : para bangsawan yang memerintah di daerah-daerah uleebalang di Aceh. Dengan dihapuskan daerah uleebalang, setelah revolusi sosial, berarti berakhir pula kekuasaan uleebalang.

DAERAH ISTIMEWA ACEH

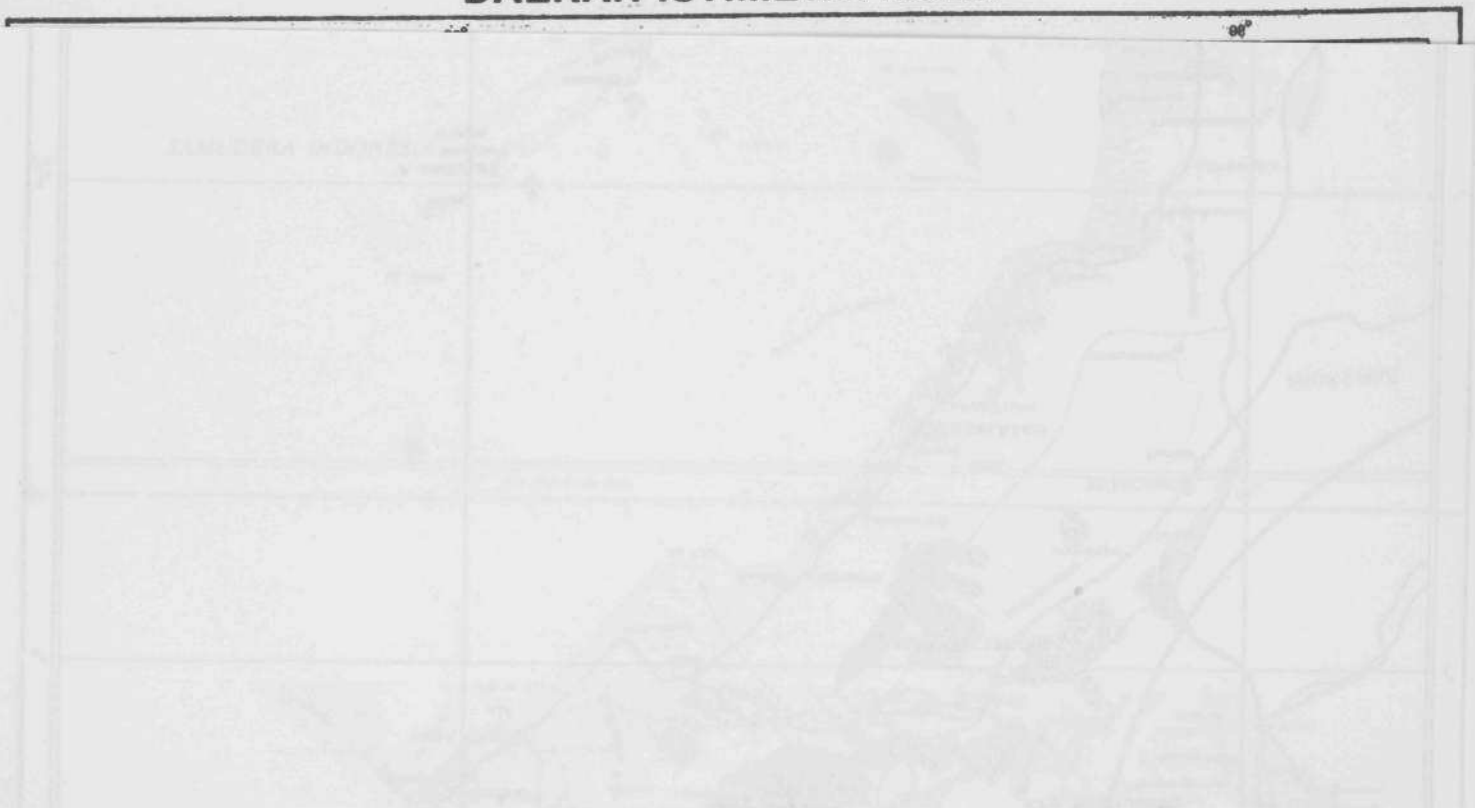

DAERAH ISTIMEWA ACEH

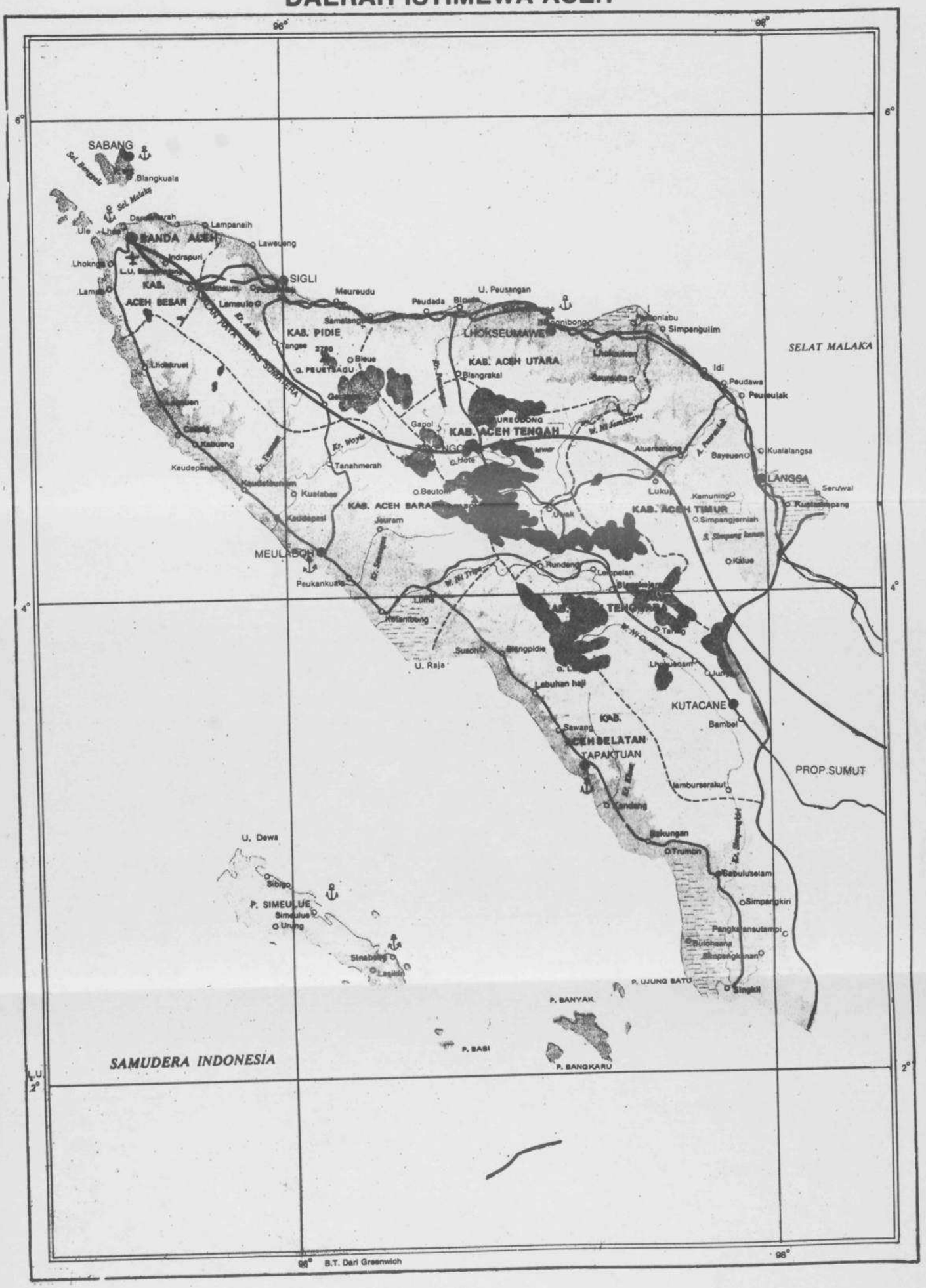

U

19

2957 1983

Tidak diperdagangkan untuk umum